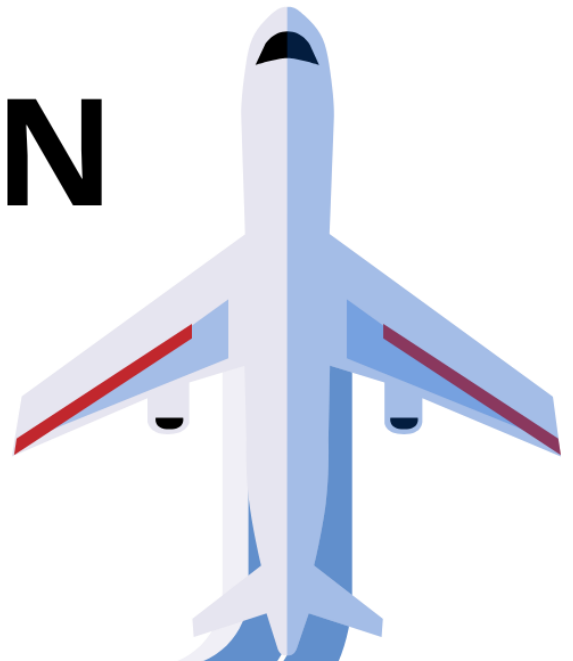


LAPORAN MANAJEMEN PERUM LPPNPI

TRIWULAN II

2026



LEMBAR PENGESAHAN

Dengan ini kami sampaikan bahwa Laporan Manajemen Perum LPPNPI Triwulan II 2026 telah sesuai dengan kondisi perusahaan selama Triwulan II 2026, yang telah melalui reviu dan bebas salah saji material.

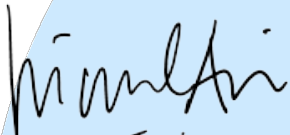
Tangerang, 31 Juli 2026

DEWAN PENGAWAS

Ketua


LUKMAN F. LAISA

Anggota


SYAMSU RIZAL

Anggota


DARYATMO

Anggota


CHALIMAH PUJIHASTUTI

DIREKSI

Direktur Utama


AVIRIANTO SURATNO

Direktur Operasi


SETIO ANGGORO

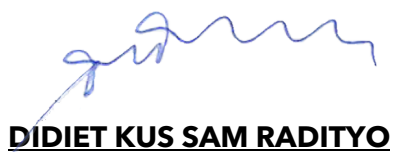
Direktur Teknik


ZAINAL ARIFIN HARAHAP

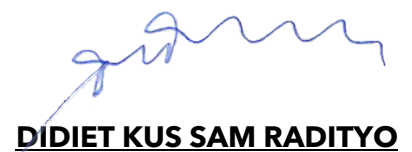
Direktur Keselamatan,
Keamanan dan Standardisasi


NURCAHYO UTOMO

PT. Direktur Keuangan dan
Manajemen Risiko


DIDIET KUS SAM RADITYO

Direktur SDM dan Umum


DIDIET KUS SAM RADITYO

KATA PENGANTAR

Laporan Manajemen Perum LPPNPI Triwulan II 2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 tertanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Laporan ini menyajikan informasi mengenai realisasi pengelolaan perusahaan sampai dengan bulan Juni 2026 (Triwulan II 2026) dibandingkan dengan targetnya dalam RKAP tahun 2026 yang telah mengacu pada RJPP tahun 2025-2029, serta turut membandingkan dengan realisasi pada periode yang sama di tahun 2025. Perbandingan tersebut diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian target serta pertumbuhan usaha secara lebih komprehensif, baik dari sisi finansial, operasional, sumber daya manusia, dan *key enabler* lain yang berkontribusi terhadap jalannya bisnis perusahaan.

Selanjutnya, laporan ini turut menjadi salah satu bentuk evaluasi atas kinerja perusahaan di Triwulan II 2026 dan sebagai referensi untuk merealisasikan perbaikan kinerja yang berkelanjutan terutama terkait peranan perusahaan dalam pelayanan publik, serta mendukung pengambilan keputusan-keputusan strategis lainnya.

Semoga laporan ini bermanfaat dan para pemangku kepentingan dapat memperoleh gambaran yang objektif serta menyeluruh tentang hasil pengelolaan perusahaan di Triwulan II 2026.

Demikian kami sampaikan guna menjadi evaluasi lebih lanjut.

Tangerang, 31 Juli 2026

Direktur Utama,


Avianto Suratno

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	II
KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR TABEL	I
DAFTAR GAMBAR	I
DAFTAR GRAFIK	II
DAFTAR LAMPIRAN	III
EXECUTIVE SUMMARY	I
I. BAB I - PENDAHULUAN	3
1.1 KONDISI UMUM	3
1.1.1 PROFIL PERUSAHAAN	3
1.1.2 SEJARAH PERUSAHAAN	4
1.1.3 LOGO PERUSAHAAN	4
1.1.4 VISI, MISI DAN TATA NILAI	5
1.1.5 WILAYAH KERJA DAN MANAJEMEN PENGELOLAAN	6
1.1.6 DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN	7
1.1.7 STRUKTUR ORGANISASI	8
1.2 GAMBARAN SINGKAT KINERJA PERUSAHAAN	11
II. BAB II - KINERJA PERUSAHAAN	13
2.1 TINJAUAN OPERASI	13
2.1.1 PERGERAKAN TRAFIK	13
2.1.2 PRODUKSI PJNP	17
2.1.3 PENDAPATAN USAHA	19
2.1.4 ALAT-ALAT PRODUKSI	20
2.2 TEKNOLOGI	21
2.2.1. REALISASI PROGRAM PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI (TI)	21
2.2.2 REALISASI PROGRAM ASPIRASI PEMEGANG SAHAM	40
2.2.3 TINDAK LANJUT HASIL AUDIT ATAU PENILAIAN TI	47
2.2.4 REALISASI PEMBIAYAAN TI	47
2.3 KEGIATAN RISET, PENGEMBANGAN, DAN INOVASI	48
2.4 HUKUM	50

2.4.1. PERCEPATAN PROSES BALIK NAMA SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH YANG BERASAL DARI PENGALIHAN PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) DAN PT. ANGKASA PURA II (PERSERO)	50
2.4.2. RENCANA PENGHAPUSBUKUAN ASET TETAP	52
2.4.3. PEMUTAKHIRAN PERATURAN DIREKSI DAN/ATAU SOP	53
2.5 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	54
2.5.1. KEKUATAN SDM	54
2.5.2. PENGEMBANGAN DAN SERTIFIKASI SDM	59
2.5.3. PENGELOLAAN DANA PENSIUN	64
2.5.4. IMPLEMENTASI AKHLAK	66
2.5.5. PEMENUHAN PROGRAM DISABILITAS BUMN	67
2.6 INVESTASI	68
2.6.1. DASAR USULAN INVESTASI TAHUN 2026	68
2.6.2. USULAN INVESTASI TAHUN 2026	69
2.7 LAPORAN KEUANGAN	71
2.7.1. LAPORAN POSISI KEUANGAN	71
2.7.2. LAPORAN LABA RUGI	74
2.7.3. LAPORAN ARUS KAS	78
2.8 KONTRIBUSI KEPADA NEGARA	80
2.8.1. PAJAK	80
2.8.2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)	82

III. BAB III - LAPORAN PENCAPAIAN KPI, KINERJA KESELAMATAN, DAN HASIL ASESMEN GCG **83**

3.1 KPI KORPORASI	83
3.2 KPI DIREKTUR	84
3.2.1 DIREKTUR OPERASI	84
3.2.2 DIREKTUR KESELAMATAN, KEAMANAN DAN STANDARDISASI	88
3.2.3 DIREKTUR TEKNIK	93
3.2.4 DIREKTUR KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO	96
3.2.5 DIREKTUR SDM DAN UMUM	99
3.3 HASIL ASESMEN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TAHUN 2024	103

IV. BAB IV - LAPORAN MANAJEMEN RISIKO & AUDIT INTERN **105**

4.1. LAPORAN PEMANTAUAN RISIKO	105
4.1.1. REALISASI PERHITUNGAN RISIKO RESIDUAL YANG DIBANDINGKAN DENGAN RENCANA TARGET RISIKO RESIDUAL SESUAI PERIODE PELAPORAN	105
4.1.2. REALISASI PELAKSANAAN PERLAKUAN RISIKO DAN BIAYA	108
4.1.3. PETA RISIKO	140
4.1.4. IKHTISAR PERUBAHAN PROFIL DAN STRATEGI RISIKO	142
4.1.5. CATATAN KEJADIAN KERUGIAN (<i>LOSS EVENT DATABASE</i>)	143
4.1.6. PERHITUNGAN PERINGKAT KOMPOSIT RISIKO	145
4.2. LAPORAN AUDIT INTERN	147
4.2.1 AUDIT TEMATIK	147
4.2.2 AUDIT OPERASIONAL	147

4.2.3	REVIU PENYERTAAN MODAL NEGARA (PMN)	148
4.2.4	PELAKSANAAN PERMINTAAN AUDIT TERTENTU/INVESTIGATIF, REVIU DAN/ATAU KONSULTATIF	150
4.2.5	EVALUASI PELAKSANAAN <i>WHISTLEBLOWING SYSTEM</i>	151
4.2.6	AUDIT <i>INFORMATION TECHNOLOGY</i>	153
4.2.7	REKAPITULASI TINDAK LANJUT TEMUAN AUDITOR INTERNAL TAHUN	153
V.	BAB V - PELAKSANAAN PROGRAM TJSL	157
5.1	PROGRAM TJSL	157
5.2	PROGRAM PUMK	160
5.3	KPI PELAKSANAAN PROGRAM TJSL	160
VI.	BAB VI - LAPORAN PENGGUNAAN TAMBAHAN PMN	164
6.1	PMN TUNAI	164
6.1.1	DASAR USULAN PMN	164
6.1.2	JUMLAH RINCIAN TAMBAHAN PMN	164
6.1.3	PROGRES PENGADAAN PROGRAM INVESTASI YANG DIBIYAI PMN	165
6.1.4	PENGELOLAAN DANA INVESTASI YANG DIBIYAI PMN	168
VII.	BAB VII - STATISTIK TEMUAN AUDITOR	171
7.1	STATISTIK TEMUAN AUDITOR	171
7.2	UPAYA PENYELESAIAN TEMUAN AUDIT	172
VIII.	BAB VIII - PENUTUP	179
	LAMPIRAN	182

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 <i>Executive Summary</i> Kinerja Perusahaan Triwulan II 2026	11
Tabel II.1 Realisasi Produksi PJNP Triwulan II 2026	17
Tabel II.2 Realisasi Pendapatan Usaha Triwulan II 2026	19
Tabel II.3 Realisasi Alat Produksi Triwulan II 2026	21
Tabel II.4 Realisasi Pembiayaan Triwulan II 2026	48
Tabel II.5 Realisasi Jumlah SDM Triwulan II 2026	54
Tabel II.6 Realisasi Jumlah SDM Triwulan II 2026 Berdasarkan Kategori Karyawan	55
Tabel II.7 Rekapitulasi Progres Pemutakhiran Dokumen FRMS di Triwulan II 2026	57
Tabel II.8 <i>Readiness</i> Karyawan Triwulan II 2026 Berdasarkan Fungsi	58
Tabel II.9 Realisasi Penyerapan Anggaran Serta Pelaksanaan Kegiatan Diklat dan Sertifikasi Triwulan II 2026	60
Tabel II.10 Saldo Dana Pensiun (JHT + PKP) Karyawan Perum LPPNPI per 30 Juni 2026	64
Tabel II.11 Premi Bulanan serta Pembayaran Manfaat Program JHT dan PKP Triwulan II 2026	64
Tabel II.12 Usulan Rencana Investasi Perum LPPNPI Tahun 2026	69
Tabel II.13 Progres Program Investasi Perum LPPNPI Triwulan II 2026	71
Tabel II.14 Posisi Keuangan Triwulan II 2026	71
Tabel II.15 Laba Rugi Triwulan II 2026	75
Tabel II.16 Laporan Arus Kas Triwulan II 2026	78
Tabel II.17 Realisasi Pembayaran Pajak Triwulan II 2026	80
Tabel II.18 Realisasi Pembayaran PNPB Triwulan II 2026	82
Tabel III.1 Realisasi <i>KPI</i> Korporasi Triwulan II 2026	83
Tabel III.2 Realisasi <i>KPI</i> Direktur Operasi Triwulan II 2026	84
Tabel III.3 Realisasi <i>KPI</i> Direktur Keselamatan, Keamanan dan Standardisasi Triwulan II 2026	88
Tabel III.4 Realisasi <i>KPI</i> Direktur Teknik Triwulan II 2026	93
Tabel III.5 Realisasi <i>KPI</i> Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Triwulan II 2026	96
Tabel III.6 Realisasi <i>KPI</i> Direktur SDM dan Umum Triwulan II 2026	99
Tabel IV.1 Perhitungan <i>Inherent Risk</i> , Target Residual Risk Tahun 2026 dan Current Risk Triwulan II 2026	105
Tabel IV.2 Perhitungan <i>Inherent Risk</i> , Target Residual Risk Triwulan II 2026 dan Current Risk Triwulan II 2026	106
Tabel IV.3 Timeline Mitigasi Risiko	108
Tabel IV.4 Mitigasi Risiko Dampak Serangan <i>Cyber</i> pada Pelayanan dan Proses Bisnis	109
Tabel IV.5 Mitigasi Risiko Tidak Tercapai Target Peningkatan Keselamatan Operasional Pelayanan	111
Tabel IV.6 Mitigasi Risiko Terlambatnya Pengoperasian New ATM JATSC dan Balikpapan	122
Tabel IV.7 Mitigasi Risiko Terganggunya Ketahanan Keuangan (<i>Financial Resilience</i>) Akibat Terhambatnya Proses Penanganan Piutang <i>Current</i> dan <i>Non Current</i>	123
Tabel IV.8 Mitigasi Risiko Terhambatnya Proses Bisnis Perusahaan Dampak dari Restrukturisasi	127
Tabel IV.9 Mitigasi Risiko Tidak Tercapainya Target Investasi (Non PMN)	136
Tabel IV.10 Mitigasi Risiko Tidak Terealisasinya Penyesuaian Biaya PJNP	138
Tabel IV.11 <i>Loss Event Database</i> Triwulan II 2026	143
Tabel IV.12 Hasil Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	145

Tabel IV.13 Hasil Penilaian Atas Pencapaian Kinerja _____	145
Tabel IV.14 Kriteria Peringkat Komposit Risiko _____	146
Tabel IV.15 Rekapitulasi Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Audit Operasional dan Audit ANTC Triwulan II 2026 _____	154
Tabel V.1 Realisasi RKA Program TJSL Triwulan II 2026 _____	158
Tabel V.2 Capaian KPI Program TJSL Triwulan II 2026 _____	161
Tabel VI.1 Saldo Akhir atas Dana PMN Tunai Tahun 2023 Per 30 Juni 2026 _____	169
Tabel VII.1 Progres Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan dan/atau Audit Eksternal per Triwulan II 2026 _____	171



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Logo Perum LPPNPI	5
Gambar I.2 Visi Misi Perum LPPNPI	5
Gambar I.3 AKHLAK Sebagai Nilai Dasar Perum LPPNPI	6
Gambar I.4 Peta Wilayah Operasi Perusahaan	7
Gambar I.5 Dewan Pengawas Perum LPPNPI	7
Gambar I.6 Dewan Direksi Perum LPPNPI	8
Gambar I.7 Struktur Organisasi Perum LPPNPI	9
Gambar II.1 Demografi SDM Per 30 Juni 2026	59
Gambar II.2 Progres Program Investasi Perum LPPNPI sampai dengan Juni Tahun 2026	70
Gambar IV.1 Peta Inherent Risk 2026	140
Gambar IV.2 Peta Target Residual Risk Tahun 2026	141
Gambar IV.3 Peta Residual Risk Triwulan II 2026	141
Gambar IV.4 Peta Current Risk Triwulan II 2026	141
Gambar IV.5 Hasil Perhitungan Peringkat Komposit Risiko	146



DAFTAR GRAFIK

Grafik II.1 Realisasi Pergerakan Trafik Triwulan II 2026	13
Grafik II.2 Perbandingan Pergerakan Trafik Triwulan Tahun 2019-2026	16
Grafik II.3 Realisasi Produksi PJNP Triwulan II 2026	18
Grafik II.4 Realisasi Pendapatan Usaha Triwulan II 2026	19
Grafik II.5 Realisasi Peserta Sertifikasi Triwulan II 2026	60
Grafik II.6 Metode dan Mekanisme Pelaksanaan Diklat Triwulan II 2026	63
Grafik II.7 Perbandingan Posisi Keuangan Triwulan II 2026 Terhadap Targetnya dan Realisasi Audited 2025	72
Grafik II.8 Perbandingan Saldo Kas Akhir Triwulan II 2026 Terhadap Target dan Realisasi Triwulan II 2025	78

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. PROGRES PELAKSANAAN PROGRAM INVESTASI TRIWULAN II 2026	182
LAMPIRAN 2. PELAKSANAAN PROGRAM TJSI TRIWULAN II 2026	188



EXECUTIVE SUMMARY

Industri penerbangan global pada tahun 2026 masih menunjukkan tren pemulihan yang berkelanjutan, dengan kawasan Asia-Pasifik sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan seiring meningkatnya aktivitas perdagangan, perjalanan bisnis, dan pariwisata. Kondisi tersebut turut mendukung pertumbuhan trafik penerbangan yang dilayani Perum LPPNPI secara *year-on-year*, termasuk kontribusi dari implementasi Realignment FIR Jakarta-Singapura sejak 21 Maret 2024 yang memberikan dampak positif terutama terhadap peningkatan trafik *overflying*. Namun demikian, pertumbuhan trafik internasional pada Triwulan II 2026 menghadapi keterbatasan akibat eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah dan ketegangan di sekitar Selat Hormuz yang mendorong penyesuaian operasional maskapai, termasuk pengurangan frekuensi penerbangan di kawasan tersebut. Di sisi lain, trafik domestik tengah menunjukkan peningkatan yang didukung oleh momentum liburan serta berbagai stimulus Pemerintah dalam rangka mendorong penggunaan transportasi udara. Di tengah dinamika tersebut, Perum LPPNPI secara umum mampu menjaga kinerja perusahaan yang positif, tercermin dari pendapatan usaha yang mencapai target serta upaya pengendalian beban usaha yang berkontribusi peningkatan laba komprehensif perusahaan, meskipun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum sesuai target.

Total trafik penerbangan Triwulan II 2026 terealisasi 989,52 Ribu pergerakan atau lebih tinggi 1,87% dari targetnya dan tumbuh 4,39% dibandingkan realisasi Triwulan II 2025. Peningkatan trafik ini terutama didorong oleh pertumbuhan di setiap jenis penerbangan. Selanjutnya, total pendapatan usaha Triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp2.079,03 Miliar atau 0,05% lebih tinggi dari target RKAP Triwulan II 2026 dan meningkat 3,25% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Total pendapatan usaha yang terealisasi sedikit di atas targetnya secara umum dipengaruhi oleh realisasi kurs USD yang lebih tinggi dari asumsi kurs USD yang digunakan dalam RKAP tahun 2026.

Total beban usaha Triwulan II 2026 terealisasi Rp1.601,16 Miliar atau terealisasi 18,56% di bawah anggarannya dan meningkat 6,19% dibandingkan realisasi Triwulan II 2025. Deviasi yang terjadi atas realisasi beban usaha terhadap targetnya tersebut secara umum disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Beban Pegawai: secara spesifik lebih rendahnya realisasi beban pegawai dipengaruhi kebijakan pengendalian biaya pegawai dari perusahaan dalam rangka pemenuhan tanggung jawab terhadap karyawan, serta realisasi sumbangan kelahiran, perkawinan dan kematian yang lebih rendah dari anggaran;
2. Beban Perlengkapan: realisasi yang lebih rendah dari target dikarenakan belum terealisasinya sejumlah kebutuhan sesuai *budgetplan*, di antaranya penyediaan pemenuhan perlengkapan kantor;

3. Beban Pemeliharaan: realisasi di bawah target dipengaruhi oleh sejumlah kegiatan pemeliharaan yang masih dalam proses pengadaan serta program-program yang masih dalam proses penyelesaian hingga akhir Triwulan II 2026;
4. Beban Operasional Lain: merupakan akun beban usaha baru yang dibentuk untuk mengakomodir pencatatan biaya operasional atas penyelenggaraan layanan baru perusahaan di Bandara Khusus. Oleh karena itu, beban tersebut belum dianggarkan dalam RKAP tahun 2026;
5. Beban Penyusutan: realisasi yang lebih rendah dari target dikarenakan belum terealisasinya sebagian investasi aset tetap sesuai jadwal RKAP, sehingga aset yang direncanakan belum siap digunakan dan belum dapat disusutkan;
6. Beban Umum: realisasi di bawah anggaran dipengaruhi oleh efisiensi biaya untuk kegiatan perjalanan dinas dan rapat, serta terdapat pergeseran realisasi atas penggunaan jasa konsultan; dan
7. Beban Penurunan Nilai Piutang: realisasi di atas target disebabkan oleh bertambahnya *aging* umur piutang di beberapa maskapai.

Laba komprehensif Triwulan II 2026 terealisasi sebesar Rp500,67 Miliar atau lebih tinggi 223,80% dari targetnya dan menurun 0,96% dibandingkan realisasi Triwulan II 2025. Capaian laba komprehensif tersebut disebabkan oleh realisasi beban usaha yang masih di bawah anggaran sehingga menghasilkan laba usaha yang lebih baik dari targetnya, serta turut dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan lain-lain terutama yang berasal dari pendapatan bunga deposito dan giro.

Capaian skor KPI Korporasi Triwulan II 2026 adalah 100,50. Mengacu pada capaian tersebut, terdapat 2 (dua) KPI dari 14 (empat belas) KPI Kolegial yang tidak mencapai target. Secara umum, ketidaktercapaian atas sejumlah kinerja Perum LPPNPI di Triwulan II 2026 dapat dijelaskan secara komprehensif, objektif, dan berbasis data. Perum LPPNPI senantiasa melakukan pembelajaran (*lesson learned*) atas setiap capaian yang dihasilkan sehingga menjadi dasar dalam menyusun upaya percepatan dalam mencapai target KPI yang telah ditetapkan, sekaligus menjadi gambaran untuk penyempurnaan proses perencanaan di periode mendatang agar dapat menghasilkan capaian yang lebih baik secara berkelanjutan.

BAB I - PENDAHULUAN



1.1 KONDISI UMUM

1.1.1 Profil Perusahaan

Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) atau AirNav Indonesia berdiri tanggal 13 September 2012 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 Tahun 2012 dengan modal awal sebesar Rp97.952.690.300,- berupa aset peralatan navigasi di Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun, Bandar Udara Juwata Tarakan, Bandar Udara Sentani Jayapura, dan Bandar Udara Dewandaru Karimun Jawa. Modal Perusahaan 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Maksud dan tujuan berdirinya Perum LPPNPI adalah menyelenggarakan dan memberikan pelayanan navigasi penerbangan sesuai dengan ketentuan perundangan serta standar yang berlaku untuk mencapai efisiensi serta efektivitas penerbangan nasional dan internasional. Perum LPPNPI memiliki peranan yang strategis untuk negara, di antaranya:

1. Berperan aktif menciptakan sistem keselamatan transportasi, khususnya transportasi udara; dan
2. Membangun citra positif Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal pelayanan navigasi penerbangan melalui pelayanan prima (selamat, efektif, dan efisien).

Bidang usaha Perum LPPNPI adalah Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan, meliputi:

1. Pelayanan lalu lintas penerbangan (*Air Traffic Services/ATS*), yang terdiri atas:
 - a. Pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan (*Air Traffic Control Service*);
 - b. Pelayanan informasi penerbangan (*Flight Information Service*); dan
 - c. Pelayanan kesiagaan (*Alerting Service*).
2. Pelayanan telekomunikasi penerbangan (*Aeronautical Telecommunication/COM*), terdiri atas:
 - a. Pelayanan aeronautika tetap (*Aeronautical Fixed Service/AFS*);
 - b. Pelayanan aeronautika bergerak (*Aeronautical Mobile Services/AMS*); dan
 - c. Pelayanan radio navigasi aeronautika (*Aeronautical Radio Navigation Service/ARNS*).
3. Pelayanan informasi aeronautika (*Aeronautical Information Services/AIS*), terdiri dari:
 - a. Pelayanan informasi aeronautika dan peta penerbangan;
 - b. Penerbitan dan penyebarluasan *Notam* (*Notice to Airmen*); dan
 - c. Pelayanan informasi aeronautika bandar udara.
4. Pelayanan informasi meteorologi penerbangan (*Aeronautical Meteorological Services/MET*); dan
5. Pelayanan informasi pencarian dan pertolongan (*Search and Rescue/SAR*).

1.1.2 Sejarah Perusahaan

Perum LPPNPI dibentuk berdasarkan amanah Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, khususnya Pasal 271 bahwa Pemerintah akan membentuk suatu lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan. Selanjutnya guna memenuhi amanah UU No. 1 Tahun 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan PP No. 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) pada 13 September 2012 yang menjadi dasar hukum terbentuknya Perum LPPNPI.

Setelah terbitnya PP No. 77 Tahun 2012 tentang Perum LPPNPI, pelayanan navigasi yang sebelumnya dikelola oleh PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan diserahkan kepada Perum LPPNPI.

Terhitung tanggal 16 Januari 2013 pukul 22:00 WIB, seluruh pelayanan navigasi yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) dialihkan ke Perum LPPNPI. Pukul 22:00 WIB dipilih karena adanya perbedaan tiga waktu di Indonesia, yaitu Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA), dan Waktu Indonesia Timur (WIT). Pukul 22:00 WIB berarti tepat pukul 24:00 WIT atau saat pergantian hari, sehingga pesawat yang melintas di wilayah Indonesia Timur pada pukul 00:01 WIT atau tanggal 17 Januari 2013 pengelolaannya sudah masuk ke Perum LPPNPI. Sejak saat itu, seluruh pelayanan navigasi yang berada di 26 bandar udara yang sebelumnya dikelola oleh PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) resmi dialihkan ke Perum LPPNPI, begitu juga dengan sumber daya manusia serta peralatannya.

Modal Perum LPPNPI sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakilkan oleh Kementerian BUMN sedangkan Kementerian Perhubungan berperan sebagai pembina teknis bidang pelayanan navigasi penerbangan. Perum LPPNPI menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip *cost recovery*, yaitu seluruh biaya pelayanan jasa navigasi dipergunakan untuk biaya investasi dan peningkatan operasional.

1.1.3 Logo Perusahaan

Berdasarkan Keputusan Direksi Perum LPPNPI No. KEP.003/LPPNPI/III/2013 perihal Identitas Perusahaan maka ditetapkanlah logo Perum LPPNPI dengan memasukkan nama AirNav Indonesia untuk dapat lebih mudah dikenal oleh masyarakat luas. Logo tersebut memiliki makna sebagai berikut:

1. Latar belakang berbentuk lingkaran solid ibarat bola dunia yang bermakna perusahaan berkelas dunia, dan warna biru melambangkan keluasaan cara berfikir serta bertindak;
2. Bentuk pesawat kertas berwarna merah putih yang mengudara melambangkan bahwa perusahaan siap membawa Indonesia menuju bangsa yang maju dan disegani oleh dunia internasional;

3. Tulisan "AirNav" adalah kependekan dari *Air Navigation* atau Navigasi Penerbangan yang menunjukkan identitas perusahaan yang menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan. Terletak ditengah-tengah yang berarti harmoni;
4. Pita berwarna merah putih berbentuk huruf "A" dan "N" melambangkan bahwa perusahaan didirikan atas dasar persatuan dan kesatuan serta didedikasikan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Garis lengkung berwarna putih yang melintang ibarat garis lintang yang mengelilingi bumi, melambangkan perusahaan siap bekerja sama dengan semua *stakeholder*.



Gambar I.1
Logo Perum LPPNPI

1.1.4 Visi, Misi dan Tata Nilai

Perum LPPNPI telah menyusun RJPP Tahun 2025 - 2029 yang turut melakukan rekonfirmasi Visi dan Misi Perum LPPNPI, serta menghasilkan visi dan misi yang baru bagi perusahaan, yaitu sebagai berikut:



Gambar I.2
Visi Misi Perum LPPNPI

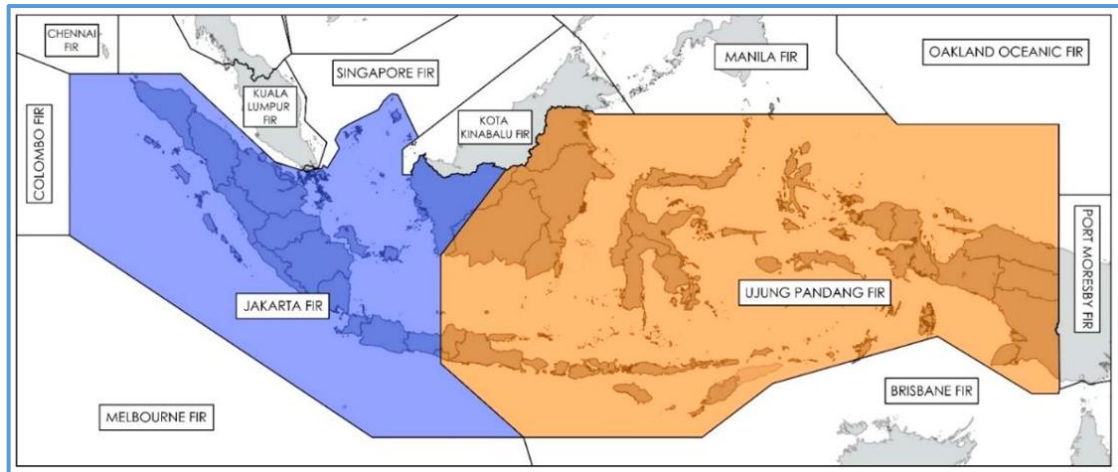
Dalam rangka mewujudkan Misi dan Visi Perusahaan, Perum LPPNPI menetapkan nilai-nilai dasar perusahaan. Sesuai pada Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-7/MBU/07/2020 tertanggal 1 Juli 2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara yaitu **AKHLAK**, maka Perum LPPNPI yang semula telah memiliki *core value* yaitu **I-SAFE** berubah menjadi **AKHLAK**, dengan rincian sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar I.3
AKHLAK Sebagai Nilai Dasar Perum LPPNPI

1.1.5 Wilayah Kerja dan Manajemen Pengelolaan

Wilayah operasi Perum LPPNPI mencakup seluruh wilayah udara Indonesia. Wilayah operasi tersebut berbatasan langsung dengan ruang udara beberapa negara, seperti Australia (*Flight Information Region (FIR) Melbourne Flight Information Region (FIR)* dan *Brisbane FIR*), Srilangka (*Colombo FIR*), Singapura (*Singapore FIR*), Malaysia (*Kuala Lumpur FIR* dan *Kinabalu FIR*), Filipina (*Manila FIR*), Amerika Serikat (*Oakland Oceanic FIR*), dan Papua Nugini (*Port Moresby FIR*), dan India (*Chennai FIR*). Adapun semenjak 21 Maret 2024, Perum LPPNPI memberikan layanan navigasi penerbangan di ruang udara seluas 7.789.268 km² yang terbagi dalam 2 (dua) *FIR*, yaitu *FIR* Jakarta dengan luas 2.842.725 km² dan *FIR* Ujung Pandang dengan luas 4.948.543 km².



Gambar I.4
Peta Wilayah Operasi Perusahaan

1.1.6 Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan

Berdasarkan Salinan Keputusan Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Selaku Wakil Pemerintah Sebagai Pemilik Modal Perum LPPNPI No. 300 Tahun 2026 tertanggal 9 Juni 2026 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Perum LPPNPI, dilakukan pengangkatan terhadap 3 (tiga) anggota Dewan Pengawas sehingga susunan Dewan Pengawas per tanggal 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

1. Bapak Lukman F. Laisa sebagai Ketua Dewan Pengawas;
2. Bapak Syamsu Rizal sebagai Anggota Dewan Pengawas;
3. Bapak Daryatmo sebagai Anggota Dewan Pengawas;
4. Ibu Chalimah Puji Hastuti sebagai Anggota Dewan Pengawas;
5. Bapak Anas Puji Istanto sebagai Anggota Dewan Pengawas;
6. Bapak Jodi Widjanarko sebagai Anggota Dewan Pengawas; dan
7. Bapak Lutfi Dipa Nawahasta sebagai Anggota Dewan Pengawas.



Gambar I.5
Dewan Pengawas Perum LPPNPI

Berdasarkan Salinan Keputusan Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Selaku Wakil Pemerintah Sebagai Pemilik Modal Perum LPPNPI No. 265 Tahun 2026 tertanggal 12 Mei 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perum LPPNPI, posisi Ibu Azizaton Azhimah digantikan oleh Bapak Oskar Syahbana terhitung mulai tanggal (TMT) 12 Mei 2026. Mengacu hal tersebut, susunan Dewan Direksi per tanggal 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

1. Bapak Avirianto Suratno sebagai Direktur Utama;
2. Bapak Setio Anggoro sebagai Direktur Operasi;
3. Bapak Nurcahyo Utomo sebagai Direktur Keselamatan, Keamanan dan Standardisasi;
4. Bapak Zainal Arifin Harahap sebagai Direktur Teknik;
5. Bapak Didiet Kus Sam Radityo sebagai Direktur SDM dan Umum; dan
6. Bapak Oskar Syahbana sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

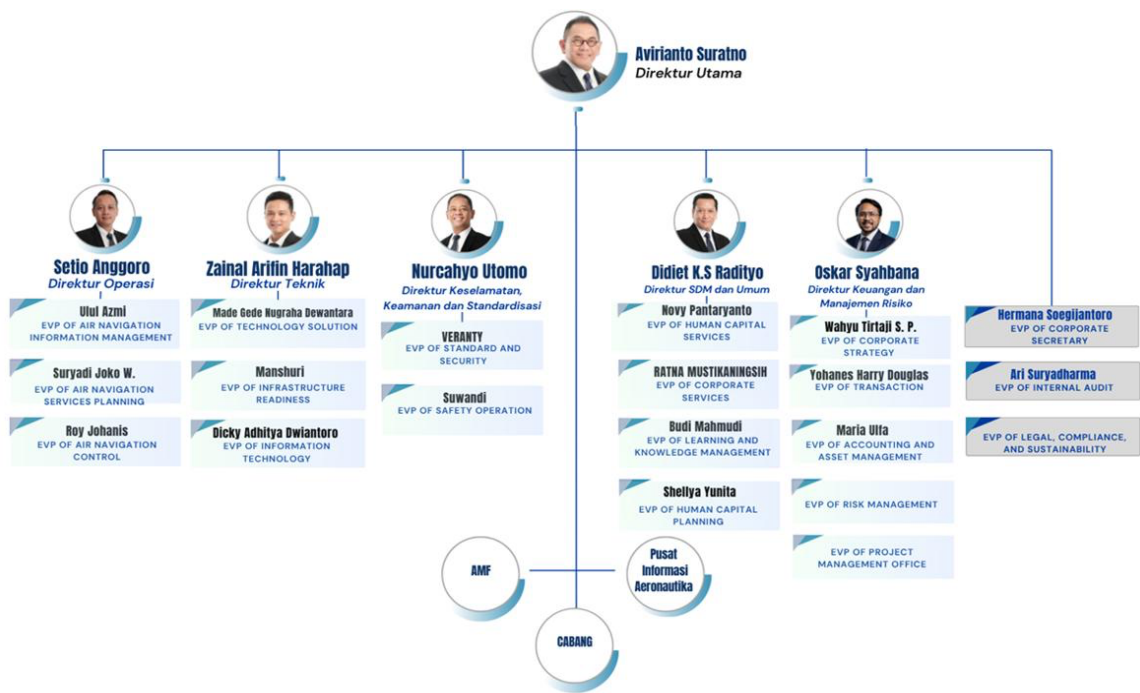
Menindaklanjuti pemutakhiran susunan Dewan Direksi tersebut, di mana anggota Direksi yang diangkat baru dapat menjalankan tugasnya secara penuh sebagai anggota Direksi setelah dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh Menteri Perhubungan, saat ini Bapak Oskar Syahbana tengah menunggu hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan.



Gambar I.6
Dewan Direksi Perum LPPNPI

1.1.7 Struktur Organisasi

Selaras dengan terbitnya Peraturan Direksi No. PER.17/LPPNPI/XII/2024 tertanggal 27 Desember 2024 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Kantor Pusat dan *AirNav Maintenance Facility*, serta Keputusan Menteri BUMN No. SK-219/MBU/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengalihan Tugas Anggota Direksi Perum LPPNPI, maka struktur jabatan dan formasi organisasi Perum LPPNPI per 31 Maret 2026 adalah sebagaimana gambar di bawah ini.



Gambar I.7
Struktur Organisasi Perum LPPNPI

1. Direktur Utama

Direktur Utama mengkoordinasikan tugas setiap direktur, yang terdiri dari:

- Direktur Operasi;
- Direktur Teknik;
- Direktur Keselamatan, Keamanan dan Standardisasi;
- Direktur SDM dan Umum; dan
- Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

Untuk membantu tugas para Direksi, masing-masing cabang dipimpin oleh seorang *General Manager (GM)* yang bertanggung jawab langsung ke para Direksi, yaitu: *Senior GM AirNav Maintenance Facility (AMF)*, *GM Pusat Informasi Aeronautika (PIA)*, dan *GM Cabang* sejumlah 28.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Utama membawahi dan dibantu organ Direksi sebagai berikut:

- Executive Vice President of Internal Audit;*
- Executive Vice President of Corporate Secretary; dan*
- Executive Vice President of Legal, Compliance, and Sustainability.*

2. Direktur Operasi

Dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya, Direktur Operasi membawahi dan dibantu organ Direksi sebagai berikut:

- a. *Executive Vice President of Air Navigation Services Planning;*
 - b. *Executive Vice President of Air Navigation Control; dan*
 - c. *Executive Vice President of Air Navigation Information Management.*
3. Direktur Teknik
- Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Teknik membawahi dan dibantu organ Direksi sebagai berikut:
- a. *Executive Vice President of Technology Solution;*
 - b. *Executive Vice President of Infrastructure Readiness; dan*
 - c. *Executive Vice President of Information Technology.*
4. Direktur Keselamatan, Keamanan dan Standardisasi
- Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Keselamatan, Keamanan dan Standardisasi membawahi dan dibantu organ Direksi sebagai berikut:
- a. *Executive Vice President of Standard and Security; dan*
 - b. *Executive Vice President of Safety Operation.*
5. Direktur SDM dan Umum
- Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur SDM dan Umum membawahi dan dibantu organ Direksi sebagai berikut:
- a. *Executive Vice President of Human Capital Planning;*
 - b. *Executive Vice President of Human Capital Services;*
 - c. *Executive Vice President of Corporate Services; dan*
 - d. *Executive Vice President of Learning and Knowledge Management.*
6. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
- Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko membawahi dan dibantu organ Direksi sebagai berikut:
- a. *Executive Vice President of Corporate Strategy;*
 - b. *Executive Vice President of Accounting and Asset Management;*
 - c. *Executive Vice President of Transaction;*
 - d. *Executive Vice President of Risk Management; dan*
 - e. *Executive Vice President of Project Management Office.*

1.2 GAMBARAN SINGKAT KINERJA PERUSAHAAN

Perum LPPNPI secara umum menghasilkan kinerja perusahaan yang baik di Triwulan II 2026, di mana hal ini ditunjukkan dengan realisasi sejumlah indikator kinerja yang lebih baik dari targetnya serta turut mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama di tahun 2025.

Tabel I.1
Executive Summary Kinerja Perusahaan Triwulan II 2026

Deskripsi	Unit	2025	2026			Rasio		Growth
		Realisasi TW II	RKAP	RKAP TW II	Realisasi TW II			
1	2	3	4	5	6	7 = (6:4)	8 = (6:5)	9 = (6-3):3
1. Pergerakan Trafik	(Juta Pergerakan)	0,95	2,01	0,97	0,99	49,25%	101,87%	4,39%
2. Produksi Enroute	(Juta Route Unit)	225,50	474,63	232,45	224,22	47,24%	96,46%	-0,57%
3. Produksi Terminal	(Juta Ton)	25,45	53,82	25,87	25,27	46,96%	97,69%	-0,70%
4. Pendapatan Usaha	(Rp. Juta)	2.013.618	4.754.390	2.078.026	2.079.030	43,73%	100,05%	3,25%
5. Beban Usaha	(Rp. Juta)	1.507.877	3.817.120	1.965.989	1.601.156	41,95%	81,44%	6,19%
6. Laba Usaha	(Rp. Juta)	505.742	937.270	112.037	477.874	50,99%	426,53%	-5,51%
7. Laba Komprehensif	(Rp. Juta)	505.506	879.918	154.624	500.672	56,90%	323,80%	-0,96%
8. Skor KPI	-	106,26	100,00	100,00	100,50	100,50%	100,50%	-5,42%

Total pergerakan trafik Triwulan II 2026 terealisasi 989,52 Ribu pergerakan atau lebih tinggi 1,87% dari targetnya sebesar 971,35 Ribu pergerakan. Realisasi total pergerakan trafik yang lebih tinggi dari targetnya serta mengalami peningkatan dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya secara umum berkontribusi dari kinerja penerbangan domestik yang tengah membaik. Peningkatan pergerakan trafik domestik di sepanjang Triwulan II 2026 secara umum dipengaruhi oleh tersedianya stimulus dari Pemerintah dalam rangka meningkatkan permintaan penerbangan, banyaknya *momentum long weekend*, kebijakan *Work From Anywhere* (WFA), dan libur sekolah.

Total produksi *enroute* Triwulan II 2026 terealisasi sebesar 224,22 Juta *Route Unit* (RU) atau 3,54% lebih rendah dari targetnya sebesar 232,45 Juta RU namun sedikit menurun 0,57% dibandingkan realisasi Triwulan II 2025 sebesar 225,50 Juta RU. Tidak tercapainya target produksi *enroute* terutama bersumber dari penerbangan domestik dan internasional, yang realisasinya tidak hanya berada di bawah target, tetapi juga lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang secara umum dipengaruhi oleh strategi maskapai dalam mengoptimalkan penggunaan pesawat dengan kapasitas yang lebih rendah.

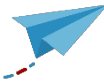
Total pendapatan usaha Triwulan II 2026 terealisasi Rp2.079,03 Miliar atau 0,05% sedikit lebih tinggi dari targetnya sebesar Rp2.078,03 Miliar dan meningkat 3,25% dibandingkan realisasi Triwulan II 2025 sebesar Rp2.013,62 Miliar. Total pendapatan usaha Triwulan II 2026 yang terealisasi sedikit di atas targetnya dipengaruhi oleh realisasi kurs USD di Triwulan II 2026 yang lebih tinggi dari asumsi kurs USD pada RKAP tahun 2026.

Beban usaha Triwulan II 2026 terealisasi sebesar Rp1.601,16 Miliar atau lebih rendah 18,56% dari target RKAP Triwulan II 2026 sebesar Rp1.965,99 Miliar dan meningkat 6,19% dibandingkan terealisasi Triwulan II 2025 sebesar Rp1.507,88 Miliar. Mengacu pada realisasi pendapatan usaha dan beban usaha Triwulan II 2026 tersebut, Perum LPPNPI mencatat laba

usaha sebesar Rp477,87 Miliar atau lebih tinggi 426,53% dari targetnya sebesar Rp112,04 Miliar serta mengalami penurunan 5,51% dibandingkan realisasi Triwulan II 2025 sebesar Rp505,74 Miliar. Sedangkan untuk laba komprehensif Triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp500,67 Miliar atau lebih tinggi 223,80% dari targetnya sebesar Rp154,62 Miliar serta sedikit menurun 0,96% dibandingkan realisasi pada Triwulan II 2025 sebesar Rp505,51 Miliar. Di sisi lain, perusahaan masih mencatat realisasi pendapatan lain-lain yang lebih tinggi dari targetnya, dengan komponen terbesar yaitu pendapatan bunga yang diperoleh dari penempatan deposito sebagai salah satu bentuk optimalisasi pengelolaan ketersediaan kas dan bank.

Capaian kinerja secara menyeluruh atas kinerja perusahaan direpresentasikan oleh skor KPI Kolegial. Skor KPI Kolegial Triwulan II 2026 terealisasi 100,50 atau lebih tinggi dari skor yang ditargetkan sebesar 100,00. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum indikator kunci yang menggambarkan kinerja perusahaan mencapai targetnya serta tetap selaras dengan arah pengembangan perusahaan. Perusahaan memiliki justifikasi yang kuat atas capaian KPI yang masih di bawah target dan melakukan upaya percepatan guna menghasilkan capaian yang lebih baik ke depannya.

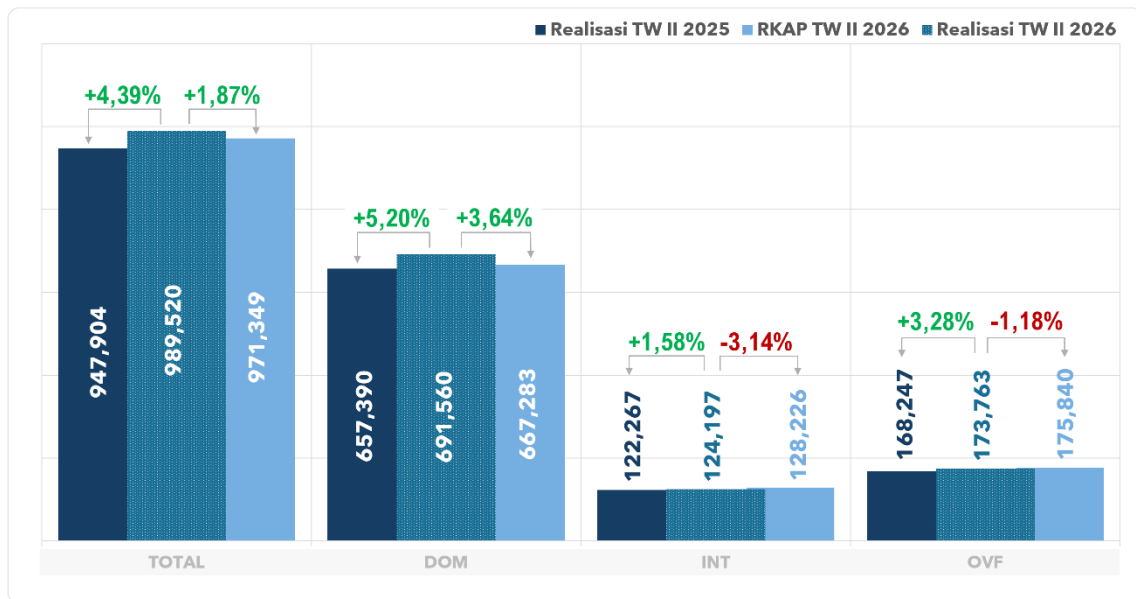
BAB II - KINERJA PERUSAHAAN



2.1 TINJAUAN OPERASI

2.1.1 Pergerakan Trafik

Grafik II.1
Realisasi Pergerakan Trafik Triwulan II 2026



Total pergerakan trafik hingga Triwulan II 2026 terealisasi 989,52 Ribu pergerakan atau lebih tinggi 1,87% dari targetnya sebesar 971,35 Ribu pergerakan serta meningkat 4,39% dibandingkan realisasi Triwulan II 2025 sebesar 947,90 Ribu pergerakan. Tercapainya target total pergerakan trafik Triwulan II 2026 berkontribusi dari peningkatan kinerja pergerakan trafik untuk jenis penerbangan domestik.

Pergerakan trafik hingga Triwulan II 2026 apabila ditinjau dari setiap jenis penerbangan, untuk pergerakan trafik yang dihasilkan dari penerbangan domestik terealisasi sebesar 691,56 Ribu pergerakan atau lebih tinggi 3,64% dari targetnya sebesar 667,28 Ribu pergerakan serta mengalami peningkatan sebesar 5,20% dibandingkan realisasi pada periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 657,39 Ribu pergerakan. Peningkatan jumlah pergerakan trafik domestik di Triwulan II 2026 secara umum dikarenakan hal-hal berikut, yaitu:

1. Stimulus dari Pemerintah dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga avtur, yaitu:
 - a. Diskon tarif tiket penerbangan domestik kelas ekonomi untuk 2 (dua) periode:

- 1) Periode natal dan tahun baru (nataru), yaitu dengan periode pembelian tiket tanggal 22 Oktober 2025 - 10 Januari 2026. Pada periode ini besaran diskon mencapai 13% - 14%¹; dan
- 2) Periode lebaran, yaitu dengan periode pembelian tiket tanggal 10 Februari - 29 Maret 2026. Pada periode ini besaran diskon mencapai 17% - 18%^{2 3}.
- b. Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang 100% ditanggung oleh Pemerintah untuk periode pembelian tiket pesawat udara di 25 April 2026 - 23 Juni 2026.
2. Peningkatan mobilitas masyarakat, yaitu utamanya pada periode libur imlek, libur lebaran di bulan April yang bertepatan dengan libur sekolah serta implementasi kebijakan *Work From Anywhere* (WFA), serta libur sekolah di bulan Juni - Juli⁴; serta
3. Peningkatan kolaborasi dalam ekosistem aviasi, khususnya kolaborasi antara pengelola bandara, maskapai dan Regulator dalam rangka penguatan konektivitas antar daerah di Indonesia melalui pembukaan rute penerbangan domestik baru⁵. Adapun rute penerbangan domestik yang dibuka pada Triwulan II 2026 di antaranya Surabaya - Makassar, Makassar - Kendari, dan Makassar - Palu oleh AirAsia⁶, Halim - Padang dan Halim - Pekanbaru oleh Citilink⁷, serta Manado - Naha Tahuna oleh Wings Air⁸.

Pergerakan trafik internasional Triwulan II 2026 terealisasi 124,20 Ribu pergerakan atau lebih rendah 3,14% dari targetnya sebesar 128,23 Ribu pergerakan serta mengalami pertumbuhan sebesar 1,58% dibandingkan realisasi pada Triwulan II 2025 sebesar 122,27 Ribu pergerakan. Di tengah peningkatan ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah sejak Maret 2026, termasuk eskalasi konflik yang berdampak terhadap kenaikan harga minyak global dan penurunan stabilitas operasional jalur penerbangan di sekitar kawasan Timur Tengah dan Selat Hormuz, trafik penerbangan internasional Perum LPPNPI hingga akhir Triwulan II 2026 masih menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun demikian, pertumbuhan yang terjadi masih relatif terbatas (tidak signifikan) akibat pengaruh kondisi eksternal tersebut yang turut mempengaruhi tidak tercapainya target jumlah penerbangan internasional di Triwulan II 2026. Peningkatan jumlah

¹ <https://news.detik.com/berita/d-8176971/diskon-tiket-pesawat-nataru-2025-2026-cek-jadwal-dan-cara-pesannya>

² <https://money.kompas.com/read/2026/02/15/182011026/diskon-tiket-pesawat-17-18-persen-berlaku-14-29-maret-2026>

³ https://ekonomi.bisnis.com/read/20260331/98/1963408/penumpang-pesawat-domestik-sepanjang-lebaran-melonjak-86-efek-stimulus#goog_rewarded

⁴ <https://news.detik.com/berita/d-8468941/simak-diskon-tiket-pesawat-2026-ppn-ditanggung-pemerintah>

⁵ <https://pasardana.id/news/2026/4/13/kuartal-i-2026-injourney-airports-layani-38-juta-penumpang-pesawat/>

⁶ <https://newsroom.airasia.com/news/2026/1/14/indonesia-airasia-tambah-rute-surabaya-makassar-luwuk-dan-palu-dukung-konektivitas-ke-indonesia-timur#gsc.tab=0>

⁷ <https://aviatren.com/2026/02/19/citilink-buka-rute-halim-padang-dan-halim-pekanbaru-mulai-16-februari-2026/>

⁸ <https://www.idntimes.com/business/economy/5-maskapai-asing-ini-mau-buka-penerbangan-ke-indonesia-cek-daftarnya-00-3m8tp-lmd8ls>

pergerakan trafik internasional di Triwulan II 2026 secara umum dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut, di antaranya:

1. Peningkatan tren liburan ke luar negeri di masyarakat Indonesia serta kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, terutama saat periode libur lebaran dan liburan sekolah. Mayoritas wisatawan Indonesia memilih berpergian ke negara-negara terdekat dan tidak dipengaruhi oleh konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, yaitu Malaysia, Singapura, dan Thailand, yang selanjutnya diikuti dengan negara Perth dan Hongkong⁹;
2. Memperhatikan *demand* yang ada, maskapai masih melakukan ekspansi jaringan (rute) secara selektif (*targeted expansion*). Maskapai seperti AirAsia, Pelita Air, Scoot, dan TransNusa mulai menambah rute internasional khususnya pada pasar dengan permintaan tinggi seperti ASEAN, Australia, dan Tiongkok;
3. Penambahan frekuensi penerbangan pada rute eksisting, yaitu dengan negara Singapura, Malaysia, dan Thailand sebagai kontributor utama; dan
4. *Realignment* FIR JKT-SIN secara kontinu memberikan kontribusi atas kenaikan jumlah pergerakan trafik internasional, yaitu dengan total penambahan sebesar 26.294 pergerakan atau memberikan kontribusi sebesar 21,17% dari total pergerakan trafik internasional Triwulan II 2026 sebesar 124.197 pergerakan.

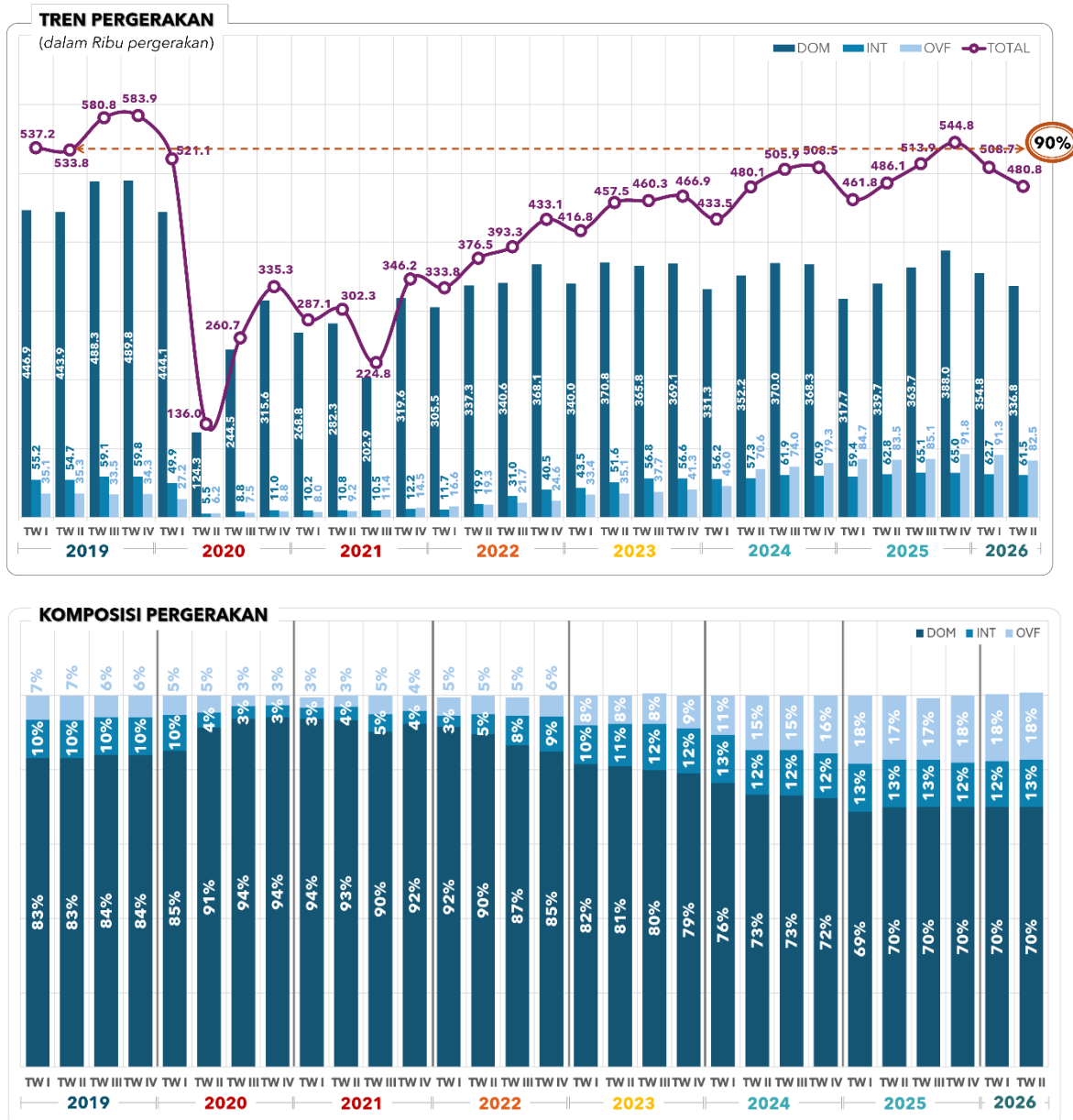
Pergerakan trafik yang berasal dari penerbangan *overflying* pada Triwulan II 2026 terealisasi sebesar 173,76 Ribu pergerakan atau lebih rendah 1,18% dari targetnya sebesar 175,84 Ribu pergerakan dan meningkat 3,28% dari realisasi Triwulan II 2025 sebesar 168,25 Ribu pergerakan. Meskipun tidak mencapai target, namun realisasi pergerakan trafik *overflying* di Triwulan II 2026 mengalami pertumbuhan yang secara umum dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yaitu:

1. *Realignment* FIR JKT-SIN memberikan dampak positif lanjutan terhadap pertumbuhan trafik akibat semakin luasnya ruang udara yang dikelola oleh Perum LPPNPI; dan
2. Masih tingginya utilisasi jalur penerbangan utama di kawasan Asia Pasifik yang melintasi ruang udara Indonesia, yang ditopang oleh pertumbuhan ekonomi di negara-negara seperti Cina, India, dan Vietnam sebagai motor perekonomian utama kawasan. Posisi geografis FIR JKT yang berada pada jalur strategis pergerakan udara regional menjadikan ruang udara Indonesia tetap menjadi bagian dari jalur penerbangan yang digunakan oleh maskapai dalam menghubungkan berbagai negara di kawasan tersebut.

⁹ <https://www.majalahbandara.com/perjalanan-domestik-dan-luar-negeri-naik-di-masyarakat-indonesia-saat-libur-hari- raya-idulfitri-2026/>

Sedangkan tidak tercapainya target pergerakan trafik *overflying* pada Triwulan II Tahun 2026 dipengaruhi oleh penurunan jumlah penerbangan pada rute Kuala Lumpur-Kuching (dan sebaliknya) serta Kuala Lumpur-Kinabalu (dan sebaliknya). Kedua rute tersebut merupakan penerbangan domestik di Malaysia yang berkontribusi signifikan terhadap trafik *overflying* di wilayah pelayanan Perum LPPNPI.

Grafik II.2
Perbandingan Pergerakan Trafik Triwulanan Tahun 2019-2026



Mengacu pada **Grafik II.2**, total pergerakan trafik Triwulan II 2026 (April - Juni 2026) tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan total pergerakan trafik Triwulan I 2026 (Januari - Maret 2026). Meskipun demikian, secara *year-on-year* total pergerakan trafik pada Triwulan II 2026 meningkat sebesar 4,39% dibandingkan dengan total pergerakan trafik

Triwulan II 2025, di mana kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum pergerakan trafik masih memiliki trend pertumbuhan positif. Adapun penurunan total pergerakan trafik pada Triwulan II 2026 (April - Juni 2026) dibandingkan dengan Triwulan I 2026 (Januari - Maret 2026) dikarenakan penurunan pada jumlah penerbangan internasional dan *overflying*. Konflik di kawasan Timur Tengah membatasi pertumbuhan trafik terutama untuk penerbangan internasional.

Kondisi penerbangan yang masih stabil terutama di periode liburan dan di wilayah yang tidak bersinggungan dengan kawasan Timur Tengah, serta semakin luasnya ruang udara yang dilayani oleh perusahaan turut mempengaruhi komposisi pergerakan trafik internasional dan *overflying*. Grafik II.2 menunjukkan bahwa komposisi pergerakan trafik internasional dan *overflying* secara bertahap mengalami peningkatan, sedangkan untuk komposisi pergerakan trafik domestik cenderung mengalami penurunan selaras dengan lambatnya pemulihan jumlah penerbangan domestik akibat masih terbatasnya jumlah pesawat yang *serviceable* dan tingginya harga avtur di Indonesia.

2.1.2 Produksi PJNP

Kinerja produksi jasa navigasi penerbangan (*enroute*) Triwulan II 2026 terealisasi sebesar 224,22 Juta RU atau 3,54% lebih rendah dari RKAP Triwulan II 2026 sebesar 232,45 Juta RU serta menurun 0,57% dari realisasi Triwulan II 2025 sebesar 225,50 Juta RU. Kinerja produksi *enroute* Triwulan II 2026 lebih rendah dari targetnya, di mana kondisi ini berbeda dengan kinerja pergerakan trafik Triwulan II 2026 yang secara total lebih tinggi dari targetnya. Hal ini dikarenakan preferensi maskapai untuk semakin mengoptimalkan penggunaan pesawat *narrowbody* untuk sejumlah penerbangan memperhatikan dampak efisiensi yang dihasilkan.

Tabel II.1
Realisasi Produksi PJNP Triwulan II 2026

Deskripsi	2025	2026			Rasio		Growth
	Realisasi TW II	RKAP	RKAP TW II	Realisasi TW II			
1	2	3	4	5	6 = 5:3	7 = 5:4	8 = (5-2):2
A. Produksi Jasa Navigasi Penerbangan (Route Unit)							
1 Penerbangan Domestik	68,229,698	137,014,736	68,570,847	63,660,876	46.46%	92.84%	-6.70%
2 Penerbangan Internasional	61,093,672	131,484,386	63,659,607	60,511,796	46.02%	95.06%	-0.95%
3 Penerbangan Lintas (<i>Overflying</i>)	96,180,551	206,133,048	100,220,134	100,046,244	48.53%	99.83%	4.02%
Jumlah Jasa Navigasi Penerbangan (Route Unit)	225,503,923	474,632,170	232,450,588	224,218,916	47.24%	96.46%	-0.57%
B. Produksi Jasa Navigasi Terminal (Ton)							
Penerbangan Domestik							
1 Penerbangan Presisi Domestik	15,724,224	32,899,707	15,802,845	15,465,926	47.01%	97.87%	-1.64%
Penerbangan Non Presisi Domestik	1,711,727	3,735,822	1,720,286	1,802,676	48.25%	104.79%	5.31%
Penerbangan Informasi Domestik	164,767	383,021	165,591	197,158	51.47%	119.06%	19.66%
Jumlah Produksi Jasa Navigasi Terminal Domestik	17,600,719	37,018,550	17,688,722	17,465,760	47.18%	98.74%	-0.77%
Penerbangan Internasional							
2 Penerbangan Presisi Internasional	7,811,864	16,741,423	8,139,962	7,756,073	46.33%	95.28%	-0.71%
Penerbangan Non Presisi Internasional	35,821	62,490	37,325	48,359	77.39%	129.56%	35.00%
Penerbangan Informasi Internasional	5,193	602	5,411	4,757	790.04%	87.90%	-8.41%
Jumlah Produksi Jasa Navigasi Terminal Internasional	7,852,877	16,804,515	8,182,698	7,809,189	46.47%	95.44%	-0.56%
Jumlah Produksi Jasa Navigasi Terminal (Ton)	25,453,595	53,823,065	25,871,420	25,274,949	46.96%	97.69%	-0.70%

Secara lebih rinci, Tabel II.1 di atas juga menunjukkan bahwa produksi *enroute* domestik Triwulan II 2026 terealisasi 63,66 Juta RU atau lebih rendah 7,16% dari targetnya serta

menurun 6,70% dibandingkan realisasi pada Triwulan II 2025. Berbeda dengan tren pertumbuhan pergerakan trafik domestik pada Triwulan II 2026, kinerja produksi *enroute* domestik mengalami penurunan yang menunjukkan adanya pergeseran di sisi komposisi armada (*aircraft mix*). Peningkatan jumlah pergerakan penerbangan lebih banyak didorong oleh penggunaan pesawat dengan kapasitas dan berat operasi yang relatif lebih rendah. Strategi ini dilakukan oleh maskapai guna mengoptimalkan kapasitas angkut disesuaikan dengan tingkat permintaan pada masing-masing rute, serta menjaga efisiensi operasional namun tetap mendukung peningkatan konektivitas nasional.

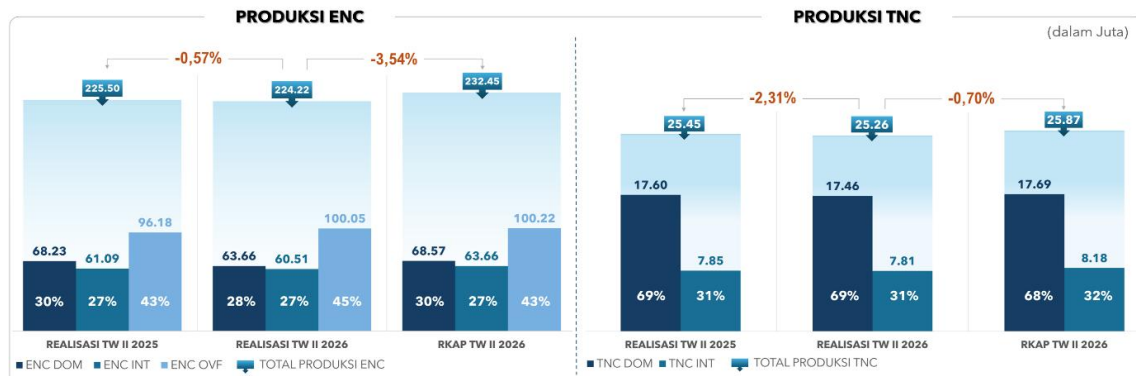
Kinerja produksi *enroute* internasional Triwulan II 2026 terealisasi 60,51 Juta RU atau lebih rendah 4,94% dari targetnya serta menurun 0,95% dibandingkan realisasi pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Sebagaimana telah diringkas pada bagian awal sub bab ini bahwa realisasi produksi *enroute* internasional yang lebih rendah dibandingkan targetnya dan realisasi di Triwulan II 2025 secara umum disebabkan oleh meningkatnya penggunaan pesawat *narrowbody* untuk perjalanan jarak jauh *non-long haul* (*short* dan *medium haul*) guna efisiensi beban operasional di sisi maskapai.

Kinerja produksi *enroute overflying* Triwulan II 2026 terealisasi 100,05 Juta RU atau sedikit lebih rendah 0,17% dari targetnya serta meningkat 4,02% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2025, yang secara umum dipengaruhi oleh:

1. Telah diresmikannya *Realignment* FIR JKT-SIN pada 21 Maret 2024 pukul 20.00 UTC yang berdampak pada peningkatan jumlah pergerakan trafik secara berkelanjutan; dan
2. Masih tingginya penggunaan transportasi udara, terutama di wilayah Asia-Pasifik, yang ditopang oleh pertumbuhan ekonomi di negara-negara seperti Cina, India, dan Vietnam. Kondisi ini mendorong peningkatan aktivitas bisnis, perdagangan, ekonomi, serta ekspor-impor.

Selanjutnya, total produksi jasa navigasi *terminal* (produksi *terminal*) Triwulan II 2026 terealisasi 25,27 Juta *Ton* atau lebih rendah 2,31% dari targetnya dan menurun 0,70% dibandingkan realisasi Triwulan II 2025. Tidak tercapainya target atas total produksi terminal pada Triwulan II 2026 secara umum disebabkan oleh penurunan kinerja produksi *enroute* yang berasal dari penerbangan domestik dan internasional.

Grafik II.3
Realisasi Produksi PJNP Triwulan II 2026



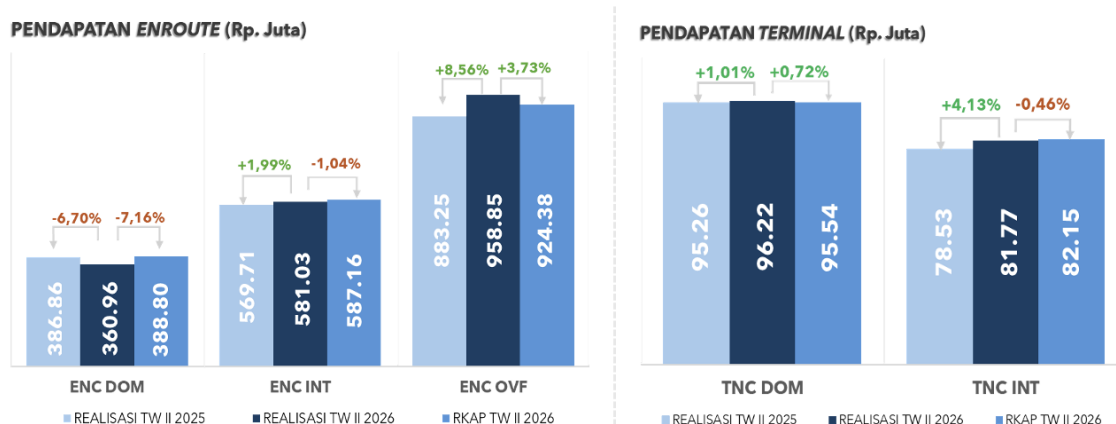
2.1.3 Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha Perum LPPNPI berasal dari kegiatan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan, baik dari jasa navigasi penerbangan (*enroute*) maupun jasa navigasi *terminal*. Selain dipengaruhi oleh besarnya produksi yang dihasilkan dari setiap jenis penerbangan (domestik, internasional, dan *overflying*), realisasi total pendapatan usaha turut dipengaruhi oleh realisasi kurs transaksi pada periode berjalan, yaitu untuk pendapatan usaha yang berasal dari penerbangan internasional dan penerbangan lintas udara (*overflying*). **Tabel II.2** berikut menunjukkan realisasi pendapatan usaha Triwulan II 2026 untuk setiap jenis penerbangan.

Tabel II.2
Realisasi Pendapatan Usaha Triwulan II 2026

Deskripsi	2025	2026			Rasio		Growth
	Realisasi TW II	RKAP	RKAP TW II	Realisasi TW II	6 = 5:3	7 = 5:4	
1	2	3	4	5	6 = 5:3	7 = 5:4	8 = (5-2):2
Pendapatan Usaha							
A Jasa Pelayanan Penerbangan							
1 Jasa Pelayanan Penerbangan Domestik	386.862	776.874	388.797	360.957	46,46%	92,84%	-6,70%
2 Jasa Pelayanan Penerbangan Internasional	569.712	1.405.233	587.164	581.033	41,35%	98,96%	1,99%
3 Jasa Pelayanan Penerbangan Lintas Udara (<i>Overflying</i>)	883.253	2.201.849	924.380	958.854	43,55%	103,73%	8,56%
Jumlah Jasa Pelayanan Penerbangan	1.839.827	4.383.956	1.900.341	1.900.844	43,36%	100,03%	3,32%
B Jasa Pelayanan Navigasi Terminal							
1 Jasa Pelayanan Navigasi Terminal Domestik							
a) Jasa Pelayanan Navigasi Terminal Presisi	73.569	153.806	73.878	72.344	47,04%	97,92%	-1,66%
b) Jasa Pelayanan Navigasi Terminal Non Presisi	14.647	31.754	14.622	15.430	48,59%	105,52%	5,35%
c) Jasa Pelayanan Navigasi Terminal <i>Flight Information</i>	7.047	16.278	7.038	8.450	51,91%	120,06%	19,91%
Jumlah Jasa Pelayanan Navigasi Terminal Domestik	95.263	201.838	95.538	96.224	47,67%	100,72%	1,01%
2 Jasa Pelayanan Navigasi Terminal Internasional							
a) Jasa Pelayanan Navigasi Terminal Presisi	77.422	166.569	80.989	80.404	48,27%	99,28%	3,85%
b) Jasa Pelayanan Navigasi Terminal Non Presisi	641	1.123	671	921	81,98%	137,26%	43,67%
c) Jasa Pelayanan Navigasi Terminal <i>Flight Information</i>	465	904	487	445	49,22%	91,39%	-4,31%
Jumlah Jasa Pelayanan Navigasi Terminal Internasional	78.528	168.596	82.147	81.770	48,50%	99,54%	4,13%
Jumlah Jasa Pelayanan Navigasi Terminal	173.791	370.434	177.685	177.994	48,05%	100,17%	2,42%
C Jasa Lainnya							
1 Jasa Konsultasi Operasional Bandara Khusus	-	-	-	192	-	-	-
Total Pendapatan Usaha	2.013.618	4.754.390	2.078.026	2.079.030	43,73%	100,05%	3,25%

Grafik II.4
Realisasi Pendapatan Usaha Triwulan II 2026



Peningkatan pendapatan usaha secara umum merupakan kontribusi atas pendapatan pada penerbangan *overflying*, yang disebabkan oleh implementasi *Realignment FIR SIN-JKT* sejak **21 Maret 2024 pukul 20.00 UTC**, serta pertumbuhan jumlah penerbangan global (baik penumpang maupun barang/kargo) terutama di wilayah Asia-Pasifik. Selain itu, peningkatan

pendapatan yang berasal dari penerbangan *overflying* tersebut turut dipengaruhi oleh realisasi kurs transaksi di sepanjang Triwulan II 2026 yang lebih tinggi dibandingkan asumsi kurs yang digunakan dalam RKAP Perum LPPNPI 2026 sebesar Rp16.500,-, di mana rata-rata realisasi kurs transaksi bulanan di sepanjang Triwulan II 2026 sebesar Rp17.076,-. Di sisi lain, perusahaan juga memperoleh pendapatan yang berasal dari jasa lainnya terkait jasa konsultasi operasional bandara khusus sebesar Rp192 Juta terkait penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan navigasi penerbangan di bandar udara khusus.

2.1.4 Alat-Alat Produksi

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan data alat produksi yang akurat, terintegrasi, konsisten, dan mendukung efektivitas pengelolaan fasilitas pelayanan navigasi penerbangan, Perum LPPNPI telah melaksanakan kegiatan validasi data Alat Produksi yang melibatkan Direktorat Operasi, Direktorat Teknik, Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko, serta seluruh Kantor Cabang Perum LPPNPI. Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KEP.2487/U/LPPNPI/TEK.02.03/VII/2024 tentang Tim Pelaksana Validasi Fasilitas Pelayanan Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.

Hasil pelaksanaan validasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan kategorisasi dan klasifikasi fasilitas alat produksi, sekaligus penetapan alur pelaporan data fasilitas sebagai upaya untuk meningkatkan tata kelola data aset operasional yang lebih sistematis, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui mekanisme tersebut, diharapkan proses pencatatan, pemantauan, dan pelaporan data alat produksi dapat dilaksanakan secara seragam di seluruh unit kerja.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Direksi nomor: PER.005/LPPNPPI/III/2026 tanggal 30 Maret 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi dari PER.017/LPPNPI/XII/2024 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Jabatan Struktural Perum LPPNPI Kantor Pusat *dan Airnav Maintenance Facility*. Peran dan Tanggung Jawab Fungsi atas perumusan kebijakan dan strategi terkait pencatatan, pengawasan, pelaporan, dan evaluasi data fasilitas atas pelayanan navigasi penerbangan dialihkan menjadi tanggung jawab fungsi Divisi *Air Navigation Information Management*.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, telah dilakukan pemutakhiran data alat produksi Perum LPPNPI yang mencakup penambahan dan penonaktifan (*phase out*) sejumlah alat produksi. Rincian perubahan tersebut disajikan pada **Tabel II.3**.

Tabel II.3
Realisasi Alat Produksi Triwulan II 2026

Deskripsi	RKAP	Realisasi 2025	Penambahan	Phase Out	Non Aktif	Realisasi Triwulan II 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
Communication/ Telekomunikasi							
1 VHF	807	795	4	0	0	805	Penambahan (4) di Oksibil (1), Satuan Pelayanan Tabang (2), Melak (1)
2 HF - FIC	6	6	0	0	0	6	
3 HF SSB	48	33	0	3	0	24	Phase Out (3) di Balikpapan (2), Melak (1)
4 ATIS	44	45	0	0	0	45	
5 Voice Recorder	176	179	0	0	0	183	
6 VSCS	25	25	0	1	0	24	Phase Out (1) di Halim (1)
Jumlah	1106	1083	4	4	0	1087	
Navigation/ Navigasi							
1 NDB	39	26	0	3	0	20	Phase Out (3) di Malang (1), Oksibil (1), Cirebon (1)
2 DVOR	70	70	0	0	0	70	
3 DME	70	70	0	0	0	70	
4 ILS	45	46	0	0	0	46	
Jumlah	224	212	0	3	0	206	
Surveillance							
1 PSR	1	1	0	0	0	1	
2 MSSR Mode S	28	28	0	0	0	28	
3 MLAT	2	2	0	0	0	2	
4 ADS-B	48	48	0	0	0	48	
Jumlah	79	79	0	0	0	79	
Automation							
1 ATC Automation System	15	15	0	0	0	15	
2 CPDLC	0	0	0	0	0	0	
3 AMSC	36	31	0	1	0	30	Phase Out (1) di Halim (1)
4 AMHS	2	2	0	0	0	2	
5 AMSGCS	2	2	0	0	0	2	
Jumlah	55	50	0	1	0	49	
Tower Building/ Bangunan Tower							
1 Bangunan Tower	118	118	0	0	0	118	
2 Bangunan Operasi	68	68	0	0	0	71	
3 Mobile Tower	2	2	0	0	0	2	
Jumlah	188	188	0	0	0	191	
Total Alat Produksi	1652	1612	4	8	0	1612	

2.2 TEKNOLOGI

2.2.1. Realisasi Program Penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI)

1. Pengembangan *Upgrade* Aplikasi Dalam Rangka Peningkatan Layanan Navigasi Penerbangan

- Kegiatan Pengembangan *Upgrade* Aplikasi dalam Rangka Peningkatan Layanan Navigasi Penerbangan merupakan kegiatan pengembangan dan penyempurnaan secara berkelanjutan terhadap aplikasi-aplikasi yang telah beroperasi pada lingkungan *production*. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengakomodasi kebutuhan perubahan sistem, baik dalam bentuk *enhancement*, penyesuaian terhadap kebutuhan operasional dan kebijakan perusahaan, maupun integrasi dengan aplikasi atau sistem terkait. Pelaksanaannya diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, keandalan, kinerja, serta kesinambungan dukungan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis dan penyelenggaraan layanan navigasi penerbangan secara optimal;
- Pencapaian program Pengembangan *Upgrade* Aplikasi dalam Rangka Peningkatan Layanan Navigasi Penerbangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 ditetapkan dengan target pencapaian sebesar 40% dan terealisasi sebesar **52,5%**.

2. Pengembangan Solusi TI 2026

- a. Dalam rangka mendukung kebutuhan organisasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi yang selaras dengan proses bisnis dan prioritas perusahaan, dilaksanakan kegiatan Pengembangan Solusi TI sebagai tindak lanjut atas pengajuan Permohonan Solusi TI Tahun 2026. Kegiatan ini mencakup proses pengembangan dan/atau pengadaan solusi teknologi informasi yang diajukan oleh unit kerja pemohon, dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional, efektivitas layanan, integrasi sistem, serta kesiapan implementasi. Melalui pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan solusi TI yang dihasilkan dapat memberikan dukungan yang optimal terhadap peningkatan kinerja organisasi, efisiensi proses kerja, dan kualitas layanan secara berkelanjutan. Daftar solusi TI tahun 2026 sebagai berikut:

1) Aplikasi *E-chain*;

a) Ruang Lingkup Pengembangan

Aplikasi *E-chain* (*competitiveness human resources of airnav indonesia*) adalah sistem yang digunakan perusahaan mengelola data, administrasi, dan proses SDM secara digital serta sebagai portal karyawan. Pengembangan Aplikasi *E-chain* ini berupa *enhancement* sesuai CR (*change request*) perubahan dan penambahan atas fitur yang dibutuhkan unit kerja pemilik proses bisnis. Terdapat beberapa CR yang diusulkan untuk dikembangkan pada tahun 2026 yaitu pembaharuan kebutuhan data pelatihan (administrasi pelatihan, pemesanan sarana/ kelas pelatihan, dan integrasi data pelatihan), pembaharuan proses gaji dan tunjangan, otomasi data keluarga bertanggung, pengelolaan imbal pasca kerja taspen *life* dan bpjs, dan usulan lainnya.

b) Perkembangan Terkini

Pada Triwulan II 2026 pengembangan masih terus dilakukan terkait CR digitalisasi pembayaran internal (tunjangan, sppd, dan restitusi), walaupun sebagian usulan CR sudah ada yang selesai dikerjakan diantaranya penerapan digital signature dalam SK (surat keputusan) perihal karyawan, proses tunjangan fungsi jabatan, tunjangan non rutin, lembur KJK, proses job tender, administrasi wfh (*work from home*).

c) Target Waktu Penyelesaian

Sesuai target tindak lanjut pengembangan atas semua CR yang sudah diusulkan dapat selesai dikerjakan pada **akhir tahun 2026**, target ini dipengaruhi oleh kesiapan unit pemilik proses bisnis dalam menyampaikan detail penambahan atau perubahan dalam tahapan analisa kebutuhan.

2) Aplikasi Jaminan;

a) Ruang Lingkup Pengembangan

Pengembangan Aplikasi Monitoring Jaminan Bank Garansi ini dirancang untuk mengoptimalkan efisiensi pengelolaan, dan mitigasi risiko keuangan perusahaan terkait jaminan penyedia jasa. Ruang lingkup utama dari pengembangan sistem ini berfokus pada otomatisasi pengawasan masa berlaku jaminan, integrasi data antar sistem, serta penanganan tata kelola penghapusan dokumen.

Aplikasi ini akan secara otomatis menyajikan daftar jaminan yang akan jatuh tempo. Pengguna dapat menandai dokumen yang telah dikirim pengingat/reminder. Proses pengiriman nota dinas kepada Unit ST juga akan berjalan otomatis melalui integrasi langsung dengan aplikasi Arsipku. Selain itu, sistem ini akan menyediakan akses pemantauan bagi Unit Pengadaan serta menyediakan tautan langsung ke sistem perbankan untuk mempermudah pengecekan keabsahan Bank Garansi secara online.

Untuk efisiensi data, aplikasi ini akan terintegrasi dengan aplikasi E-Proc guna menarik dokumen serta nomor Surat Pemilihan (Jaminan Penawaran) dan Surat Penunjukkan Pemenang (Jaminan Pelaksanaan). Dari segi manajemen status, sistem akan mengakomodasi pencatatan khusus untuk Bank Garansi yang dicairkan akibat mitra mengalami wanprestasi. Terakhir, untuk menjaga keamanan dan akurasi data, aplikasi menyediakan fitur penghapusan data Bank Garansi yang telah kedaluwarsa dan selesai pekerjaannya melalui mekanisme otorisasi berlapis yang melibatkan peran pembuat (*maker*) dan penyetuju (*approver*).

b) Perkembangan Terkini

Saat ini kegiatan berada pada tahap perencanaan dan penentuan alternatif solusi. Pembahasan awal telah dilaksanakan pada tanggal 30 April 2026 dengan menghasilkan dua alternatif pengembangan, yaitu:

- Mempertahankan Aplikasi Jaminan yang telah tersedia dan melakukan integrasi pertukaran data dengan aplikasi e-Proc; atau
- Mengembangkan seluruh fungsi pengelolaan jaminan sebagai modul baru di dalam aplikasi e-Proc.

Technology Solution Division telah menyampaikan permohonan konfirmasi tindak lanjut, pemilihan alternatif pengembangan, dan kepastian alokasi anggaran kepada *Transaction Division* sebagai dasar penyusunan ruang lingkup serta pelaksanaan pengembangan.

c) Target Waktu Penyelesaian

Konfirmasi alternatif pengembangan dan ketersediaan anggaran ditargetkan diterima paling lambat tanggal **31 Juli 2026**. Setelah konfirmasi diterima, akan dilanjutkan dengan finalisasi ruang lingkup kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis, penetapan strategi pengadaan, serta penyusunan jadwal implementasi. Target waktu penyelesaian pengembangan akan ditetapkan setelah alternatif solusi dan skema pelaksanaan disepakati, dengan mempertimbangkan proses pengadaan vendor, ketersediaan sumber daya internal, dan kompleksitas integrasi dengan aplikasi e-Proc.

3) Aplikasi Laporan Bulanan Operasi;

a) Ruang Lingkup Pengembangan

Aplikasi Otomasi Laporan Bulanan Operasi Kantor Cabang dikembangkan untuk memodernisasi proses pelaporan operasional ATS dari Kantor Cabang ke Kantor Pusat secara otomatis, cepat, dan akurat. Berikut adalah cakupan ruang lingkup utama:

- Tujuan Sistem: Mempermudah rekapitulasi data bulanan, mempercepat penyampaian informasi operasional, serta mendukung pengambilan keputusan yang akurat di tingkat manajemen;
- Manajemen Akun (Hak Akses): Sistem membagi pengguna ke dalam tiga peran utama, yaitu Kantor Pusat Viewer (Direksi untuk melihat/mengunduh data), Kantor Pusat Admin (evaluasi dan monitoring), serta Kantor Cabang (pembuat laporan dan verifikasi/GM);
- Template & Komponen Laporan: Pelaporan mencakup ringkasan eksekutif (Executive Summary), data pergerakan lalu lintas penerbangan (Traffic Movement dari Aplikasi Stream), jam pemanduan personel (ATC, ACO, AIS), kondisi validitas fasilitas (komunikasi, navigasi, surveilans, sistem ATS), capaian KPI operasional, hingga pencatatan kejadian signifikan seperti RTA, RTB, Divert, dan Go Around;
- Mekanisme Alur Kerja: Proses bisnis penyampaian laporan berjalan secara berjenjang dimulai dari level Unit/Capem PNP, divalidasi oleh Kantor Cabang, hingga berakhir di sistem Kantor Pusat.

b) Perkembangan Terkini

Saat ini kegiatan berada pada tahap penyusunan dan pemutakhiran kebutuhan pengguna. *Air Navigation Information Management Division* sedang menyiapkan data dukung berupa pembaruan URS Otomasi Laporan Bulanan Operasional. *Technology Solution Division* selanjutnya akan melakukan analisis kebutuhan dan menindaklanjuti hasil pembahasan sebagai dasar pelaksanaan pengembangan. Serta, *Technology Solution Division* telah mengembangkan prototipe berdasarkan spesifikasi URS versi sebelumnya.

c) Target Waktu Penyelesaian

Pelaksanaan analisis, pengembangan, pengujian, dan penyelesaian sistem ditargetkan berlangsung pada periode **Juli** sampai dengan **Desember 2026**, dengan menyesuaikan kelengkapan dokumen kebutuhan dan data dukung yang disampaikan oleh unit pengguna.

4) Aplikasi Penerbangan Lintas;

a) Ruang Lingkup Pengembangan

Pengembangan Aplikasi Penerbangan Lintas pada tahap ini dibatasi pada pelaksanaan Proof of Concept (PoC) Validation berupa pembuatan prototipe dengan fungsi utama aplikasi berdasarkan rancangan teknis awal aplikasi sebelum dilanjutkan ke tahap pengembangan penuh. Ruang lingkup PoC Validation meliputi:

- Identifikasi pengelompokan penerbangan berdasarkan pergerakan penerbangan yaitu *domestic flight*, *international flight*, dan *overflying*;
- Membandingkan data dengan STREAM/HAADES dengan mengidentifikasi data yang sinkron dan tidak sinkron
- Menampilkan detail rute, trajectory, serta potensi anomali
- Menjadi dasar penyusunan kebutuhan lanjutan untuk validasi otomatis dan data produksi

b) Perkembangan Terkini

Pelaksanaan Aplikasi Penerbangan Lintas saat ini berada pada tahap Proof of Concept (PoC) Validation, yang difokuskan untuk menguji dan memvalidasi kesesuaian konsep prototipe dengan kebutuhan proses bisnis pengguna. Pengumpulan masukan pengguna serta identifikasi kesenjangan antara prototipe yang dikembangkan dan kebutuhan operasional. Hasil validasi akan digunakan sebagai dasar penyempurnaan proses bisnis, kebutuhan pengguna, rancangan solusi, serta penentuan ruang lingkup pengembangan pada tahap selanjutnya.

Pada tahap ini, aplikasi belum digunakan sebagai sistem operasional produksi

c) Target Waktu Penyelesaian

Pelaksanaan PoC Validation aplikasi ditargetkan selesai pada **Agustus 2026**. Penyelesaian kegiatan ditandai dengan terlaksananya demonstrasi dan pengujian prototipe, diperolehnya masukan dari unit pengguna, serta tersusunnya hasil evaluasi dan rekomendasi pengembangan lanjutan

5) Aplikasi Manajemen Risiko;

a) Ruang Lingkup Pengembangan

Pengembangan Aplikasi Manajemen Risiko mencakup digitalisasi proses pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi risiko perusahaan melalui ruang lingkup sebagai berikut:

- Modul A – Pengelolaan Risiko RKAP Tahunan, untuk menyusun, mengelola, dan memantau Profil Risiko Korporat yang selaras dengan tujuan strategis, RKAP, dan sasaran kinerja perusahaan.
- Modul B – Pengelolaan Risiko Kajian Insidentil/Per Kasus, untuk mengelola kajian risiko secara ad hoc atas insiden aktual, keputusan strategis, atau isu krusial di luar proses RKAP.
- Modul C – Risk Register Lini 1, untuk mengelola risiko yang berasal dari unit kerja operasional, cabang, dan kantor pusat yang dapat memengaruhi kegiatan operasional, layanan navigasi, aset, hukum, reputasi, keuangan, dan sumber daya manusia.
- Penyediaan *dashboard* dan laporan untuk menampilkan profil risiko, perkembangan pelaksanaan mitigasi, serta informasi monitoring risiko sesuai kebutuhan perusahaan.

b) Perkembangan Terkini

Pengembangan Modul A, B, C dan *Stress Testing* dan *Loss Event Database* oleh *Technology Solution Division* telah diselesaikan. Selanjutnya, *Information Technology Division* sedang mengembangkan *dashboard* sesuai kebutuhan yang telah disampaikan oleh *Risk Management Division*. Secara paralel, *Risk Management Division* sedang melaksanakan pengujian terhadap modul dan *dashboard* yang sudah dikembangkan melalui proses pengisian data untuk memastikan kesesuaian fungsi, alur proses, dan hasil keluaran sistem.

c) Target Waktu Penyelesaian

Tahapan selanjutnya ditargetkan pada penyelesaian pengembangan *dashboard* serta penyelesaian pengujian oleh *Risk Management Division*.

Hasil pengujian akan menjadi dasar untuk pelaksanaan perbaikan atau penyempurnaan apabila masih ditemukan ketidaksesuaian sebelum sistem dinyatakan siap untuk digunakan.

6) Aplikasi SWORD;

a) Ruang Lingkup Pengembangan

Aplikasi SWORD (*standar now online on record & document*) adalah media *online* yang dapat digunakan oleh seluruh personel Airnav Indonesia untuk mengakses dan mendapatkan informasi terkait dengan peraturan penerbangan, standar internasional, dokumen operasional (SOP) serta dokumen lain sebagai acuan dalam pemberian pelayanan navigasi penerbangan. Pengembangan Aplikasi SWORD ini berupa *enhancement* sesuai CR (*change request*) perubahan dan penambahan atas fitur yang dibutuhkan unit kerja pemilik proses bisnis.

b) Perkembangan Terkini

Pengembangan yang sudah dilakukan pada triwulan II 2026 yaitu terkait CR penyesuaian beberapa fitur seperti mekanisme autentikasi dan pengalihan halaman setelah login, pembaharuan input ataupun update kategori dokumen, pengiriman notifikasi email sesuai kategori dokumen, dan dokumen sesuai dengan hak akses yang dimiliki oleh pengguna.

c) Target Waktu Penyelesaian

Sesuai target tindak lanjut pengembangan atas semua CR yang sudah diusulkan dapat selesai dikerjakan pada **akhir tahun 2026**, target ini dipengaruhi oleh kesiapan unit pemilik proses bisnis dalam menyampaikan detail penambahan atau perubahan dalam tahapan analisa kebutuhan

7) Aplikasi Portal Penerbangan;

a) Ruang Lingkup Pengembangan

Proyek ini mencakup perancangan dan pengembangan Portal Permintaan Data Realisasi Penerbangan berbasis web yang berfungsi sebagai platform terpusat untuk mengelola seluruh ekosistem data penerbangan korporasi. Pengembangan ini bertujuan menggantikan proses manual berbasis surat dan *e-mail* menjadi sistem digital yang efisien, akurat, dan dapat dilacak secara real-time. Lebih jauh, *platform* ini diorientasikan untuk mendukung model bisnis baru yang mampu mengonversi penyediaan data eksternal menjadi sumber pendapatan lain-lain bagi perusahaan.

Secara fungsional, ruang lingkup sistem ini terbagi menjadi empat:

- Manajemen Permintaan Terpusat: Menyediakan sarana digital terpadu untuk menerima, memproses, memantau, serta mendokumentasikan setiap permintaan data penerbangan yang diajukan oleh pengguna internal maupun pemangku kepentingan eksternal
- Integrasi Data Operasional: Menghubungkan portal secara langsung dengan sistem eksisiting, yaitu STREAM dan HAADES, sebagai sumber utama data realisasi penerbangan untuk mengeliminasi proses pengolahan data manual.
- Dashboard Pemantauan dan Pelaporan: Menyediakan fitur dashboard pelacakan status permohonan data serta fungsi dokumentasi otomatis guna mempermudah penyusunan laporan pemanfaatan data secara periodik atau bulanan.
- Tata Kelola Hak Akses (*Data Governance*): Menerapkan aturan akses (*rules*) yang ketat bagi setiap pemohon data untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) keamanan informasi sekaligus mengoptimalkan keandalan analisis data pada fungsi operasi perusahaan.

b) Perkembangan Terkini

Saat ini kegiatan berada pada tahap penyusunan dan pemutakhiran kebutuhan pengguna. *Air Navigation Information Management Division* sedang menyiapkan data dukung berupa penyusunan *URS Portal Permintaan Realisasi Penerbangan*. *Technology Solution Division* selanjutnya akan melakukan analisis kebutuhan dan menindaklanjuti hasil pembahasan sebagai dasar pelaksanaan pengembangan.

c) Target Waktu Penyelesaian

Tahapan selanjutnya berupa pelaksanaan analisis, pengembangan, pengujian, dan penyelesaian sistem ditargetkan berlangsung **Semester II tahun 2026**, setelah URS, kelengkapan dokumen kebutuhan dan data dukung yang disampaikan oleh unit pengguna.

8) Aplikasi Perancangan Prosedur Penerbangan dan Validasi Data;

a) Ruang Lingkup Pengembangan

Pengembangan ini mencakup pengadaan dan implementasi Sistem Otomasi Perancangan dan Validasi Darat (*Ground Validation*) Prosedur Penerbangan yang terintegrasi dalam satu ekosistem digital untuk :

- Otomasi Perancangan Prosedur: Pembuatan area perlindungan (*protection area*) dan penilaian rintangan (*obstacle assessment*) secara penuh untuk seluruh jenis rute konvensional maupun PBN

(seperti VOR/NDB/ILS, RNP APCH, RNP AR, SID, STAR, holding, dan MSA) (pp. 9-10). Fitur ini mendukung perancangan multi-bandara sekaligus dalam satu peta kerja (*working map*) serta fitur *drag-and-drop* perubahan rute yang adaptif

- Sistem Validasi Darat (*Ground Validation*): Modul pengujian kelayakan terbang (*flyability*) yang mampu mensimulasikan performa jenis pesawat, beban muatan, kondisi cuaca, hingga konstelasi GPS secara akurat

Untuk menunjang performa operasional sistem, ruang lingkup pengembangan juga mewajibkan penyediaan infrastruktur fisik berupa:

- Stasiun Kerja (*Workstation*): Pengadaan 4 unit PC *Workstation* dengan spesifikasi grafis tinggi yang mampu beroperasi 24 jam nonstop secara remote, dilengkapi 4 unit monitor eksternal multitasking dan perangkat UPS cadangan.
- Fasilitas Kerja Ergonomis: Pengadaan meja, kursi, serta *keyboard* dan *mouse wireless* yang dirancang ergonomis untuk kenyamanan pengguna.

Aspek legalitas dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia mencakup:

- Hak Milik & Lisensi Perangkat Lunak: Penyediaan 4 lisensi *software* perancangan, 2 lisensi *software flyability*, *perpetual license* untuk *software* CAD, serta aplikasi penunjang laporan kantor.
- Pelatihan Operasional: Pelaksanaan transfer pengetahuan berupa pelatihan intensif penggunaan *software* baru bagi 15 personel tersertifikasi.
- Pemeliharaan Berkelanjutan: Jaminan dukungan teknis pemeliharaan perangkat keras dan pembaruan berkala fitur *software* agar selalu mematuhi (*comply*) regulasi penerbangan internasional terbaru.

b) Perkembangan Terkini

Permohonan pengadaan beserta dokumen pendukung berupa Rencana Kerja & Syarat Teknis (RKST) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) telah diajukan *Corporate Service Division*. Dengan demikian, kegiatan saat ini masih berada pada tahap persiapan dan pemrosesan pengadaan, termasuk penyempurnaan dokumen teknis dan pemenuhan persyaratan pengadaan.

c) Target Waktu Penyelesaian

Proses pengadaan, penyediaan lisensi, instalasi perangkat lunak dan perangkat pendukung, pelatihan, serta pengujian operasional

ditargetkan dapat dilaksanakan secara bertahap pada **Semester II tahun 2026.**

9) Aplikasi *Geographical Information System* (GIS)

a) Ruang Lingkup Pengembangan

Ruang lingkup sistem mencakup lima aspek utama untuk mendukung pelayanan informasi aeronautika. Aspek tersebut meliputi pengelolaan, validasi, analisis, visualisasi, dan distribusi data penting. Data yang dikelola terdiri dari data topografi, terrain (medan), dan *obstacle* (rintangan). Seluruh komponen ini diintegrasikan guna memastikan akurasi dan standar kualitas informasi navigasi penerbangan.

b) Perkembangan Terkini

Telah dilaksanakan proses *Request for Information (RFI)* kepada vendor untuk memperoleh alternatif solusi yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana disampaikan dalam *User Requirement Specification (URS)*. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penawaran awal berupa solusi "*Modernization of Aeronautical Data Management & Production System*", ditemukan bahwa ruang lingkup dan fitur solusi tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam URS. Oleh karena itu, saat ini sedang dilakukan proses penyesuaian penawaran oleh vendor dengan mengarahkan solusi pada penyediaan "*AIM Database*" yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengelolaan data aeronautika.

c) Target Waktu Penyelesaian

Setelah penawaran solusi *AIM Database* yang telah disesuaikan diterima dan dievaluasi kesesuaiannya terhadap URS, selanjutnya akan dilaksanakan tahapan persiapan pengadaan. Tahapan tersebut meliputi finalisasi spesifikasi teknis, penyusunan dokumen pengadaan, penyusunan estimasi biaya, serta pemenuhan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan pengadaan yang berlaku.

10) Aplikasi *Customer Relationship Management* (CRM)

a) Ruang Lingkup Pengembangan

Aplikasi ini dirancang sebagai *platform* mandiri untuk mengotomatisasi dan mengoptimalkan pengelolaan data pelanggan, proses fakturisasi, penerimaan pembayaran, pengelolaan piutang, penanganan komplain, serta penyusunan analisis dan *dashboard* pelaporan yang *real-time*. Secara garis besar, ruang lingkup yang dicakup dalam dokumen ini meliputi :

- Kondisi Eksisting dan Kendala: Mengidentifikasi keterbatasan sistem A-Care saat ini, seperti kinerja server yang lambat, proses manual

pada *settlement* piutang, dan belum adanya *dashboard* yang komprehensif.

- Ketentuan dan Keamanan Umum: Menetapkan standar pengembangan sistem, termasuk penerapan *Role-Based Access Control (RBAC)*, enkripsi data, kepatuhan terhadap UU ITE, *framework* keamanan sejenis ISO 27001, serta jaminan ketersediaan layanan 24/7.
- Kebutuhan Operasional dan Fungsional: Merinci 16 modul utama yang wajib tersedia, mulai dari Modul Data Pelanggan, Fakturisasi, Pembayaran, Piutang, Otomatisasi Credit Note, sistem pengingat otomatis (SP1, SP2, SP3), Manajemen Komplain (SLA), hingga dukungan helpdesk berbasis AI.
- Dampak dan Integrasi Sistem Eksisting: Mengatur mekanisme integrasi data dan perubahan fungsi pada sistem yang sudah berjalan, seperti STREAM (difokuskan hanya untuk data pergerakan pesawat), SAP (sinkronisasi modul keuangan), Sistem Perpajakan/Cortex (e-Faktur), Master Data, dan BION.
- Migrasi Data Historis: Menetapkan prosedur identifikasi, pemetaan, dan validasi bertahap (*controlled migration*) untuk memindahkan data lama secara aman tanpa mengganggu operasional perusahaan.
- Batasan Pengembangan: Menentukan target waktu penyelesaian sistem selama 7 hingga 9 bulan serta kewajiban pengalihan hak source code dan dokumentasi dari pihak ketiga kepada Unit Kerja TI AirNav Indonesia.

b) Perkembangan Terkini

Saat ini kegiatan berada pada tahap perencanaan pengadaan dan penentuan alternatif solusi. Proses *Request for Information (RFI)* telah dilaksanakan kepada tiga calon penyedia, yaitu MKI, IBM, dan PTI. Berdasarkan hasil RFI, MKI dan PTI menawarkan skema custom development, sedangkan IBM menawarkan solusi *Salesforce Sales & Service Cloud*. Estimasi waktu pelaksanaan yang disampaikan berkisar antara enam sampai tujuh bulan.

c) Target Waktu Penyelesaian

Konfirmasi tindak lanjut dan alokasi anggaran ditargetkan diterima paling lambat pada **17 Juli 2026**. Setelah konfirmasi diterima, kegiatan akan dilanjutkan dengan finalisasi kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis, penetapan solusi dan strategi pengadaan, serta pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa.

Proses pengadaan sampai dengan penetapan penyedia diperkirakan membutuhkan waktu kurang lebih dua bulan, sedangkan pelaksanaan pengembangan atau implementasi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar enam sampai tujuh bulan, menyesuaikan dengan solusi dan penyedia yang dipilih

- b. Pencapaian program Pengembangan Solusi TI sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 ditetapkan dengan target pencapaian sebesar 47,65% dan terealisasi sebesar **50,75%**.

3. Pengembangan Aplikasi Sistem *Monitoring & Reporting Technology* (SMART)

- a. Pengembangan Aplikasi Sistem *Monitoring & Reporting Technology* (SMART) merupakan kegiatan pengembangan sistem yang bertujuan memperkuat fungsi pengawasan, pemantauan, dan pelaporan kondisi peralatan teknis secara terintegrasi sebagai bagian dari inisiatif pengembangan sistem monitoring peralatan *Communication, Navigation, Surveillance, Automation/Data Processing* (CNSA/D) beserta peralatan pendukung dalam mendukung implementasi konsep *Technical Operation Center* (TOC). Kegiatan ini juga merupakan salah satu *Key Performance Indicator* (KPI) Direktorat Teknik yang diarahkan untuk meningkatkan visibilitas, kecepatan respons, serta efektivitas pengendalian terhadap kondisi operasional peralatan teknis. Pelaksanaannya dilakukan melalui tiga tahapan utama (*milestone*), yaitu *Data Definition & Categorization* yang meliputi *requirement gathering*, *project planning*, dan *system design*, dilanjutkan dengan *Development System* sebagai tahapan pembangunan dan pengembangan aplikasi, serta *Data Acquisition & Display* yang mencakup proses akuisisi data, integrasi, pengujian sistem, hingga penyajian data dan informasi pada *system display*. Melalui kegiatan ini diharapkan terwujud sistem monitoring yang mampu menyajikan informasi secara akurat, terstruktur, dan *real time* sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat serta meningkatkan keandalan layanan operasional navigasi penerbangan;
- b. Pencapaian program Pengembangan Aplikasi Sistem *Monitoring & Reporting Technology* (SMART) sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 ditetapkan dengan target pencapaian sebesar 50% dan terealisasi sebesar **55%**.

4. Review & Evaluasi Tata Kelola TI

- a. Program Review dan Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menelaah efektivitas kebijakan, proses, peran, serta mekanisme pengelolaan teknologi informasi yang telah diterapkan, sekaligus mengidentifikasi area perbaikan guna meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, pengendalian risiko, serta kualitas dukungan teknologi informasi terhadap proses bisnis Perusahaan. Kegiatan ini mencakup evaluasi terhadap

penerapan tata kelola TI, keselarasan strategi TI dengan kebutuhan bisnis, efektivitas pengendalian, serta tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi sebagai dasar penyusunan rekomendasi perbaikan dan rencana tindak lanjut. Melalui pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan terwujud penguatan tata kelola teknologi informasi secara berkelanjutan sehingga implementasi inisiatif, pengelolaan layanan, dan pengembangan teknologi informasi dapat berlangsung secara lebih terarah, terukur, efektif, serta memberikan nilai tambah yang optimal bagi Perusahaan.

- b. Pencapaian program Review dan Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 ditetapkan dengan target pencapaian sebesar 20% dan terealisasi sebesar **20%**.

5. Pengembangan FF-ICE TBO/R2 Technical Trial

- a. Pengembangan FF-ICE TBO/R2 Technical Trial merupakan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung modernisasi layanan navigasi penerbangan serta meningkatkan keterlibatan aktif Perusahaan pada inisiatif regional dan global. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas rencana kegiatan ICAO APAC FF-ICE Ad Hoc Group and Workshop serta APAC TBO Pathfinder Tahun 2026, sekaligus menjadi salah satu *Key Performance Indicator* (KPI) Direktorat Teknik. Pelaksanaannya mencakup partisipasi dalam *workshop* dan *technical meeting*, pengembangan sistem, serta pelaksanaan *technical trial* yang ditujukan untuk memperkuat pemahaman, kesiapan, dan implementasi konsep *Trajectory Based Operations (TBO)* dan *Flight and Flow Information for a Collaborative Environment (FF-ICE) Release 2 (R2)* secara bertahap. Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun landasan teknis dan operasional yang mendukung harmonisasi dengan inisiatif ICAO Asia/Pacific, meningkatkan interoperabilitas dan pertukaran informasi penerbangan secara kolaboratif dan terstandar, serta memperkuat kesiapan Perusahaan dalam mewujudkan layanan navigasi penerbangan yang lebih efisien, aman, dan berkualitas.
- b. Pencapaian program Pengembangan FF-ICE TBO/R2 Technical Trial sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 ditetapkan dengan target pencapaian sebesar 35% dan terealisasi sebesar **42,5%**.

6. Modernisasi dan Transformasi Proses Pengembangan TI

- a. Modernisasi dan Transformasi Proses Pengembangan Teknologi Informasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas, kualitas, dan kecepatan pelaksanaan pengembangan solusi teknologi informasi melalui penyempurnaan metode, tata kelola, serta mekanisme pengembangan aplikasi secara berkelanjutan. Kegiatan ini mencakup penerapan pendekatan

pengembangan yang lebih modern dan adaptif, antara lain melalui penguatan praktik *DevOps*, implementasi *Continuous Integration/Continuous Delivery* (CI/CD), peningkatan otomatisasi proses pengembangan dan pengujian (*test automation*), serta penguatan kolaborasi antara tim pengembangan, pengujian, dan operasional. Melalui pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan proses pengembangan aplikasi dapat berlangsung secara lebih terstruktur, efisien, responsif terhadap perubahan kebutuhan bisnis, serta menghasilkan solusi teknologi informasi yang lebih andal, berkualitas, aman, dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan layanan dan pencapaian sasaran strategis Perusahaan.

- b. Pencapaian program Modernisasi dan Transformasi Proses Pengembangan Teknologi Informasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 ditetapkan dengan target pencapaian sebesar 0% dan terealisasi sebesar **20%**.

7. Manajemen Tata Kelola TI Terintegrasi

- a. Program Manajemen Tata Kelola TI merupakan program yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola, layanan, serta kapabilitas data dan analitik perusahaan secara terintegrasi guna mendukung efektivitas operasional dan pengambilan keputusan berbasis data;
- b. Program ini dilaksanakan melalui beberapa aktivitas utama, yaitu: (i) kajian, perancangan, dan pengembangan proses IT *Service Management* (ITSM) untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan responsivitas layanan teknologi informasi; serta (ii) pelaksanaan IT *Maturity Assessment* untuk mengukur tingkat kematangan tata kelola dan kapabilitas teknologi informasi sebagai dasar penyusunan strategi dan rencana peningkatan secara berkelanjutan;
- c. Pencapaian program Manajemen Tata Kelola TI Terintegrasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 ditetapkan dengan target pencapaian sebesar 22,50% dan terealisasi sebesar **23,75%** dan lebih tinggi sebesar 16,25% dari pencapaian Triwulan I Tahun 2026. Sementara itu, realisasi anggaran masih tercatat sebesar **0%** karena pelaksanaan kegiatan masih berada pada tahap proses pengadaan, sehingga realisasi anggaran direncanakan akan dilakukan setelah proses pengadaan selesai dan pembayaran dilaksanakan pada akhir pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.

8. Pendukung Aplikasi Operasi

- a. Program Pendukung Aplikasi Operasi merupakan program yang dilaksanakan untuk mendukung kebutuhan organisasi dalam pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan Aplikasi Perancangan Prosedur Penerbangan dan Validasi Data serta Aplikasi *Geographical Information System* (GIS). Implementasi kedua aplikasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas proses operasional, akurasi data, dan kualitas layanan navigasi penerbangan;

- b. Pencapaian program Pendukung Aplikasi Operasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 terealisasi sebesar **30%** dan lebih tinggi sebesar 3,33% dari pencapaian pada Triwulan I Tahun 2026. Adapun realisasi anggaran masih mencapai **0%**, karena pelaksanaan kegiatan masih berada pada tahap proses pengadaan.

9. Penyediaan Fasilitas Layanan TI Untuk Pendukung Operasional Perkantoran

- a. Program Penyediaan Fasilitas Layanan TI untuk Pendukung Operasional Perkantoran merupakan program yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan layanan teknologi informasi melalui pemenuhan kebutuhan perangkat keras, lisensi perangkat lunak, serta layanan pendukung, seperti email dan sistem kolaborasi. Program ini diharapkan dapat mendukung kelancaran operasional perkantoran, meningkatkan efisiensi proses kerja, serta mendorong produktivitas organisasi;
- b. Pencapaian Penyediaan Fasilitas Layanan TI sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 terealisasi sebesar **37,35%** dan lebih tinggi 14,19% dari pencapaian pada Triwulan I Tahun 2026, adapun realisasi anggaran telah mencapai **49,89%** atau lebih besar 39,08% dari realisasi Triwulan I 2026. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai rencana dan mendukung pemenuhan kebutuhan layanan teknologi informasi bagi operasional perusahaan.

10. Penyediaan Operasional ERP

- a. Program Penyediaan Operasional ERP ini bertujuan untuk memastikan keberlangsungan operasional sistem ERP yang meliputi penyediaan *disaster recovery center*, penyediaan dukungan teknis tahunan terhadap *hardware* dan *software*, dan penyediaan *change request* terhadap aplikasi. Dengan program ini menggambarkan upaya komprehensif untuk menjaga sistem ERP tetap berjalan optimal, responsif terhadap kebutuhan bisnis, dan didukung oleh infrastruktur TI yang memadai, sehingga dapat terus mendukung seluruh aktivitas perusahaan secara efektif;
- b. Pencapaian Program Penyediaan Operasional ERP sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 terealisasi sebesar **54,29%** dan lebih tinggi 26,79% dari pencapaian pada Triwulan I Tahun 2026, adapun realisasi anggaran telah mencapai **31.04%** atau lebih besar 17,90% dari realisasi Triwulan I Tahun 2026.

11. Penyediaan Operasional Layanan TI

- a. Program Penyediaan Operasional Layanan TI merupakan program yang bertujuan untuk menjaga stabilitas, keandalan, dan keberlanjutan layanan

teknologi informasi melalui pengelolaan operasional aplikasi, penyediaan dukungan teknis dari penyedia layanan (vendor), serta pengelolaan perubahan (*change request*) secara terstruktur. Program ini dilaksanakan untuk memastikan layanan teknologi informasi tetap andal, aman, dan adaptif terhadap kebutuhan bisnis perusahaan, sehingga mampu mendukung kelancaran operasional serta peningkatan kualitas layanan secara berkesinambungan;

- b. Pencapaian Penyediaan Operasional Layanan TI sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 terealisasi sebesar **25%** dan lebih tinggi 12,50% dari pencapaian pada Triwulan I Tahun 2026, adapun realisasi anggaran telah mencapai **4,11%** atau lebih besar 0,64% dari realisasi Triwulan I Tahun 2026.

12. Post Implementation Review Layanan TI

- a. Program Post Implementation Review Layanan TI merupakan program yang bertujuan untuk memastikan bahwa layanan teknologi informasi yang telah diimplementasikan beroperasi sesuai dengan tujuan, kebutuhan bisnis, dan standar yang telah ditetapkan. Program ini mencakup kegiatan monitoring dan evaluasi layanan TI secara berkala, serta pelaksanaan *Post Implementation Review* atas layanan *Digital Signature* yang bekerja sama dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE). Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi, kinerja layanan, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan operasional perusahaan, sehingga dapat menjadi dasar dalam penyempurnaan dan peningkatan kualitas layanan TI secara berkelanjutan;
- b. Pencapaian Post Implementation Review Layanan TI sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 terealisasi sebesar **15%** dan lebih tinggi 10% dari pencapaian pada Triwulan I Tahun 2026, adapun realisasi anggaran telah mencapai **23,53%** atau lebih besar 20,68% dari realisasi Triwulan I Tahun 2026.

13. Program Penyediaan Layanan Jaringan

- a. Program Penyediaan Pendukung Operasional Layanan Navigasi Penerbangan merupakan program yang bertujuan untuk memastikan tersedianya konektivitas jaringan perusahaan yang andal, berkesinambungan, aman, dan terintegrasi guna mendukung operasional pelayanan navigasi penerbangan. Program ini mencakup penyediaan konektivitas antar lokasi internal perusahaan, baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang, serta konektivitas dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional dan internasional, termasuk Kementerian Perhubungan, BMKG, PT Angkasa Pura Indonesia, serta mitra internasional seperti Australia, Singapura, Thailand, dan negara lainnya sesuai kebutuhan operasional. Infrastruktur jaringan yang dikelola meliputi Jaringan Komunikasi Penerbangan Nasional (Jarkompenas), *The Common Aeronautical Virtual Private Network* (CRV), *AirNav Network*, *Virtual Private Network* (VPN),

jaringan *Automatic Dependent Surveillance-Broadcast* (ADS-B), serta jaringan *Controller-Pilot Data Link Communication* (CPDLC). Pengelolaan program dilaksanakan melalui kombinasi pemanfaatan sumber daya internal perusahaan dan layanan terkelola (*managed service*) oleh pihak ketiga guna memastikan ketersediaan, keandalan, dan kualitas layanan jaringan secara berkelanjutan;

- b. Pencapaian Penyediaan Pendukung Operasional Layanan Navigasi Penerbangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 terealisasi sebesar **38,08%** dan lebih tinggi 18,91% dari pencapaian pada Triwulan I Tahun 2026, adapun realisasi anggaran telah mencapai **6,82%** atau lebih besar 5,65% dari realisasi Triwulan I Tahun 2026.

14. Program Pendukung Penyediaan Layanan Jaringan

- a. Program Pendukung Penyediaan Layanan Jaringan merupakan program yang bertujuan untuk memastikan seluruh infrastruktur jaringan yang dikelola Perusahaan beroperasi secara andal, aman, dan berkesinambungan sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA) yang telah ditetapkan. Program ini menjadi bagian penting dalam menjaga keandalan operasional serta keamanan infrastruktur teknologi informasi melalui pemenuhan kebutuhan siklus hidup infrastruktur jaringan, yang meliputi pemastian masa berlaku lisensi perangkat lunak dan perangkat keras, pemastian perangkat jaringan tetap berada dalam siklus masa pakai yang direkomendasikan (*life cycle*), pemutakhiran perangkat keras dan perangkat lunak dari aspek fungsi maupun keamanan, serta penyediaan dukungan teknis dari prinsipal. Pelaksanaan program dilakukan melalui optimalisasi sumber daya internal Perusahaan, antara lain melalui pengadaan perangkat, perpanjangan lisensi, dan penyediaan *annual technical support*, serta didukung oleh skema layanan terkelola (*managed service*) yang disediakan oleh pihak ketiga guna menjamin ketersediaan dan kualitas layanan jaringan secara berkelanjutan;
- b. Pencapaian Pendukung Penyediaan Layanan Jaringan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 terealisasi sebesar **73,33%** dan lebih tinggi 23,3% dari pencapaian pada Triwulan I Tahun 2026, adapun realisasi anggaran telah mencapai **68,14%** atau lebih besar 68,03% dari realisasi Triwulan I Tahun 2026.

15. Program Penyediaan Layanan Infrastruktur

- a. Program Penyediaan Layanan Infrastruktur merupakan program yang bertujuan untuk memastikan tersedianya infrastruktur teknologi informasi yang andal, aman, dan memadai dalam mendukung penyimpanan, pengelolaan, serta pemrosesan data, pengembangan dan operasional aplikasi, serta implementasi teknologi *artificial intelligence* (AI). Program ini diarahkan untuk menjaga tingkat *downtime* seminimal mungkin, menjamin keamanan dan ketersediaan data, serta

memastikan skalabilitas sumber daya komputasi sesuai dengan kebutuhan bisnis dan operasional Perusahaan. Pengelolaan infrastruktur dilaksanakan melalui pengoperasian Data Center dengan standar ketersediaan layanan 24x7, yang didukung oleh kegiatan pemeliharaan rutin terhadap fasilitas pendukung, meliputi sistem kelistrikan, *generator set* (genset), *Uninterruptible Power Supply* (UPS), *Precision Air Conditioning* (PAC), serta infrastruktur pendukung lainnya. Selain itu, program ini juga mencakup monitoring kapasitas server dan *private cloud*, pelaksanaan *backup* data secara berkala, serta pengujian dan pemeliharaan *Disaster Recovery Plan* (DRP) untuk memastikan keberlangsungan layanan teknologi informasi dalam menghadapi potensi gangguan operasional;

- b. Pencapaian Penyediaan Layanan Infrastruktur sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 terealisasi sebesar **36%** dan lebih tinggi 22,25% dari pencapaian pada Triwulan I Tahun 2026, adapun realisasi anggaran telah mencapai **92,89%** atau lebih besar 37,64% dari realisasi Triwulan I Tahun 2026.

16. Penyusunan dan Reviu Tata Kelola Keamanan Siber

- a. Program Penyusunan dan Reviu Tata Kelola Keamanan Siber bertujuan untuk penyesuaian dan penguatan tata kelola keamanan siber yang selaras dengan kebijakan nasional dan standar internasional. Penyusunan dan penetapan sejumlah dokumen serta kegiatan strategis terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) antara lain penyusunan dan penetapan SOP Pengelolaan Gangguan dan Manajemen Insiden sebagai pedoman penanganan insiden berdasarkan klasifikasi dan prioritas, serta pemberian dukungan awal kepada karyawan saat terjadi insiden, dan penetapan SOP Pengelolaan Akses dan Kata Sandi sebagai pedoman untuk mengatur dan mengendalikan pemberian, penggunaan, serta pengamanan akses ke sistem dan data perusahaan;
- b. Program Penyusunan dan Reviu Tata Kelola Keamanan Siber merupakan program yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola keamanan siber melalui penyelarasan kebijakan dan prosedur dengan kebijakan nasional serta standar internasional di bidang keamanan informasi. Program ini dilaksanakan melalui penyusunan, reviu, dan penetapan berbagai dokumen strategis dalam kerangka Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), antara lain Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Gangguan dan Manajemen Insiden sebagai pedoman penanganan insiden berdasarkan klasifikasi dan tingkat prioritas, termasuk pemberian dukungan awal kepada karyawan saat terjadi insiden, serta SOP Pengelolaan Akses dan Kata Sandi sebagai pedoman dalam mengatur, mengendalikan, dan mengamankan pemberian serta penggunaan hak akses terhadap sistem dan data perusahaan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keamanan siber, meminimalkan risiko

keamanan informasi, serta mendukung terciptanya tata kelola teknologi informasi yang andal dan berkelanjutan;

- c. Pencapaian Penyusunan dan Reviu Tata Kelola Keamanan Siber sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 terealisasi sebesar **85%** dan lebih tinggi 57% dari pencapaian pada Triwulan I Tahun 2026, adapun realisasi anggaran telah mencapai **30,35%**.

17. Peningkatan Budaya Keamanan Siber

- a. Program Peningkatan Budaya Keamanan Siber merupakan program yang bertujuan untuk memperkuat kesadaran, kompetensi, dan kesiapsiagaan seluruh karyawan dalam menghadapi potensi ancaman siber melalui pelaksanaan kegiatan yang terstruktur dan berkelanjutan. Program ini mencakup pelaksanaan *Table Top Exercise* (TTX) sebagai simulasi penanganan insiden siber yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait untuk menguji pemahaman, koordinasi, dan efektivitas penerapan prosedur penanganan insiden yang telah ditetapkan. Selain itu, program ini juga meliputi pelaksanaan registrasi ulang *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) AirNav Indonesia kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai upaya memperkuat tata kelola respons insiden siber dan memastikan keberlanjutan pengakuan kelembagaan CSIRT dalam mendukung pengelolaan keamanan siber perusahaan.
- b. Pencapaian Peningkatan Budaya Keamanan Siber sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 terealisasi sebesar **70%** dan lebih tinggi 46,84% dari pencapaian pada Triwulan I Tahun 2026, adapun realisasi anggaran telah mencapai **59,07%**.

18. Monitoring Kontrol Keamanan Siber

- a. Program Monitoring Kontrol Keamanan Siber merupakan program yang bertujuan untuk memastikan efektivitas penerapan kontrol keamanan siber melalui penyediaan sistem proteksi terintegrasi dan *cyber security monitoring tools* dalam rangka menjaga keamanan informasi perusahaan. Program ini mencakup kegiatan pemantauan implementasi kontrol keamanan, evaluasi tingkat kepatuhan terhadap kebijakan dan standar yang berlaku, serta identifikasi potensi kerentanan yang dapat memengaruhi keamanan sistem informasi. Hasil pelaksanaan monitoring digunakan sebagai dasar penyusunan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan pengendalian keamanan informasi secara berkelanjutan guna meminimalkan risiko keamanan siber, menjaga ketersediaan layanan, serta mendukung keberlangsungan operasional perusahaan;
- b. Pencapaian Monitoring Kontrol Keamanan Siber sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 terealisasi sebesar **50%** dan lebih tinggi 25% dari pencapaian pada Triwulan I Tahun 2026, adapun realisasi anggaran telah mencapai **60,99%** atau lebih besar 41,61% dari realisasi Triwulan I Tahun 2026.

2.2.2 Realisasi Program Aspirasi Pemegang Saham

1. Penyusunan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI)

a. Konsultasi dan Implementasi IT Service Management

- 1) Kegiatan Konsultasi dan Implementasi IT Service Management ini merupakan bagian dari implementasi Rencana Strategis TI (RSTI) 2025-2029 yang bertujuan untuk mentransformasi pengelolaan layanan TI secara menyeluruh, mulai dari tahap *assessment*, hingga penyediaan *platform* teknologi yang mendukung otomatisasi proses melalui penerapan *IT Service Management* (ITSM). Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini juga mencakup pengelolaan aset TI secara terstruktur, meliputi perangkat keras, perangkat lunak, lisensi, dan layanan, melalui pemanfaatan IT Asset Management dan Configuration Management Database (CMDB) untuk mencatat, memetakan, serta memonitor konfigurasi dan keterkaitan aset. Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan layanan, mendukung pengendalian perubahan, penanganan insiden, analisis dampak, serta memastikan efektivitas operasional dan optimalisasi sumber daya TI secara berkelanjutan;
- 2) Pencapaian Konsultasi dan Implementasi IT Service Management sampai dengan Triwulan II tahun 2026 terealisasi sebesar **35%** dan lebih tinggi 5% dibandingkan realisasi pada Triwulan I Tahun 2026, adapun realisasi anggaran masih **0%** dikarenakan masih dalam tahap proses pengadaan.

b. Pengukuran Tingkat Kematangan TI (IT Maturity Level)

- 1) Pelaksanaan pengukuran tingkat kematangan Teknologi Informasi (TI) merupakan upaya untuk menilai tingkat kematangan tata kelola dan kapabilitas TI secara komprehensif dengan mengacu pada *framework* COBIT. Pengukuran ini dilaksanakan oleh pihak independen setiap 2 (dua) tahun guna memastikan objektivitas hasil penilaian. Hasil asesmen tersebut menjadi dasar dalam penyusunan prioritas peningkatan kapabilitas TI, penguatan tata kelola, serta penetapan arah transformasi digital perusahaan secara berkelanjutan;
- 2) Pencapaian pengukuran tingkat kematangan Teknologi Informasi (TI) sampai dengan Triwulan II tahun 2026 terealisasi sebesar **20%** dan lebih tinggi 20% dibandingkan realisasi pada Triwulan I Tahun 2026, adapun realisasi anggaran masih **0%** dikarenakan masih dalam tahap proses pengadaan.

c. Implementasi Kendali Kebocoran Data Email

- 1) Implementasi Kendali Kebocoran Data Email merupakan bagian dari inisiatif *Data Loss Prevention* (DLP) yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan data perusahaan dari risiko kebocoran informasi, khususnya melalui media surat elektronik (email). Kegiatan ini meliputi penerapan mekanisme

pengendalian keamanan, pemantauan lalu lintas data, serta kebijakan pencegahan kebocoran informasi guna memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data perusahaan. Implementasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan informasi, mendukung kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan internal, serta memitigasi risiko operasional yang timbul akibat potensi kebocoran data;

- 2) Pencapaian Implementasi Kendali Kebocoran Data Email sampai dengan Triwulan II tahun 2026 terealisasi sebesar **20%** dan lebih tinggi 20% dibandingkan realisasi pada Triwulan I Tahun 2026, adapun realisasi anggaran masih **0%** dikarenakan masih dalam tahap proses persiapan pengadaan.

d. Managed Service Infrastruktur Jaringan Komunikasi Penerbangan Nasional

- 1) *Managed Service* Infrastruktur Jaringan Komunikasi Penerbangan Nasional merupakan program pengelolaan layanan infrastruktur jaringan komunikasi yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan, keandalan, keamanan, dan keberlanjutan jaringan komunikasi sebagai pendukung utama operasional pelayanan navigasi penerbangan di seluruh wilayah kerja Perum LPPNPI. Dalam rangka memastikan keselamatan, efisiensi, dan keteraturan lalu lintas penerbangan di wilayah udara Indonesia, Perum LPPNPI terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan komunikasi penerbangan yang mendukung layanan *Air Traffic Management* (ATM) secara menyeluruh melalui penyediaan layanan jaringan secara terkelola (*managed service*) yang mencakup pemantauan, pemeliharaan, optimalisasi kinerja, peningkatan kapasitas, serta penguatan keamanan jaringan. Strategi pengembangan infrastruktur tersebut diarahkan pada penerapan teknologi jaringan modern, seperti *Software-Defined Wide Area Network* (SD-WAN), *Next-Generation Multiprotocol Label Switching* (Next-Generation MPLS), dan jaringan berbasis *Internet Protocol* (IP) yang tersegmentasi untuk mendukung komunikasi operasional yang bersifat kritis. Selain itu, peningkatan redundansi jaringan, penerapan mekanisme *disaster recovery*, serta penguatan sistem keamanan siber terus dilakukan guna menjamin kontinuitas layanan operasional dan meminimalkan risiko gangguan terhadap pelayanan navigasi penerbangan. Pelaksanaan program ini juga didukung melalui sinergi dan integrasi dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain TNI Angkatan Udara, operator bandar udara, maskapai penerbangan, Kementerian Perhubungan, BMKG, BASARNAS, penyedia jaringan global, negara tetangga, serta mitra teknologi, sehingga tercipta ekosistem komunikasi penerbangan yang terintegrasi dan andal.

Melalui pengelolaan layanan yang terstandarisasi dan kolaboratif, *Managed Service* Infrastruktur Jaringan Komunikasi Penerbangan Nasional diharapkan mampu meningkatkan keandalan dan ketersediaan jaringan komunikasi penerbangan, mendukung efektivitas pengawasan lalu lintas udara, mempercepat respons terhadap kondisi operasional maupun situasi kritis, serta mendukung transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan navigasi penerbangan secara berkelanjutan;

- 2) Pencapaian *Managed Service* Infrastruktur Jaringan Komunikasi Penerbangan Nasional sampai dengan Triwulan II tahun 2026 terealisasi sebesar **95,80%** dan lebih tinggi 9,8% dibandingkan realisasi pada Triwulan I Tahun 2026, adapun realisasi anggaran masih **0%** dikarenakan belum terdapat pembayaran pada tahap implementasi.

e. Langganan CRV

- 1) Kegiatan Langganan *Common Aeronautical Virtual Private Network (CRV)* merupakan penyediaan layanan jaringan komunikasi khusus (*dedicated network*) yang menghubungkan *Air Navigation Service Provider (ANSP)* di kawasan Asia Pasifik melalui infrastruktur jaringan yang disediakan oleh PCCW Global sebagai penyedia layanan yang ditunjuk oleh *International Civil Aviation Organization (ICAO)*. Layanan CRV berfungsi sebagai media komunikasi yang aman, andal, dan terintegrasi untuk mendukung pertukaran data dan komunikasi suara antar-ANSP dalam rangka penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan. Jaringan ini memfasilitasi komunikasi berbagai sistem dan peralatan *Communication, Navigation, Surveillance*, dan *Aeronautical Information (CNS/AIM)* yang digunakan dalam operasional pelayanan navigasi penerbangan, sehingga mendukung kelancaran koordinasi lintas negara, meningkatkan keandalan layanan komunikasi penerbangan, serta menjamin keselamatan, efisiensi, dan keberlangsungan pelayanan navigasi penerbangan di wilayah udara Indonesia maupun kawasan regional Asia Pasifik;
- 2) Pencapaian Langganan *Common Aeronautical Virtual Private Network (CRV)* sampai dengan Triwulan II tahun 2026 terealisasi sebesar **50%** dan lebih tinggi 25% dibandingkan realisasi pada Triwulan I Tahun 2026, adapun realisasi anggaran terserap **50%** pada Triwulan II tahun 2026 dan lebih tinggi 25% dibandingkan realisasi pada Triwulan I Tahun 2026 dikarenakan pembayaran langganan dilakukan secara perbulan.

f. Managed Service Perangkat CRV

- 1) Managed Service Perangkat *Common Aeronautical Virtual Private Network (CRV)* merupakan layanan pengelolaan perangkat jaringan yang bertujuan

untuk memastikan seluruh perangkat pendukung layanan CRV senantiasa berada dalam kondisi optimal, andal, dan siap beroperasi melalui dukungan pemeliharaan, pemantauan (*monitoring*), penanganan gangguan (*troubleshooting*), serta dukungan teknis oleh pihak ketiga sebagai penyedia layanan. Program ini mencakup penyediaan jasa sewa dan pengelolaan perangkat jaringan (*managed services*) guna mendukung implementasi CRV di Perum LPPNPI sehingga mampu memenuhi kebutuhan konektivitas perangkat berbasis *Internet Protocol* (IP) secara berkelanjutan. Melalui layanan terkelola tersebut, risiko gangguan terhadap konektivitas data aeronautika dapat diminimalkan sehingga mendukung kelancaran operasional pelayanan navigasi penerbangan. Selain itu, program ini mendukung integrasi jaringan telekomunikasi antar *Air Navigation Service Provider* (ANSP) di kawasan Asia Pasifik melalui jaringan CRV serta menjamin ketersediaan perangkat telekomunikasi yang diperlukan untuk koordinasi, pertukaran data, dan komunikasi operasional antar-ANSP sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh *International Civil Aviation Organization* (ICAO), sehingga mampu meningkatkan keandalan, keamanan, dan kontinuitas layanan komunikasi penerbangan secara regional;

- 2) Pencapaian kegiatan Langganan *Common Aeronautical Virtual Private Network* (CRV) sampai dengan Triwulan II tahun 2026 terealisasi sebesar **55%**, capaian tersebut disebabkan telah dilaksanakannya *repeat order* layanan yang mulai berlaku pada bulan April 2026 untuk periode kontrak tahun 2026-2029, yang sebelumnya pada Triwulan I tahun 2026 realisasi fisik tercatat sebesar 100% karena merupakan penyelesaian pelaksanaan kontrak layanan periode tahun 2023-2026. Sementara itu, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 telah terserap sebesar **25%** mengingat mekanisme pembayaran biaya langganan dilakukan secara semesteran sesuai dengan ketentuan dalam kontrak layanan.

g. Perpanjangan Lisensi *Private Cloud*

- 1) Kegiatan Perpanjangan Lisensi *Private Cloud* merupakan kegiatan perpanjangan masa berlaku lisensi perangkat lunak beserta layanan dukungan (*support/maintenance*) yang digunakan pada infrastruktur *Private Cloud* Perum LPPNPI. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan legalitas penggunaan perangkat lunak, keberlanjutan akses terhadap fitur dan fungsi sistem, serta ketersediaan pembaruan (*update*) dan dukungan teknis resmi dari penyedia. Melalui perpanjangan lisensi tersebut, keamanan sistem dan stabilitas operasional infrastruktur *Private Cloud* tetap terjaga sehingga mampu mendukung keberlangsungan operasional (*business continuity*),

meminimalkan risiko berakhirnya masa berlaku lisensi (*expired*), serta mencegah terjadinya pembatasan layanan yang dapat memengaruhi kinerja layanan Teknologi Informasi di lingkungan Perum LPPNPI;

- 2) Pencapaian Perpanjangan Lisensi *Private Cloud* sampai dengan Triwulan II tahun 2026 terealisasi sebesar **100%** dan lebih tinggi 10% dibandingkan realisasi pada Triwulan I Tahun 2026, adapun realisasi anggaran terserap **100%** pada Triwulan II tahun 2026 dikarenakan pembayaran langganan dilakukan pada tahun pertama.

h. Manajemen dan Peningkatan Kapasitas Backup Data Perusahaan

- 1) Kegiatan Manajemen dan Peningkatan Kapasitas *Backup* Data Perusahaan merupakan bagian dari implementasi Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) Tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola dan kapabilitas pengelolaan *backup* data sebagai upaya mendukung transformasi digital perusahaan. Seiring dengan meningkatnya ketergantungan perusahaan terhadap sistem Teknologi Informasi dalam mendukung proses operasional dan layanan bisnis, data menjadi salah satu aset strategis yang memiliki peran penting dalam menjamin keberlangsungan operasional perusahaan. Oleh karena itu, data yang tersimpan pada berbagai sistem aplikasi, infrastruktur server, dan media penyimpanan perlu dikelola serta dilindungi secara optimal agar tetap tersedia, aman, memiliki integritas, dan dapat dipulihkan secara cepat apabila terjadi gangguan sistem, kesalahan operasional, maupun insiden keamanan informasi. Dalam rangka memperkuat perlindungan data perusahaan, Perum LPPNPI melaksanakan kegiatan Jasa Konsultansi Manajemen dan Peningkatan Kapasitas *Backup* Data Perusahaan yang mencakup penyusunan kajian, perancangan arsitektur *backup* dan *disaster recovery*, penyusunan tata kelola, serta penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan *backup* dan pemulihan data. Melalui kegiatan ini diharapkan terwujud sistem pengelolaan *backup* data yang terstandarisasi, andal, dan selaras dengan kebutuhan operasional perusahaan, sehingga mampu mendukung keberlangsungan layanan (*business continuity*), meningkatkan ketahanan infrastruktur Teknologi Informasi, serta meminimalkan risiko kehilangan data akibat gangguan maupun bencana;
- 2) Pencapaian Manajemen dan Peningkatan Kapasitas Backup Data Perusahaan sampai dengan Triwulan II tahun 2026 terealisasi sebesar **0%**, dikarenakan pekerjaan tersebut ditargetkan akan dimulai pada akhir Triwulan III sehingga belum ada realisasi fisik maupun anggaran pada pekerjaan ini.

i. Pengujian Disaster Recovery

- 1) Pengujian *Disaster Recovery* merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memastikan kesiapan Perusahaan dalam menghadapi potensi gangguan, kegagalan sistem, maupun bencana yang dapat memengaruhi keberlangsungan layanan Teknologi Informasi. Kegiatan ini mencakup simulasi proses pemulihan layanan (*service recovery*), validasi mekanisme *failover*, pengujian integritas dan konsistensi data hasil pemulihan, serta evaluasi terhadap kesiapan infrastruktur, sumber daya, dan prosedur operasional yang mendukung pelaksanaan *Disaster Recovery Plan* (DRP). Melalui pengujian ini, Perusahaan dapat memastikan bahwa mekanisme pemulihan telah berjalan secara efektif, target waktu pemulihan (*Recovery Time Objective/RTO*) dan target titik pemulihan data (*Recovery Point Objective/RPO*) dapat dipenuhi, serta mengidentifikasi area yang memerlukan penyempurnaan guna meningkatkan ketahanan sistem, meminimalkan risiko gangguan operasional, dan menjamin keberlangsungan layanan (*business continuity*);
- 2) Pencapaian Pengujian *Disaster Recovery* sampai dengan Triwulan II tahun 2026 terealisasi sebesar **0%**, dikarenakan pekerjaan tersebut ditargetkan akan dimulai pada akhir Triwulan III sehingga belum ada realisasi fisik maupun anggaran pada pekerjaan ini.

2. Realisasi Investasi

Pada Tahun 2026, Perum LPPNPI melaksanakan beberapa program investasi teknologi informasi sebagai bagian dari implementasi Rencana Strategis TI (RSTI) 2025–2029 yang diarahkan untuk mendukung transformasi digital, peningkatan keandalan infrastruktur, serta penguatan keamanan sistem informasi Perusahaan.

Program investasi yang dilaksanakan mencakup penguatan kapasitas komputasi untuk pengembangan *Artificial Intelligence (AI)* melalui pengadaan *Graphic Processing Unit (GPU)*, guna mendukung kebutuhan analisis data, otomatisasi proses, dan pengembangan model AI/ML. Selain itu, Perusahaan juga melaksanakan program peremajaan perangkat jaringan, khususnya terhadap perangkat yang telah memasuki akhir masa dukungan (*end of support*), dengan perangkat generasi terbaru yang memiliki kemampuan keamanan dan dukungan pembaruan yang lebih baik.

Kedua program investasi tersebut dirancang untuk memastikan kesiapan infrastruktur teknologi informasi dalam mendukung kebutuhan operasional Perusahaan yang semakin kompleks, sekaligus meningkatkan efisiensi, skalabilitas, dan resiliensi layanan digital.

a. Pengadaan *Graphic Processing Unit* Untuk Mendukung Pengembangan Aplikasi *Artificial Intelligence*

- 1) Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Rencana Strategis TI (RSTI) 2025-2029 dalam mendukung transformasi digital dan penguatan kapasitas teknologi informasi Perum LPPNPI. Pengadaan GPU ditujukan untuk meningkatkan kemampuan infrastruktur komputasi agar mampu mendukung kebutuhan analisis data, otomatisasi proses, serta pengembangan teknologi berbasis *Artificial Intelligence* (AI) dan *Machine Learning* (ML), khususnya untuk mendukung *data-driven decision making*. Saat ini Perum LPPNPI telah memiliki infrastruktur *Hyper-Converged Infrastructure* (HCI) yang berfungsi sebagai *platform* virtualisasi dan penyimpanan data perusahaan. Namun, kapasitas komputasi yang tersedia masih berbasis CPU sehingga belum optimal untuk proses pelatihan model AI/ML yang membutuhkan akselerasi GPU. Keterbatasan tersebut berdampak pada proses pengolahan data dan pengembangan model AI yang belum efisien;
- 2) Pada Triwulan II, dokumen teknis pendukung pengadaan telah disampaikan untuk proses pengadaan lebih lanjut, dikarenakan masih berjalannya proses administrasi persetujuan investasi Tahun 2026. Untuk itu, dalam upaya percepatan Perum LPPNPI telah melakukan pembahasan finalisasi terkait Persetujuan Investasi dengan Direktorat Navigasi Penerbangan pada 25 Juni 2026.

b. Penggantian Perangkat *Application Delivery and Security*

- 1) Kegiatan ini juga merupakan bagian dari implementasi Rencana Strategis TI (RSTI) 2025-2029. Pengadaan dilakukan dalam rangka peremajaan perangkat jaringan yang telah memasuki akhir masa dukungan (*end of support*) sesuai *product life cycle* dari prinsipal. Perangkat pengganti direncanakan menggunakan versi teknologi terbaru yang memiliki fitur sesuai perkembangan kebutuhan operasional dan standar keamanan informasi Perusahaan. Mengingat fungsi perangkat jaringan sangat strategis dalam menjaga keamanan dan keandalan sistem informasi, dukungan pembaruan keamanan (*security update*) dari prinsipal menjadi salah satu persyaratan utama;
- 2) Pada Triwulan II, dokumen teknis pendukung pengadaan telah disampaikan untuk proses pengadaan lebih lanjut, dikarenakan masih berjalannya proses administrasi persetujuan investasi Tahun 2026. Untuk itu, dalam upaya percepatan Perum LPPNPI telah melakukan pembahasan finalisasi terkait Persetujuan Investasi dengan Direktorat Navigasi Penerbangan pada 25 Juni 2026.

3. Program Keamanan Siber

- a. Melakukan monitoring kontrol keamanan siber secara periodik melalui kegiatan *weekly meeting* dan *monthly meeting*. Kontrol monitoring melalui *Security Information & Event Management* (SIEM) secara *managed service* ini dilakukan selama periode tahun 2026. Proteksi keamanan siber diperkuat dengan implementasi *Endpoint Detection & Response* (EDR) yang di dalamnya sudah termasuk antivirus dan *malware protection*; dan
- b. Pada Triwulan II jumlah insiden siber yang menyebabkan berhentinya seluruh layanan dan/atau kebocoran data pribadi pada aplikasi kritikal adalah **0**.

2.2.3 Tindak Lanjut Hasil Audit atau Penilaian TI

Audit TI secara konsisten dilaksanakan setiap tahun sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses audit laporan keuangan perusahaan. Pendekatan terintegrasi ini memastikan bahwa tidak hanya aspek finansial, tetapi juga sistem dan kontrol TI yang mendukung operasional keuangan akan dievaluasi secara menyeluruh. Audit TI tahunan ini bertujuan untuk menilai efektivitas kontrol internal TI, mengidentifikasi potensi risiko keamanan informasi, serta mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku.

Pada tahun 2025, hasil pelaksanaan audit TI menunjukkan **tidak terdapat temuan** signifikan yang berdampak terhadap keandalan sistem maupun integritas data keuangan perusahaan. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat Perum LPPNPI dalam menjaga tata kelola TI yang efektif, memperkuat sistem pengendalian internal, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku. Selain itu, hal ini juga menjadi indikator bahwa upaya peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam pengelolaan TI telah diimplementasikan secara konsisten dan memberikan hasil yang optimal dalam mendukung kinerja perusahaan.

2.2.4 Realisasi Pembiayaan TI

Realisasi pembiayaan Program CAPEX pada Triwulan II Tahun 2026 **belum terealisasi**, karena 2 (dua) program yang diusulkan sebagai bagian dari CAPEX Perum LPPNPI masih dalam tahap proses pengadaan dan menunggu persetujuan dari Kementerian Perhubungan. Sementara itu, untuk program OPEX TI dari total 18 (delapan belas) program kerja yang tercantum dalam RKAP Tahun 2026, realisasi anggaran hingga Triwulan II telah mencapai sebesar **18,38%**.

Tabel II.4
Realisasi Pembiayaan Triwulan II 2026

Kategori Pembiayaan TI	Tahun 2026		Rasio
	Rencana (Rp. Juta)	TW II (Rp. Juta)	
1	2	3	4 = 3 : 2
1. <i>Capital Expenditure (CAPEX)</i> TI	15.382	0	0,00%
2. <i>Operational Expenditure (OPEX)</i> TI	158.824	29.198	18,38%

2.3 KEGIATAN RISET, PENGEMBANGAN, DAN INOVASI

Pada bagian ini akan dituangkan progres kegiatan riset, pengembangan, dan inovasi, termasuk kegiatan yang mengarah pada pengembangan bisnis perusahaan di tahun 2026. Kegiatan tahun 2026 berfokus pada pengembangan aplikasi, dan untuk beberapa program riset serta inovasi saat ini masih dalam proses identifikasi dan kesiapan. Adapun beberapa program pengembangan aplikasi yang dilakukan sebagai berikut.

1. **FF-ICE/R2 Trial and Demo**

Dalam rangka mendukung transformasi layanan navigasi penerbangan menuju implementasi *Trajectory Based Operations* (TBO) serta selaras dengan arah pengembangan *System Wide Information Management* (SWIM) dan *Flight and Flow Information for a Collaborative Environment* (FF-ICE) di kawasan regional, Perum LPPNPI pada tahun 2026 melaksanakan program kerja FF-ICE/R2 Trial dan Lab Demonstration. Program ini merupakan kelanjutan dari inisiatif dan capaian Perum LPPNPI pada tahap sebelumnya dalam menyiapkan fondasi jaringan, infrastruktur, layanan, serta integrasi sistem pelayanan navigasi penerbangan yang mendukung pertukaran data operasional secara digital, terstruktur, dan interoperabel.

Pelaksanaan program kerja dimaksud juga mencerminkan komitmen Perum LPPNPI dalam memperkuat kesiapan nasional terhadap target implementasi SWIM dan FF-ICE regional yang semakin mendesak. Dalam konteks tersebut, Perum LPPNPI tidak hanya berperan sebagai pihak yang mempersiapkan kapabilitas internal, namun juga sebagai institusi yang secara aktif mendorong kolaborasi dan keterlibatan para pemangku kepentingan, khususnya di Indonesia, guna mendukung terbentuknya ekosistem pertukaran data dan layanan penerbangan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Sebagai bagian dari program kerja tahun 2026 tersebut, Perum LPPNPI akan bertindak sebagai tuan rumah untuk dua agenda strategis berskala internasional sebagai bagian dari program APAC TBO *Pathfinder Project*, yaitu FF-ICE/R2 Trial yang direncanakan dilaksanakan pada November 2026 dan FF-ICE/R2 Lab Demonstration yang direncanakan dilaksanakan pada Maret 2027. Penyelenggaraan kedua kegiatan

tersebut di Indonesia merupakan bentuk kepercayaan sekaligus pengakuan atas kesiapan dan peran aktif Perum LPPNPI dalam mendukung agenda transformasi navigasi penerbangan di tingkat regional.

Program FF-ICE/R2 *Trial* dan *Lab Demonstration* diarahkan untuk menguji kesiapan pertukaran dan pengelolaan data penerbangan sesuai dengan konsep SWIM yang mendukung pertukaran informasi penerbangan secara real-time pada fase *en-route*. Melalui pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan terbangun validasi yang lebih komprehensif terhadap aspek operasional, teknis, dan koordinatif antarpemangku kepentingan, termasuk dalam integrasi data meteorologi, data operasional penerbangan, serta kebutuhan interoperabilitas sistem antarorganisasi.

Dengan penyelenggaraan kedua agenda tersebut, Perum LPPNPI menegaskan posisinya sebagai ANSP yang proaktif, adaptif, dan berorientasi ke depan dalam mendukung implementasi FF-ICE dan SWIM, baik pada tatanan nasional maupun regional. Selain itu, program ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dengan seluruh stakeholder terkait, meningkatkan kepercayaan terhadap kesiapan Indonesia dalam mendukung implementasi TBO, serta mendorong terwujudnya layanan navigasi penerbangan yang semakin aman, efisien, interoperabel, dan berkelanjutan.

2. Implementasi System Wide Information Management (SWIM)

Implementasi *System Wide Information Management* (SWIM) merupakan salah satu program strategis Perum LPPNPI dalam mendukung modernisasi layanan navigasi penerbangan serta sebagai enabler utama bagi *penerapan Trajectory Based Operations* (TBO). SWIM dirancang sebagai kerangka kerja untuk memungkinkan integrasi dan pertukaran data secara digital, *real-time*, terstandarisasi, aman, dan interoperabel antar pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun regional. Melalui implementasi SWIM, Perum LPPNPI diharapkan dapat memperkuat keterhubungan layanan dan pertukaran informasi aeronautika, meteorologi, serta data operasional penerbangan secara lebih efektif guna mendukung pengambilan keputusan yang cepat, akurat, dan kolaboratif.

Pada tahun 2026, Perum LPPNPI melanjutkan persiapan implementasi SWIM melalui penguatan aspek infrastruktur, jaringan, dan layanan. Dari sisi infrastruktur, Perum LPPNPI telah menyiapkan *data center* beserta perangkat keamanan yang diperlukan sebagai fondasi penyelenggaraan layanan SWIM. Dari sisi konektivitas regional, Perum LPPNPI telah terhubung dengan *Common Aeronautical VPN* (CRV) sebagai jaringan yang menghubungkan antarnegara di kawasan regional. Sementara itu, pembangunan jaringan nasional saat ini sedang dalam tahap instalasi dan ditargetkan selesai pada tahun 2026, sehingga seluruh pemangku kepentingan

nasional dapat saling terhubung dan berinteraksi dengan *stakeholder* terkait lainnya dalam ekosistem SWIM.

Pada aspek layanan, salah satu fokus utama program kerja ini adalah pelaksanaan uji coba integrasi data OPMET dengan menggunakan model IWXXM versi 2025-2 sebagai versi terkini yang relevan dengan kebutuhan interoperabilitas data meteorologi penerbangan. Dalam pelaksanaan uji coba tersebut, layanan dan data OPMET akan disediakan oleh BMKG sebagai pemangku kepentingan utama di bidang meteorologi. Uji coba integrasi tersebut ditargetkan dapat tercapai pada Triwulan III 2026 sebagai bagian dari langkah konkret dalam mewujudkan implementasi SWIM secara bertahap, terstruktur, dan operasional.

Melalui pelaksanaan program ini, Perum LPPNPI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong implementasi SWIM secara aktif, baik dalam lingkup internal maupun bersama seluruh pemangku kepentingan terkait, khususnya di Indonesia. Inisiatif ini diharapkan dapat mempercepat terbentuknya ekosistem pertukaran data penerbangan yang terintegrasi, memperkuat interoperabilitas layanan antar instansi, serta menjadi fondasi penting dalam mendukung implementasi TBO dan transformasi layanan navigasi penerbangan nasional secara berkelanjutan.

2.4 HUKUM

2.4.1. Percepatan Proses Balik Nama Sertifikasi Hak Atas Tanah yang Berasal dari Pengalihan PT. Angkasa Pura I (Persero) dan PT. Angkasa Pura II (Persero)

Terdapat tanah yang berasal dari pengalihan PT. Angkasa Pura I (Persero) dan PT. Angkasa Pura II (Persero) yang sekarang menjadi PT. Angkasa Pura Indonesia dan belum dilakukan proses balik nama (sertifikasi hak atas lahan masih atas nama PT. Angkasa Pura I (Persero) dan PT. Angkasa Pura II (Persero)).

Melalui Surat EVP of *Accounting and Asset Division* No. 5362/KA/00/PGD.06/X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023 perihal Sertifikasi Aset Tanah Perum LPPNPI, sejumlah cabang (JATSC, MATSC, Medan, Palembang, Yogyakarta, Denpasar, Balikpapan, Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjungpinang, Bandung, Semarang, Banjarmasin, dan Ambon) diminta untuk melakukan proses perhitungan biaya atas balik nama melalui koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) di lokasi tanah untuk tanah-tanah yang sertifikat tanahnya bukan atas nama Perum LPPNPI, dan mengumpulkan informasi mengenai tata cara pengurusan sertifikat baru.

Terdapat beberapa kendala pada cabang saat berkoordinasi dengan Notaris dan BPN di lokasi masing-masing, di antaranya:

1. Terkait dengan proses balik nama, dibutuhkan surat kuasa dari Direktur PT. Angkasa Pura I (Persero), PT. Angkasa Pura II (Persero), dan Perum LPPNPI kepada General

Manager Cabang PT. Angkasa Pura I (Persero), PT. Angkasa Pura II (Persero), dan Perum LPPNPI;

2. Arahan yang disampaikan oleh BPN, yaitu:
 - a. Agar pihak Perum LPPNPI mengirimkan surat ke Kementerian BUMN perihal pengambilalihan Hak Pengelolaan atas tanah tersebut. Selanjutnya, pihak pemilik hak sebelumnya PT. Angkasa Pura I (Persero) atau PT. Angkasa Pura II (Persero) bersurat kepada Kementerian BUMN perihal pengembalian Hak Pengelolaan. Setelah melalui proses dimaksud, Notaris dan BPN setempat dapat menentukan langkah selanjutnya dan melakukan estimasi biaya balik nama;
 - b. Perubahan status wilayah dari kabupaten ke kota karena perubahan status daerah, dan untuk biaya tidak dapat di perhitungkan sampai dengan dilakukan perubahan status wilayah; dan
 - c. BPN daerah meminta surat turunan dari Kementerian ATR/BPN untuk proses balik nama.
3. Ketidaksanggupan Notaris PPAT di beberapa Cabang Perum LPPNPI untuk mengurus proses balik nama antara perusahaan BUMN.

Guna penyelesaian kendala di beberapa cabang, pada tahun 2024 *Accounting and Asset Division* melakukan koordinasi secara terpusat dengan Kementerian ATR/BPN. Pada tahun 2025, telah dilakukan pembahasan bersama antara Direktur Perum LPPNPI, Menteri, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di mana dihasilkan keputusan bahwa Kementerian ATR/BPN mendukung penuh terhadap proses balik nama lahan hasil dari pengalihan PT. Angkasa Pura I (Persero) dan PT. Angkasa Pura II (Persero) kepada Perum LPPNPI. Perum LPPNPI juga telah menyampaikan surat kuasa yang ditandatangani oleh Direktur Utama kepada 14 (empat belas) general manager sebagai dasar kewenangan dalam pengurusan proses balik nama. Selain itu telah disampaikan agar cabang dapat berkoordinasi dengan BPN setempat serta memenuhi seluruh kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan, dan apabila terdapat kendala administrasi serta legalisasi lainnya maka proses pengurusan dapat dibantu melalui Notaris yang ditunjuk oleh Kementerian ATR/BPN.

Pada 19 November 2025, PT. Angkasa Pura Indonesia juga telah mengeluarkan surat pernyataan terkait aset-aset yang tersebut pada PP 46/2018 bahwa telah dilakukan serah terima fisik dan dokumen kepemilikan tanah kepada Perum LPPNPI serta telah melakukan penghapusbukuan pencatatan aset tanah pada PT. Angkasa Pura Indonesia.

Adapun sampai dengan Triwulan II 2026 telah dilakukan proses balik nama untuk lokasi MATSC, Medan, dan Balikpapan.

2.4.2. Rencana Penghapusbukuan Aset Tetap

Perum menjalankan tugas dan fungsinya, Perum LPPNPI didukung dengan aset tetap senilai Rp2.584.389.040.203,- (nilai bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan) per 31 Desember 2023. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat aset-aset yang sudah tidak mendukung operasional karena mengalami *aging*, rusak (tidak dapat diperbaiki dan digunakan kembali), tidak update terhadap teknologi, serta telah habis umur ekonomisnya. Selain itu, terdapat aset-aset yang tidak ditemukan karena hilang, kebakaran, kecurian, dan terjadinya bencana alam.

Guna mendukung manajemen aset yang baik, Perum LPPNPI bermaksud akan melakukan penghapusbukuan aset tetap yang sudah tidak mendukung kegiatan operasional perusahaan, yaitu dengan total aset tetap sebanyak 1609 item dengan nilai perolehan sebesar Rp79.391.374.450,- dan nilai buku per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,- (telah dilakukan *impairment* pada tahun 2023). Adapun 1.609 item tersebut terdiri dari:

1. 509 *item* (aset tetap bergerak dengan umur ekonomis $\leq$ 5 tahun) dengan persetujuan Dewan Pengawas; dan
2. 1100 *item* (aset tetap tidak bergerak dan aset tetap bergerak dengan umur ekonomis $>$ 5 tahun) dengan persetujuan Menteri BUMN.

Selain dapat merapikan data pencatatan aset, penghapusbukuan aset tetap dimaksud pada akhirnya mendukung efisiensi beban operasional, pemeliharaan, optimalisasi pemanfaatan kapasitas tempat/gudang, dan tidak menutup kemungkinan akan mendapat tambahan nilai ekonomis jika aset tetap yang akan dihapusbukukan dapat dijual.

Progres atas rencana penghapusbukuan aset tetap sampai dengan Triwulan II tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Aset tetap bergerak yang memiliki umur ekonomis $\leq$ 5 tahun (sejumlah 509 *item*) telah disetujui oleh Dewan Pengawas serta telah disahkan dalam Keputusan Direksi Perum LPPNPI Nomor : KEP.1395/U/LPPNPI/PGD.06/VI/2025 tanggal 12 Juni 2025 tentang Penghapusbukuan Aset Tetap dengan Umur Ekonomis sampai dengan 5 (Lima) Tahun di Lingkungan Perum LPPNPI;
2. Aset bergerak dengan umur ekonomis $>$ 5 tahun dan aset tidak bergerak masih dalam tahap perbaikan kajian untuk selanjutnya akan disetujui oleh Menteri BUMN; dan
3. Semula jumlah aset bergerak dengan umur ekonomis $>$ 5 tahun dan aset tidak bergerak yang diusulkan berjumlah 1100 item, namun terdapat beberapa penyesuaian sebagai berikut :
 - a. Penyesuaian 1 (satu) aset bangunan dan lapangan di Cabang JATSC yang masih digunakan sehingga diusulkan tidak dihapusbukukan;
 - b. Telah dilakukan inventarisasi aset milik Perum LPPNPI sehingga ditemukan terdapat 11 (sebelas) aset yang berupa pekerjaan konsultan sehingga dilakukan kapitalisasi ke aset utamanya;

- c. Dari penyesuaian tersebut, total penghapusbukuan aset bergerak dengan umur ekonomis > 5 tahun dan aset tidak bergerak menjadi sebesar 1088 *item* aset tetap dengan nilai perolehan Rp72.100.932.126,- dan nilai buku sebesar Rp29,-; dan
4. Berdasarkan hasil penyesuaian, terdapat total akhir sebanyak 1088 *item* aset tetap yang diusulkan untuk memperoleh persetujuan penghapusbukuan dari Kepala BP BUMN. Sampai dengan Triwulan II 2026, Perum LPPNPI telah menyampaikan permohonan tanggapan kepada Dewan Pengawas terkait rencana penghapusbukuan aset tetap dimaksud dan telah melakukan pembahasan dengan Komite Audit pada tanggal 16 Maret 2026.
5. Dewan Pengawas telah menyampaikan tanggapan atas rencana penghapusbukuan aset tetap milik Perum LPPNPI dengan umur ekonomis di atas lima tahun pada 17 Maret 2026, dimana terdapat beberapa hal yang perlu dilengkapi serta menjadi perhatian, di antaranya:
 - a. Pakta Integritas yang di tanda tangani oleh Direksi;
 - b. Melengkapi penjelasan mengenai manfaat penghapusbukuan aset secara keseluruhan, serta penyebab deviasi proyeksi keuangan akibat penghapusbukuan;
 - c. Melakukan langkah-langkah mitigasi atas potensi peningkatan beban pajak yang timbul akibat perbedaan nilai buku aset yang dihapusbukuan antara laporan keuangan komersial dan laporan fiskal;
 - d. Melakukan upaya efisiensi terkait alokasi anggaran terutama terkait anggaran pembongkaran bangunan; dan
 - e. Menyusun justifikasi terkait penghapusbukuan baik dari aspek finansial maupun nonfinansial.

2.4.3. Pemutakhiran Peraturan Direksi dan/atau SOP

Pemutakhiran Peraturan Direksi (PER) dan/atau SOP dilakukan sebagai tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN pada bulan Maret 2023. Adapun pemutakhiran PER yang dilakukan sampai Triwulan I tahun 2026 adalah PER tentang Pedoman Manajemen Risiko dan Kepatuhan Perum LPPNPI, PER tentang Pedoman Tata Kelola Perum LPPNPI, serta Peraturan Barang dan Jasa Perum LPPNPI.

Dalam pelaksanaannya, untuk PER tentang Pedoman Manajemen Risiko dan Kepatuhan Perum LPPNPI dilakukan pemisahan dimana yang semula direncanakan menjadi 1 (satu) PER sehingga menjadi 2 PER yaitu PER Pedoman Manajemen Risiko dan PER Kepatuhan Perum LPPNPI. Sampai dengan Triwulan I tahun 2026, PER tentang Pedoman Manajemen Risiko dan PER tentang Kepatuhan telah memperoleh pengesahan pada tanggal 12 Januari 2026 dengan Nomor: PER.001/LPPNPI/I/2026 tentang Pedoman Kepatuhan Perum LPPNPI

dan Nomor: PER.002/LPPNPI/I/2026 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Perum LPPNPI dan PER tentang Pedoman Tata Kelola Perum LPPNPI sudah dalam tahap finalisasi substansi.

Sedangkan untuk progres pemutakhiran atas Peraturan Barang dan Jasa, sebagai dampak atas PER tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum LPPNPI yang baru disahkan pada 20 Desember 2024, pada tahun 2025 sebagai percepatan dan dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan barang dan jasa, Perum LPPNPI telah menerbitkan Keputusan Direksi No. KEP.526/U/LPPNPI/PGD.02/III/2025 tentang Penetapan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kantor Pusat dan AirNav Maintenance Facility (AMF) tanggal 7 Maret 2025. Terkait pemutakhiran Peraturan Barang dan Jasa sampai dengan Triwulan II 2026, telah dilaksanakan rapat terkait pembahasan konsep aturan pengadaan barang/jasa bersama dengan unit pemrakarsa dan unit kerja terkait yang disesuaikan dengan substansi rencana restrukturisasi organisasi, adapun PER tersebut diperkirakan akan selesai atau disahkan pada bulan Juli 2026.

2.5 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

2.5.1. Kekuatan SDM

Jumlah SDM yang dimiliki perusahaan di akhir Triwulan II 2026 adalah 4.859 orang yang terdiri dari 4.705 orang karyawan serta 154 orang non karyawan, dengan rincian pergerakan formasi SDM sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel II.5
Realisasi Jumlah SDM Triwulan II 2026

Deskripsi	2026	2025	Triwulan II 2026		
	RKAP	Realisasi	Penambahan	Pengurangan	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1. Karyawan	4736	4737	2	34	4705
2. Non Karyawan	167	152	15	13	154
Total	4903	4889	17	47	4859

Memperhatikan pergerakan formasi SDM di sepanjang Triwulan II 2026, secara total terdapat penambahan SDM sebanyak 17 (tujuh belas) orang serta pengurangan sebanyak 47 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Karyawan
 - a. Pengurangan 34 orang, yang berasal dari 22 orang pensiun (memasuki Batas Usia Pensiun (BUP)), 5 (lima) orang meninggal dunia, 2 (dua) orang diberhentikan karena pelanggaran disiplin, 3 (tiga) orang pensiun atas permintaan sendiri, serta 2 (dua) orang cuti diluar tanggungan; dan

- b. Penambahan 2 (dua) orang, yaitu 1 (satu) orang karyawan yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan perusahaan dan 1 (satu) orang *prohire* sebagai *Executive Vice President (EVP)* di *Information Technology Division*.
 2. Non Karyawan
 - a. Pengurangan 13 (tiga belas) orang, yaitu 4 (empat) orang kodal yang berlokasi di Cabang JATSC, 5 (lima) orang PKWT yang merupakan tenaga strategis dikarenakan habis kontrak, 1 (satu) orang PKWT fungsi administrasi dan keuangan dikarenakan habis kontrak, 1 (satu) orang karyawan penugasan pada posisi *EVP of Legal, Compliance, and Sustainability Division* sehubungan dengan adanya pemanggilan untuk penugasan kembali di instansi asal, serta 2 (dua) orang kodal yang berlokasi di Cabang Yogyakarta; dan
 - b. Penambahan 15 (lima belas) orang, yaitu 7 (tiga) orang kodal yang berlokasi di Cabang Ambon, Cabang Bandung, dan Cabang Yogyakarta, 1 orang PNS DTS (ditugaskan) yang menjabat sebagai dokter perusahaan, 2 (dua) orang PKWT untuk Program Optimalisasi Penggunaan *ATC Simulator* Tahun 2026 yang bertempat di *Learning and Knowledge Management Division*, serta 5 (lima) orang PKWT di Direktorat Teknik sebagai *Fullstack Developer & Devops Engineer* dalam rangka mendukung program yang menjadi prioritas sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) 2025-2029.

Tabel II.6
Realisasi Jumlah SDM Triwulan II 2026 Berdasarkan Kategori Karyawan

Deskripsi	2025 Realisasi	2026		Deviasi	
		RKAP	Realisasi TW II		
1	2	3	4	5=4-3	6=4-2
Karyawan					
1 Karyawan Eksisting	4717	4743	4738	-5	21
2 Penambahan (Rekrutmen & Alih Status)					
Operasional & Teknik	82	36	0	-36	-82
Administrasi & Keuangan	10	2	0	-2	-10
<i>Prohire</i>	0	0	1	1	1
3 Pensiun	-37	-45	-22	23	15
4 Lain - lain	-35	0	-12	-12	23
Jumlah Karyawan	4737	4736	4705	-31	-32
Non Karyawan					
1 PKWT	9	13	10	-3	1
2 TNI AU	103	102	104	2	1
3 Magang					
Operasional & Teknik	36	48	36	-12	0
Administrasi & Keuangan	2	2	2	0	0
4 Penugasan	2	2	2	0	0
Jumlah Non Karyawan	152	167	154	-13	2
Kekuatan SDM	4889	4903	4859	-44	-30

Berdasarkan tabel di atas, terdapat deviasi atas jumlah SDM tahun 2025 terhadap jumlah SDM pada periode sebelumnya, yaitu dengan rincian pergerakan SDM sebagaimana telah dijelaskan pada awal **Sub Bab 2.5.1**. Selain itu terdapat deviasi atas jumlah SDM Triwulan II 2026 terhadap targetnya, yang secara umum dikarenakan:

1. Deviasi jumlah SDM pada kategori karyawan
 - a. Realisasi kategori pensiun yang masih lebih rendah dari target dalam 1 (satu) tahun atau dengan kata lain proyeksi jumlah pensiun di sepanjang tahun 2026 belum terealisasi sepenuhnya;
 - b. Realisasi atas kategori Lain-Lain yang tidak dapat diprediksi dalam perencanaan kekuatan SDM perusahaan. Adapun kategori Lain-Lain mencakup hal-hal berikut, seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, dan cuti diluar tanggungan perusahaan; dan
 - c. Belum dilakukan pengangkatan atas 36 orang pemagangan fungsi ATC mengingat penerimaan dilakukan pada bulan Oktober 2025, serta 2 (dua) orang pemagangan tenaga disabilitas pada fungsi administrasi dan keuangan yang diterima pada bulan Desember 2025.
2. Deviasi jumlah SDM pada kategori non karyawan, yang secara umum dikarenakan:
 - a. Deviasi pada kategori PKWT di mana terdapat pengurangan 6 (enam) orang dikarenakan habis kontrak serta penambahan 7 (tujuh) orang guna mendukung program prioritas perusahaan;
 - b. Belum dilakukan rekrutmen untuk 48 orang fungsi operasional dan teknik (24 orang fungsi ATC, 12 (dua belas) orang fungsi Teknik, dan 12 (dua belas) orang fungsi ACO) serta 2 (dua) orang tenaga disabilitas fungsi administrasi dan keuangan yang merupakan keberlanjutan dari program rekrutmen tenaga disabilitas; dan
 - c. Terdapat 1 (satu) orang Penugasan mempertimbangkan evaluasi proses bisnis dan kebutuhan perusahaan di periode berjalan.

Rencana rekrutmen fungsi operasional dan teknik sebanyak 48 orang tersebut telah mengacu pada kebutuhan jumlah SDM sebagaimana dalam dokumen *Fatigue Risk Management System* (FRMS) walaupun belum dengan standard level yang optimal, dan saat ini perusahaan masih mengoptimalkan mekanisme *scheduling* dengan tetap memperhatikan kaidah pembatasan waktu bekerja (*scheduling limit*) sesuai parameter *fatigue management* yang telah ditetapkan, alih status, penugasan, serta rekrutmen secara bertahap guna memenuhi kebutuhan personel operasional.

Di tahun 2026, perusahaan akan menyusun kajian atas implementasi *fatigue management* di cabang untuk personel navigasi penerbangan secara menyeluruh sebagai bentuk evaluasi atas implementasi parameter *fatigue management* sesuai dengan operasional

di lapangan dan tindak lanjut atas perubahan regulasi yang berlaku. Adapun dokumen Formulasi Kebutuhan Personel dengan Mempertimbangkan *Fatigue Management* telah disusun di Triwulan II 2026, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel II.7
Rekapitulasi Progres Pemutakhiran Dokumen FRMS di Triwulan II 2026

Fungsi	Keterangan	Catatan Aktivitas Pemutakhiran
1. Personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan (ATC)	Formulasi telah tersedia dalam dokumen Kebutuhan Personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan tahun 2022-2026	Telah dilakukan amandemen dokumen Formulasi Kebutuhan Personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan dengan peningkatan layanan pada Unit Batulicin, Tambolaka, dan Weda Tengah.
2. Personel Pemandu Komunikasi Penerbangan (ACO)	Formulasi telah tersedia dalam dokumen Kebutuhan Personel Pemandu Komunikasi Penerbangan untuk tahun 2023-2027	Telah dilakukan reviu dokumen Formulasi Kebutuhan Personel Pemandu Komunikasi Penerbangan untuk mendukung penyesuaian pelayanan dan penambahan lokasi unit (bandara khusus).
3. Personel Pelayanan Informasi Aeronautika (AIS)	Formulasi telah tersedia dalam dokumen Kebutuhan Personel Pelayanan Informasi Aeronautika untuk tahun 2023-2027	Telah dilaksanakan kegiatan Evaluasi Formulasi Penetapan Personel Pelayanan Informasi Aeronautika berdasarkan manajemen kelelahan di PIA Wilayah Medan oleh DNP.
4. Personel Teknik Telekomunikasi Penerbangan	Formulasi telah tersedia dalam dokumen Kebutuhan Personel Teknik Telekomunikasi Penerbangan untuk tahun 2023-2027	-
5. Personel Perancang Prosedur Penerbangan	Formulasi telah tersedia dalam dokumen Kebutuhan Personel Perancang Prosedur Penerbangan tahun 2025-2029	-

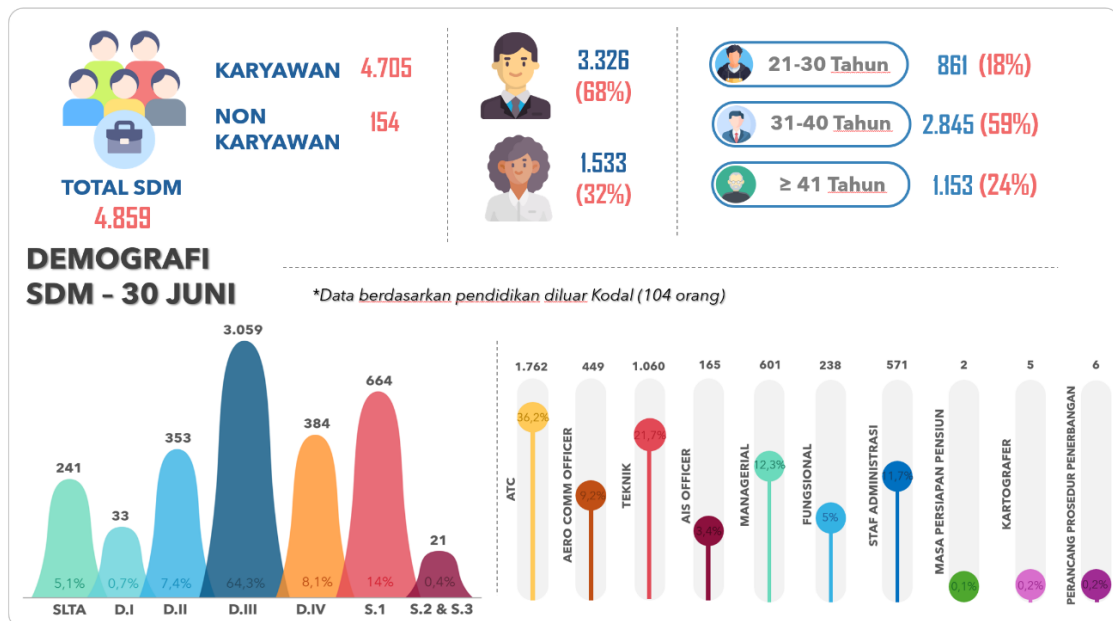
Tingkat *readiness* dari SDM yang dimiliki oleh Perum LPPNPI pada 30 Juni 2026 ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel II.8
Readiness Karyawan Triwulan II 2026 Berdasarkan Fungsi

Fungsi	RKAP 2026	Realisasi TW II 2026			Readiness
		Karyawan	Non Karyawan	Total	
1	2	3	4	5 = 3+4	6 = 5:2
ATC	1836	1622	140	1762	96%
AIS	165	165	0	165	100%
ACO	422	449	0	449	106%
TEKNIK	1099	1060	0	1060	96%
MANAGERIAL	516	601	0	601	116%
FUNGSIONAL	284	233	5	238	84%
STAF	568	562	9	571	101%
MPP	0	2	0	2	-
KARTOGRAFER	5	5	0	5	100%
PERANCANG PROSEDUR PENERBANGAN	8	6	0	6	75%
TOTAL	4903	4705	154	4859	99%

Mengacu pada Tabel II.9, masih terdapat capaian *readiness* yang berada di bawah 100%, di antaranya berada pada fungsi ATC dan Teknik. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa upaya yang dilakukan perusahaan guna tetap menjaga kelancaran operasional adalah optimalisasi mekanisme *scheduling* (dinasan), penugasan, alih status, mutasi, penyesuaian pelayanan menjadi CTAF, pemenuhan SDM melalui alih daya, serta rekrutmen secara bertahap. Sedangkan untuk capaian *readiness* pada jabatan fungsional yang juga di bawah 100% secara umum dikarenakan pengisian jabatan fungsional secara optimal akan dilakukan setelah penetapan PER Nomenklatur Jabatan Fungsional, pegawai yang akan memasuki usia pensiun namun memilih untuk tidak mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP) hingga akhir tahun, serta rencana pelaksanaan program ATC *Secondment*.

Mayoritas SDM sampai dengan 30 Juni 2026 berasal dari fungsi operasional, yaitu fungsi ATC (36,2%) dan diikuti oleh fungsi Teknik (21,7%). Hal ini selaras dengan bisnis inti perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan navigasi penerbangan, dengan komitmen untuk senantiasa menjaga kualitas pelayanan dan keselamatan penerbangan. Sedangkan dari segi usia, mayoritas SDM berasal dari usia 31-40 tahun (59%), di mana demografi ini memberikan dampak positif bagi perusahaan dikarenakan rentang usia tersebut merupakan usia produktif dengan pengalaman kerja yang cukup, etos kerja dan integritas yang tinggi, serta kematangan emosional yang baik.



Gambar II.1
Demografi SDM Per 30 Juni 2026

2.5.2. Pengembangan dan Sertifikasi SDM

Perum LPPNPI senantiasa menerapkan kebijakan pengembangan SDM yang menjadi acuan dalam penyusunan serta pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) serta sertifikasi SDM di tahun 2026. Adapun kebijakan dimaksud adalah:

1. Mendukung investasi dan program strategis perusahaan, termasuk pemenuhan program kementerian;
2. Mendukung pemenuhan temuan audit;
3. Pemenuhan regulasi; dan
4. Pemenuhan dan pengembangan kompetensi karyawan.

Mendasari kebijakan tersebut di atas, selanjutnya Perum LPPNPI menetapkan jenis/sasaran atas program pengembangan dan sertifikasi SDM kedalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Sertifikasi Personel;
2. Pelatihan Pengembangan Pelayanan;
3. Pelatihan Berbasis Kompetensi; dan
4. Dukungan Inisiatif Strategis 2026.

Perum LPPNPI telah melaksanakan sejumlah kegiatan diklat dan sertifikasi sampai dengan Triwulan II 2026 mengacu pada 4 (empat) kategori di atas dengan penyerapan anggaran sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel II.9
Realisasi Penyerapan Anggaran Serta Pelaksanaan Kegiatan Diklat & Sertifikasi TW II 2026

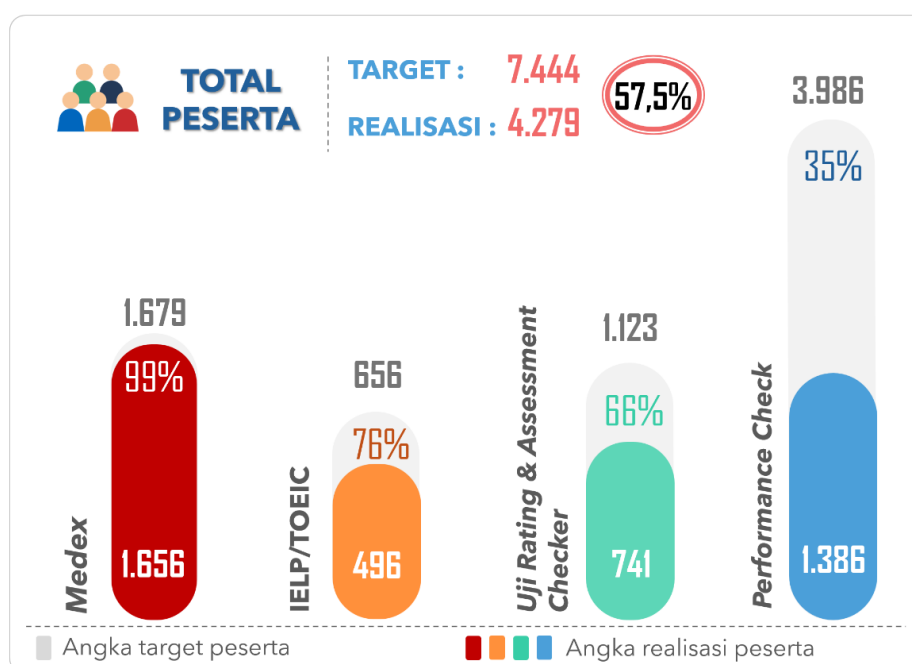
Jenis/Sasaran Diklat	Anggaran			Kegiatan		
	RKAP 2026 (Rp. Juta)	Realisasi Triwulan II 2026 (Rp. Juta)	Rasio	RKAP 2026	Realisasi Triwulan II 2026	Rasio
1	2	3	4 = 3:2	5	6	7 = 6:5
1. Sertifikasi Personel	18,394	14,124	76.78%	128	124	96.88%
2. Pelatihan Pengembangan Pelayanan	23,829	5,286	22.18%	143	47	32.87%
3. Pelatihan berbasis kompetensi	57,148	8,309	14.54%	133	37	27.82%
4. Dukungan Inisiatif Strategis 2026	2,810	386	13.74%	15	1	6.67%
Total	102,181	28,105	27.50%	419	209	49.88%

tingkat penyerapan anggaran hingga Triwulan II 2026 sebesar 27,50% atau terealisasi sebesar Rp28,11 Miliar. Sedangkan dari sisi kegiatan, Perum LPPNPI telah melakukan 209 kegiatan diklat dan sertifikasi dari 419 rencana kegiatan yang telah disusun atau dengan persentase pelaksanaan kegiatan sebesar 49,88%. Pelaksanaan diklat dan sertifikasi Triwulan II 2026 secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

1. Sertifikasi Personel

Sertifikasi Personel dalam hal ini merupakan Sertifikasi Personel Pelayanan Navigasi Penerbangan (PNP) mengacu pada regulasi yang berlaku, di mana Sertifikasi Personel dimaksud terdiri dari 4 (empat) program, yaitu sertifikat *medical examination*, *IELP/TOEIC*, *uji rating & assessment checker*, serta *performance check*. Alokasi anggaran Sertifikasi Personel PNP tahun 2026 sebesar Rp18,39 Miliar dengan realisasi anggaran di Triwulan II 2026 sebesar Rp14,12 Miliar atau terserap 76,78%. Adapun total peserta sertifikasi di Triwulan II 2026 sebanyak 4.279 peserta dari target tahun 2026 sebanyak 7.444 orang atau dengan tingkat capaian sebesar 57,48%. Realisasi jumlah peserta untuk setiap program Sertifikasi Personel di Triwulan II 2026 secara lebih rinci ditunjukkan pada grafik di bawah ini.

Grafik II.5
Realisasi Peserta Sertifikasi Triwulan II 2026



2. Pelatihan Pengembangan Pelayanan

Pelatihan Pengembangan Pelayanan merupakan kegiatan pelatihan dan pendidikan yang mencakup:

- a. Pelatihan Penyembangan Pelayanan, meliputi kegiatan *Factory Training* (FT) dan *Site Training* (ST);
- b. Pelatihan Pengayaan, yang merupakan kegiatan seminar dan *workshop* di semua bidang (operasional dan penunjang/umum);
- c. Pelatihan Pendukung, di antaranya mencakup kegiatan orientasi, pelatihan kepemimpinan, pelatihan purnabakti, serta *change management*; dan
- d. Pengembangan Pendidikan Lanjutan, yaitu pengembangan kompetensi karyawan melalui dukungan tugas belajar dan izin belajar.

Alokasi anggaran Pelatihan Pengembangan Pelayanan tahun 2026 sebesar Rp23,83 Miliar dan telah terealisasi Rp5,29 Miliar di Triwulan II 2026 atau terserap 22,18% dari anggarannya. Mengacu pada penyerapan anggaran sebesar Rp23,83 Miliar tersebut, perusahaan telah melaksanakan 47 kegiatan Pelatihan Pengembangan Pelayanan dari targetnya sebesar 143 kegiatan dengan realisasi total peserta sebanyak 927 peserta. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Pelayanan yang telah dilakukan di Triwulan II 2026 di antaranya "Site Training Engineer VSCS Cabang Pontianak", "Site Training ATMAS dan VSCS Personel ATS Cabang Balikpapan", "Site Training ATMAS dan VSCS Personel ATS Cabang Pontianak", "Site Training ATMAS Personel ATC Cabang Halim", "Pelatihan Simulator Prosedur SID/STAR AIRAC 172 Di Ujung Pandang APP/TMA", "Pelatihan Accident Investigation", "Pelatihan Mindful Recovery", "Site Training WIZARDSUITE - AIM (SDO & EAIP)", dan "One Day Training : Finance for Executive Non Finance".

3. Pelatihan Berbasis Kompetensi

Pelatihan Berbasis Kompetensi merupakan kegiatan pelatihan dan pendidikan yang berfokus pada:

- a. Pemenuhan *Corrective Action Plan* (CAP) atas hasil audit cabang; dan
- b. Pelatihan berbasis kompetensi bagi personel di semua fungsi (operasi, *safety*, teknik, *human capital*, keuangan, serta non direktorat) guna memenuhi *gap kompetensi* sesuai Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) pada posisi di fungsi terkait.

Total anggaran tahun 2026 untuk jenis diklat ini sebesar Rp57,15 Miliar dan sampai 30 Juni 2026 telah terealisasi Rp8,31 Miliar atau terserap 14,54% dari anggarannya. Mengacu pada realisasi anggaran diklat tersebut, perusahaan telah melakukan 37 kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi dari rencana pelaksanaan 133 kegiatan dengan realisasi total peserta sebanyak 660 orang. Adapun kegiatan pelatihan yang telah dilakukan di sepanjang Triwulan II 2026 di antaranya "Pelatihan Orientasi

BoD-1 Tahun 2026", "Basic Air Navigation Services: Overview of ANS", "Pelatihan Threat and Error Management (TEM)", "Pelatihan Investigasi Keselamatan", "Pelatihan Aktuaria", dan "Approach Control Procedural Refresher".

4. Dukungan Inisiatif Strategis 2026

Dukungan Inisiatif Strategis 2026 merupakan kegiatan pelatihan dan pendidikan dalam rangka menunjang pelaksanaan program strategis 2026 sehingga dapat menghasilkan *outcome* sesuai yang ditargetkan, di mana fokus yang ditetapkan di tahun 2026 adalah:

- a. Pelatihan personel ATC sistem otomasi baru di Cabang JATSC;
- b. Pelatihan *Business Continuity Management (BCM) Awareness*;
- c. Pelatihan pemenuhan kualifikasi organ pengelola risiko; dan
- d. Pelatihan sistem teknologi informasi manajemen risiko.

Total anggaran tahun 2026 untuk jenis diklat ini sebesar Rp2,80 Miliar dan telah terealisasi Rp386 Juta di Triwulan II 2026. Berdasarkan realisasi anggaran tersebut, total kegiatan pelatihan Dukungan Inisiatif Strategis 2026 yang telah terlaksana sebanyak 1 (satu) kegiatan dari target 15 (lima belas) kegiatan dengan realisasi jumlah peserta sebanyak 120 orang. Adapun pelaksanaan pelatihan yang telah dilakukan adalah "Pelatihan Pengenalan New ATMAS Cabang JATSC".

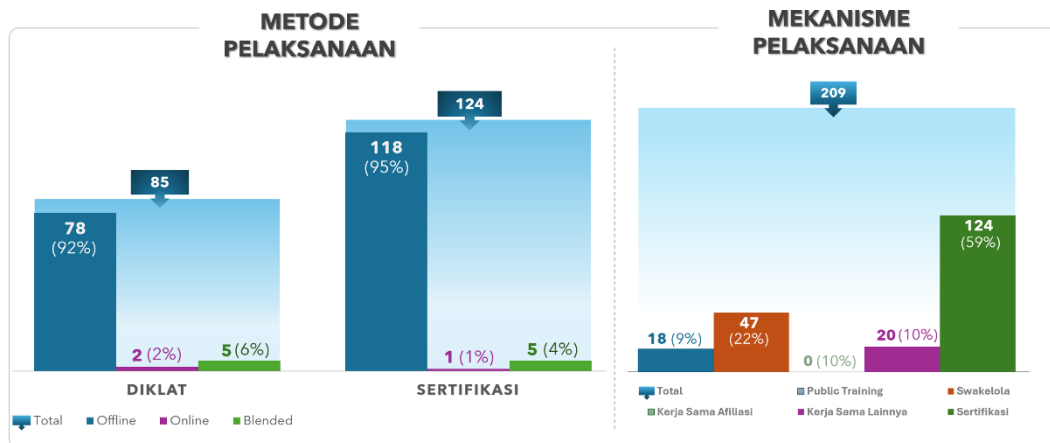
Metode pembelajaran yang diterapkan oleh perusahaan untuk upaya peningkatan kompetensi karyawannya adalah sebagai berikut:

1. Metode pembelajaran tatap muka (*luring*);
2. Metode pembelajaran *online* (*daring*); dan
3. Metode pembelajaran *blended* (pembelajaran *daring* dan diikuti tatap muka).

Mekanisme pelaksanaan diklat yang dilakukan oleh perusahaan diklasifikasikan menjadi 5 (lima) mekanisme, yaitu:

1. *Public Training*;
2. *Swakelola*;
3. Kerja Sama Afiliasi, yaitu berkerjasama dengan lembaga pendidikan di bawah Kementerian Perhubungan;
4. Kerja Sama Lainnya, seperti kerjasama dengan *LinkedIn Learning* dan PPM Manajemen; dan
5. Sertifikasi, yaitu pelaksanaan pengujian kompetensi untuk personel pelayanan navigasi, di mana sertifikasi yang dimaksud berupa kegiatan IELP, *Performance Check*, *Medical Check Up*, *Medex*, dan *Uji Rating*.

Grafik II.6
Metode dan Mekanisme Pelaksanaan Diklat Triwulan II 2026



Mengacu pada grafik di atas, pelaksanaan diklat dan sertifikasi di Triwulan II 2026 dilakukan dengan metode pembelajaran tatap muka (*offline*). Sedangkan terkait dengan mekanismenya, mayoritas dilakukan melalui sertifikasi dan secara swakelola. Selain 5 (lima) mekanisme pelaksanaan diklat sebagaimana telah disebutkan di atas, Perum LPPNPI juga mendorong setiap karyawan untuk melakukan pembelajaran dengan mekanisme *self-learning* yang difasilitasi dengan aplikasi *Learning Management System (LMS)* dan *Linkedin Learning*.

Aplikasi *LMS* yang dimiliki Perum LPPNPI dikenal dengan *AirNav Learning and Education Platform (NAVLEAP)*. Melalui NAVLEAP, setiap karyawan dapat mengakses materi pembelajaran secara fleksibel tanpa batasan waktu dan lokasi, sehingga mendorong efektifitas pembelajaran, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Pada Triwulan II 2026, sebanyak 12 (dua belas) modul pembelajaran telah tersedia di NAVLEAP yang diakses oleh 407 karyawan. Selain itu di bulan Juli 2026, perusahaan menargetkan 3 (tiga) pengembangan modul pelatihan di bidang operasional, yaitu modul pelatihan dokumen *Manual Air Traffic Services (MATS)*. Sebagai bentuk optimalisasi pemanfaatan NAVLEAP, aplikasi ini tidak hanya digunakan sebagai media pelaksanaan diklat secara *end-to-end*, tetapi juga digunakan sebagai fasilitas atau media pendukung pelaksanaan tahapan diklat, misalnya penggunaan NAVLEAP untuk pelaksanaan *pre-test* dan *post-test*.

Selain melalui NAVLEAP, Perusahaan juga memperluas akses pembelajaran mandiri (*self-learning*) melalui kerja sama dengan *LinkedIn Learning* sebagai bagian dari upaya penguatan budaya pembelajaran berkelanjutan (*continuous learning*). Berbeda dengan NAVLEAP yang dikembangkan sebagai platform pembelajaran internal dengan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi dan pengembangan karyawan Perum LPPNPI, *LinkedIn Learning* menyediakan akses terhadap berbagai materi pembelajaran eksternal dengan cakupan topik yang lebih luas dan beragam, meliputi pengembangan kompetensi teknis, bisnis, kepemimpinan, digital, serta keterampilan pendukung lainnya. Sebagai bentuk komitmen perusahaan tersebut, telah dilakukan penyediaan 4.800 akun *LinkedIn Learning* yang hingga 30 Juni 2026 telah diaktivasi oleh 3.281 karyawan atau dengan tingkat utilisasi

sebesar 68,35%. Implementasi *LinkedIn Learning* menjadi komplementer terhadap NAVLEAP dalam membangun ekosistem pembelajaran yang lebih adaptif dan inklusif.

2.5.3. Pengelolaan Dana Pensiun

Saldo dana untuk Program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Program Kesehatan Pensiun (PKP) pada posisi 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp1.322,16 Miliar sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.10
Saldo Dana Pensiun (JHT + PKP) Karyawan Perum LPPNPI per 30 Juni 2026

Bulan	Jumlah Saldo Dana Program Kesehatan Pensiun (PKP)	Jumlah Saldo Dana Program Jaminan Hari Tua (JHT)	Jumlah Dana Pensiun (PKP+JHT)
1. Januari	90.061.083.782	1.157.745.757.805	1.247.806.841.587
2. Februari	91.169.707.136	1.171.816.563.733	1.262.986.270.869
3. Maret	92.265.231.739	1.185.041.776.543	1.277.307.008.282
4. April	93.650.238.072	1.197.675.662.145	1.291.325.900.217
5. Mei	94.943.050.794	1.211.298.186.231	1.306.241.237.025
6. Juni	96.340.436.200	1.225.820.585.479	1.322.161.021.679

Jumlah pembayaran iuran premi bulanan dan pembayaran manfaat Program JHT dan PKP sampai dengan bulan Juni 2026 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel II.11
Premi Bulanan serta Pembayaran Manfaat Program JHT dan PKP Triwulan II 2026

Bulan	Program Kesehatan Pensiun (PKP)		Program Jaminan Hari Tua (JHT)	
	Premi	Manfaat	Premi	Manfaat
1. Januari	943.287.562	126.261.300	9.433.872.148	1.249.644.369
2. Februari	914.716.768	126.264.801	9.147.164.239	1.114.713.611
3. Maret	915.301.286	129.305.300	9.153.009.566	1.528.213.914
4. April	914.710.578	131.479.100	9.147.104.770	2.690.658.769
5. Mei	915.556.122	133.814.100	9.155.560.111	2.671.565.469
6. Juni	913.504.818	138.681.104	9.135.047.196	1.600.241.011

Pembayaran manfaat Program JHT merupakan akumulasi pembayaran manfaat bulanan serta manfaat *lumpsum* (pengembalian iuran), yaitu pembayaran 20% (dua puluh per seratus) modal kerja dan pembayaran manfaat sekaligus bagi karyawan yang berhenti bekerja mencapai batas usia pensiun (BUP), karyawan berhenti bekerja sebelum mencapai BUP (pengembalian iuran), karyawan meninggal dunia, dan karyawan berhenti bekerja karena uzur.

Program tersebut dibiayai oleh premi yang dibayarkan oleh perusahaan dan karyawan. Komposisi iuran program JHT sebesar 20% dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP), yang terdiri dari 17% ditunjang oleh perusahaan dan 3% dipotong dari penghasilan karyawan. Sedangkan komposisi iuran PKP sebesar 2% dari PhDP, yang terdiri dari 1% ditunjang oleh perusahaan dan 1% dipotong dari penghasilan karyawan.

Pembayaran manfaat PKP merupakan akumulasi pembayaran manfaat bulanan dan manfaat *lumpsum* bagi karyawan berhenti bekerja sebelum mencapai BUP, karyawan meninggal dunia, dan karyawan berhenti bekerja karena uzur. Total peserta aktif pada Triwulan II 2026 untuk Program JHT maupun PKP sebanyak 4.276 orang. Terdapat deviasi sebanyak 583 orang antara total peserta aktif dengan total jumlah SDM sebanyak 4.859 orang, di mana 583 orang tersebut tidak terdaftar sebagai peserta aktif karena belum monostatus.

Terkait dengan optimalisasi pengelolaan dana pensiun, perusahaan telah melakukan sejumlah kegiatan di antaranya:

1. Guna memastikan penempatan maupun penatakelolaan dana pensiun karyawan yang senantiasa aman dan memberikan manfaat lebih kedepannya, telah dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:
 - a. Melakukan rekonsiliasi rutin data premi, pembayaran manfaat, dan data peserta program JHT dan PKP setiap 6 bulan sekali;
 - b. Telah dilakukan penyusunan Laporan Tahunan atas pengembangan premi saldo yang terkumpul;
 - c. Melakukan revaluasi perjanjian kerja sama dengan pengelola setiap 2 tahun sekali; dan
 - d. Telah dilakukan valuasi oleh konsultan aktuaria atas nilai program JHT dan PKP pada tahun 2023/2024 dan akan dilakukan secara rutin setiap 5 tahun sekali.
2. Sesuai dengan Perjanjian Pengadaan JHT dan PKP bahwa akan dilakukan proses rekonsiliasi terhadap data peserta, data iuran premi beserta pengembangannya, dan data penerima manfaat. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun yang melibatkan Satuan Pengawasan Intern (*Audit Internal Division*);
3. Melakukan rekonsiliasi data pembayaran setiap bulan antara *Human Capital Services Division* bersama *Accounting and Asset Management Division* untuk memastikan tidak terjadi kesalahan pembayaran; dan

4. Karyawan yang masih berstatus sebagai PNS Penugasan di tahun 2025, dipastikan bahwa Karyawan PNS Penugasan sudah mengikuti program JHT yang diselenggarakan oleh instansi induk (Taspen) sesuai dengan pengajuan pembayaran setiap bulannya ke PT. Taspen yang dilakukan melalui pemotongan penghasilan berdasarkan gaji tingkat golongan jabatan pada instansi induk. Dalam hal yang bersangkutan pensiun dini dari instansi induk maka akan diikutsertakan Imbal Pasca Kerja Perusahaan (Taspen Life) serta dilakukan rekonsiliasi data bersama PT. Taspen untuk memastikan kesesuaian pembayaran.

2.5.4. Implementasi AKHLAK

Sejak ditetapkan sebagai budaya BUMN pada 1 Juli 2020 melalui Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-7/MBU/07/2020, AKHLAK menjadi tata nilai yang melekat pada setiap perusahaan BUMN dan implementasinya menjadi salah satu fokus perusahaan untuk senantiasa dioptimalkan. AKHLAK bukanlah semata-mata kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi, namun menjadi pedoman utama yang membimbing tindakan agar sejalan dengan nilai-nilai moral dan etika. Implementasi AKHLAK secara kontinu diharapkan menjadi katalisator perubahan positif, tidak hanya dalam lingkup internal perusahaan tetapi juga dalam pengaruhnya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Perusahaan senantiasa berkomitmen untuk mengoptimalkan penerapan AKHLAK. Komitmen ini ditunjukkan dengan menetapkan KSATRIA periode 2025 - 2026 sebagai *Agent of Change* (AoC) sejumlah 37 orang. Selain itu perusahaan telah menetapkan 1 (satu) Rencana Kerja Manajemen (RKM) di tahun 2026, yaitu RKM "Implementasi Budaya Perusahaan" guna memastikan pelaksanaan kegiatan penguatan budaya perusahaan. Adapun kegiatan yang telah dilakukan di Triwulan II 2026 adalah:

1. Publikasi "Well-being and Culture Buletin" yang disampaikan oleh KSATRIA Cabang MATSC (periode Januari 2026), KSATRIA Cabang MATSC (periode Februari 2026), KSATRIA Cabang Tanjungpinang (periode Maret 2026), KSATRIA Cabang Pontianak (periode April 2026), KSATRIA Cabang Wamena (periode Mei 2026), dan KSATRIA Cabang Merauke (periode Juni 2026);
2. Pembuatan dan publikasi video dalam rangka memperingati Hari Kartini dengan melibatkan:
 - a. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko sebagai sosok direktur perempuan;
 - b. *General Manager (GM)* Cabang Semarang sebagai sosok *GM* perempuan; dan
 - c. 8 (delapan) perwakilan karyawan perempuan dari cabang yang berbeda.
3. Pada bulan Juni 2026 telah dilakukan pembekalan "Optimalisasi Employee Assistance Program" kepada KSATRIA 2025 - 2026 dengan narasumber dari Naluri; serta
4. Pada bulan Juni 2026 dilakukan pengisian Pedoman *Code of Conduct* (Pedoman Perilaku) oleh seluruh karyawan melalui sistem HRIS e-Chain.

Selain kegiatan tersebut di atas, sejumlah cabang juga senantiasa melakukan kegiatan penguatan budaya yang diusung oleh GM bersama dengan perwakilan KSATRIA di cabang terkait. Kegiatan penguatan budaya yang dilakukan mengacu pada program-program KSATRIA yang telah ditetapkan, yaitu:

1. KSATRIA BAIK (Berbagi Aksi, Ilmu dan Kepedulian) adalah konsep “sharing is caring”. Budaya untuk saling berbagi, baik yang bersifat informasi, *knowledge* maupun *charity* kepada lingkungan kerja atau lingkungan sekitar;
2. KSATRIA SALAM (Sinergi Antar Lintas Unit dan *Stakeholder*) adalah budaya untuk saling berdiskusi, sosialisasi, dan bertukar pikiran dengan unit kerja lain, organisasi profesi, serikat pekerja, para *role model* maupun instansi lain;
3. KSATRIA PINTAR adalah budaya pembelajaran (*learning culture*) di tempat kerja yang bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan kompetensi, inovasi, dan peningkatan kualitas karyawan secara berkelanjutan;
4. KSATRIA RESIK adalah budaya senang bersih-bersih dan merapikan ruang kerja yg bertujuan menciptakan lingkungan kerja nyaman, rapi, dan sehat sehingga meningkatkan produktivitas serta semangat karyawan;
5. KSATRIA BISA (Belajar Inovatif Secara Aktif) adalah budaya untuk terus mendorong karyawan ditempat kerja agar memiliki inovasi. Inovasi dapat berupa sistem digitalisasi dalam proses kerja di masing-masing unit ataupun perubahan alur dan prosedur kerja; dan
6. KSATRIA SEHAT adalah budaya untuk menjalani hidup sehat dan selain itu didalam program ini KSATRIA juga diminta untuk mencari talenta-talenta terbaik dibidang olahraga yang ada di Perum LPPNPI.

2.5.5. Pemenuhan Program Disabilitas BUMN

Total tenaga disabilitas pada Triwulan II 2026 adalah 8 (delapan) orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Karyawan fungsi staf administrasi sebanyak 6 (enam) orang, dengan lokasi kerja dari karyawan dimaksud adalah 1 (satu) orang di Kantor Pusat, 1 (satu) orang di Cabang Pontianak, 2 (dua) orang di Cabang MATSC, 1 (satu) orang di Cabang Surabaya, dan 1 (satu) orang di Cabang Yogyakarta; dan
2. Pemagangan sebanyak 2 (dua) orang dengan lokasi kerja di Cabang Yogyakarta dan Kantor Pusat, di mana penerimaan atas 2 (dua) orang pemagangan tersebut dilakukan di bulan Desember 2025.

Tenaga kerja disabilitas ditempatkan sebagai staf administrasi atau penunjang karena tidak memungkinkan penempatan sebagai karyawan operasional yang memiliki kompetensi dan persyaratan sesuai ketentuan Kementerian Perhubungan. Tenaga kerja disabilitas memiliki hak yang sama terkait kesejahteraan, pengembangan karir, program kesehatan dan

keselamatan kerja, yang disesuaikan dengan hak serta kewajiban menurut status kepegawaian.

Dalam rangka memenuhi target jumlah tenaga disabilitas sesuai dengan *roadmap* perusahaan dan guna mendukung program disabilitas pemilik modal, perusahaan akan melakukan rekrutmen sebanyak 2 (dua) tenaga disabilitas di tahun 2026. Selain itu guna mendukung dan memperkuat pengelolaan tenaga disabilitas, perusahaan telah memiliki kebijakan terkait tenaga kerja disabilitas yang diatur melalui Keputusan Direksi No. KEP.1351/U/LPPNPI/PER.10/VI/2024 tertanggal 20 Juni 2024 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan Disabilitas di Lingkungan Perum LPPNPI, serta RKM tahunan di mana untuk tahun 2026 RKM dimaksud berjudul "Monitoring Implementasi Kebijakan Ketenagakerjaan Disabilitas". RKM ini disusun guna mengakomodir pelaksanaan *reviu* atas kebijakan ketenagakerjaan disabilitas yang telah dimiliki perusahaan serta menindaklanjuti kerja sama dengan Prospera, di antaranya pelaksanaan *workshop* dan pelatihan untuk tenaga disabilitas. Pada Triwulan II 2026, perusahaan telah melakukan pembahasan internal dalam rangka finalisasi agenda serta koordinasi dengan pihak Prospera atas rangkaian kegiatan yang akan dilakukan pada Triwulan III – Triwulan IV 2026. Adapun agenda terdekat yang akan dilakukan adalah *reviu* atas Kebijakan Ketenagakerjaan Disabilitas di Lingkungan Perum LPPNPI guna memastikan kesesuaian kebijakan dengan perkembangan kebutuhan perusahaan serta prinsip penerapan ketenagakerjaan yang inklusif.

2.6 INVESTASI

2.6.1. Dasar Usulan Investasi Tahun 2026

Penyusunan usulan investasi Perum LPPNPI Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI), khususnya Pasal 6, yang mengatur bahwa rancangan rencana investasi tahunan harus memperoleh persetujuan tertulis dari Kementerian Teknis yaitu Kementerian Perhubungan. Selain itu, penyusunan usulan investasi juga mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengajuan dan Persetujuan Rencana Investasi Perum LPPNPI.

Dalam penyusunan program investasi tahunan, Perum LPPNPI berpedoman pada kebijakan umum perusahaan, kebijakan operasional pelayanan navigasi penerbangan, serta kebijakan strategis pemerintah. Pedoman tersebut menjadi dasar dalam menetapkan prioritas investasi guna mendukung peningkatan kinerja perusahaan, keberlanjutan pelayanan navigasi penerbangan, dan pencapaian sasaran strategis nasional.

2.6.2. Usulan Investasi Tahun 2026

1. Usulan Rencana Investasi

Penyusunan awal Rencana Investasi Tahun 2026 didasarkan pada Surat Direktur Utama kepada Menteri Perhubungan Nomor 3233/U/00/LPPNPI/KEU.15/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang Permohonan Persetujuan atas Usulan Rencana Investasi Perum LPPNPI Tahun 2026. Melalui surat tersebut, Perum LPPNPI mengusulkan 88 (delapan puluh delapan) program investasi baru dengan nilai pagu sebesar Rp636,22 Miliar.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Direktur Utama kepada Menteri Perhubungan Nomor 4714/U/00/LPPNPI/KEU.15/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025 tentang Permohonan Persetujuan *Carry Over* Program Investasi Perum LPPNPI ke Tahun 2026, diusulkan sebanyak 56 (lima puluh enam) program *carry over* dengan nilai pagu sebesar Rp2.608,06 Miliar.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan dan prioritas investasi perusahaan, Perum LPPNPI menyampaikan pembaruan usulan investasi melalui Surat Direktur Utama Nomor 5836/U/TNG/LPPNPI/KEU.15/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Penyampaian Pembaruan (*Update*) Usulan Investasi Perum LPPNPI. Dalam pembaruan tersebut, usulan investasi yang semula terdiri atas 88 (delapan puluh delapan) program dengan nilai pagu Rp636,22 Miliar disesuaikan menjadi 28 (dua puluh delapan) program dengan nilai pagu sebesar Rp2.443,27 Miliar. Dari 28 (dua puluh delapan) program tersebut, terdapat 306 (tiga ratus enam) rincian program investasi yang direncanakan akan terealisasi secara bertahap pada periode tahun 2026 sampai dengan 2029.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pembahasan evaluasi teknis bersama Kementerian Perhubungan pada tanggal 25 Juni 2026, terdapat 2 (dua) usulan program yang tidak dilanjutkan, yaitu pengadaan VHF APP Gorontalo dan VHF APP Ternate. Dengan demikian, rekapitulasi usulan Rencana Investasi Perum LPPNPI Tahun 2026 setelah hasil evaluasi teknis dapat disajikan pada Tabel II.13.

Tabel II.12
Usulan Rencana Investasi Perum LPPNPI Tahun 2026

Deskripsi	Usulan Program Investasi	
	Program	Nilai Rp (Miliar)
Program Usulan Baru*	304	2448,88
Program <i>Carry Over</i> **	56	2608,06
Total	360	5.056,94

Keterangan:

*) Berdasarkan hasil pembahasan evaluasi teknis bersama Kemenhub 25 Juni 2026.

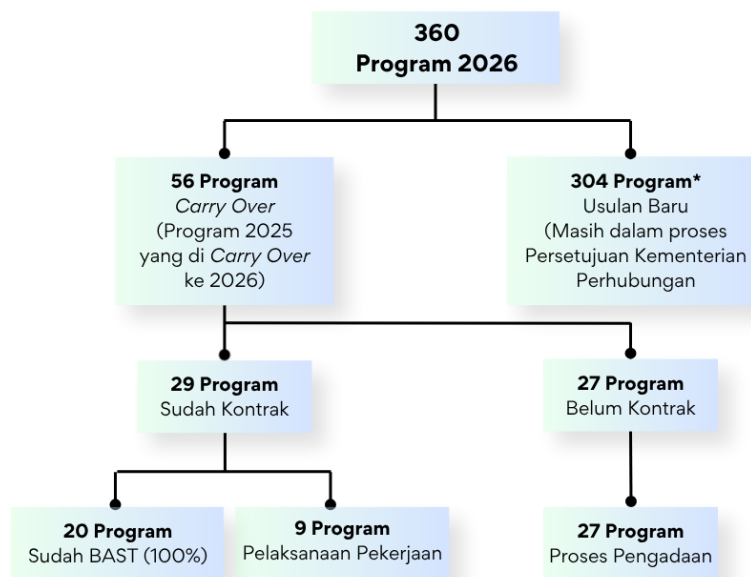
**) Berdasarkan surat Direktur Utama Nomor 4774/U/TNG/LPPNPI/KEU.15/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025 perihal Permohonan Persetujuan *Carry Over* Program Investasi Perum LPPNPI ke Tahun 2026.

2. Penjelasan Investasi Tahun 2026

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, usulan Rencana Investasi Perum LPPNPI Tahun 2026 masih dalam proses pembahasan dan evaluasi oleh Kementerian Perhubungan. Dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program investasi, Perum LPPNPI melakukan upaya percepatan melalui pelaksanaan beberapa proses lelang tidak mengikat sebagai tindak lanjut dari Surat Direktur Teknik Nomor 224/T/TNG/PGD.02.01/I/2026 tanggal 15 Januari 2026 tentang Program Investasi Tahun 2026. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program investasi setelah Rencana Investasi Tahun 2026 memperoleh persetujuan dari Menteri Perhubungan.

Selain usulan program investasi baru, terdapat 56 (lima puluh enam) program investasi yang diusulkan untuk *carry over* ke Tahun 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 29 (dua puluh sembilan) program telah memasuki tahap berkontrak dan 27 (dua puluh tujuh) program lainnya masih berada dalam proses pengadaan.

Ringkasan progres pelaksanaan program investasi Perum LPPNPI Tahun 2026 disajikan pada Gambar II.2 berikut.



Keterangan:

*) Masih dalam proses persetujuan Menteri Perhubungan

Gambar II.2
Progres Program Investasi Perum LPPNPI sampai dengan Juni Tahun 2026

Berdasarkan hasil monitoring sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan program *carry over* Tahun 2025 ke Tahun 2026 menunjukkan bahwa seluruh dokumen teknis untuk 56 (lima puluh enam) program telah selesai disusun (100%). Dari jumlah tersebut, sebanyak 29 (dua puluh sembilan) program atau 51,79% telah memasuki tahap kontrak, sedangkan 27 (dua puluh tujuh) program atau 48,21% masih dalam proses pengadaan.

Dari 29 (dua puluh sembilan) program yang telah berkontrak, sebanyak 20 (dua puluh) program telah selesai 100% dan telah dilakukan Serah Terima Pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST), sementara 9 (sembilan) program lainnya masih dalam tahap pelaksanaan pekerjaan.

Perum LPPNPI terus melakukan percepatan pada tahapan persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagai upaya mendukung percepatan realisasi program investasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel II.13
Progres Program Investasi Perum LPPNPI Triwulan II 2026

Deskripsi	Program	Status		Progres Fisik (TW II)				
		Belum Kontrak	Sudah Kontrak	0% - 25%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 100%	
							Belum BAST	BAST
Carry Over	56	27	29	3	3	1	2	20
Single Year	40	20	20	2	1		1	16
Multi Years	16	7	9	1	2	1	1	4
Usulan Baru	304	304	-	-	-	-	-	-
Total	360	331	29	3	3	1	2	20

Note: Data pada Tabel II.13 merupakan realisasi atas program investasi utama

2.7 LAPORAN KEUANGAN

2.7.1. Laporan Posisi Keuangan

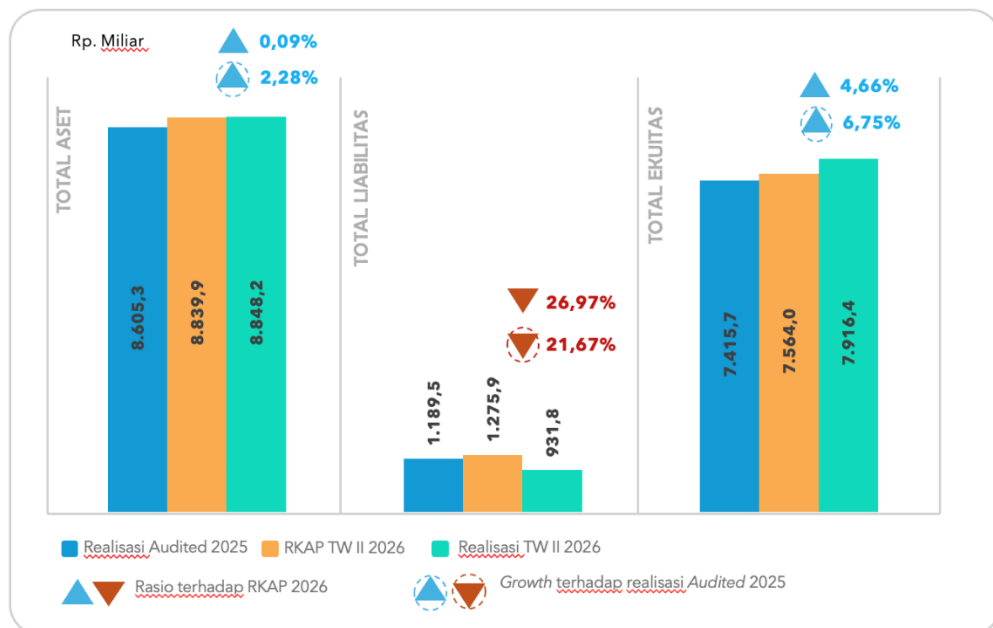
Posisi keuangan per 30 Juni 2026 menunjukkan realisasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan realisasi *audited* pada tahun sebelumnya. Rincian atas kinerja posisi keuangan dimaksud secara lebih rinci ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.14
Posisi Keuangan Triwulan II 2026

Deskripsi	2025	2026			Rasio		Growth
	Realisasi Audited	RKAP	RKAP TW II	Realisasi TW II			
1	2	3	4	5	6 = 5:3	7 = 5:4	8 = (5-2):2
Aset Lancar	6.030.612	6.751.658	6.193.749	6.261.610	92,74%	101,10%	3,83%
Aset Tetap	2.157.898	2.464.257	2.231.242	2.235.041	90,70%	100,17%	3,57%
Aset Lainnya	416.755	416.105	414.887	351.538	84,48%	84,73%	-15,65%
Total Aset	8.605.265	9.632.020	8.839.878	8.848.190	91,86%	100,09%	2,82%
Liabilitas Jangka Pendek	974.512	1.131.402	1.062.697	703.480	62,18%	66,20%	-27,81%
Liabilitas Jangka Panjang	215.029	211.314	213.172	228.313	108,04%	107,10%	6,18%
Total Liabilitas	1.189.541	1.342.716	1.275.869	931.793	69,40%	73,03%	-21,67%
Ekuitas	7.415.725	8.289.304	7.564.009	7.916.397	95,50%	104,66%	6,75%
Total Liabilitas + Ekuitas	8.605.265	9.632.020	8.839.878	8.848.190	91,86%	100,09%	2,82%

Rp (Juta)

Grafik II.7
Perbandingan Posisi Keuangan Triwulan II 2026 Terhadap Targetnya dan Realisasi Audited 2025



Total aset pada 30 Juni 2026 sebesar Rp8.848,19 Miliar atau lebih tinggi 0,09% dari target Triwulan II 2026 sebesar Rp8.839,88 Miliar dan mengalami pertumbuhan 2,82% dari realisasi *audited* total aset pada 31 Desember 2025 sebesar Rp8.605,26 Miliar. Adapun rincian atas pergerakan total aset di periode 30 Juni 2026 dibandingkan realisasi pada periode 31 Desember 2025, secara umum disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Kenaikan saldo kas dan setara kas sebesar Rp46,70 Miliar, dari total saldo kas dan setara kas sebesar Rp4.921,63 Miliar menjadi Rp5.385,33 Miliar. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya penerimaan dari maskapai, yang dipengaruhi oleh meningkatnya nilai tukar kurs dollar, serta didukung oleh pengelolaan beban operasional perusahaan yang dilakukan secara efektif hingga periode Juni 2026;
2. Rekening bank dibatasi penggunaannya dengan nilai sebesar Rp395,17 Miliar di akhir tahun 2025, menurun Rp269,79 Miliar menjadi Rp125,37 Miliar pada 31 Juni 2026, di mana penurunan tersebut dikarenakan adanya pembayaran yang telah berlangsung sejak periode sebelumnya, sehingga secara kumulatif hingga Triwulan II 2026 progres pembayaran investasi yang dibiayai oleh PMN telah mencapai 95%, meliputi:
 - a. Pembayaran Pekerjaan Pengadaan dan Penggantian Fasilitas ATM (ATC System) di Wilayah Ruang Udara Barat / Program New JATSC;
 - b. Pembayaran Pekerjaan Peralatan Utama dan Konstruksi Bangunan di Medan;
 - c. Pembayaran Pekerjaan Peralatan Utama dan Konstruksi Bangunan di Pontianak;
dan

- d. Pembayaran Pekerjaan Pengadaan dan Penggantian Fasilitas ATM (ATC System) untuk pekerjaan peralatan utama Modernisasi Fasilitas Pelayanan APP, serta pembayaran atas pekerjaan konstruksi dan bangunan di Balikpapan.
3. Peningkatan piutang usaha bersih sebesar Rp38,08 Miliar, yaitu dari Rp437,11 Miliar menjadi Rp475,19 Miliar, yang secara umum disebabkan oleh kondisi penurunan kinerja pembayaran oleh maskapai akibat tekanan kondisi global seperti kenaikan harga avtur;
 4. Penurunan nilai kontrak aset sebesar Rp19,13 Miliar, yaitu dari Rp159,28 Miliar menjadi Rp140,15 Miliar, di mana hal ini kemungkinan disebabkan karena penurunan total *traffic* sebesar 17,78% dari realisasi *traffic* dari periode Triwulan IV tahun 2025;
 5. Penurunan nilai persediaan sebesar Rp12,71 Miliar, yaitu dari Rp55,57 Miliar menjadi Rp42,87 Miliar. Penurunan nilai persediaan tersebut dikarenakan adanya penggunaan suku cadang persediaan pada peralatan navigasi dan komunikasi;
 6. Kenaikan nilai pajak dibayar dimuka sebesar Rp33,32 Miliar, yaitu dari Rp4,33 juta menjadi Rp33,33 Miliar, peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya kredit pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp31,34 Miliar yang berasal dari pemotongan pajak atas pendapatan jasa oleh pelanggan dan masih tercatat sebagai Pajak Dibayar di Muka hingga akhir periode pelaporan, serta adanya PPN masukan sebesar Rp1,99 Miliar yang berasal dari transaksi pengadaan barang dan jasa selama periode berjalan dan belum dikreditkan;
 7. Penurunan piutang jangka panjang sebesar Rp33,12 Miliar, yaitu dari Rp74,45 Miliar menjadi Rp41,33 Miliar. Penurunan ini lebih disebabkan oleh penyelesaian kewajiban atas piutang restrukturisasi dari PT.Citilink Indonesia dari periode Januari hingga Juni 2026 sebesar Rp33,19 Miliar;
 8. Peningkatan aset tetap sebesar Rp77,14 Miliar, yaitu dari Rp2.157,89 Miliar menjadi Rp2.235,04 Miliar. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh realisasi penambahan aset tetap dan penyelesaian aset dalam konstruksi yang direklasifikasi menjadi aset tetap siap digunakan; dan
 9. Penurunan aset pajak tangguhan sebesar Rp26,35 Miliar, yaitu dari Rp326,58 Miliar menjadi Rp300,24 Miliar. Adapun penurunan aset pajak tangguhan tersebut dikarenakan koreksi fiskal atas beda waktu, di antaranya beban penyusutan, penyisihan piutang, dan penurunan nilai aset tetap menurut akuntansi dan pajak.

Total Liabilitas pada 30 Juni 2026 tercatat sebesar Rp931,79 Miliar atau lebih rendah 26,97% dari targetnya sebesar Rp1.275,87 Miliar dan turun 21,67% dari realisasi *audited* tahun 2025 sebesar Rp1.189,54 Miliar. Adapun pergerakan total liabilitas tersebut dipengaruhi oleh akun-akun sebagai berikut:

1. Penurunan utang usaha sebesar Rp 0,66 Miliar, yaitu dari Rp24,34 Miliar menjadi Rp23,69 Miliar. Penurunan utang usaha ini terutama disebabkan oleh penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga;
2. Penurunan utang pajak sebesar Rp62,86 Miliar, yaitu dari Rp106,71 Miliar menjadi Rp43,84 Miliar. Penurunan ini secara umum disebabkan oleh saldo utang PPh Pasal 29 yang dikompensasikan dari angsuran PPh Pasal 25 yang telah dibayarkan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Penurunan tersebut mencerminkan realisasi pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
3. Penurunan liabilitas (biaya) yang masih harus dibayar sebesar Rp125,77 Miliar, yaitu dari Rp221,57 Miliar menjadi Rp95,78 Miliar. Adapun penurunan tersebut dipengaruhi oleh telah diterimanya tagihan pekerjaan yang telah diselesaikan;
4. Penurunan liabilitas imbalan kerja jangka pendek sebesar Rp104,14 Miliar, yaitu dari Rp299,04 Miliar menjadi Rp194,89 Miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh realisasi pembayaran kewajiban imbalan kerja kepada karyawan, termasuk pembayaran tunjangan non rutin dan hak-hak karyawan lainnya yang sebelumnya telah diakui sebagai liabilitas pada akhir tahun;
5. Peningkatan liabilitas jangka pendek lain sebesar Rp15,37 Miliar, yaitu dari Rp294,38 Miliar menjadi Rp309,74 Miliar. Hal ini lebih disebabkan oleh peningkatan retensi atas pekerjaan-pekerjaan yang telah selesai dan masih dalam masa pemeliharaan;
6. Peningkatan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp9,9 Miliar, yaitu dari Rp23,28 Miliar menjadi Rp33,21 Miliar. Hal ini secara umum disebabkan peningkatan deposit atas PJNP;
7. Kenaikan imbalan kerja jangka panjang sebesar Rp14,94 Miliar, yaitu dari Rp207,53 Miliar menjadi Rp222,47 Miliar. Hal ini secara umum disebabkan kenaikan estimasi hasil perhitungan atas imbal pasca kerja yang dilakukan oleh Aktuaris. Adapun kenaikan tersebut terjadi pada program purnabakti.

Total ekuitas perusahaan pada 30 Juni 2026 sebesar Rp7.916,39 Miliar atau lebih tinggi 4,66% dari nilai ekuitas yang diproyeksikan sebesar Rp7.564,01 Miliar dan tumbuh 6,75% dari realisasi *audited* tahun 2025 sebesar Rp7.415,72 Miliar. Realisasi total ekuitas pada 30 Juni 2026 yang lebih tinggi dari targetnya secara umum disebabkan oleh realisasi beban usaha yang belum sepenuhnya terserap dan peningkatan laba ditahan yang berasal dari laba periode berjalan, serta akumulasi laba tahun-tahun sebelumnya yang belum ditentukan penggunaannya.

2.7.2. Laporan Laba Rugi

Komponen keuangan yang terdapat dalam Laporan Laba Rugi Triwulan II 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik jika dibandingkan dengan targetnya, namun lebih

rendah dibanding realisasi pada Triwulan II 2025, terutama untuk kinerja laba yang dihasilkan. Kinerja keuangan dalam Laporan Laba Rugi Triwulan II 2026 secara lebih rinci ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel II.15
Laba Rugi Triwulan II 2026

Rp (Juta)

Deskripsi	2025	2026			Rasio		Growth
	Realisasi TW II	RKAP	RKAP TW II	Realisasi TW II	6 = 5:3	7 = 5:4	
1	2	3	4	5	6 = 5:3	7 = 5:4	8 = (5-2):2
Total Pendapatan Usaha	2.013.618	4.754.390	2.078.026	2.079.030	43,73%	100,05%	3,25%
Beban Pegawai	1.018.056	2.162.883	1.124.715	1.069.248	49,44%	95,07%	5,03%
Beban Perlengkapan	7.090	32.468	25.285	9.487	29,22%	37,52%	33,80%
Beban Pemeliharaan	55.472	315.291	158.082	61.780	19,59%	39,08%	11,37%
Beban Utilitas	58.120	212.442	114.048	50.512	23,78%	44,29%	-13,09%
Beban Penyusutan	218.885	453.808	216.864	205.359	45,25%	94,69%	-6,18%
Beban Operasional Lain	-	-	-	167	-	-	-
Beban Umum	165.111	624.586	319.174	162.845	26,07%	51,02%	-1,37%
Beban Penurunan Nilai Piutang	(14.857)	15.642	7.821	41.757	266,96%	533,92%	-381,06%
Total Beban Usaha	1.507.877	3.817.120	1.965.989	1.601.156	41,95%	81,44%	6,19%
Laba (Rugi) Usaha	505.742	937.270	112.037	477.874	50,99%	426,53%	-5,51%
Pendapatan (Beban) Lainnya	119.691	158.418	78.555	141.321	89,21%	179,90%	18,07%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	625.432	1.095.688	190.592	619.195	56,51%	324,88%	-1,00%
(Manfaat) Beban Pajak Penghasilan	119.927	215.770	35.968	118.523	54,93%	329,52%	-1,17%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	505.506	879.918	154.624	500.672	56,90%	323,80%	-0,96%
Pendapatan Komprehensif Lain	-	-	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) Komprehensif	505.506	879.918	154.624	500.672	56,90%	323,80%	-0,96%

Pendapatan usaha sampai dengan 30 Juni tahun 2026 terealisasi sebesar Rp2.079,03 Miliar atau lebih tinggi 0,05% dari target sebesar Rp2.078,03 Miliar dan tumbuh 3,25% dibandingkan realisasi Triwulan II 2025 sebesar Rp2.013,62 Miliar. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada **Sub Bab 2.1.3**, di mana capaian pendapatan usaha secara umum merupakan kontribusi atas pendapatan pada penerbangan *overflying*, yang disebabkan oleh implementasi *Realignment FIR SIN-JKT* sejak **21 Maret 2024 pukul 20.00 UTC**, serta pertumbuhan jumlah penerbangan global (baik penumpang maupun barang/kargo) terutama di wilayah Asia-Pasifik. Selain itu, peningkatan pendapatan yang berasal dari penerbangan *overflying* tersebut turut dipengaruhi oleh realisasi kurs transaksi di sepanjang Triwulan II 2026 yang lebih tinggi dibandingkan asumsi kurs yang digunakan dalam RKAP Perum LPPNPI 2026 sebesar Rp16.500,-, di mana rata-rata realisasi kurs transaksi bulanan di sepanjang Triwulan II 2026 sebesar Rp17.073,-. Di sisi lain, perusahaan juga memperoleh pendapatan yang berasal dari jasa lainnya terkait jasa konsultasi operasional bandara khusus sebesar Rp192 Juta terkait penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan navigasi penerbangan di bandar udara khusus.

Total beban usaha sampai dengan 30 Juni tahun 2026 terealisasi sebesar Rp1.601,16 Miliar atau lebih rendah 18,56% dari RKAP sebesar Rp1.965,99 Miliar, namun mengalami kenaikan sebesar 6,19% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2025 sebesar Rp1.507,88 Miliar. Realisasi ini dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Beban pegawai, terealisasi sebesar Rp1.069,25 Miliar atau lebih rendah 4,93% dari targetnya sebesar Rp1.124,71 Miliar. Realisasi beban pegawai yang sedikit lebih

rendah dari targetnya tersebut secara umum dikarenakan kebijakan pengendalian biaya pegawai dari perusahaan dalam rangka pemenuhan tanggung jawab terhadap karyawan sesuai dengan *budget plan* Triwulan II 2026. Selain itu hal ini juga dipengaruhi oleh belum terealisasinya beban pegawai lain seperti sumbangan kelahiran, perkawinan dan kematian sesuai dengan anggaran yang direncanakan;

2. Beban perlengkapan, terealisasi sebesar Rp9,49 Miliar atau lebih rendah 62,48% dari targetnya sebesar Rp25,28 Miliar. Belum tercapainya penyerapan beban perlengkapan pada Triwulan II 2026 dipengaruhi oleh sejumlah beban yang belum terealisasi sesuai budget plan seperti beban perlengkapan kantor yang akan terserap pada periode berikutnya;
3. Beban pemeliharaan, terealisasi sebesar Rp61,78 Miliar atau lebih rendah 60,92% dari anggaran Triwulan II tahun 2026 sebesar Rp158,08 Miliar. Belum tercapainya penyerapan beban pemeliharaan pada periode Triwulan II diantaranya disebabkan oleh proses pengadaan yang masih berjalan, serta dipengaruhi juga oleh kegiatan atau program masih dalam proses penyelesaian hingga akhir periode Triwulan II sehingga belum dapat tercatat sebagai realisasi beban;
4. Beban Utilitas, terealisasi sebesar sebesar Rp50,51 Miliar atau lebih rendah 55,71% dari anggaran Triwulan II tahun 2026 sebesar Rp114,05 Miliar. Belum tercapainya penyerapan beban utilitas secara umum dikarenakan terdapat sejumlah layanan dan biaya langganan yang belum diterima nominal realisasi terkini. Selain itu, hal ini juga dipengaruhi oleh efisiensi pemanfaatan utilitas serta pengendalian konsumsi energi seperti melalui pengaturan AC Central yang secara otomatis padam saat jam kerja usai serta adanya pemeliharaan fasilitas navigasi yang terjadwal;
5. Beban penyusutan, terealisasi sebesar Rp205,36 Miliar atau lebih rendah 5,31% dari targetnya sebesar Rp216,86 Miliar. Hal ini secara umum disebabkan oleh belum terealisasinya sebagian investasi aset tetap sesuai target RKAP, sehingga aset yang direncanakan belum siap digunakan dan belum dapat disusutkan;
6. Beban Operasional Lain, terealisasi sebesar Rp167,21 Juta. Realisasi beban ini berasal dari akun beban usaha baru yang dibentuk untuk mengakomodir pencatatan biaya operasional atas penyelenggaraan layanan baru perusahaan pada Bandara Khusus. Oleh karena itu, beban tersebut belum dianggarkan dalam RKAP tahun 2026;
7. Beban umum, terealisasi sebesar Rp162,84 Miliar atau lebih rendah 48,98% dari anggarannya sebesar Rp319,17 Miliar. Hal ini disebabkan oleh sejumlah akun yang terealisasi lebih rendah dari targetnya seperti beban perjalanan dinas, beban diklat, beban rapat dan beban konsultan. Saat ini perusahaan tetap berupaya untuk melakukan efisiensi biaya dengan melakukan penghematan dari sisi pelaksanaan rapat dan perjalanan dinas Perusahaan; dan

8. Beban penurunan nilai piutang, terealisasi sebesar Rp41,76 Miliar lebih tinggi 533,92% dari proyeksi RKAP Triwulan II 2026 sebesar Rp7,82 Miliar, adapun peningkatan beban penurunan nilai piutang ini disebabkan oleh bertambahnya *aging* umur piutang di beberapa maskapai.

Mengacu pada realisasi pendapatan usaha dan beban usaha sampai dengan 30 Juni tahun 2026, Perum LPPNPI mencatat realisasi laba usaha sebesar Rp477,87 Miliar atau lebih baik dari target laba sebesar Rp112,04 Miliar. Secara *year-on-year* (yoy) realisasi laba usaha perusahaan mengalami penurunan sebesar 5,51% dari realisasi periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp505,74 Miliar. Capaian laba usaha sampai dengan Triwulan II tahun 2026 tersebut secara umum dikarenakan tingkat penyerapan beban yang masih dibawah target.

Perusahaan mencatat perolehan laba komprehensif pada 30 Juni 2026 sebesar Rp500,67 Miliar atau lebih baik dari target laba sebesar Rp154,62 Miliar. Secara *year-on-year* (yoy) realisasi laba komprehensif perusahaan mengalami penurunan sebesar 0,96% dari realisasi periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp505,51 Miliar. Selain dikarenakan tercapainya laba usaha, laba komprehensif sampai dengan Triwulan II tahun 2026 dikarenakan bertambahnya pendapatan lain-lain, yang berasal dari:

1. Pendapatan bunga giro, terealisasi sebesar Rp15,86 Miliar atau lebih tinggi 906,24% dari targetnya sebesar Rp1,75 Miliar, namun mengalami penurunan 13,38% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp18,31 Miliar. Realisasi tersebut terutama disebabkan oleh realisasi saldo kas dan bank yang lebih tinggi dari asumsi dalam RKAP, serta dinamika suku bunga yang terjadi selama periode berjalan, sehingga menghasilkan pendapatan bunga giro yang lebih besar;
2. Pendapatan bunga deposito, terealisasi sebesar Rp89,31 Miliar atau lebih tinggi 11,90% dibandingkan targetnya sebesar Rp79,81 Miliar dan mengalami kenaikan sebesar 4,04% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2025 sebesar Rp85,84 Miliar, serupa dengan pendapatan bunga giro, peningkatan pendapatan bunga deposito pada tahun 2026 tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya nilai kas dan bank yang diinvestasikan pada instrumen keuangan deposito;
3. Optimalisasi pemanfaatan aset, terealisasi sebesar Rp488,27 Juta atau lebih tinggi 37,23% dari targetnya sebesar Rp355,81 Juta dan lebih tinggi 41,62% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2025 sebesar Rp344,78 Juta. Peningkatan realisasi tersebut terutama didorong oleh adanya kerja sama baru dalam pemanfaatan aset perusahaan yang mulai efektif selama periode berjalan, sehingga memberikan tambahan kontribusi terhadap pendapatan lain-lain perusahaan; dan
4. Pendapatan *advance/extend*, terealisasi sebesar Rp9,29 Miliar atau lebih tinggi 22,74% dari target 2026 sebesar Rp7,57 Miliar dan mengalami peningkatan sebesar 25,54% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2025 sebesar Rp7,40 Miliar. Realisasi

pendapatan *advance/extend* yang lebih tinggi dari targetnya salah satunya disebabkan oleh meningkatnya jadwal penerbangan maskapai di luar *Operating Hour* bandara.

2.7.3. Laporan Arus Kas

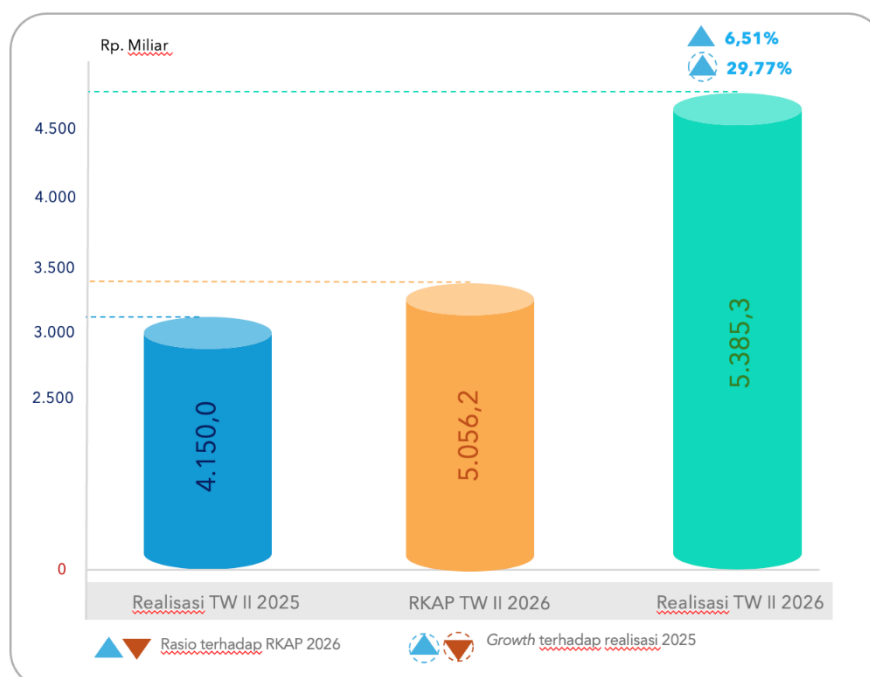
Semakin luasnya ruang udara yang dilayani oleh Perum LPPNPI memberikan dampak positif pada kondisi arus kas Perum LPPNPI. Perum LPPNPI mencatat nilai saldo kas akhir pada Triwulan II 2026 sebesar Rp5.385,33 Miliar atau lebih tinggi 6,51% dari target Triwulan II 2026 sebesar Rp5.056,24 Miliar dan mengalami peningkatan sebesar 29,77% dibandingkan realisasi Triwulan II 2025 sebesar Rp4.150,01 Miliar.

Tabel II.16
Laporan Arus Kas Triwulan II 2026

Deskripsi	2025	2026			Rasio		Growth
	Realisasi TW II	RKAP	RKAP TW II	Realisasi TW II	6 = 5:3	7 = 5:4	8 = (5-3):3
1	2	3	4	5	6 = 5:3	7 = 5:4	8 = (5-3):3
A Arus Kas dari Aktivitas Operasi							
1 Total Kas Masuk Aktivitas Operasi	2.504.585	5.812.954	2.617.266	2.576.350	44,32%	98,44%	2,87%
2 Total Kas Keluar Aktivitas Operasi	(1.873.313)	(4.508.653)	(2.296.128)	(2.090.953)	46,38%	91,06%	11,62%
Jumlah Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	631.272	1.304.301	321.138	485.397	37,22%	151,15%	-23,11%
B Arus Kas dari Aktivitas Investasi							
1 Total Kas Masuk Aktivitas Investasi	147.987	-	-	-	-	-	-
2 Total Kas Keluar Aktivitas Investasi	(81.680)	(769.380)	(278.221)	(296.792)	38,58%	106,67%	263,36%
* 3 Total Kas yang Dipisahkan Penggunaannya	44.670	238.201	95.724	275.599	115,70%	287,91%	516,96%
Jumlah Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	110.977	(531.179)	(182.497)	(21.194)	3,99%	11,61%	-119,10%
C Arus Kas dari Aktivitas Keuangan							
1 Total Kas Masuk Aktivitas Keuangan	-	-	-	-	-	-	-
2 Total Kas Keluar Aktivitas Keuangan	(3.469)	(7.931)	(4.035)	(4.142)	52,23%	102,65%	19,40%
Jumlah Kas Bersih dari Aktivitas Keuangan	(3.469)	(7.931)	(4.035)	(4.142)	52,23%	102,65%	19,40%
Surplus (Defisit)	738.780	765.191	134.606	460.062	60,12%	341,78%	-37,73%
Pengaruh Perubahan Kurs	(941)	-	-	3.636	-	-	-486,37%
Saldo Kas Awal	3.412.175	4.921.633	4.921.633	4.921.633	100,00%	100,00%	44,24%
Saldo Kas Akhir	4.150.013	5.686.824	5.056.240	5.385.331	94,70%	106,51%	29,77%

* Pada tahun 2026 dilakukan realokasi anggaran dari Kas Masuk Aktivitas Investasi menjadi Kas yang Dibatasi Penggunaannya, menyesuaikan dengan update pencatatan penggunaan dana PMN dalam laporan arus kas perusahaan.

Grafik II.8
Perbandingan Saldo Kas Akhir Triwulan II 2026 Terhadap Target dan Realisasi Triwulan II 2025



Saldo kas akhir Triwulan II 2026 Perusahaan mengalami surplus sebesar Rp460,06 Miliar, yang secara umum diperoleh dari aktivitas operasional perusahaan, di mana capaian kas masuk operasi pada Triwulan II 2026 lebih tinggi dibandingkan capaian kas keluar operasi. Kas masuk operasi Triwulan II 2026 terealisasi sebesar Rp2.576,35 Miliar atau lebih rendah 1,56% dari targetnya sebesar Rp2.617,27 Miliar dan tumbuh 2,87% dari realisasi pada Triwulan II 2025 sebesar Rp2.504,58 Miliar.

Sampai dengan Triwulan II 2026 tidak terdapat realisasi kas masuk dari aktivitas investasi. Selanjutnya, Kas yang Dipisahkan Penggunaannya terealisasi sebesar Rp275,60 miliar, atau 287,91% dari target Triwulan II sebesar Rp95,72 miliar. Realisasi tersebut merupakan dana yang bersumber dari PMN dan ditempatkan pada rekening khusus (*restricted account*). Dana tersebut akan dipindahkan ke rekening operasional perusahaan apabila terdapat pembayaran atas investasi yang dibiayai melalui PMN, sehingga pada periode yang sama akan terealisasi sebagai Kas Keluar dari Aktivitas Investasi. Disisi lain kas keluar investasi pada periode Triwulan II 2026 terealisasi sebesar Rp296,79 Miliar atau 106,67% dari targetnya sebesar Rp278,22 Miliar. Realisasi kas keluar investasi Triwulan II 2026 tersebut digunakan untuk pembayaran investasi yang dibiayai dari sumber dana internal perusahaan maupun dibiayai oleh PMN. Pembayaran tersebut merupakan bagian dari penyelesaian kontrak yang telah berlangsung sejak periode sebelumnya, sehingga secara kumulatif hingga Triwulan II 2026 progres pembayaran investasi yang dibiayai oleh PMN telah mencapai 95%, meliputi:

- a. Pembayaran Pekerjaan Pengadaan dan Penggantian Fasilitas ATM (ATC System) di Wilayah Ruang Udara Barat / Program New JATSC;
- b. Pembayaran Pekerjaan Peralatan Utama dan Konstruksi Bangunan di Medan;
- c. Pembayaran Pekerjaan Peralatan Utama dan Konstruksi Bangunan di Pontianak; dan
- d. Pembayaran Pekerjaan Pengadaan dan Penggantian Fasilitas ATM (ATC System) untuk pekerjaan peralatan utama Modernisasi Fasilitas Pelayanan APP, serta pembayaran atas pekerjaan konstruksi dan bangunan di Balikpapan.

Kas keluar dari aktivitas keuangan/pendanaan pada Triwulan II 2026 terealisasi sebesar Rp4,14 Miliar atau 102,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp4,03 Miliar, serta meningkat 19,40% dibandingkan realisasi pada Triwulan II 2025 sebesar Rp3,47 Miliar. Kas keluar dimaksud digunakan untuk pembayaran atas sewa aset hak guna sesuai PSAK 116.

2.8 KONTRIBUSI KEPADA NEGARA

2.8.1. Pajak

Tabel II.17
Realisasi Pembayaran Pajak Triwulan II 2026

Rp (Juta)

Deskripsi	Realisasi TW II		Growth
	2025	2026	
1	2	3	4 = (3-2):2
A Pajak Penghasilan (PPh)			
1 PPh 21	141.012	178.291	26,44%
2 PPh 22	2.048	4.665	127,81%
3 PPh 23	2.587	3.101	19,86%
4 PPh Final	1.689	2.344	38,76%
5 PPh 25	52.954	82.639	56,06%
6 PPh Badan	34.916	65.652	88,03%
Jumlah PPh	235.206	336.692	43,15%
B Pajak Pertambahan Nilai			
1 PPN	51.935	49.693	-4,32%
2 PPN WAPU	28.411	51.981	82,96%
Jumlah PPN	80.346	101.674	26,55%
C Pajak Lainnya			
1 PBB	588	594	0,97%
2 Pajak Kendaraan	6	14	128,14%
3 Pajak Giro / Pajak Bank	708	2.011	184,03%
4 PIB	-	-	-
5 Pajak Lainnya (Pengembalian, dll)	1	508	50739,03%
Jumlah Pajak Lainnya	1.303	3.127	139,96%
Total	316.855	441.493	39,34%

Pembayaran pajak s.d Triwulan II 2026 senilai Rp441,49 Miliar atau meningkat 39,34% dibandingkan dengan realisasi pembayaran pajak pada Triwulan II 2025 senilai Rp316,86 Miliar. Jumlah total pembayaran pajak s.d. Triwulan II 2026 turut memuat pembayaran pajak untuk pekerjaan Pengadaan dan Penggantian Fasilitas ATM (ATC System) di Wilayah Ruang Udara Barat RI (FIR Jakarta) / Program New JATSC, Balikpapan, Medan dan Pontianak yang dibiayai oleh PMN Tunai.

Realisasi pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) s.d. Triwulan II 2026 senilai Rp336,69 Miliar atau naik 43,15% dibandingkan dengan realisasi Triwulan II 2025, kenaikan pembayaran PPh sejalan dengan kenaikan pembayaran pada semua jenis pajak penghasilan, dengan pembayaran PPh perorangan (PPh 21) karyawan mengalami kenaikan sebesar 26,44%, kenaikan tersebut didorong dengan adanya kenaikan level jabatan dan promosi ke jabatan struktural sepanjang tahun 2025 hingga Triwulan II 2026 yang menyebabkan meningkatnya

pendapatan karyawan. Selain itu, pembayaran tunjangan kepada karyawan seperti tunjangan perumahan, cuti, hari raya hingga tunjangan kesejahteraan keluarga turut berkontribusi terhadap kenaikan pembayaran pajak penghasilan pasal 21.

PPh atas pengadaan barang dan jasa (PPh 22 dan PPh 23) masing-masing sebesar 127,81% dan 19,86% yang disebabkan oleh peningkatan pembayaran pajak terutama untuk pembelian barang perlengkapan kantor, pekerjaan sewa maupun jasa di Perum LPPNPI.

Sementara itu, meningkatnya pembayaran PPh Final Pasal 4 Ayat 2 sebesar 38,76% dari realisasi periode yang sama pada tahun sebelumnya disebabkan oleh fluktuasi nilai transaksi yang berasal dari beberapa pekerjaan konstruksi, baik berupa bangunan ataupun lapangan. Pembayaran angsuran PPh 25 tahun 2025 naik 56,06% dari realisasi periode yang sama di tahun 2025, kenaikan ini dipengaruhi oleh nilai pendapatan pada RKAP 2026 yang meningkat karena telah memperhitungkan kenaikan tarif PJNP yang mempengaruhi laba perusahaan sehingga angsuran PPh 25 lebih besar dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, realisasi pembayaran PPh Badan turut mengalami kenaikan sebesar 88,03%, di mana kenaikan ini dikarenakan sudah tidak terdapatnya kompensasi kerugian fiskal atas kerugian tahun 2020 dan 2021 untuk digunakan di tahun 2026 dan pembayaran PPh Badan telah dilaksanakan pada bulan April 2026.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara total turut mengalami kenaikan, yaitu sebesar 26,55%, yang dipengaruhi oleh kenaikan PPN WAPU sebesar 82,96%. Kondisi ini seiring dengan kenaikan transaksi perusahaan, baik pengadaan barang maupun jasa.

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) s.d. Triwulan II 2026 mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,97% dibandingkan dengan realisasi pembayaran pada periode yang sama di tahun 2025. Di mana, sepanjang Triwulan II Perum LPPNPI telah melaksanakan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di beberapa kantor cabang seperti Cabang Semarang sebesar Rp72,8 juta, Cabang Banjarmasin sebesar Rp333,9 juta, dan Cabang Halim Perdana Kusuma sebesar Rp101,3 juta. Di sisi lain, terealisasinya pembayaran Pajak Giro/Bank menyebabkan terjadinya kenaikan Pajak Giro/Bank sebesar 184,03%. Peningkatan ini dipengaruhi oleh penempatan dana pada bunga giro dengan skema *special rate* sepanjang tahun 2025 hingga Triwulan II 2026, yang menghasilkan pendapatan bunga giro dan berdampak langsung pada meningkatnya kewajiban Pajak Giro. Selain itu, Pajak Kendaraan juga mengalami kenaikan sebesar 128,14%. Berdasarkan kondisi tersebut, secara keseluruhan realisasi pembayaran pajak Triwulan II tahun 2026 mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025.

2.8.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Tabel II.18
Realisasi Pembayaran PNBP Triwulan II 2026

		Rp (Juta)	
Deskripsi	Realisasi TW II		Growth
	2025	2026	
1	2	3	4 = (3-2):2
A PNBP Kementerian Perhubungan			
1 Jumlah Pembayaran dalam Rupiah	164.372	161.844	-1,54%
2 Jumlah Pembayaran dalam US Dollar*	119.785	123.891	3,43%
Jumlah PNBP Kementerian Perhubungan	284.156	285.735	0,56%
B PNBP BMKG			
1 Jumlah Pembayaran dalam Rupiah	45.128	52.534	16,41%
2 Jumlah Pembayaran dalam US Dollar*	47.579	56.058	17,82%
Jumlah BMKG	92.707	108.591	17,13%
Total	376.863	394.327	4,63%

*) Realisasi telah dikonversi ke Rupiah

Pembayaran PNBP s.d. Triwulan II 2026 senilai Rp394,33 Miliar atau mengalami kenaikan sebesar 4,63% dari total PNBP yang dibayarkan pada periode yang sama tahun 2025 sebesar Rp376,86 Miliar. Dari pembayaran PNBP Triwulan II 2026, Perum LPPNPI telah merealisasikan pembayaran PNBP kepada Kementerian Perhubungan sebesar Rp285,74 Miliar atau meningkat 0,56% dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan II 2025 sebesar Rp284,16 Miliar. Sejalan dengan peningkatan pembayaran PNBP kepada Kementerian Perhubungan, pembayaran PNBP BMKG juga turut mengalami kenaikan dengan realisasi pembayaran sebesar Rp108,59 Miliar atau meningkat 17,13% dibandingkan realisasi pembayaran pada periode yang sama tahun 2025 sebesar Rp92,71 Miliar. Peningkatan realisasi pembayaran PNBP pada Triwulan II 2026 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, dipengaruhi oleh adanya pembayaran PNBP BMKG untuk periode penagihan Oktober 2025 yang dibayarkan pada Januari 2026, yang seharusnya dibayarkan pada Desember 2025.

Nilai realisasi pembayaran utang PNBP Kementerian Perhubungan sampai dengan Triwulan II 2026 merupakan porsi PNBP Kementerian Perhubungan atas pembayaran jasa pelayanan navigasi penerbangan yang telah dibayarkan oleh pengguna jasa pada periode bulan November 2025 s.d. April 2026. Sementara itu, realisasi pembayaran utang PNBP BMKG mencakup porsi PNBP BMKG atas pembayaran jasa pelayanan navigasi penerbangan yang telah dibayarkan oleh pengguna jasa pada periode bulan Oktober 2025 s.d. April 2026.

Secara keseluruhan, kenaikan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencerminkan konsistensi perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada pemerintah secara tertib, sekaligus menunjukkan bahwa aktivitas operasional perusahaan tetap terjaga sepanjang Triwulan II tahun 2026.

BAB III - LAPORAN PENCAPAIAN KPI, KINERJA KESELAMATAN, DAN HASIL ASESMEN GCG



3.1 KPI KORPORASI

Tabel III.1
Realisasi KPI Korporasi Triwulan II 2026

Deskripsi	ESG	Polaritas	Bobot	2026			Rasio	Skor
				RKAP	RKAP TW II	Realisasi TW II		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 : 6	9 = 8 x 4
A. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia			51,00					51,63
a. Finansial								
1 EBITDA	C	Maximize	8,00	Rp1550,96	Rp295,05	Rp801,68	271,71%	8,80
2 ROIC-WACC	C	Maximize	7,00	15,03%	-5,81%	4,13%	171,08%	7,70
3 Average Collecting Period (ACP)	C	Maximize	7,00	45	43	54	74,42%	5,21
b. Operasional								
4 Safety Performance Target (SPT)	G	Maximize	8,00	100,00%	100,00%	108,13%	108,13%	8,65
5 Departure Punctuality and Arrival Punctuality	C	Maximize	7,00	95,00%	95,00%	98,68%	103,87%	7,27
6 Customer Satisfaction Index	G	Maximize	7,00	4,4	0	0	100,00%	7,00
c. Sosial								
7 ESG Rating	S	Maximize	7,00	33	0	0	100,00%	7,00
B. Inovasi Model Bisnis			7,00					7,00
8 Penyesuaian Biaya PJNP Enroute International dan Overflying	C	Maximize	7,00	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	7,00
C. Kepemimpinan Teknologi			14,00					14,00
9 IT Cyber Security Maturity	G	Maximize	7,00	4,40	0	0	100,00%	7,00
10 First Priority in ICAO APAC Seamless Plan: Datalink di FIR JKT, ATFM, dan AIM	G	Maximize	7,00	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	7,00
D. Peningkatan Investasi			14,00					12,47
11 Realisasi PMN	S	Maximize	7,00	100,00%	0,00%	110,00%	110,00%	7,70
12 Realisasi Investasi Non PMN	G	Maximize	7,00	100,00%	18,51%	12,62%	68,18%	4,77
E. Pengembangan Talenta			14,00					15,40
13 Operasional ATC Simulator di 3 Lokasi (KNO, BPN, PNK)	S	Maximize	7,00	100,00%	40,00%	60,00%	150,00%	7,70
14 Talent Diversity	S	Maximize	7,00	17,00%	0,00%	50,00%	110,00%	7,70
Total								100,50

Kinerja Perusahaan diukur berdasarkan KPI yang tercantum dalam Kontrak Manajemen. Mendasari Surat Persetujuan Menteri BUMN atas RKAP Perum LPPNPI 2026, pengukuran KPI saat ini telah mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 tertanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Koorporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian KPI yang dilaporkan oleh unit kerja terkait, skor KPI Perum LPPNPI (KPI Korporasi) sampai dengan Triwulan II 2026 terealisasi sebesar **100,50**.

3.2 KPI DIREKTUR

3.2.1 Direktur Operasi

Tabel III.2
Realisasi KPI Direktur Operasi Triwulan II 2026

Deskripsi	ESG	Polaritas	Bobot	2026			Rasio	Skor
				RKAP	RKAP TW II	Realisasi TW II		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 : 6	9 = 8 x 4
A. KPI Bersama			40,00					42,52
1 EBITDA	C	Maximize	13,00	Rp1550,96	Rp295,05	Rp801,68	271,71%	14,30
2 Safety Performance Target (SPT)	G	Maximize	15,00	100,00%	100,00%	108,13%	108,13%	16,22
3 Penyesuaian Biaya PJNP Enroute International dan Overflying	C	Maximize	12,00	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	12,00
B. KPI Direktorat			60,00					62,79
4 Departure Punctuality and Arrival Punctuality	C	Maximize	10,00	95,00%	95,00%	98,68%	103,87%	10,39
5 First Priority in ICAO APAC Seamless Plan: Datalink di FIR JKT, ATFM, dan AIM	G	Maximize	10,00	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	10,00
6 Customer Satisfaction Index	G	Maximize	8,00	4,4	0	0	100,00%	8,00
7 Realisasi PMN	S	Maximize	10,00	100,00%	0,00%	110,00%	110,00%	11,00
8 Perwakilan AirNav di Organisasi Internasional	S	Maximize	7,00	2	0	2	110,00%	7,70
9 Peningkatan Kapasitas Runway di Bandara Soekarno Hatta (Jakarta) dan Ngurah Rai (Denpasar) Tahun 2026	G	Maximize	8,00	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	8,00
10 Digital Twin Data Foundation Readiness	G	Maximize	7,00	80,00%	40,00%	60,00%	150,00%	7,70
TOTAL								105,31

Penjelasan:

1. EBITDA

Sampai dengan Triwulan II 2026, Perum LPPNPI mencatat Laba Sebelum Pajak sebesar Rp619,19 Miliar. Dengan total pendapatan yang berhasil dicapai sebesar Rp2.079,03 Miliar dan total beban usaha sebesar Rp1.601,16 Miliar, serta diperhitungkannya beban penyusutan sebesar Rp209,80 Miliar, maka EBITDA untuk periode ini adalah **Rp801,68 Miliar**. Angka ini secara signifikan lebih tinggi daripada target yang ditetapkan dalam RKAP sampai dengan Juni tahun 2026, sebesar Rp295,05 Miliar. Kondisi ini menggambarkan pertumbuhan pendapatan yang mengalami peningkatan dan menandakan sebuah fase pemulihan menuju keadaan normal pasca pandemi (*bouncing back*).

2. Safety Performance Target (SPT)

Sampai dengan Triwulan II 2026, KPI *Safety Performance Target (SPT)* tercapai sebesar **108,13%** atau 8,13% di atas target Triwulan II 2026. Hal ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjamin keamanan dan keselamatan dalam pemberian layanan lalu lintas penerbangan di Indonesia.

3. Penyesuaian Biaya PJNP Enroute International dan Overflying

Dalam rangka menjaga *sustainability* dan peningkatan pelayanan navigasi penerbangan, Perum LPPNPI berinisiatif untuk melakukan penyesuaian biaya PJNP

Enroute International dan *Overflying*. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendorong modernisasi pelayanan penerbangan, peremajaan peralatan navigasi, serta peningkatan kompetensi personel. KPI Penyesuaian Biaya PJNP *Enroute International* dan *Overflying* merupakan suatu indikator ketepatan waktu implementasi penyesuaian Biaya pelayanan yang ditargetkan pada bulan Juli 2026. Dalam rangka mendorong capaian KPI tersebut Perum LPPNPI telah menyusun dokumen SLA pelayanan yang akan dipakai sebagai acuan standar pelayanan navigasi Perusahaan. Adapun dokumen tersebut telah disampaikan kepada Direktorat Navigasi Penerbangan. Capaian KPI tersebut sampai dengan Triwulan II 2026 sebesar **0%** atau sesuai dengan target Triwulan II 2026. Adapun KPI tersebut ditargetkan akan terlaksana pada periode Triwulan III 2026.

4. *Departure Punctuality and Arrival Punctuality*

KPI Departure Punctuality and Arrival Punctuality pada tahun 2026 memiliki fokus pada 2 (dua) lokasi, yaitu Cabang JATSC dan Cabang Denpasar dalam *window tolerance* (10 menit). Realisasi *KPI Departure Punctuality and Arrival Punctuality* sampai dengan Triwulan II 2026 tercapai **98,68%** atau lebih tinggi 3,68% dari target Triwulan II 2026 sebesar 95,00%. Realisasi *departure traffic* sampai dengan Triwulan II 2026 sebesar 122.905 dengan total *Punctual* sebesar 121.627. Sedangkan realisasi *arrival traffic* sampai dengan Triwulan II 2026 sebesar 122.514 dengan total *Punctual* sebesar 120.542.

5. *First Priority in ICAO APAC Seamless Plan: Datalink di FIR JKT, ATFM, dan AIM*

KPI First Priority in ICAO APAC Seamless Plan: Datalink di FIR JKT, ATFM, dan AIM merupakan salah satu komitmen perusahaan dalam rangka modernisasi pelayanan navigasi penerbangan di wilayah Indonesia. Adapun inisiatif tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas ruang udara, peningkatan keselamatan, serta optimalisasi dalam menjalankan kegiatan pelayanan navigasi penerbangan. Sampai dengan Triwulan II 2026 KPI tersebut tersealisasi sebesar **0%** atau sesuai target Triwulan II 2026. Adapun KPI tersebut ditargetkan terealisasi pada periode Triwulan IV 2026. Dalam rangka pemenuhan KPI tersebut, Direktorat Operasi telah melakukan beberapa rangkaian kegiatan, di antaranya:

a. Implementasi *Data-Link* di FIR Barat

Telah dilaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka mendukung kesiapan operasional *New JATSC*, yang meliputi rapat persiapan operasional serta pelaksanaan uji coba operasional D-ATIS (*Digital Automatic Terminal Information Service*) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan D-VOLMET (*Digital VOLMET*) di wilayah Jakarta FIR berdasarkan NOTAM terkait, pada periode 25 Juni sampai dengan 9 Juli 2026.

b. Implementasi ATFM untuk penerbangan domestik

Telah dilaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka mendukung implementasi *Air Traffic Flow Management* (ATFM) untuk penerbangan domestik, yang meliputi pelaksanaan SAT dan BAST fasilitas ATFM di Maret, penempatan personel untuk operasional Unit ATFM, serta persiapan peserta *site training* yang terdiri atas personel ATFM Teknik dan ATFM *Operator Batch 1* dan *Batch 2*.

c. Implementasi AIM

Telah dilaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka mendukung implementasi *Aeronautical Information Management* (AIM), yang meliputi familiarisasi AADPS, uji coba operasional dan evaluasi sistem *AviSuite AIS*, monitoring transisi operasional di NOTAM Office dan Unit PIA wilayah Medan, Palembang, Jakarta, dan Makassar, serta penyampaian laporan hasil pelaksanaan transisi dan *dry and wet shadow operation AviSuite AIS* selama Mei hingga Juni 2026.

6. Customer Satisfaction Index

KPI *Customer Satisfaction Index* merupakan indikator yang menunjukkan capaian kepuasan pelanggan atas pelayanan navigasi penerbangan dengan tujuan untuk mengukur kualitas layanan navigasi penerbangan (*service quality*) Perum LPPNPI yang mencakup berbagai aspek operasional dan mempengaruhi pengalaman pengguna layanan navigasi penerbangan berdasarkan hasil *gap analysis*, *importance performance analysis*, serta observasi dan/atau mekanisme lainnya. Adapun realisasi KPI *Customer Satisfaction Index* dengan Triwulan II 2026 sebesar **0** atau sesuai dengan target Triwulan II 2026. Sebagai upaya dukungan penyelesaian KPI tersebut, Direktorat Operasi telah melakukan *kick-off meeting (virtual meeting)* dan penerbitan SPRINT Tim *CSI* serta penyusunan metodologi dan teknis pelaksanaan survei. Adapun skor *CSI* diperkirakan akan terealisasi pada periode Triwulan IV 2026.

7. Realisasi PMN

KPI Realisasi PMN merupakan suatu indikator kinerja yang menggambarkan ketepatan waktu penyelesaian program PMN Tunai Tahun 2023 sampai dengan implementasi ATM Sistem di 4 (empat) lokasi. Sampai dengan Triwulan II 2026 KPI Realisasi PMN terealisasi sebesar **110%** atau lebih tinggi dari target Triwulan II 2026, di mana telah dilakukan implementasi ATM Sistem sistem di 4 (lokasi) yaitu Cabang Medan pada 18 November 2025, Cabang Pontianak pada 2 Desember 2025, Cabang Balikpapan pada 7 April 2026, dan Cabang JATSC pada 16 Juni 2026.

8. Perwakilan AirNav di Organisasi Internasional

KPI Perwakilan AirNav di Organisasi Internasional merupakan indikator yang menunjukkan capaian atas penempatan 2 (dua) personel AirNav Indonesia di Organisasi Internasional dengan tujuan meningkatkan eksistensi serta keterlibatan perusahaan pada Organisasi Internasional. Sampai dengan Triwulan II 2026 KPI Perwakilan AirNav

di Organisasi Internasional tercapai **2** atau lebih tinggi dari target Triwulan II 2026 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepemimpinan Regional (ICAO APAC): Direktur Operasi AirNav Indonesia, Bapak Setio Anggoro, secara resmi terpilih secara aklamasi sebagai *Chairperson APAC Project 30/10 Task Force (AP30-10/TF)* dalam rapat *Kick-off* tanggal 21 April 2026. Penunjukan ini didukung penuh oleh negara-negara anggota seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Pakistan, dan Mongolia, yang memperkuat posisi tawar AirNav Indonesia dalam menentukan arah kebijakan navigasi di kawasan Asia Pasifik;
- b. Penempatan Personel (ICAO Beijing): Telah diterbitkannya surat penunjukan resmi (*Letter of Engagement*) tertanggal 23 April 2026 untuk Bapak Irwandi Krisnata sebagai *Regional Officer, Performance Based Navigation (P-4)* di Kantor Sub-Regional ICAO Asia Pasifik, Beijing, China. Penugasan ini akan berlangsung efektif mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Mei 2029, di mana personel AirNav Indonesia akan bertugas sebagai Pejabat Senior (*Senior Official*) organisasi internasional tersebut.

9. Peningkatan Kapasitas Runway di Bandara Soekarno Hatta (Jakarta) dan Ngurah Rai (Denpasar) Tahun 2026

KPI Peningkatan Kapasitas *Runway* di Bandara Soekarno Hatta (CGK) dan I Gusti Ngurah Rai (DPS) Tahun 2026 merupakan indikator yang menggambarkan upaya strategis Perum LPPNPI dalam meningkatkan kapasitas dan efisiensi operasi *runway* pada Bandara Soekarno Hatta (Jakarta) dan Bandara I Gusti Ngurah Rai (Denpasar) melalui penerapan optimalisasi prosedur operasional, pemanfaatan infrastruktur eksisting, serta pengembangan konsep operasi lanjutan secara bertahap pada periode 2026-2030, yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan PT. Angkasa Pura Indonesia dengan tetap mengedepankan prinsip keselamatan, keteraturan dan efisiensi layanan navigasi penerbangan guna mendukung peningkatan *throughput runway*, pengurangan *runway occupancy time*, serta kesiapan bandara dalam menghadapi pertumbuhan trafik penerbangan. KPI Peningkatan Kapasitas *Runway* di Bandara Soekarno Hatta (CGK) dan I Gusti Ngurah Rai (DPS) Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II 2026 tercapai **0%** atau sesuai dengan target Triwulan II 2026. Adapun KPI tersebut diperkirakan akan terealisasi pada periode Triwulan IV 2026. Dalam rangka pemenuhan indikator tersebut, Direktorat Operasi telah melakukan beberapa upaya, diantaranya:

- a. Prosedur *Take Off Runway 3 (06/24)* di Bandara Soekarno Hatta
Telah dilaksanakan serangkaian kegiatan penyusunan Prosedur *Take Off Runway 3 (06/24)* Bandara Soekarno-Hatta, meliputi rapat penyusunan dan tindak lanjut *draft* prosedur pengoperasian *Runway 3*, serta penyusunan dokumen lembar penilaian formal dan *safety risk assessment* selama bulan Juni 2026.

- b. Prosedur Penggunaan *Rapid Exit Taxiway* dan *Fillet Runway* 09 di Bandara I Gusti Ngurah Rai

Telah dilaksanakan serangkaian kegiatan penyusunan Prosedur Penggunaan *Rapid Exit Taxiway* (RET) dan *Fillet Runway* 09 di Bandara I Gusti Ngurah Rai, meliputi penentuan lokasi, pembahasan implementasi, rapat teknis penyusunan prosedur, pembentukan tim, serta tindak lanjut penyusunan prosedur selama Februari hingga Juni 2026.

10. Digital Twin Data Foundation Readiness

KPI *Digital Twin Data Foundation Readiness* merupakan indikator kinerja yang menggambarkan kesiapan fondasi data dalam mendukung implementasi *Digital Twin*, khususnya melalui pelaksanaan akuisisi data *surveillance* yang dibutuhkan. Sampai dengan Triwulan II 2026 KPI *Digital Twin Data Foundation Readiness* terealisasi sebesar **60%** atau lebih tinggi dari target Triwulan II 2026 sebesar 40%. Adapun realisasi di atas target tersebut merupakan upaya percepatan yang dilakukan oleh Direktorat Operasi dengan melakukan serangkaian kegiatan meliputi penyusunan identifikasi *use case* dan *performance metrics*, rancangan pengiriman data *surveillance* Cat21 dan Cat62, serta standardisasi dan harmonisasi data selama April hingga Juni 2026.

3.2.2 Direktur Keselamatan, Keamanan dan Standardisasi

Tabel III.3
Realisasi KPI Direktur Keselamatan, Keamanan dan Standardisasi Triwulan II 2026

Deskripsi	ESG	Polaritas	Bobot	2026			Rasio	Skor
				RKAP	RKAP TW II	Realisasi TW II		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 : 6	9 = 8 x 4
A. KPI Bersama			40,00					42,52
1 EBITDA	C	Maximize	13,00	Rp1550,96	Rp295,05	Rp801,68	271,71%	14,30
2 Safety Performance Target (SPT)	G	Maximize	15,00	100,00%	100,00%	108,13%	108,13%	16,22
3 Penyesuaian Biaya PJNP Enroute International dan Overflying	C	Maximize	12,00	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	12,00
B. KPI Direktorat			60,00					62,60
4 Penilaian ESG	S	Maximize	10,00	33	0	0	100,00%	10,00
5 IT Cyber Security Maturity	G	Maximize	10,00	4,4	0	0	100,00%	10,00
6 Safety Maturity Level	G	Maximize	10,00	87%	0,00%	18,74%	110,00%	11,00
7 Safety Awareness Karyawan	G	Maximize	7,00	4,6	0	0	100,00%	7,00
8 Safety Risk Assessment	G	Maximize	8,00	100,00%	28,57%	65,71%	230,00%	8,80
9 Prosedur Penerbangan	G	Maximize	7,00	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	7,00
10 Crisis Management	S	Maximize	8,00	100,00%	10,00%	80,00%	800,00%	8,80
TOTAL								105,12

Penjelasan:

1. EBITDA

Sampai dengan Triwulan II 2026, Perum LPPNPI mencatat Laba Sebelum Pajak sebesar Rp619,19 Miliar. Dengan total pendapatan yang berhasil dicapai sebesar Rp2.079,03 Miliar dan total beban usaha sebesar Rp1.601,16 Miliar, serta diperhitungkannya beban penyusutan sebesar Rp209,80 Miliar, maka EBITDA untuk periode ini adalah **Rp801,68 Miliar**. Angka ini secara signifikan lebih tinggi daripada target yang ditetapkan dalam RKAP sampai dengan Triwulan II 2026, sebesar Rp295,05 Miliar. Kondisi ini menggambarkan pertumbuhan pendapatan yang mengalami peningkatan dan menandakan sebuah fase pemulihan menuju keadaan normal pasca pandemi (*bouncing back*).

2. Safety Performance Target (SPT)

Safety Performance Target (SPT) merupakan tingkat kinerja keselamatan minimum dalam penyelenggaraan penerbangan sipil oleh suatu negara yang ditetapkan melalui program keselamatan keamanan nasional atau penyedia jasa penerbangan yang ditetapkan melalui sistem manajemen, yang dinyatakan dalam target kinerja keselamatan. Realisasi indikator SPT sampai dengan Triwulan II 2026 terbentuk atas capaian 5 (lima) aspek penilaian, di antaranya:

a. Airprox Cat.A dan Cat.B

Capaian *Airprox Cat.A dan Cat.B* sampai dengan Triwulan II 2026 sebesar **0,56** atau di atas target SPT sebesar 1,28.

b. Runway Incursion Cat A dan Cat B

Tidak terdapat kejadian dengan kategori *Runway Incursion Cat A dan Cat B* dengan *ANS Contribution* sehingga capaian sampai dengan Triwulan II 2026 sebesar **0** atau di atas target SPT sebesar 0,07.

c. ATC Coordination Error between ATS Unit

Tidak terdapat kejadian dengan kategori *ATC Coordination Error between ATS Unit* dengan *ANS Contribution* sehingga capaian sampai dengan Triwulan II 2026 sebesar **0** atau di atas target SPT sebesar 13,28.

d. ATC Readback Hearback Issue

Capaian *ATC Readback Hearback Issue* dengan *ANS Contribution* sampai dengan Triwulan II 2026 sebesar **0,15** atau di atas target SPT sebesar 0,42.

e. Ketersediaan (Availability) Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan

Sampai dengan Triwulan II 2026, indikator Ketersediaan (*Availability*) Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan terealisasi sebesar **99,65%** atau di atas target SPT sebesar 99%. Adapun realisasi tersebut terbentuk atas capaian ketersediaan peralatan *Communication* sebesar 99,81%, *Navigation* sebesar 98,18%, *Surveillance* sebesar 100%, dan *Data Processing* sebesar 99,61%.

Berdasarkan realisasi atas 5 (lima) aspek tersebut, maka capaian KPI SPT sampai dengan Triwulan II 2026 sebesar **108,13%** atau 8,13% di atas target Triwulan II 2026. Hal ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjamin keamanan dan keselamatan dalam pemberian layanan lalu lintas penerbangan di Indonesia.

3. Penyesuaian Biaya PJNP Enroute International dan Overflying

Dalam rangka menjaga *sustainability* dan peningkatan pelayanan navigasi penerbangan, Perum LPPNPI berinisiatif untuk melakukan penyesuaian biaya PJNP *Enroute International* dan *Overflying*. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendorong modernisasi pelayanan penerbangan, peremajaan peralatan navigasi, serta peningkatan kompetensi personel. KPI Penyesuaian Biaya PJNP *Enroute International* dan *Overflying* merupakan suatu indikator ketepatan waktu implementasi penyesuaian Biaya pelayanan yang ditargetkan pada bulan Juli 2026. Dalam rangka mendorong capaian KPI tersebut Perum LPPNPI telah menyusun dokumen SLA pelayanan yang akan dipakai sebagai acuan standar pelayanan navigasi Perusahaan. Adapun dokumen tersebut telah disampaikan kepada Direktorat Navigasi Penerbangan. Capaian KPI tersebut sampai dengan Triwulan II 2026 sebesar **0%** atau sesuai dengan target Triwulan II 2026. Adapun KPI tersebut ditargetkan akan terlaksana pada periode Triwulan III 2026.

4. ESG Rating

ESG Rating adalah penilaian terhadap kinerja perusahaan dalam 3 (tiga) aspek utama, yaitu lingkungan (*Environmental*), sosial (*Social*), dan tata kelola (*Governance*). Penilaian ini mencerminkan seberapa baik perusahaan mengelola dampak dan risiko keberlanjutan yang berpengaruh terhadap operasional jangka panjang. *ESG Rating* kini menjadi acuan penting bagi pemangku kepentingan untuk menilai reputasi, risiko, dan potensi pertumbuhan perusahaan secara holistik dan tidak hanya dari sisi finansial. Adapun realisasi *KPI ESG Rating* sampai dengan Triwulan II 2026 adalah **0** atau sesuai dengan target tahun 2026. Adapun capaian *ESG Rating* ditargetkan akan terealisasi pada periode Triwulan IV 2026.

5. IT Cyber Security Maturity

IT Cyber Security adalah upaya perlindungan sistem teknologi informasi, jaringan, dan data digital dari ancaman atau serangan siber seperti peretasan, *malware*, dan pencurian data. Tujuannya adalah menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi, serta memastikan operasional bisnis tetap aman dan berjalan lancar. Bagi Perum LPPNPI yang mengelola sistem vital navigasi penerbangan nasional, penerapan dan asesmen *IT Cyber Security* menjadi sangat krusial guna memastikan bahwa infrastruktur digital yang mendukung keselamatan penerbangan terlindungi secara optimal. Asesmen ini membantu identifikasi celah keamanan, mengevaluasi tingkat kesiapan terhadap ancaman siber, dan memastikan bahwa kebijakan serta prosedur

keamanan TI selaras dengan standar industri serta regulasi nasional maupun internasional untuk menjaga keandalan layanan navigasi penerbangan dan kepercayaan *stakeholder*. Realisasi KPI IT *Cyber Security Maturity* akan terlaksana pada triwulan IV tahun 2026. Sehingga capaian kpi tersebut sampai dengan Triwulan II 2026 **0** atau sesuai dengan target tahun 2026 di mana telah dilaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka mendukung peningkatan tingkat kematangan keamanan siber (*IT Cyber Security Maturity*), yang meliputi koordinasi dengan BSSN terkait pelaksanaan dan asistensi IKAS, evaluasi hasil IKAS tahun 2025, identifikasi dan reviu kebutuhan *evidence* pada seluruh domain IKAS, perbandingan hasil penilaian tahun 2025 dengan rencana jangkauan penilaian tahun 2026, serta pelaksanaan *self-assessment* melalui pengisian *tools* IKAS. Adapun KPI tersebut akan terealisasi pada periode Triwulan IV 2026.

6. Safety Maturity Level

KPI *Safety Maturity Level* merupakan sebuah indikator yang menggambarkan kesesuaian pelaksanaan *Safety Management System* di 15 (lima belas) lokasi kerja sesuai dengan Ketentuan Perundangan yang bertujuan untuk mengukur hasil pelaksanaan *Safety Management System* di 15 (lima belas) lokasi kerja dan mengukur kapabilitas Perum LPPNPI dalam mengembangkan dan menginternalisasi budaya keselamatan guna mendukung tercapainya *Safety Performance Target*. Realisasi KPI *Safety Maturity Level* sampai dengan Triwulan II 2026 sebesar **18,74%** atau lebih tinggi dari target Triwulan II 2026. Adapun kegiatan penilaian telah dilakukan pada 3 (tiga) lokasi, di antaranya:

- a. Cabang Nabire, dengan hasil *Operating* sebanyak 7 aspek dan *Effective* sebanyak 28 aspek;
- b. Cabang Merauke, dengan hasil *Operating* sebanyak 13 aspek dan *Effective* sebanyak 22 aspek;
- c. Cabang Banda Aceh, dengan hasil *Operating* sebanyak 13 aspek dan *Effective* sebanyak 22 aspek.

7. Safety Awareness Karyawan

KPI *Safety Awareness Karyawan* pada tahun 2026 memiliki fokus pada level managerial perusahaan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menilai inisiatif dan kemampuan level managerial dalam menciptakan kesadaran pemahaman (*safety awareness*) terhadap pentingnya keselamatan. Realisasi KPI *Safety Awareness Karyawan* sampai dengan Triwulan II 2026 sebesar **0** atau sesuai dari Triwulan II 2026. Adapun kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada bulan Juli 2026. Adapun KPI tersebut akan terealisasi pada periode Triwulan IV 2026.

8. **Safety Risk Assessment**

KPI *Safety Risk Assessment* memiliki tujuan mengidentifikasi segala perubahan yang dapat mempengaruhi keselamatan pelayanan navigasi penerbangan serta menjelaskan mengapa tindakan keselamatan tertentu diambil dan menjelaskan mengapa prosedur keselamatan diimplementasikan ataupun diubah. Pada tahun 2026 Direktorat keselamatan, Keamanan, dan Standardisasi memiliki target sejumlah 35 pelaksanaan *Safety Risk Assessment*. Sampai dengan Triwulan II 2026 KPI *Safety Risk Assessment* terealisasi sebesar **65,71%** atau di atas target Triwulan II 2026 sebesar 28,57%, di mana telah dilaksanakan 23 kegiatan SRA. Adapun capaian di atas target tersebut dipengaruhi oleh percepatan pelaksanaan sejumlah kegiatan dalam rangka mendukung operasional perusahaan.

9. **Prosedur Penerbangan**

Realisasi KPI Pembuatan Prosedur Penerbangan sampai dengan Triwulan II 2026 sebesar **50%** atau sesuai dengan target Triwulan II 2026. Capaian ini ditunjukkan dengan telah selesainya pembuatan prosedur pada 4 (empat) lokasi, yaitu pembuatan prosedur pada bandara Andi Jemma, Bandara Aek Godang, Bandara A.A. Bere Tallo, dan Bandara Babo. Penyelesaian prosedur penerbangan akan memberikan dampak pada meningkatnya pelayanan dan keamanan penerbangan dikarenakan tersedianya prosedur yang terintegrasi.

10. **Crisis Management**

Penyusunan dokumen *Crisis Management* merupakan upaya perusahaan dalam penguatan sistem kesiapsiagaan, respon, dan keberlangsungan pelayanan navigasi penerbangan dalam menghadapi kondisi krisis di lingkungan Perum LPPNPI. Sampai dengan Triwulan II 2026 KPI *Crisis Management* tercapai sebesar **80%** atau lebih tinggi dari target Triwulan II 2026 sebesar 40%. Adapun terealisasinya KPI di atas target merupakan salah satu upaya percepatan dalam rangka meningkatkan keamanan dan kesiapan perusahaan dalam menghadapi segala kondisi. Pada Triwulan II 2026 Direktorat Keamanan, Keselamatan, dan Standardisasi telah menyelesaikan penyusunan draft Peraturan Direksi Tentang Manajemen Krisis Pelayanan Navigasi Penerbangan dan telah dilakukan rapat pembahasan internal Perum LPPNPI pada tanggal 20 Mei 2026.

3.2.3 Direktur Teknik

Tabel III.4
Realisasi KPI Direktur Teknik Triwulan II 2026

Deskripsi	ESG	Polaritas	Bobot	2026			Rasio	Skor
				RKAP	RKAP TW II	Realisasi TW II		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 : 6	9 = 8 x 4
A. KPI Bersama			40,00					42,52
1 EBITDA	C	Maximize	13,00	Rp1550,96	Rp295,05	Rp801,68	271,71%	14,30
2 Safety Performance Target (SPT)	G	Maximize	15,00	100,00%	100,00%	108,13%	108,13%	16,22
3 Penyesuaian Biaya PJNP Enroute International dan Overflying	C	Maximize	12,00	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	12,00
B. KPI Direktorat			60,00					57,60
4 Progres Fisik PMN Tunai	S	Maximize	10,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	10,00
5 Realisasi Investasi Non PMN	G	Maximize	10,00	100,00%	18,51%	12,62%	68,18%	6,82
6 IT Maturity Level	G	Maximize	8,00	3,1	0	0	100,00%	8,00
7 Pemenuhan Service Level Agreement Jaringan Komunikasi Penerbangan Nasional (Jarkompenas)	S	Maximize	8,00	99,00%	99,00%	99,93%	100,94%	8,08
8 Implementasi Sistem Monitoring dan Reporting Technology (SMART)	S	Maximize	7,00	100,00%	40,00%	55,00%	137,50%	7,70
9 Implementasi Managed Services untuk Fasilitas Bangunan	G	Maximize	7,00	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	7,00
10 Customer Satisfaction Index	G	Maximize	10,00	4,4	0	0	100,00%	10,00
TOTAL								100,12

Penjelasan:

1. EBITDA

Sampai dengan Triwulan II 2026, Perum LPPNPI mencatat Laba Sebelum Pajak sebesar Rp619,19 Miliar. Dengan total pendapatan yang berhasil dicapai sebesar Rp2.079,03 Miliar dan total beban usaha sebesar Rp1.601,16 Miliar, serta diperhitungkannya beban penyusutan sebesar Rp209,80 Miliar, maka EBITDA untuk periode ini adalah **Rp801,68 Miliar**. Angka ini secara signifikan lebih tinggi daripada target yang ditetapkan dalam RKAP sampai dengan Triwulan II 2026, sebesar Rp295,05 Miliar. Kondisi ini menggambarkan pertumbuhan pendapatan yang mengalami peningkatan dan menandakan sebuah fase pemulihan menuju keadaan normal pasca pandemi (*bouncing back*).

2. Safety Performance Target (SPT)

Sampai dengan Triwulan II 2026, KPI *Safety Performance Target (SPT)* tercapai sebesar **108,13%** atau 8,13% di atas target Triwulan II 2026. Hal ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjamin keamanan dan keselamatan dalam pemberian layanan lalu lintas penerbangan di Indonesia.

3. Penyesuaian Biaya PJNP Enroute International dan Overflying

Dalam rangka menjaga *sustainability* dan peningkatan pelayanan navigasi penerbangan, Perum LPPNPI berinisiatif untuk melakukan penyesuaian biaya PJNP *Enroute International* dan *Overflying*. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendorong modernisasi pelayanan penerbangan, peremajaan peralatan navigasi, serta

peningkatan kompetensi personel. KPI Penyesuaian Biaya PJNP *Enroute International* dan *Overflying* merupakan suatu indikator ketepatan waktu implementasi penyesuaian Biaya pelayanan yang ditargetkan pada bulan Juli 2026. Dalam rangka mendorong capaian KPI tersebut Perum LPPNPI telah menyusun dokumen SLA pelayanan yang akan dipakai sebagai acuan standar pelayanan navigasi Perusahaan. Adapun dokumen tersebut telah disampaikan kepada Direktorat Navigasi Penerbangan. Capaian KPI tersebut sampai dengan Triwulan II 2026 sebesar **0%** atau sesuai dengan target Triwulan II 2026. Adapun KPI tersebut ditargetkan akan terlaksana pada periode Triwulan III 2026.

4. Progres Fisik PMN Tunai

KPI Progres Fisik PMN Tunai bertujuan untuk peremajaan peralatan telekomunikasi penerbangan khususnya ATC System pada 4 (empat) lokasi serta mendukung pemenuhan atas PMN Tunai yang diserahkan kepada Perum LPPNPI di tahun 2023. Indikator ini menggambarkan ketepatan waktu penyelesaian fisik ATM Sistem di 4 (empat) lokasi program PMN Tunai Tahun 2023 dengan target waktu bulan Maret 2026. Sampai dengan Triwulan I 2026 KPI Progres Fisik PMN Tunai terealisasi sebesar **100%** atau sesuai target Triwulan II 2026, di mana telah diselesaikannya fisik ATM Sistem di 4 (empat) Lokasi yaitu pekerjaan ATM Sistem di JATSC, Pontianak, Balikpapan, dan Medan.

5. Realisasi Investasi Non PMN

KPI Realisasi Investasi Non PMN bertujuan memastikan perusahaan melaksanakan investasi tahun 2026 sesuai dengan usulan program investasi yang telah disetujui oleh Kementerian Perhubungan dengan Investasi Non PMN mencakup program dengan nilai total Rp 509.663.200.702,- dengan progres sampai dengan Triwulan II 2026 sudah mencapai **12,62%** dengan total nilai Rp64.316.357.126,37,- atau lebih rendah dari target Triwulan II 2026 sebesar 18,51% dengan nilai Rp94.333.447.551,-. Realisasi investasi non PMN tidak mencapai target dikarenakan terdapat beberapa pekerjaan *carry over* yang saat ini masih dalam proses pengadaan serta pekerjaan Usulan Baru yang direncanakan berkontrak pada Semester I 2026 belum dapat dilaksanakan dikarenakan masih berjalannya proses administrasi persetujuan investasi Tahun 2026. Dalam upaya percepatan, Perum LPPNPI telah melakukan pembahasan finalisasi terkait Persetujuan Investasi dengan Direktorat Navigasi Penerbangan pada 25 Juni 2026.

6. IT Maturity Level

KPI *IT Maturity Level* bertujuan menganalisa tingkat kematangan tata kelola dan pengelolaan teknologi informasi berdasarkan kerangka kerja COBIT, hal tersebut dilakukan agar pengelolaan teknologi informasi selaras dengan strategi bisnis, efektif, dan mampu memberikan nilai tambah pada perusahaan. Sampai dengan Triwulan II

2026 capaian KPI *IT Maturity Level* sebesar **0** atau sesuai dengan target Triwulan II 2026. Adapun kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung indikator kinerja tersebut adalah persiapan pengadaan jasa konsultasi *IT Maturity Level*. Adapun KPI tersebut akan terealisasi pada periode Triwulan IV 2026.

7. Pemenuhan *Service Level Agreement* Jaringan Komunikasi Penerbangan Nasional (Jarkompenas)

Jaringan Komunikasi Penerbangan Nasional (Jarkompenas) merupakan suatu jaringan yang mengintegrasikan jaringan komunikasi antar stasiun penerbangan (*ground-ground*) dengan jaringan navigasi penerbangan (*air-ground*) serta *stakeholder* penerbangan menjadi satu jaringan yang handal, efektif dan efisien menggunakan topologi *point to multipoint (full mesh)*. Adapun tujuan dari Indikator KPI tersebut memastikan terpenuhinya *Service Level Agreement* (SLA) atas layanan Jarkompenas guna kelancaran proses bisnis perusahaan. Sampai dengan Triwulan II 2026 terealisasi sebesar **99,93%** atau 0,93% di atas target Triwulan II 2026. Hal tersebut menunjukkan konsistensi Perum LPPNPI dalam menjaga kualitas layanan Jarkompenas sesuai standar yang telah ditetapkan, sehingga dapat mendukung kelancaran operasional pelayanan navigasi penerbangan secara optimal.

8. Implementasi Sistem *Monitoring dan Reporting Technology* (SMART)

KPI Implementasi Sistem *Monitoring dan Reporting Technology* (SMART) merupakan KPI lanjutan atas keberhasilan proses uji coba pengembangan sistem monitoring peralatan pada lokasi Jakarta dan Makassar. KPI ini sendiri memiliki tujuan untuk mempercepat proses bisnis perusahaan dalam pemeliharaan peralatan, di mana akan dilakukan optimalisasi kesiapan fasilitas navigasi menggunakan *IoT for Smart Process Engineering* guna mendeteksi kerusakan fasilitas penerbangan. Sampai dengan Triwulan II 2026 capaian KPI Implementasi Sistem *Monitoring dan Reporting Technology* (SMART) sebesar **55%** atau lebih tinggi 15% dari Target Triwulan II 2026, di mana telah dilaksanakan Review dan Tindak Lanjut SK Tim Pengembangan Aplikasi Sistem *Monitoring dan Reporting Technology* (SMART TOC) serta pemenuhan perlengkapan dalam rangka implementasi SMART.

9. Implementasi *Managed Services* untuk Fasilitas Bangunan

KPI Implementasi *Managed Services* untuk Fasilitas Bangunan bertujuan meningkatkan kehandalan pemeliharaan khususnya untuk fasilitas bangunan dengan metode *managed services*. Adapun capaian KPI Implementasi *Managed Services* untuk Fasilitas Bangunan sampai dengan Triwulan II 2026 sebesar **50%** atau sesuai dengan target Triwulan II 2026, di mana telah tersedianya dokumen teknis pada 27 Juni 2026 guna mendukung Implementasi *Managed Services* untuk Fasilitas Bangunan untuk selanjutnya dilakukan proses pengadaan pada triwulan berikutnya.

10. Customer Satisfaction Index

KPI *Customer Satisfaction Index* merupakan indikator yang menunjukkan capaian kepuasan pelanggan atas pelayanan navigasi penerbangan dengan tujuan untuk mengukur kualitas layanan navigasi penerbangan (*service quality*) Perum LPPNPI yang mencakup berbagai aspek operasional dan mempengaruhi pengalaman pengguna layanan navigasi penerbangan berdasarkan hasil gap *analysis*, *importance performance analysis*, serta observasi dan/atau mekanisme lainnya. Adapun realisasi KPI *Customer Satisfaction Index* dengan Triwulan II 2026 sebesar **0** atau sesuai dengan target Triwulan II 2026. Sebagai upaya dukungan penyelesaian KPI tersebut, Direktorat Operasi telah melakukan *kick-off meeting (virtual meeting)* dan penerbitan SPRINT Tim CSI serta penyusunan metodologi dan teknis pelaksanaan survei. Adapun skor CSI diperkirakan akan terealisasi pada periode Triwulan IV 2026.

3.2.4 Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

Tabel III.5
Realisasi KPI Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Triwulan II 2026

Deskripsi	ESG	Polaritas	Bobot	2026			Rasio	Skor
				RKAP	RKAP TW II	Realisasi TW II		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 : 6	9 = 8 x 4
A. KPI Bersama			40,00					42,52
1 EBITDA	C	Maximize	13,00	Rp1550,96	Rp295,05	Rp801,68	271,71%	14,30
2 Safety Performance Target (SPT)	G	Maximize	15,00	100,00%	100,00%	108,13%	108,13%	16,22
3 Penyesuaian Biaya PJNP Enroute International dan Overflying	C	Maximize	12,00	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	12,00
B. KPI Direktorat			60,00					59,84
4 ROIC-WACC	C	Maximize	10,00	15,03%	-5,81%	4,13%	171,08%	11,00
5 Average Collecting Period (ACP)	C	Minimize	10,00	45	43	54	74,42%	7,44
6 Penyerapan PMN Tunai 2023	S	Maximize	10,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	10,00
7 Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko	S	Maximize	7,00	93,00%	25,00%	61,77%	247,08%	7,70
8 Risk Maturity Index Score	C	Maximize	8,00	2,9	0	0	100,00%	8,00
9 Penyelesaian Peraturan dan Standar Kebijakan Ketahanan Keuangan	C	Maximize	8,00	100,00%	16,67%	16,67%	100,00%	8,00
10 Monitoring RJPP 2025-2029	G	Maximize	7,00	100,00%	0,00%	60,00%	110,00%	7,70
TOTAL								102,36

Penjelasan:

1. EBITDA

Sampai dengan Triwulan II 2026, Perum LPPNPI mencatat Laba Sebelum Pajak sebesar Rp619,19 Miliar. Dengan total pendapatan yang berhasil dicapai sebesar Rp2.079,03 Miliar dan total beban usaha sebesar Rp1.601,16 Miliar, serta diperhitungkannya beban penyusutan sebesar Rp209,80 Miliar, maka EBITDA untuk periode ini adalah **Rp801,68 Miliar**. Angka ini secara signifikan lebih tinggi daripada target yang ditetapkan dalam RKAP sampai dengan Triwulan II 2026, sebesar Rp295,05 Miliar. Kondisi ini menggambarkan pertumbuhan pendapatan yang mengalami

peningkatan dan menandakan sebuah fase pemulihan menuju keadaan normal pasca pandemi (*bouncing back*).

2. Safety Performance Target (SPT)

Sampai dengan Triwulan II 2026, KPI *Safety Performance Target (SPT)* tercapai sebesar **108,13%** atau 8,13% di atas target Triwulan II 2026. Hal ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjamin keamanan dan keselamatan dalam pemberian layanan lalu lintas penerbangan di Indonesia.

3. Penyesuaian Biaya PJNP Enroute International dan Overflying

Dalam rangka menjaga *sustainability* dan peningkatan pelayanan navigasi penerbangan, Perum LPPNPI berinisiatif untuk melakukan penyesuaian biaya PJNP *Enroute International* dan *Overflying*. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendorong modernisasi pelayanan penerbangan, peremajaan peralatan navigasi, serta peningkatan kompetensi personel. KPI Penyesuaian Biaya PJNP *Enroute International* dan *Overflying* merupakan suatu indikator ketepatan waktu implementasi penyesuaian Biaya pelayanan yang ditargetkan pada bulan Juli 2026. Dalam rangka mendorong capaian KPI tersebut Perum LPPNPI telah menyusun dokumen SLA pelayanan yang akan dipakai sebagai acuan standar pelayanan navigasi Perusahaan. Adapun dokumen tersebut telah disampaikan kepada Direktorat Navigasi Penerbangan. Capaian KPI tersebut sampai dengan Triwulan II 2026 sebesar **0%** atau sesuai dengan target Triwulan II 2026. Adapun KPI tersebut ditargetkan akan terlaksana pada periode Triwulan III 2026.

4. ROIC - WACC

Realisasi KPI ROIC - WACC pada Triwulan II 2026 sebesar **4,13%** atau lebih tinggi dari target Triwulan II 2026 sebesar -5,81%. Capaian tersebut mengindikasikan peningkatan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan nilai tambah dari pengelolaan modal yang diinvestasikan.

5. Average Collecting Period (ACP)

KPI *Average Collecting Period* bertujuan mengetahui efektifitas kinerja perusahaan dalam penagihan piutang terhadap maskapai. Sampai dengan Triwulan II 2026 KPI tersebut tercapai sebesar **54 hari** atau di bawah target Triwulan II 2026 sebesar 43 hari. Hal tersebut dikarenakan menurunnya kemampuan pembayaran maskapai yang disebabkan oleh peningkatan biaya operasional pasca kenaikan harga bahan bakar avtur.

6. Penyerapan PMN Tunai 2023

Sampai dengan Triwulan II 2026, KPI Penyerapan PMN Tunai 2023 terealisasi sebesar **100%** Sesuai dengan target Triwulan II 2026. Di mana telah dilakukan penyerapan anggaran atas program pendanaan PMN Tunai 2023 sebesar Rp599,74 Miliar dari keseluruhan nilai kontrak dikurangi total retensi.

7. Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko

KPI Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengelola risiko sesuai dengan peraturan BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 dan No. SK-3/DKU.MBU/05/2023. Dengan pemenuhan kualifikasi organ pengelola risiko, diharapkan organ pengelola risiko mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen risiko di seluruh unit kerja, meminimalkan potensi risiko operasional dan korporasi, serta mendukung pencapaian target strategis organisasi secara keseluruhan.

Realisasi KPI ini sampai dengan Triwulan II 2026 adalah **61,77%** atau lebih tinggi dari target Triwulan II 2026 sebesar 25%. Dimana telah terealisasi 42 organ pengelola risiko yang memenuhi kualifikasi dari target sejumlah 68 orang.

8. Risk Maturity Index Score

Mengacu pada jenis KPI ini yaitu dengan target realisasi berupa **skor RMI**, maka realisasi untuk KPI ini sampai dengan Triwulan II 2026 adalah **0** atau sesuai dengan target Triwulan II 2026. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi persiapan proses pengadaan konsultan terkait penilaian RMI dan kegiatan internalisasi penerapan Manajemen Risiko, Budaya Risiko, dan Tata Kelola. Adapun KPI tersebut akan terealisasi pada periode Triwulan IV 2026.

9. Penyelesaian Peraturan dan Standar Kebijakan Ketahanan Keuangan

KPI Penyelesaian Peraturan dan Standar Kebijakan Ketahanan Keuangan bertujuan untuk memastikan tersedianya peraturan dan standar kebijakan yang mutakhir, relevan, dan selaras dengan kebutuhan operasional serta manajemen risiko perusahaan, sehingga mampu memperkuat ketahanan keuangan secara berkelanjutan. Pada tahun 2026 terdapat 6 (enam) target, di antaranya:

- a. Pemutakhiran peraturan terkait pengelolaan aset atau barang milik perusahaan;
- b. Implementasi tata kelola mekanisme pembayaran PJNP;
- c. Pembuatan dokumen BCMS;
- d. Pemutakhiran dokumen *Contingency Plan*;
- e. Pembuatan dokumen SLA pelayanan; dan
- f. Pembuatan kajian monetisasi UTM.

Sampai dengan Triwulan II 2026, KPI Penyelesaian Peraturan dan Standar Kebijakan Ketahanan Keuangan terealisasi sebesar **16,67%** atau sesuai dengan target Triwulan I 2026. Di mana telah terealisasi 1 (satu) dokumen, yaitu Dokumen SLA pelayanan yang telah disampaikan pada Direktorat Navigasi Penerbangan pada bulan Juni 2026.

10. Monitoring RJPP 2025-2029

KPI Monitoring RJPP 2025-2029 merupakan bentuk komitmen perusahaan terhadap dokumen RJPP yang menjadi pedoman dalam segala kegiatan bisnis

perusahaan. KPI tersebut memiliki tujuan untuk memasrikan ketercapaian tujuan dan sasaran perusahaan dalam segala aspek yang tertuang pada RJPP 2025-2029. Sampai dengan Triwulan II 2026 KPI Monitoring RJPP 2025-2029 terealisasi sebesar **60%** atau lebih tinggi dari target Triwulan II 2026. Adapun kegiatan yang telah dilakukan meliputi evaluasi atas ketercapaian tiap sasaran di *project charter* dan evaluasi asumsi untuk diturunkan pada asumsi penyusunan RKAP 2027.

3.2.5 Direktur SDM dan Umum

Tabel III.6
Realisasi KPI Direktur SDM dan Umum Triwulan II 2026

Deskripsi	ESG	Polaritas	Bobot	2026			Rasio	Skor
				RKAP	RKAP TW II	Realisasi TW II		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 : 6	9 = 8 x 4
A. KPI Bersama			40,00					42,52
1 EBITDA	C	Maximize	13,00	Rp1550,96	Rp295,05	Rp801,68	271,71%	14,30
2 Safety Performance Target (SPT)	G	Maximize	15,00	100,00%	100,00%	108,13%	108,13%	16,22
3 Penyesuaian Biaya PJNP Enroute International dan Overflying	C	Maximize	12,00	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	12,00
B. KPI Direktorat			60,00					58,09
4 Keterselesaian Proses Lelang Investasi Non-PMN	S	Maximize	10,00	100,00%	100,00%	30,89%	30,89%	3,09
5 Operasional ATC Simulator di 3 lokasi (KNO, BPN, PNK)	S	Maximize	10,00	100,00%	40,00%	60,00%	150,00%	11,00
6 Talent Diversity	S	Maximize	10,00	17,00%	0,00%	50,00%	110,00%	11,00
7 Pemenuhan Training Need Analysis	G	Maximize	8,00	100,00%	20,00%	43,80%	219,00%	8,80
8 Penyelesaian Kajian Tender Internasional	G	Maximize	7,00	100,00%	0,00%	5,00%	110,00%	7,70
9 Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko	S	Maximize	7,00	93,00%	25,00%	61,77%	247,08%	7,70
10 Produktivitas Pegawai	C	Maximize	8,00	100,00%	33,87%	50,93%	150,37%	8,80
TOTAL								100,61

Penjelasan:

1. EBITDA

Sampai dengan Triwulan II 2026, Perum LPPNPI mencatat Laba Sebelum Pajak sebesar Rp619,19 Miliar. Dengan total pendapatan yang berhasil dicapai sebesar Rp2.079,03 Miliar dan total beban usaha sebesar Rp1.601,16 Miliar, serta diperhitungkannya beban penyusutan sebesar Rp209,80 Miliar, maka EBITDA untuk periode ini adalah **Rp801,68 Miliar**. Angka ini secara signifikan lebih tinggi daripada target yang ditetapkan dalam RKAP sampai dengan Triwulan II 2026, sebesar Rp295,05 Miliar. Kondisi ini menggambarkan pertumbuhan pendapatan yang mengalami peningkatan dan menandakan sebuah fase pemulihan menuju keadaan normal pasca pandemi (*bouncing back*).

2. Safety Performance Target (SPT)

Sampai dengan Triwulan II 2026, KPI *Safety Performance Target (SPT)* tercapai sebesar **108,13%** atau 8,13% di atas target Triwulan II 2026. Hal ini mencerminkan

komitmen perusahaan dalam menjamin keamanan dan keselamatan dalam pemberian layanan lalu lintas penerbangan di Indonesia.

3. Penyesuaian Biaya PJNP *Enroute International* dan *Overflying*

Dalam rangka menjaga *sustainability* dan peningkatan pelayanan navigasi penerbangan, Perum LPPNPI berinisiatif untuk melakukan penyesuaian biaya PJNP *Enroute International* dan *Overflying*. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendorong modernisasi pelayanan penerbangan, peremajaan peralatan navigasi, serta peningkatan kompetensi personel. KPI Penyesuaian Biaya PJNP *Enroute International* dan *Overflying* merupakan suatu indikator ketepatan waktu implementasi penyesuaian Biaya pelayanan yang ditargetkan pada bulan Juli 2026. Dalam rangka mendorong capaian KPI tersebut Perum LPPNPI telah menyusun dokumen SLA pelayanan yang akan dipakai sebagai acuan standar pelayanan navigasi Perusahaan. Adapun dokumen tersebut telah disampaikan kepada Direktorat Navigasi Penerbangan. Capaian KPI tersebut sampai dengan Triwulan II 2026 sebesar **0%** atau sesuai dengan target Triwulan II 2026. Adapun KPI tersebut ditargetkan akan terlaksana pada periode Triwulan III 2026.

4. Keterselesaian Proses Lelang Investasi Non-PMN

KPI Keterselesaian Proses Lelang Investasi Non-PMN bertujuan untuk mendukung pelaksanaan dan penyelesaian program investasi non-PMN di Perum LPPNPI. Sampai dengan Triwulan II 2026 telah terdapat penetapan pemenang sebanyak 21 program dan 89 program berprogres penetapan pemenang dimana telah diselesaikan dua tahap dari sembilan tahap yang ada, yaitu tahapan pemeriksaan kelengkapan dokumen permintaan pengadaan dan tahap rapat persiapan pengadaan, sehingga KPI Keterselesaian Proses Lelang Investasi Non-PMN terealisasi sebesar **30,89%** pada Triwulan II 2026, atau dibawah targetnya sebesar 100%. Ketidaktercapaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa pekerjaan *carry over* yang saat ini masih dalam proses pengadaan yang disebabkan masih berjalannya proses pembaharuan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang diperkirakan akan selesai pada bulan Juli 2026 serta pekerjaan Usulan Baru yang direncanakan berkontrak pada Semester I 2026 belum dapat dilaksanakan dikarenakan masih berjalannya proses administrasi persetujuan investasi Tahun 2026. Dalam upaya percepatan, Perum LPPNPI telah melakukan pembahasan finalisasi terkait Persetujuan Investasi dengan Direktorat Navigasi Penerbangan pada 25 Juni 2026.

5. Operasional ATC Simulator di 3 Lokasi (KNO, BPN, PNK)

KPI Operasional ATC Simulator di 3 Lokasi (KNO, BPN, PNK) merupakan bentuk dukungan atas implementasi ATM Sistem atas promgram PMN Tunai tahun 2023. Pada tahun 2026 telah direncanakan pelaksanaan *training* ATM Sistem di 3 (tiga) lokasi menggunakan simulator dengan target 115 personel ATC (rating APS). Sampai dengan

Triwulan II 2026, KPI Operasional ATC Simulator di 3 Lokasi (KNO, BPN, PNK) terealisasi sebanyak **60%** atau lebih tinggi dari target Triwulan II 2026 sebesar 40%. Sampai dengan Triwulan II 2026 telah dilaksanakan program operasional ATC simulator pada 69 orang, adapun capaian melampaui di atas target tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam meningkatkan pelayanan dengan percepatan dan optimalisasi dalam implementasi ATM Sistem .

6. Talent Diversity (Millenial and Women)

KPI Talent Diversity memiliki tujuan untuk memastikan tersedianya pejabat *millenial* dan perempuan dalam *talent pool* perusahaan untuk mendorong inklusivitas, menciptakan lingkungan kerja yang beragam, dan memaksimalkan potensi SDM dengan perspektif yang luas. *Talent Diversity* terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu:

- a. *Nominated Talent Muda (millenial)*, yang bertujuan untuk mengukur talent muda dalam rangka menjaring pemimpin muda yang memiliki inovasi yang baik menjadi inspirator serta penggerak kemajuan dan transformasi BUMN. Komponen *KPI* ini terealisasi 0% pada Triwulan II 2026;
- b. *Women Nominated Talent*, yang bertujuan untuk mengukur perempuan dalam rangka mendukung transformasi *Human Capital* di BUMN untuk mencapai kesetaraan *gender*, serta menyeimbangkan komposisi kepemimpinan yang berujung pada terciptanya iklim perusahaan yang lebih baik. Komponen *KPI* ini terealisasi 100% pada Triwulan II 2026.

Berdasarkan realisasi atas *nominated talent* muda dan *women nominated talent* di atas maka realisasi *KPI Talent Diversity* sampai dengan Triwulan II 2026 adalah **50%** atau lebih tinggi dari target Triwulan II 2026.

7. Pemenuhan Training Need Analysis

Dalam rangka identifikasi pemenuhan dan peningkatan kompetensi karyawan, Direktorat SDM dan Umum menyusun *Training Need Analysis*. Berdasarkan dokumen tersebut, selama tahun 2026 terdapat target pelaksanaan sebanyak 137 pelatihan. Sampai dengan Triwulan II 2026 telah terlaksana sebanyak 60 pelatihan, sehingga realisasi KPI Pemenuhan *Training Need Analysis* tercapai sebesar **43,80%** atau lebih tinggi dari target Triwulan II 2026. Hal tersebut dikarenakan beberapa upaya percepatan pemenuhan kompetensi karyawan sebagai dukungan pemenuhan dukungan atas gap kompetensi pada suatu jabatan.

8. Penyelesaian Kajian Tender Internasional

KPI Penyelesaian Kajian Tender Internasional merupakan suatu indikator yang menunjukkan keterselesaian proses penyusunan dokumen analisa penggunaan tender internasional pada proses lelang perusahaan. Hal tersebut dilakukan guna peningkatan pelayanan dan keamanan pelayanan navigasi penerbangan. Sampai dengan Triwulan II 2026 terealisasi sebesar **5%** atau lebih tinggi dari target Triwulan II 2026. Hal tersebut

disebabkan telah dilaksanakannya diskusi dengan Ikatan Ahli Pengadaaan Indonesia (IAPI) dan pengumpulan data pendukung dari berbagai sumber sebagai tahap awal penyusunan kajian tender internasional.

9. Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko

KPI Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengelola risiko sesuai dengan peraturan BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 dan No. SK-3/DKU.MBU/05/2023. Dengan pemenuhan kualifikasi organ pengelola risiko, diharapkan organ pengelola risiko mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen risiko di seluruh unit kerja, meminimalkan potensi risiko operasional dan korporasi, serta mendukung pencapaian target strategis organisasi secara keseluruhan.

Realisasi *KPI* ini sampai dengan Triwulan II 2026 adalah **61,77%** atau lebih tinggi dari target Triwulan II 2026 sebesar 25%. Dimana telah terealisasi 42 organ pengelola risiko yang memenuhi kualifikasi dari target sejumlah 68 orang.

10. Produktivitas Pegawai

KPI Produktivitas Pegawai bertujuan untuk mengetahui tingkat produktivitas pegawai dengan target sesuai dengan RKAP tahun 2026 sebagai acuan untuk meningkatkan tingkat produktivitas per karyawan perusahaan pada tahun berikutnya. Perhitungan produktivitas pegawai terdiri dari produktivitas finansial dan produktivitas operasional dengan rincian sebagai berikut :

- a. Produktivitas finansial, dihitung berdasarkan nilai *EBITDA* tahun 2026 dibagi dengan total SDM tahun 2026. Realisasi produktivitas finansial pada Triwulan II 2026 adalah 0,165, yang diperoleh dari realisasi nilai *EBITDA* sebesar Rp801,68 Miliar dan jumlah SDM sebesar 4.859 orang. Dengan realisasi produktivitas finansial tersebut, maka tingkat capaian produktivitas finansial pada Triwulan II 2026 sebesar 26,08%;
- b. Produktivitas operasional, dihitung berdasarkan nilai total trafik tahun 2026 dibagi dengan total SDM tahun 2026. Realisasi produktivitas operasional pada Triwulan II 2026 adalah 203,65, yang diperoleh dari realisasi total trafik sebesar 989.520 pergerakan dan jumlah SDM sebesar 4.859 orang. Dengan realisasi produktivitas operasional tersebut, maka tingkat capaian produktivitas operasional pada Triwulan II 2026 tersebut adalah 24,85%.

Berdasarkan komponen perhitungan produktivitas pegawai di atas, realisasi total produktivitas pegawai pada Triwulan II 2026 adalah **50,93%** atau lebih tinggi dari target tahun Triwulan II 2026 sebesar 33,87%.

3.3 HASIL ASESMEN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TAHUN 2024

Terbitnya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara telah mengubah mekanisme pelaksanaan pengukuran penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*), yang terdiri atas penilaian (*assessment*) yang dilaksanakan setiap dua tahun dan evaluasi (*review*) pada tahun berikutnya terhadap tindak lanjut hasil penilaian. Meskipun Peraturan Menteri tersebut telah mencabut PER-01/MBU/2011 dan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012, sampai dengan pelaksanaan asesmen Tahun Buku 2024 belum terdapat indikator dan parameter pengukuran pengganti, sehingga penilaian GCG Tahun 2024 masih dilaksanakan berdasarkan indikator dan parameter sebagaimana diatur dalam SK-16/S.MBU/2012.

Pada tanggal 16 April 2026 telah dilaksanakan *Exit Meeting* Pengukuran Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun 2024, di mana Perum LPPNPI memperoleh skor akhir sebesar **90,69** dengan klasifikasi "**Sangat Baik**", meningkat 1,05 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar **89,64**. Hasil tersebut mencerminkan konsistensi Perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* melalui penguatan komitmen tata kelola, penyediaan perangkat tata kelola yang memadai, serta penyempurnaan berbagai kebijakan, pedoman, dan prosedur yang mendukung pelaksanaan *governance process*. Perusahaan juga terus mengimplementasikan prinsip transparansi melalui publikasi Laporan Tahunan sebagai bentuk akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan. Meskipun demikian, hasil asesmen masih mengidentifikasi 58 *Area of Improvement* (AOI) yang menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan untuk semakin meningkatkan kualitas penerapan GCG di Perum LPPNPI.

Menindaklanjuti hasil asesmen tersebut, Badan Pengaturan BUMN menerbitkan Surat Nomor S-5/DKU.BP/04/2026 tanggal 24 April 2026 tentang Pelaksanaan Penilaian atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Surat tersebut mengamanatkan pelaksanaan Penilaian GCG Tahun Buku 2025, yang tetap menggunakan indikator dan parameter SK-16/S.MBU/2012 sepanjang masih relevan, dengan pendalaman analisis yang mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor 1, 2, dan 3 Tahun 2023 serta peraturan internal perusahaan. Selain mengukur tingkat penerapan GCG Tahun Buku 2025, asesmen juga difokuskan pada evaluasi tindak lanjut atas rekomendasi dan *Area of Improvement* hasil asesmen Tahun 2024, sehingga dapat memastikan proses perbaikan tata kelola berjalan secara berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 25 Juni 2026 Perum LPPNPI telah melaksanakan Entry Meeting Pengukuran Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun 2025 yang dihadiri oleh Direksi, Dewan Pengawas, Organ Pendukung Dewan Pengawas, serta tim asesor independen dari PT Dinamika Pasifik Solusindo (DPS Consulting). Melalui kegiatan tersebut

disampaikan ruang lingkup pekerjaan, metodologi pengukuran, parameter penilaian, struktur tim, timeline pelaksanaan, mekanisme pengumpulan dokumen, serta rencana tindak lanjut selama proses asesmen. Pelaksanaan pengukuran dilakukan melalui tahapan review dokumen, penyebaran kuesioner, wawancara, observasi, pengolahan data, *pre-closing*, hingga penyampaian hasil akhir dan rekomendasi.

BAB IV - LAPORAN MANAJEMEN RISIKO & AUDIT INTERN



4.1. LAPORAN PEMANTAUAN RISIKO

Pengelolaan risiko di lingkungan Perum LPPNPI mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tertanggal 03 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Keputusan Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko KBUMN No. SK-7/DKU.MBU/10/2023 tertanggal 26 Oktober 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Manajemen Risiko BUMN Dalam Penerapan Manajemen Risiko, Perum LPPNPI menggunakan acuan *International Organization for Standardization (ISO) 31000:2018 Risk Management - Guidelines* yang telah mendapatkan sertifikasi dari Badan Standardisasi Nasional (BSN) tahun 2018 yang kemudian diadopsi menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 31000:2018.

4.1.1. Realisasi Perhitungan Risiko Residual yang Dibandingkan dengan Rencana Target Risiko Residual Sesuai Periode Pelaporan

Sebagai bagian dari proses manajemen risiko yang berkesinambungan, Perum LPPNPI secara periodik melakukan pengukuran terhadap risiko *residual* aktual (*current residual risk*) dan membandingkannya dengan target *residual risk* sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026.

Pengukuran ini bertujuan untuk menilai efektivitas implementasi perlakuan risiko yang telah dilakukan hingga Triwulan II 2026 serta mengidentifikasi potensi deviasi antara kondisi aktual dengan proyeksi risiko yang telah direncanakan sebelumnya. Pada tabel di bawah ini disajikan realisasi perbandingan Risiko *Inherent*, Target Risiko *Residual* Triwulan II 2026, dan Risiko *Current* Triwulan II 2026 berdasarkan 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1. *Inherent Risk*, yaitu risiko yang melekat sebelum dilakukan mitigasi;
2. *Target Residual Risk*, yaitu risiko yang ditargetkan setelah dilakukan perlakuan risiko;
3. *Current Risk*, yaitu risiko aktual berdasarkan pemantauan hingga Triwulan II 2026.

Tabel IV.1
Perhitungan *Inherent Risk*, Target *Residual Risk* Tahun 2026 dan *Current Risk* Triwulan II 2026

No	Peristiwa Risiko	Inherent Risk 2026			Target Residual Risk 2026			Current Risk Triwulan II 2026		
		K	D	Level of Risk	K	D	Level of Risk	K	D	Level of Risk
1	Risiko dampak serangan cyber pada pelayanan dan proses bisnis	4	5	High (24)	2	2	Low to Moderate (6)	2	4	Moderate to High (16)

No	Peristiwa Risiko	Inherent Risk 2026			Target Residual Risk 2026			Current Risk Triwulan II 2026		
		K	D	Level of Risk	K	D	Level of Risk	K	D	Level of Risk
2	Risiko tidak tercapainya target peningkatan keselamatan operasional pelayanan	2	5	High (21)	1	2	Low (5)	2	4	Moderate to High (19)
3	Risiko terlambatnya pengoperasian New ATM JATSC dan Balikpapan	5	4	High (22)	2	2	Low to Moderate (6)	2	2	Low to Moderate (6)
4	Risiko terganggunya ketahanan keuangan (<i>financial resilience</i>) akibat terhambatnya proses penanganan piutang <i>current</i> dan <i>non current</i>	4	5	High (24)	2	2	Low to Moderate (6)	4	5	High (24)
5	Risiko terhambatnya proses bisnis perusahaan dampak dari restrukturisasi organisasi	4	5	High (24)	2	2	Low to Moderate (6)	4	3	Moderate (14)
6	Risiko tidak tercapainya target investasi (non PMN)	4	5	High (24)	2	2	Low to Moderate (6)	4	5	High (24)
7	Risiko tidak terealisasinya penyesuaian biaya PJNP	4	5	High (24)	2	2	Low to Moderate (6)	4	5	High (24)

Tabel IV.2

Perhitungan *Inherent Risk*, *Target Residual Risk* Triwulan II 2026 dan *Current Risk* Triwulan II 2026

No	Peristiwa Risiko	Inherent Risk 2026			Target Residual Risk Triwulan II 2026			Current Risk Triwulan II 2026		
		K	D	Level of Risk	K	D	Level of Risk	K	D	Level of Risk
1	Risiko dampak serangan <i>cyber</i> pada pelayanan dan proses bisnis	4	5	High (24)	4	5	High (24)	2	4	Moderate to High (16)
2	Risiko tidak tercapainya target peningkatan keselamatan operasional pelayanan	2	5	High (21)	2	5	High (21)	2	4	Moderate to High (16)
3	Risiko terlambatnya pengoperasian New ATM JATSC dan Balikpapan	5	4	High (22)	4	4	Moderate to High (19)	2	2	Low to Moderate (6)
4	Risiko terganggunya ketahanan keuangan (<i>financial resilience</i>) akibat terhambatnya proses penanganan piutang <i>current</i> dan <i>non current</i>	4	5	High (24)	4	5	High (24)	4	5	High (24)
5	Risiko terhambatnya proses bisnis perusahaan dampak dari restrukturisasi organisasi	4	5	High (24)	3	4	Moderate to High (18)	4	3	Moderate (14)
6	Risiko tidak tercapainya target investasi (non PMN)	4	5	High (24)	4	5	High (24)	4	5	High (24)
7	Risiko tidak terealisasinya penyesuaian biaya PJNP	4	5	High (24)	4	5	High (24)	4	5	High (24)

Setiap triwulan dilakukan asesmen terhadap profil yang ada, dan berdasarkan pemantauan serta evaluasi pada Triwulan II 2026 diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Terdapat 3 (tiga) kategori **High**, yaitu:
 - a. Risiko terganggunya ketahanan keuangan (*Financial Resilience*) akibat terhambatnya proses penanganan piutang current dan non current;
 - b. Risiko tidak tercapainya target investasi (non PMN); dan
 - c. Risiko tidak terealisasinya penyesuaian biaya PJNP.
2. Terdapat 2 (dua) kategori **Moderate to High**, yaitu:
 - a. Risiko dampak serangan cyber pada pelayanan dan proses bisnis; dan
 - b. Risiko tidak tercapainya target peningkatan keselamatan operasional pelayanan;
3. Terdapat 1 (satu) kategori **Moderate**, yaitu:
 - a. Risiko terhambatnya proses bisnis perusahaan dampak dari restrukturisasi organisasi.
4. Terdapat 1 (satu) kategori **Low to Moderate**, yaitu:
 - a. Risiko terlambatnya pengoperasian New ATM JATSC dan Balikpapan.

Berdasarkan hasil asesmen di Triwulan II 2026, terdapat sejumlah perubahan dalam profil risiko perusahaan. Hal ini mencerminkan adanya upaya yang konsisten dari manajemen dalam mengelola dan mengendalikan risiko secara tepat sasaran, serta perubahan yang terjadi menunjukkan bahwa sebagian besar risiko telah dikelola secara aktif.

1. *Current Risk* **sama dengan target** sebanyak 3 (tiga) risiko, yaitu:
 - a. Risiko tidak tercapainya target investasi (Non PMN) masuk dalam kategori High (24);
 - b. Risiko terganggunya ketahanan keuangan (*Financial Resilience*) akibat terhambatnya proses penanganan piutang current dan non current dengan realisasi *Current Risk* masuk dalam kategori High (24);
 - c. Risiko tidak terealisasinya penyesuaian biaya PJNP masuk dalam kategori High (24)
2. *Current Risk* **lebih rendah dari target** sebanyak 4 (empat) risiko, yaitu:
 - a. Risiko dampak serangan cyber pada pelayanan dan proses bisnis dengan realisasi *Current Risk* masuk dalam kategori Moderate to High (16) dari target High (24);
 - b. Risiko tidak tercapainya target peningkatan keselamatan operasional pelayanan masuk dalam kategori Moderate to High (16) dari target High (21)
 - c. Risiko terlambatnya pengoperasian New ATM JATSC dan Balikpapan masuk dalam kategori Low to Moderate (6) dari target Moderate to High (19);

- d. Risiko terhambatnya proses bisnis Perusahaan dampak dari Restrukturisasi Organisasi dengan realisasi Current Risk masuk dalam kategori Moderate (14) dari target Moderate to High (18).

4.1.2. Realisasi Pelaksanaan Perlakuan Risiko dan Biaya

Sebagai tindak lanjut atas identifikasi risiko yang telah dilakukan, Perum LPPNPI telah menyusun dan melaksanakan berbagai program mitigasi sesuai rencana kerja tahun 2026 dengan timeline spesifik sebagaimana ditunjukkan pada Tabel IV.3. Pemantauan terhadap pelaksanaan perlakuan risiko dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas kegiatan serta realisasi biaya yang telah dikeluarkan.

Laporan berikut memuat capaian pelaksanaan mitigasi risiko pada Triwulan II 2026, yang disajikan berdasarkan peristiwa risiko utama.

Tabel IV.3
Timeline Mitigasi Risiko

No. Risiko	No. Penyebab Risiko	Penyebab risiko	Rencana Perlakuan Risiko	Rencana Biaya Perlakuan Risiko (Rp/Mata Uang Lain)	Timeline (Bulan)											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	a	Terjadi serangan cyber atau gangguan keamanan yang berdampak pada sistem navigasi penerbangan	Penyusunan mekanisme dan prosedur dari ancaman cyber	69.977.855.802												
	b	Tidak tersedianya perlindungan terhadap serangan cyber pada infrastruktur dan layanan sistem kritis	Penyediaan proteksi pada infrastruktur dan layanan sistem kritis													
	c	Tidak tersedianya tools untuk melakukan monitoring dan pengawasan keamanan cyber	Penyediaan tools untuk monitoring dan pengawasan keamanan cyber													
	d	Lisensi hardware dan software sistem kritis tidak terupdate sehingga menimbulkan kerentanan keamanan	Penyediaan lisensi hardware dan software sistem kritis serta dukungan teknis													
	e	Kepagagalan dalam pemulihan bencana/gangguan sistem kritis karena tidak tersedianya DRC	Penyediaan infrastruktur DRC untuk sistem kritis													
	f	Kapabilitas tim yang terbatas dalam menyusun tata kelola dan kapotuhan keamanan cyber	Peningkatan kompetensi terkait cyber security													
	g	Kurangnya Knowledge tentang keamanan cyber dari karyawan	Peningkatan budaya dan knowledge keamanan cyber karyawan													
	a	Belum terpenuhinya peningkatan Kualitas (Kompetensi) dan Kuantitas Personil dalam hal Pelatihan Personel	Program pelatihan personil operasi sesuai dengan kebutuhan dan relevan dengan isu keselamatan													
	b	Belum terpenuhinya kebutuhan Personel	Pemenuhan kebutuhan personil operasi mengacu pada FRMS minimum dan lokasi yang high density yaitu JATSC dan Bali													
	c	Belum efektifnya Review dan Sosialisasi Dokumen standar lalu lintas penerbangan, antara lain manual operasi, manual ATS, SOP dan LOCA	Proses penyusunan/review dokumen													
2	d	Belum diimplementasikannya prosedur PBN di Bandara baru dan Bandara yang tidak memiliki fasilitas Navaid	Pelaksanaan sosialisasi dokumen standar lalu lintas penerbangan	294.757.185.051												
	e	Belum optimalnya pelaksanaan Review Prosedur PBN dan Prosedur Penerbangan Konvensional	Pembuatan Prosedur Penerbangan PBN dan/atau Konvensional sesuai target/prioritas													
	f	Kebutuhan Suku cadang yang obsolete	Pelatihan personil pada bidang penyusunan prosedur penerbangan RNP-AR dan P-RIS													
	g	Terhambatnya implementasi JARKOMPENAS yang terintegrasi dalam layanan navigasi penerbangan yang dikelola oleh AirNav	Review Prosedur Penerbangan PBN sesuai prioritas													
	h	Belum Optimalnya struktur organisasi Direktorat Operasi	Pelatihan personil pada bidang penyusunan prosedur penerbangan PBN													
	i	Belum optimalnya Penanganan potensi dampak pasca kejadian ATS incident	Melakukan pemeliharaan backup peralatan navigasi sesuai dengan kriteria urgensi umur teknis peralatan													
	j	Isu atas SDM & Hubungan Industrial	Managed Service oleh pihak ketiga untuk pemeliharaan fasilitas													
	k	Keterlambatan proses dan ketidaksesuaian mutu pekerjaan	Peningkatan kompetensi personil AMF terkait dengan fasilitas kritis yang dimiliki													
	l	Keterlambatan pelaksanaan proyek pengadaan ATM System di JATSC dan Balikpapan karena faktor pendukung sarana dan prasarana	Pengadaan fasilitas telekomunikasi penerbangan sesuai dengan program usulan investasi Airnav Indonesia													
	m	Belum tersedianya dokumen untuk transisi New ATM System di JATSC dan Balikpapan	Implementasi, identifikasi dan pelaksanaan evaluasi pemanfaatan JARKOMPENAS													
3	a	Jumlah piutang yang bertambah:	Pelaksanaan kegiatan safety assessment JARKOMPENAS	4.309.926.419												
	b	1. Piutang current	Program Managed Service JARKOMPENAS													
	c	2. Piutang noncurrent, dikarenakan piutang tidak tertagih optimal	Penyusunan dokumen transisi JARKOMPENAS													
	d	Potensi ketidakakuratan data/ terhambatnya sinkronisasi data penerbangan (misal: untuk penerbangan lintas)	Dukungan transisi JARKOMPENAS													
4	a	Jumlah piutang Noncurrent tidak tertagih dalam hal terjadi palit (lebanglutan) pihak maskapai yang mengakibatkan Kerugian perusahaan	Implementasi tahapan restrukturisasi sesuai dengan Timeline dan target	15.770.881.473												
	b	Potensi ketidakakuratan data/ terhambatnya sinkronisasi data penerbangan (misal: untuk penerbangan lintas)	Pengadaan asuransi liability													
	c	ACP lebih dari target yaitu >45 hari	Perbaikan sistemasi tuntutan hukum (pemenuhan dokumen persidangan)													
	d	Kerjasama pihak ketiga (APH) untuk penagihan piutang bersiko tinggi	Treatment personil operasional dan teknis (Pemanfaatan Employee Assistance Program (EAP) untuk dukungan treatment personil operasional dan teknis)													

No. Risiko	No. Penyebab Risiko	Penyebab risiko	Rencana Perlakuan Risiko	Rencana Biaya Perlakuan Risiko (Rp/Masa Uang Lain)	Timeline (Bulan)											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	a	Tidak sesuainya peraturan dan prosedur terkait proses bisnis pasca restrukturisasi organisasi	Melakukan pemetaan tersedianya peraturan dan prosedur terkait proses bisnis pasca restrukturisasi organisasi sesuai dengan Role Charter	40.560.805.790												
			Seluruh peraturan yang berdampak proses restrukturisasi telah disesuaikan dengan OTK dan Role Charter													
			Seluruh draft Peraturan yang disesuaikan telah selaras dengan OTK dan Role Charter baru dan dapat terimplementasi													
	b	Resistensi terhadap restrukturisasi organisasi	Change Management terhadap proses transformasi organisasi secara internal													
			Tindakan penanganan hubungan industrial													
	c	Pelaksanaan restrukturisasi organisasi yang tidak efektif yang berpotensi menimbulkan isu/masalah baru (contoh: tunggang lindi, kekosongan fungsi, proses pengadaan, pengawasan itukan kerja tidak optimal, sistem/aplikasi belum dilakukan penyesuaian)	Monitoring dan review terhadap pasca restrukturisasi organisasi													
	d	Ketidaksiapan proses lanjutan pasca restrukturisasi organisasi	Penyiapan aplikasi pendukung (sistem IT, database, dll)													
			Penyesuaian kebijakan SDM dan keuangan sesuai struktur baru													
			Analisis beban kerja pasca restrukturisasi organisasi untuk memastikan distribusi tugas yang optimal													
			Penyiapan migrasi data keuangan dan penyesuaian proses bisnis di SAP													
6	e	Resistensi dari organisasi dan ketidaksiapan hasil restrukturisasi organisasi dengan tujuan awal	Review kajian risiko dari lini 1 oleh lini 2	3.123.754.674												
			Melakukan monitoring dan evaluasi penataan organisasi													
	f	Penyesuaian perubahan struktur jabatan sesuai dengan struktur organisasi baru	Penyusunan pergerakan dan pola karir karyawan sebagai dampak dari penataan organisasi guna membangun pengembangan karir jabatan fungsional dan jabatan struktural													
	g	Pola perubahan (restrukturisasi organisasi) yang belum didukung dengan skill/keterampilan karyawan	Memberikan dukungan program pelatihan dalam rangka restrukturisasi (Up-Skilling)													
	h	Belum terpenuhinya formasi SDM untuk pelaksanaan tupoksi unit kerja	Rekrutmen 50 orang peserta Pemagangan 2026													
	a	Keterlambatan Proses Pelaksanaan Investasi dan Monitoring Progres Pelaksanaan Investasi	Memperkuat fungsi pengawasan pekerjaan atau peran dan fungsi Project Management Office; Pelaksanaan pekerjaan yang lewat tahun dilakukan lelang tidak mengikat; Melakukan persiapan dokumen teknis pada Q4 Tahun sebelumnya dan melakukan evaluasi pada Q1 Tahun berjalan sehingga untuk meminimalisir lelang gagal; Pemakatan pekerjaan sejenis dan sentralisasi pekerjaan pengadaan dilakukan di Kantor Pusat untuk pekerjaan investasi CNSA													
			Program penyesuaian biaya P.JNP;													
			Reprioritasi program, program mandatory, safety critical dan operasional kontinuiti tetap di pertahankan, sedangkan penjadwalan ulang program non prioritas atau dilaksanakan secara bertahap;													
7	a	Kenaikan tarif P.JNP Internasional	Pengendalian belanja secara selektif, belanja dan pengadaan dikendalikan berdasarkan urgency, kesiapan teknis, serta kontribusi terhadap kehandalan pelayanan dan sasaran strategis; Monitoring komitmen dan progress beban, realisasi, komitmen progress anggaran, arus kas dan Risiko dilakukan pemantauan secara berkala sebagai dasar penyesuaian program ataupun belanja.	1.097.242.000												
	b	Belum adanya pedoman Kesepakatan Tingkat Layanan (SLA) yang diterbitkan untuk mendukung PM 34 2024	Melakukan monitoring efisiensi biaya dan membuat kebijakan cost cutting.													

Sampai dengan Triwulan II 2026, realisasi mitigasi risiko yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Risiko dampak serangan cyber pada pelayanan dan proses bisnis

Tabel IV.4
Mitigasi Risiko Dampak Serangan Cyber pada Pelayanan dan Proses Bisnis

Rencana Penanganan Risiko		Target Waktu	Penjelasan Realisasi	Anggaran Biaya Mitigasi (Juta)	Realisasi Biaya Mitigasi (Juta)
1	Penyusunan mekanisme dan prosedur dari ancaman cyber	Des 2026	a. Draf sistem manajemen keamanan informasi; b. Penerbitan perpanjangan tim tanggap insiden siber (CSIRT) BSSN; c. Pembinaan keamanan siber oleh BSSN; d. Peningkatan kesiapsiagaan keamanan siber.	Rp69.977,86	Rp6.260,83
2	Penyediaan proteksi pada infrastruktur dan layanan sistem kritikal		a. Telah dilakukan monitoring jasa managed service System Information and Event Management (SIEM); b. Telah dilakukan proteksi terhadap endpoint; dan		

Rencana Penanganan Risiko		Target Waktu	Penjelasan Realisasi	Anggaran Biaya Mitigasi (Juta)	Realisasi Biaya Mitigasi (Juta)
			c. Telah dilakukan penyediaan <i>renewal technical support</i> perangkat F5 dan <i>Fortinet</i> tahun 2026.		
3	Penyediaan <i>tools</i> untuk monitoring dan pengawasan keamanan <i>cyber</i>		a. Melakukan monitoring jasa <i>managed service</i> SIEM (<i>System Information and Event Management</i>); b. Melakukan proteksi terhadap <i>endpoint</i> ;		
4	Penyediaan lisensi <i>hardware</i> dan <i>software</i> sistem kritikal serta dukungan teknis		Telah dilakukan penyediaan <i>renewal technical support</i> perangkat F5 dan <i>Fortinet</i> tahun 2026		
5	Penyediaan infrastruktur DRC untuk sistem kritikal		a. Rutin dilakukan <i>maintenance</i> serta monitoring. Pembayaran dilakukan per semester, penagihan dilakukan di TW III; b. Proses penyusunan dokumen teknis; c. Sudah dilakukan implementasi di 2025, sudah dilakukan testing dan pengujian. Rutin dilakukan <i>maintenance</i> serta monitoring <i>Cloud</i> . Pembayaran dilakukan per semester (Bulan Mei 2026), Vendor belum mengirimkan tagihan pembayaran; dan d. Rutin dilakukan <i>maintenance</i> serta monitoring oleh penyedia bersama tim TN. pembayaran dilakukan per semester (Bulan Mei 2026), Vendor belum mengirimkan tagihan pembayaran.		
6	Peningkatan kompetensi terkait <i>cyber security</i>		Sampai dengan TW IV 2026 rencana akan dilakukan pelatihan: a. <i>cyber security and resilience</i> ;		

Rencana Penanganan Risiko		Target Waktu	Penjelasan Realisasi	Anggaran Biaya Mitigasi (Juta)	Realisasi Biaya Mitigasi (Juta)
			b.IT Audit and Cyber Risk Assessment		
7	Peningkatan budaya dan <i>knowledge</i> keamanan cyber karyawan		Draft penyusunan Cyber Security Awareness 2026 (Rencana realisasi bulan Juli 2026).		

2. Risiko tidak tercapainya target peningkatan keselamatan operasional pelayanan

Tabel IV.5

Mitigasi Risiko Tidak Tercapai Target Peningkatan Keselamatan Operasional Pelayanan

Rencana Perlakuan Risiko		Target Waktu	Penjelasan Realisasi Perlakuan Risiko	Anggaran Biaya Mitigasi (Miliar)	Realisasi Biaya Mitigasi (Miliar)
1	Program pelatihan personil operasi sesuai dengan kebutuhan dan relevan dengan isu keselamatan	Desember 2026	Telah dilaksanakan: a. Pelatihan Company Aviation Safety Officer (CASO) b. Pelatihan Investigasi Keselamatan (Februari dan Maret 2026) c. Pelatihan Threat and Error Management (TEM) d. Pengujian IELP e. Site Training (ST) ATMAS f. Site Training (ST) VSCS g. Pelatihan safety risk management (ITSAP), 18-22 mei 2026	Rp294,76	Rp20.84
2	Pemenuhan kebutuhan personel operasi mengacu pada FRMS minimum dan lokasi yang high density yaitu JATSC dan Bali	Desember 2026	Benchmarking ke AirServices Australia (ASA) pada tanggal 7 s.d. 13 Juni 2026 sebagai referensi dan best practice terkait Strategic Workforce Planning, termasuk pengelolaan rostering dan fatigue management.		
3	Proses penyusunan/review dokumen	Desember 2026	a. Telah melakukan review dokumen manual ATS tanggal 22-26 Juni 2026 (manual ATS part 3 ada 15 section dengan rincian yang telah dilakukan pada TW II 2026 yaitu 9 section pada manual ATS yg		

Rencana Perlakuan Risiko		Target Waktu	Penjelasan Realisasi Perlakuan Risiko	Anggaran Biaya Mitigasi (Miliar)	Realisasi Biaya Mitigasi (Miliar)
			dilakukan review, kurang 6 section yg blm direview, rencana bulan Agustus 2026 akan dilakukan review 6 section); b. Telah dilakukan penyesuaian Hirarki Dokumen Operasional ATS (Manual ATS, SOP, LI, working method, etc) yaitu berdasarkan: a. surat Direktur Operasi Nomor: 251/O/TNG/KMP. 12.01/II/2026 tanggal 17 Januari 2026 perihal Penyampaian Dokumen Manual of Air Traffic Services (MATS) 1st Edition b. surat General Manager Cabang Palangkaraya Nomor: 038/G/23/OPS/II/2026 tanggal 28 Februari 2026 perihal Penyampaian Berita Acara Kegiatan Bedah Dokumen Manual of Air Traffic Services 1st Edition Manual Perhitungan Kapasitas Runway dan Manual Kapasitas Ruang Udara berpindah tanggungjawab ke operasi sesuai dengan ND EVP of Standard and Security Nomor: 216/SS/OTL.01.01/IV/2026 tanggal 14 April 2026 perihal Penyampaian Berita Acara Transisi Implementasi Peraturan Direksi Perum LPPNPI No.PER.004/LPPNPI/III/2026 dan No.PER.005/LPPNPI/III/2026		

Rencana Perlakuan Risiko		Target Waktu	Penjelasan Realisasi Perlakuan Risiko	Angaran Biaya Mitigasi (Miliar)	Realisasi Biaya Mitigasi (Miliar)
4	Pelaksanaan sosialisasi dokumen standar lalu lintas penerbangan	Desember 2026	Telah dilakukan sosialisasi dokumen standar lalu lintas penerbangan dengan rincian sebagai berikut: a. Pembuatan surat edaran Direktur Keselamatan, Keamanan dan Standarisasi tentang kepatuhan karyawan terhadap ketentuan keamanan di lingkungan Perum LPPNPI tanggal 12 Juni 2026; b. Penyusunan draf instruksi DKKS tentang penggunaan generatif AI publik secara aman dan bertanggungjawab di lingkungan Perum LPPNPI; c. Telah terdapat Surat Direktur Operasi terkait instruksi Direktur Operasi Nomor: INS.004/O/TNG/LPPNPI/OPS.03/I/2026 tentang Implementasi Instrument Approach Procedure bagi personel ATC tanggal 30 Januari 2026; d. Telah terdapat Surat Direktur Operasi terkait instruksi Direktur Operasi Nomor: INS.003/O/TNG/LPPNPI/OPS.03/I/2026 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Fitur MSAW pada ATM Automation System tanggal 27 Januari 2026		

Rencana Perlakuan Risiko		Target Waktu	Penjelasan Realisasi Perlakuan Risiko	Anggaran Biaya Mitigasi (Miliar)	Realisasi Biaya Mitigasi (Miliar)
5	Pembuatan Prosedur Penerbangan PBN dan konvensional sesuai target/prioritas	Desember 2026	Target Lokasi Pembuatan prosedur penerbangan PBN dan/atau konvensional di beberapa Bandara yang belum mengimplementasikan prosedur penerbangan PBN dan/atau konvensional selama tahun 2026 yaitu 8 lokasi. a. Bandara Andi Jemma - Masamba (WAFM) telah disampaikan permohonan validasi kepada Direktorat Navigasi Penerbangan; b. Bandara Aek Godang - Padang Sidempuan (WIME) telah disampaikan permohonan validasi kepada Direktorat Navigasi Penerbangan; c. Bandara Gusti Sjaamsir Alam - Kotabaru (WAOK) telah disampaikan permohonan validasi kepada Direktorat Navigasi Penerbangan; d. Bandara A.A. Bere Tallo - Atambua (WATA) telah disampaikan permohonan validasi kepada Direktorat Navigasi Penerbangan; e. Bandara Babo - Teluk Bintuni (WASO) telah disampaikan permohonan validasi kepada Direktorat Navigasi Penerbangan. Rencana pada TW III menyelesaikan 1 lokasi yaitu Pembuatan IAP Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang (WIPP),		

Rencana Perlakuan Risiko		Target Waktu	Penjelasan Realisasi Perlakuan Risiko	Anggaran Biaya Mitigasi (Miliar)	Realisasi Biaya Mitigasi (Miliar)
			sehingga total menjadi 6 lokasi; Rencana pada TW IV menyelesaikan 2 lokasi yaitu Pembuatan IAP Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru (WIBB) dan Pembuatan IAP Jendral Ahmad Yani - Semarang (WAHS), sehingga total menjadi 8 lokasi dan menuntaskan target lokasi selama tahun 2026.		
6	Pelatihan personel pada bidang penyusunan prosedur penerbangan RNP-AR dan PinS	Desember 2026	Belum ada		
7	Review Prosedur Penerbangan PBN sesuai prioritas	Desember 2026	Target Lokasi Review prosedur penerbangan PBN dan/atau konvensional di beberapa Bandara selama Tahun 2026 yaitu 8 lokasi: a. Bandara Soekarno Hatta - Jakarta (WIII) telah disampaikan permohonan validasi kepada Direktorat Navigasi Penerbangan (TW I 2026); b. Bandara Gusti Sjaamsir Alam - Kotabaru (WAOK) telah disampaikan permohonan validasi kepada Direktorat Navigasi Penerbangan (TW I 2026); c. Bandara IMIP - Morowali (WAMP) telah disampaikan permohonan validasi kepada Direktorat Navigasi Penerbangan (TW II 2026); d. Bandara Babo - Teluk Bintuni (WASO) telah disampaikan permohonan validasi kepada Direktorat Navigasi Penerbangan (TW II 2026) Rencana pada TW III menyelesaikan 2 lokasi yaitu Bandara Harun Thohir - Bawean &		

Rencana Perlakuan Risiko		Target Waktu	Penjelasan Realisasi Perlakuan Risiko	Anggaran Biaya Mitigasi (Miliar)	Realisasi Biaya Mitigasi (Miliar)
			Bandara Supadio - Pontianak, sehingga total menjadi 6 lokasi Rencana pada TW IV menyelesaikan 2 lokasi yaitu Bandara Juanda (Surabaya) dan Bandara Jenderal Ahmad Yani (Semarang), sehingga total menjadi 8 lokasi		
8	Pelatihan personel pada bidang penyusunan prosedur penerbangan PBN	Desember 2026	Belum ada		
9	Melakukan pemeliharaan backup peralatan navigasi sesuai dengan kriteria urgensi umur teknis peralatan	Desember 2026	Perbaikan peralatan ADSB di 6 lokasi (Manado, Cilacap, Denpasar, Waingapu, Tarakan dan Kendari), yg awalnya single operation sekarang menjadi dual operation. Target sampai dengan TW III 2026 yaitu 7 lokasi: Palu, Manado, Cilacap, Denpasar, Waingapu, Tarakan dan Kendari; Perbaikan peralatan DME di Pontianak (single to dual), DVOR di Ketapang (single to dual) dan DVOR di JATSC (US to Dual) Nilai availability peralatan pada TW II 2026 yaitu 99,84%, target availability TW II 2026 yaitu 99,00%.		
10	Managed service oleh pihak ketiga untuk pemeliharaan fasilitas	November 2026	Kajian BKT sdh disampaikan ke AirNav pada 21 Juni 2026 (Kajian BKT merupakan kajian yang menyatakan diperlukan adanya managed service oleh pihak ketiga) Rencana berikutnya yaitu penyiapan dokumen teknis untuk kontrak pekerjaan managed service oleh pihak ketiga.		
11	Peningkatan kompetensi personel AMF terkait dengan fasilitas kritikal yang dimiliki	Desember 2026	Divisi ML sudah bersurat ke para General Manager, termasuk GM AMF permintaan nama-nama terkait pelatihan yang akan dilakukan dengan no surat 2031/ML/TNG/PDL/V/2026 perihal Permintaan		

Rencana Perlakuan Risiko		Target Waktu	Penjelasan Realisasi Perlakuan Risiko	Anggaran Biaya Mitigasi (Miliar)	Realisasi Biaya Mitigasi (Miliar)
			nama peserta yang akan dilaksanakan pada bulan juni dan juli tahun 2026. Surat balasan GM AMF dengan nomor surat 179/S/JOG/TEK.05/V/2026 perihal konfirmasi peserta pelatihan dimana isinya menyatakan AMF belum dapat mengikutsertakan personel pada kegiatan pelatihan yang akan direncanakan pada Juni dan Juli.		
12	Pengadaan fasilitas telekomunikasi penerbangan sesuai dengan program usulan investasi Airnav Indonesia	Desember 2026	Proses lelang sudah ada di divisi MS		
13	Implementasi, identifikasi dan pelaksanaan evaluasi pemanfaatan JARKOMPENAS	September 2026	Implementasi, identifikasi dan pelaksanaan evaluasi pemanfaatan JARKOMPENAS telah dilakukan: Shadow Ops : 87% Shadow finish : 59% BA shadow : 20% UAT : 6% BALO : 30 Agt 2026		
14	Pelaksanaan kegiatan safety assesment JARKOMPENAS	November 2026	Pelaksanaan kegiatan safety assesment JARKOMPENAS telah terdapat beberapa pelaksanaan yaitu: a. Safety Risk Assessment (SRA): • Pelaksanaan SRA Implementasi Jarkompenas Cabang Pekanbaru tanggal 24 April 2026; • Pelaksanaan SRA Implementasi Jarkompenas Cabang Palembang tanggal 2 Juni 2026; • Pelaksanaan SRA Implementasi Jarkompenas Cabang Yogyakarta tanggal 2 Juni 2026; • Pelaksanaan SRA Implementasi Jarkompenas		

Rencana Perlakuan Risiko		Target Waktu	Penjelasan Realisasi Perlakuan Risiko	Anggaran Biaya Mitigasi (Miliar)	Realisasi Biaya Mitigasi (Miliar)
			Cabang Tanjung Pinang tanggal 2 Juni 2026; • Pelaksanaan SRA Implementasi Jarkompenas Cabang Ambon tanggal 5 Juni 2026; • Pelaksanaan SRA Implementasi Jarkompenas Cabang Denpasar tanggal 6 Juni 2026; • Pelaksanaan SRA Implementasi Jarkompenas Cabang Pontianak tanggal 11 Juni 2026; • Pelaksanaan SRA Implementasi Jarkompenas Cabang Surabaya tanggal 11 Juni 2026; • Pelaksanaan SRA Implementasi Jarkompenas Cabang MATSC tanggal 12 Juni 2026; • Pelaksanaan SRA Implementasi Jarkompenas Cabang Medan tanggal 20 Juni 2026; • Pelaksanaan SRA Implementasi Jarkompenas Cabang Sentani tanggal 26 Juni 2026. b. Verifikasi SRA: • Verifikasi SRA Implementasi Jarkompenas Cabang Balikpapan tanggal 12 Mei 2026; • Verifikasi SRA Implementasi Jarkompenas Cabang Pekanbaru tanggal 12 Mei 2026;		

Rencana Perlakuan Risiko		Target Waktu	Penjelasan Realisasi Perlakuan Risiko	Anggaran Biaya Mitigasi (Miliar)	Realisasi Biaya Mitigasi (Miliar)
			Rencana Verifikasi SRA Implementasi Jarkompenas Cabang Makassar tanggal 29 Juni - 01 Juli 2026; Rencana Verifikasi SRA Implementasi Jarkompenas Cabang Surabaya tanggal 29 Juni - 01 Juli 2026; Rencana Verifikasi SRA Implementasi Jarkompenas Cabang Denpasar tanggal 30 Juni - 02 Juli 2026; Rincian pengeluaran biaya: Kegiatan SRA Jarkompenas 12 lokasi tidak mengeluarkan biaya karena dilaksanakan oleh masing2 kantor Cabang		
15	Program managed service JARKOMPENAS	Desember 2026	Progress Pelaksanaan Implementasi JARKOMPENAS: Shadow Ops : 87% Shadow finish : 59% BA shadow : 20% UAT : 6% BALO : 30 Agt 2026		
16	Penyusunan dokumen transisi JARKOMPENAS	September 2026	Progress Pelaksanaan Implementasi JARKOMPENAS: Shadow Ops : 87% Shadow finish : 59% BA shadow : 20% UAT : 6% BALO : 30 Agt 2026		
17	Dukungan transisi JARKOMPENAS	November 2026	Progress Pelaksanaan Implementasi JARKOMPENAS: Shadow Ops : 87% Shadow finish : 59% BA shadow : 20% UAT : 6% BALO : 30 Agt 2026		
18	Implementasi tahapan restrukturisasi sesuai dengan timeline dan target	Desember 2026	Berdasarkan Surat Ketua Dewan Pengawas Perum LPPNPI nomor: S-21/DW/III/2026 tanggal 25 Maret 2026 perihal Tanggapan Dewan Pengawas atas Usulan Perubahan Struktur Organisasi 1 (satu) Tingkat Dibawah Direksi, sebagai tindak lanjut atas arahan Dewan Pengawas,		

Rencana Perlakuan Risiko		Target Waktu	Penjelasan Realisasi Perlakuan Risiko	Anggaran Biaya Mitigasi (Miliar)	Realisasi Biaya Mitigasi (Miliar)
			perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kantor Pusat, Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kantor Cabang, serta Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Perum LPPNPI Kantor Pusat dan AirNav Maintenance Facility telah ditetapkan melalui Peraturan Direksi sebagai berikut: a. Peraturan Direksi Perum LPPNPI nomor: PER.004/LPPNPI/III/2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi nomor: PER.013/LPPNPI/XII/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum LPPNPI Kantor Pusat; b. Peraturan Direksi Perum LPPNPI nomor: PER.005/LPPNPI/III/2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi nomor: PER.017/LPPNPI/XII/2024 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Perum LPPNPI Kantor Pusat dan AirNav Maintenance Facility; dan c. Peraturan Direksi Perum LPPNPI nomor: PER.006/LPPNPI/III/2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum LPPNPI Kantor Cabang Perum LPPNPI; Dilakukan Rapat Pembahasan mengenai Daftar Lokasi Pelayanan Perum LPPNPI dalam		

Rencana Perlakuan Risiko		Target Waktu	Penjelasan Realisasi Perlakuan Risiko	Anggaran Biaya Mitigasi (Miliar)	Realisasi Biaya Mitigasi (Miliar)
			rangka tindak Lanjut Peraturan Direksi nomor: PER.006/LPPNPI/III/2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum LPPNPI Kantor Cabang Perum LPPNPI;		
19	Pengadaan asuransi liability	Desember 2026	Pada tanggal 09 April 2026 telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi asuransi ANSP Liability ketiga di Cabang Ambon dengan perwakilan peserta dari Accounting and Asset Management Division dan 7 (tujuh) cabang di wilayah Indonesia Timur; Pembayaran premi tahap pertama telah dilaksanakan pada tanggal 9 November 2025 dan pembayaran premi tahap kedua telah dilakukan pada tanggal 9 Januari 2026, serta pembayaran premi tahap ketiga telah dilakukan pada tanggal 22 Mei 2026.		
20	Persiapan asistensi tuntutan hukum (pemenuhan dokumen persidangan)	Desember 2026	Belum ada		
21	Treatment personel operasional dan teknis (Pemanfaatan Employee Assistance Program (EAP) untuk dukungan treatment personel operasional dan teknis)	Desember 2026	Telah dilakukan tindak lanjut pendampingan karyawan yang pelaporannya masuk pada aplikasi EAP (rencana akan dilakukan pada TW IV 2026), target karyawan yang akan dilakukan pendampingan 20% dari total jumlah karyawan perusahaan selama tahun 2026. Pembayaran Aplikasi EAP dilakukan per triwulan (8 Januari 2026 - 7 Mei 2026, 8 Mei 2026 - 7 Agustus 2026).		
22	Penyesuaian remunerasi dan tunjangan	Desember 2026	Telah dilakukan penyusunan konsep Kerangka Acuan Kerja atas Pekerjaan Evaluasi Pola Remunerasi Karyawan dan Salary Survey.		

3. Risiko terlambatnya pengoperasian New ATM JATSC dan Balikpapan

Tabel IV.6
Mitigasi Risiko Terlambatnya Pengoperasian New ATM JATSC dan Balikpapan

Rencana Penanganan Risiko		Target Waktu	Penjelasan Realisasi	Anggaran Biaya Mitigasi (Juta)	Realisasi Biaya Mitigasi (Juta)
1	Pengawasan terhadap ketepatan waktu, biaya, dan mutu dari proses pelaksanaan	Jan s.d. Feb 2026	Telah dilakukan pengawasan langsung dan jasa konsultan selama proses pekerjaan PMN di New JATSC dan Balikpapan.	Rp4.309,93	Rp791,37
2	Pelaksanaan kegiatan <i>safety assessment</i> New ATM System di JATSC dan Balikpapan	Jan s.d. Maret 2026	a. Telah dilaksanakan SRA Penggantian dan Pemasangan fasilitas ATMAS di New JATSC; dan b. Telah dilaksanakan monitoring pengendalian risiko SRA penggantian dan pemasangan fasilitas ATMAS di New JATSC.		
3	Penyusunan dokumen transisi New ATM System di JATSC dan Balikpapan	Jan s.d. Juni 2026	Penyusunan dokumen transisi New ATM System di JATSC dan Balikpapan pada TW II 2026 terdapat kemajuan pekerjaan yaitu terdapat dokumen transisi operasi di New JATSC, yaitu: a. Konsep Transisi New ATMAS dan perpindahan Pelayanan beserta sarana pendukung dari Jatsc ke New JATSC b. Konsep Transisi AMHS, TSOP TWR, TSOP FDO, TSOP AMS, TSOP AMHS, TSOP APP, TSOP New ATMAS.		

Rencana Penanganan Risiko		Target Waktu	Penjelasan Realisasi	Anggaran Biaya Mitigasi (Juta)	Realisasi Biaya Mitigasi (Juta)
4	Dukungan transisi New ATM System di JATSC dan Balikpapan	Jan s.d. Juni 2026	Telah dilakukan pembahasan perihal optimalisasi SDM eksisting		

4. Risiko terganggunya ketahanan keuangan (*financial resilience*) akibat terhambatnya proses penanganan piutang *current* dan *non current*

Tabel IV.7

Mitigasi Risiko Terganggunya Ketahanan Keuangan (*Financial Resilience*) Akibat Terhambatnya Proses Penanganan Piutang *Current* dan *Non Current*

Rencana Perlakuan Risiko		Target Waktu	Penjelasan Realisasi Perlakuan Risiko	Biaya Mitigasi (Miliar)	Realisasi Biaya Mitigasi
1	Penyusunan mekanisme dan prosedur tanggung jawab dan kewajiban (aging policy: ketentuan jangka waktu pembayaran setelah pemberian pelayanan navigasi, perlakuan terhadap pembayaran piutang non current), serta sanksi keterlambatan pembayaran PJNP	Desember 2026	Penyusunan mekanisme dan prosedur tanggung jawab dan kewajiban (aging policy: ketentuan jangka waktu pembayaran setelah pemberian pelayanan navigasi, perlakuan terhadap pembayaran piutang non current,), serta sanksi keterlambatan pembayaran PJNP pada TW II 2026 terdapat hal berikut: - Telah disusun draft perubahan PER.005/LPPNPI/I/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Pendapatan Perusahaan, Fakturisasi dan Penagihan; - Telah disusun draft juknis deposit kantor cabang.	Rp15.77,-	Rp3.05,-
2	Koordinasi SLA dengan pihak pengguna jasa/airlines dan Kementerian Perhubungan	Juli 2026	Koordinasi SLA dengan pihak pengguna jasa/airlines dan Kementerian Perhubungan pada TW II 2026 telah dilakukan hal berikut: a. UM.004/7/8/DJPU.D NP-2026 Hasil Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Kesepakatan		

Rencana Perlakuan Risiko		Target Waktu	Penjelasan Realisasi Perlakuan Risiko	Biaya Mitigasi (Miliar)	Realisasi Biaya Mitigasi
			Tingkat Layanan (Service Level Agreement) Perum LPPNPI dengan Pengguna Jasa PJNP mendasari UM 207/39/13/DJPU.DN P/ 2026 Undangan Rapat SLA tanggal 21 Mei 2026; b. 314/KP/HUK.07/VI/2026 tanggal 05 Juni 2026 perihal Undangan Pembahasan Penyesuaian Draft SLA reff Hasil Rapat Pembahasan SLA bersama Regulator; c. 357/KP/HUK.07/VI/2026 tanggal 29 Juni 2026 perihal Penyampaian Matrik Penyesuaian Draft SLA dan Undangan Rapat untuk Konsolidasi Hasil Penyesuaian Draft SLA;		
3	Penyusunan draf SLA dengan pihak pengguna jasa/airlines	Juli 2026	Penyusunan draf SLA dengan pihak pengguna jasa/airlines pada TW II 2026 terdapat hal sebagai berikut: Telah disusun draf SLA. Draf tersebut telah ada pada TW I 2026, namun masih terus dilakukan pembahasan baik internal maupun eksternal.		
4	Melakukan monitoring berkala terhadap performa penagihan piutang	Desember 2026	Melakukan monitoring berkala terhadap performa penagihan piutang pada TW II 2026 masih terus dilakukan monitoring berkala serta rencana akan dilakukan kegiatan Customer Engagement dan rekonsiliasi dengan customer pada bulan Agustus 2026.		
5	Melakukan pemetaan untuk memberikan Early warning system dalam hal memantau kemampuan bayar maskapai yang memiliki risiko gagal bayar	Desember 2026	Melakukan pemetaan untuk memberikan Early warning sytem dalam hal memantau kemampuan bayar maskapai yang memiliki risiko gagal bayar pada TW II 2026		

Rencana Perlakuan Risiko		Target Waktu	Penjelasan Realisasi Perlakuan Risiko	Biaya Mitigasi (Miliar)	Realisasi Biaya Mitigasi
			telah dilakukan monitoring / pemantauan terhadap maskapai yang memiliki risiko gagal bayar.		
6	Melakukan upaya negosiasi formal terhadap airline yang memiliki risiko gagal bayar	Desember 2026	Melakukan upaya negosiasi formal terhadap airline yang memiliki risiko gagal bayar pada TW II 2026 telah dilakukan rapat pembahasan penyelesaian Biaya PJNP pada tanggal 19-20 Mei 2026 dengan maskapai penerbangan (AirAsia X BHD, PT Air Asia Indonesia, PT Citilink Indonesia, PT ASI Pudjiastuti Aviation), Kemenhub, dan BMKG.		
7	Kerjasama pihak ketiga (APH) untuk penagihan piutang beresiko tinggi	Desember 2026	Kerjasama pihak ketiga (APH) untuk penagihan piutang beresiko tinggi pada TW II 2026 telah terdapat MOU antara AirNav dengan Kejaksaan RI		
8	Pengembangan/ pembaruan aplikasi yang berkaitan dengan penagihan	Desember 2026	Pengembangan/ pembaruan aplikasi yang berkaitan dengan penagihan pada TW II 2026 terdapat hal yang telah dilakukan sebagai berikut: 1. Telah dilakukan rapat koordinasi antara IT dengan KT terkait progres hasil RFI; 2. Rapat pengembangan Aplikasi STREAM dan Aplikasi HAADES yaitu dari TT, TN, MATSC serta JATSC mengenai keakuratan dan kelengkapan data. Aplikasi STREAM dan Aplikasi HAADES diharapkan dapat mencatat data traffic yang berada pada sektor A,B dan diatas FL370 dengan lebih akurat serta dengan adanya NEW JATSC, 2 aplikasi tersebut bisa lebih akurat dalam melakukan		

Rencana Perlakuan Risiko		Target Waktu	Penjelasan Realisasi Perlakuan Risiko	Biaya Mitigasi (Miliar)	Realisasi Biaya Mitigasi
			pencatatan data penerbangan. Rencana akan dilakukan evaluasi aplikasi ke Kantor Cabang pada TW III 2026 3. Masih dalam persiapan anggaran unit pemakai, karena adanya peraturan direksi perihal barang dan jasa yang dimana unit pemakai diharapkan melakukan kontrol anggaran dan menyusun SPBJE; 4. Jasa Managed Operation, pembayaran dilakukan per semester (Bulan Mei 2026), Vendor belum mengirimkan tagihan pembayaran; 5. IBM Server dan IBM Storwize sedang dalam proses pengadaan; 6. License Lenovo dan Suse sudah dibayarkan di bulan Juni 2026.		
9	Intensifikasi collection Memperkuat monitoring jatuh tempo piutang, aging, konfirmasi pembayaran, serta percepatan tindak lanjut penagihan berdasarkan tingkat kolektibilitas pelanggan.	Desember 2026	Monitoring dan evaluasi atas pencapaian target kinerja keuangan RKAP 2026. -Monitoring dan evaluasi atas pencapaian target kinerja investasi RKAP 2026 -Pembuatan dashboard monitoring RKAP yang mencakup kinerja trafik & produksi, keuangan, anggaran, dan investasi.		
10	Penyelesaian piutang bermasalah. Melakukan percepatan penyelesaian piutang melalui rekonsiliasi, restrukturisasi, kesepakatan pembayaran, maupun langkah hukum apabila diperlukan.	Desember 2026			
11	Optimalisasi pengelolaan kas Mengoptimalkan penempatan dana jangka pendek dan melakukan	Desember 2026			

Rencana Perlakuan Risiko		Target Waktu	Penjelasan Realisasi Perlakuan Risiko	Biaya Mitigasi (Miliar)	Realisasi Biaya Mitigasi
	pengendalian arus kas untuk menjaga likuiditas perusahaan selama proses percepatan penerimaan kas berlangsung.				
12	Monitoring ACP dan cash flow secara berkala Melakukan evaluasi berkala terhadap perkembangan ACP, penerimaan kas, dan proyeksi likuiditas sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen.	Desember 2026			

5. Risiko terhambatnya proses bisnis perusahaan dampak dari restrukturisasi

Tabel IV.8

Mitigasi Risiko Terhambatnya Proses Bisnis Perusahaan Dampak dari Restrukturisasi

Rencana Penanganan Risiko		Target Waktu	Penjelasan Realisasi	Anggaran Biaya Mitigasi (Juta)	Realisasi Biaya Mitigasi (Juta)
1	Melakukan pemetaan tersedianya peraturan dan prosedur terkait proses bisnis pasca restrukturisasi organisasi sesuai dengan <i>role charter</i>	Des 2026	Telah dilakukan pembahasan dan dilakukan <i>legal drafting</i> atas Peraturan Direksi terkait OTK, tingkat jabatan struktural, <i>role charter</i> , pengadaan barang dan jasa, penempatan kembali dalam jabatan, serta penunjukan pelaksana harian pelaksana tugas	Rp40.560,80	Rp3.841,68
2	Seluruh peraturan yang terdampak proses restrukturisasi telah disesuaikan dengan OTK dan <i>role charter</i>	Juli 2026			
3	Seluruh draf peraturan yang disesuaikan telah selaras dengan OTK dan <i>role charter</i> baru, serta dapat terimplementasi	Juli 2026			
4	<i>Change management</i> terhadap proses transformasi organisasi secara internal	Maret 2026	Telah dilakukan: a. monitoring pada helpdesk di Echain untuk seluruh karyawan dalam menyampaikan aspirasi terkait restrukturisasi organisasi; dan b. tindak lanjut pendampingan karyawan yang pelaporannya masuk		

Rencana Penanganan Risiko		Target Waktu	Penjelasan Realisasi	Anggaran Biaya Mitigasi (Juta)	Realisasi Biaya Mitigasi (Juta)
			pada aplikasi EAP (rencana akan dilakukan pada TW IV 2026), target karyawan yang akan dilakukan pendampingan 20% dari total jumlah karyawan perusahaan selama tahun 2026. Pembayaran Aplikasi EAP dilakukan per triwulan (8 Januari 2026 - 7 Mei 2026, 8 Mei 2026 - 7 Agustus 2026)		
5	Tindakan penanganan hubungan industrial	Des 2026	a. Bantuan pembiayaan perwakilan SKYNAV dalam kegiatan manajemen; b. Telah terbentuk panitia peneliti dan pemeriksaan pelanggaran disiplin karyawan nomor: KEP.1099/U/LPPNPI/PE R.12.01/IV/2026 tanggal 23 April 2026 Perihal Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi Nomor: Kep.4205/U/LPPNPI/PE R.12.01/XI/2024 Tentang Panitia Peneliti Dan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Karyawan (P4DK); c. Pembentukan Tim P4DK bertujuan untuk menghindari perselisihan hubungan industrial akibat terdapatnya pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Disiplin Tingkat Berat kepada Karyawan; d. Rapat penyampaian rencana implementasi Administration Services Only pelayanan kesehatan dengan serikat karyawan; e. Rapat kenaikan level jabatan tanggal 17 Juni 2026 bersama dengan serikat karyawan; f. Belum ada kegiatan namun rencana akan		

Rencana Penanganan Risiko		Target Waktu	Penjelasan Realisasi	Anggaran Biaya Mitigasi (Juta)	Realisasi Biaya Mitigasi (Juta)
			dilakukan pada saat perumusan PKB 2027-2029 pada bulan Agustus 2026; g. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dengan Serikat Karyawan AirNav Indonesia (SkyNav) pada tanggal 27 Februari 2026 mengenai Pembayaran Pakaian Dinas Harian (PDH); h. Rapat Penyampaian Rencana Implementasi ASO Pelayanan Kesehatan; i. Pada rapat kali ini manajemen mengundang Perwakilan Serikat Karyawan untuk menghadiri Pemaparan dari Performance and Reward Department terkait rencana implementasi Administrative Service Only (ASO) Pelayanan Kesehatan yang akan diimplementasikan kedalam Peraturan Direksi terkait kesehatan Karyawan. Rapat LKS Bipartit ini dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2026 di Gedung Pusat AirNav Indonesia; j. Rapat Persiapan Kenaikan Level Jabatan; k. Rapat ini dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2026 di Gedung Pusat AirNav Indonesia yang dihadiri oleh Perwakilan Serikat karyawan AirNav Indonesia dan Tim Manajemen AirNav		

Rencana Penanganan Risiko		Target Waktu	Penjelasan Realisasi	Anggaran Biaya Mitigasi (Juta)	Realisasi Biaya Mitigasi (Juta)
			Indonesia. Rapat kali ini membahas tentang kesiapan kenaikan level jabatan karyawan yang sempat tertinggal pada 1 Desember 2025.; l. Rapat Lanjutan Kenaikan Level Jabatan; m. Rapat ini dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2026 di Kantor Pusat AirNav yang dihadiri oleh Perwakilan Serikat karyawan AirNav Indonesia dan Tim Manajemen AirNav Indonesia. Rapat kali ini membahas tentang kesiapan akhir terkait kenaikan level jabatan karyawan yang sempat tertinggal pada 1 Desember 2025 n. Belum ada kegiatan perumusan dan perundingan PKB, namun rencana akan dilaksanakan pada Agustus 2026; o. Pembahasan terkonsentrasi terkait penerapan aturan ketenagakerjaan mencakup berbagai aspek hukum dan praktik yang mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha, pada Rabu 04 Maret 2026 telah diadakan diskusi terkait pemahaman mengenai Tenaga Alih Daya (outsourcing). Kegiatan dimaksud bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif serta menyamakan persepsi terkait pengaturan Tenaga Alih Daya (Outsourcing) sesuai ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. diskusi tersebut menghadirkan		

Rencana Penanganan Risiko		Target Waktu	Penjelasan Realisasi	Anggaran Biaya Mitigasi (Juta)	Realisasi Biaya Mitigasi (Juta)
			pembicara dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yaitu Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan (ibu Dhatun Kuswandari, S.H.,M.H) yang dihadiri oleh personel dari Human Capital Services Division dan Human Capital Planning Division; p. Rencana akan dilaksanakan workshop dari dinas ketenagakerjaan kepada para perunding PKB terkait dengan perumusan perjanjian kerjasama dan peraturan terbaru, rencana akan dilaksanakan pada bulan September 2026; q. Telah dilakukan penindakan pelanggaran disiplin sebanyak 18 kasus dari total 20 laporan sampai TW II 2026.		
6	Monitoring dan review terhadap pasca restrukturisasi organisasi	Maret 2026	Berdasarkan Surat Ketua Dewan Pengawas Perum LPPNPI nomor: S-21/DW/III/2026 tanggal 25 Maret 2026 perihal Tanggapan Dewan Pengawas atas Usulan Perubahan Struktur Organisasi 1 (satu) Tingkat Dibawah Direksi, sebagai tindak lanjut atas arahan Dewan Pengawas, perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kantor Pusat, Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kantor Cabang, serta Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Perum LPPNPI Kantor Pusat dan AirNav Maintenance Facility telah ditetapkan melalui Peraturan Direksi sebagai berikut: a. Peraturan Direksi Perum LPPNPI nomor: PER.004/LPPNPI/III/2026		

Rencana Penanganan Risiko		Target Waktu	Penjelasan Realisasi	Anggaran Biaya Mitigasi (Juta)	Realisasi Biaya Mitigasi (Juta)
			tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi nomor: PER.013/LPPNPI/XII/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum LPPNPI Kantor Pusat; b. Peraturan Direksi Perum LPPNPI nomor: PER.005/LPPNPI/III/2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi nomor: PER.017/LPPNPI/XII/2024 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Perum LPPNPI Kantor Pusat dan AirNav Maintenance Facility; dan c. Peraturan Direksi Perum LPPNPI nomor: PER.006/LPPNPI/III/2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum LPPNPI Kantor Cabang Perum LPPNPI; Telah dilaksanakan kegiatan monitoring implementasi Struktur Organisasi dan Proses Bisnis di Kantor Cabang Surabaya pada tanggal 22-23 Juni 2026. Selanjutnya, kegiatan monitoring pada lokasi lainnya yang telah ditetapkan akan dilaksanakan secara bertahap hingga Triwulan IV Tahun 2026		
7	Penyiapan aplikasi pendukung (sistem IT, database, dan lainnya)	Des 2026	a. Jasa Managed Operation, pembayaran dilakukan per semester (Bulan Mei 2026), Vendor belum mengirimkan tagihan pembayaran; b. IBM Server dan IBM Storwize sedang dalam proses pengadaan; c. License Lenovo dan Suse sudah dibayarkan di bulan Juni 2026		
8	Penyesuaian kebijakan SDM dan keuangan sesuai struktur organisasi baru	Jun s.d. Des 2026	Pembahasan penyusunan URS pengembangan fitur echain perihal digitalisasi		

Rencana Penanganan Risiko		Target Waktu	Penjelasan Realisasi	Anggaran Biaya Mitigasi (Juta)	Realisasi Biaya Mitigasi (Juta)
			pembayaran tunjangan non rutin, restitusi online. Pembahasan dilakukan bersama PMO.		
9	Analisis beban kerja pasca restrukturisasi organisasi untuk memastikan distribusi tugas yang optimal	Des 2026	Analisis beban kerja pasca restrukturisasi organisasi untuk memastikan distribusi tugas yang optimal pada TW II 2026 sedang melaksanakan evaluasi jabatan fungsional sampai dengan TW IV 2026 Selanjutnya, dilakukan perhitungan kebutuhan formasi jabatan fungsional.		
10	Persiapan migrasi data keuangan dan penyesuaian proses bisnis di SAP	Des 2026	Persiapan migrasi data keuangan dan penyesuaian proses bisnis di SAP pada TW II 2026 telah dilakukan hal sebagai berikut: a. Jasa Managed Operation, pembayaran dilakukan per semester (Bulan Mei 2026), Vendor belum mengirimkan tagihan pembayaran; b. BM Server dan IBM Storwize sedang dalam proses pengadaan; c. License Lenovo dan Suse sudah dibayarkan di bulan Juni 2026		
11	Melakukan monitoring dan evaluasi penataan organisasi	Des 2026	Melakukan monitoring dan evaluasi penataan organisasi pada TW II terdapat hal sebagai berikut: a. Berdasarkan Surat Ketua Dewan Pengawas Perum LPPNPI nomor: S-21/DW/III/2026 tanggal 25 Maret 2026 perihal Tanggapan Dewan Pengawas atas Usulan Perubahan Struktur Organisasi 1 (satu) Tingkat Dibawah Direksi, sebagai tindak lanjut atas arahan Dewan Pengawas, perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kantor Pusat, Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kantor		

Rencana Penanganan Risiko		Target Waktu	Penjelasan Realisasi	Anggaran Biaya Mitigasi (Juta)	Realisasi Biaya Mitigasi (Juta)
			Cabang, serta Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Perum LPPNPI Kantor Pusat dan AirNav Maintenance Facility telah ditetapkan melalui Peraturan Direksi sebagai berikut: - Peraturan Direksi Perum LPPNPI nomor: PER.004/LPPNPI/III/2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi nomor: PER.013/LPPNPI/XII/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum LPPNPI Kantor Pusat; - Peraturan Direksi Perum LPPNPI nomor: PER.005/LPPNPI/III/2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi nomor: PER.017/LPPNPI/XII/2024 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Perum LPPNPI Kantor Pusat dan AirNav Maintenance Facility; dan - Peraturan Direksi Perum LPPNPI nomor: PER.006/LPPNPI/III/2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum LPPNPI Kantor Cabang Perum LPPNPI; b. Telah dilaksanakan kegiatan monitoring implementasi Struktur Organisasi dan Proses Bisnis di Kantor Cabang Surabaya pada tanggal 22-23 Juni 2026. Selanjutnya, kegiatan monitoring		

Rencana Penanganan Risiko		Target Waktu	Penjelasan Realisasi	Anggaran Biaya Mitigasi (Juta)	Realisasi Biaya Mitigasi (Juta)
			pada lokasi lainnya yang telah ditetapkan akan dilaksanakan secara bertahap hingga Triwulan IV Tahun 2026.		
12	Penyusunan pergerakan dan pola karir karyawan sebagai dampak dari penataan organisasi guna membangun pengembangan karir jabatan fungsional dan jabatan struktural	Des 2026	Penyusunan pergerakan dan pola karir karyawan sebagai dampak dari penataan organisasi guna membangun pengembangan karir jabatan fungsional dan jabatan struktural pada TW II 2026 telah dilakukan hal sebagai berikut: a. Pada tanggal 02 April 2026 telah dilaksanakan Kegiatan Konfirmasi Hasil Penyusunan Konsep Pola Karier Karyawan Pada Bidang Operational Service di Lingkungan Perum LPPNPI; b. Pada tanggal 08 April 2026 telah dilaksanakan Kegiatan Penyusunan Konsep Pola Karier Karyawan Pada Bidang Operational Facilities di Lingkungan Perum LPPNPI; c. Rencana akan dilakukan pembentukan tim dalam rangka penyusunan peraturan direksi tentang manajemen karir karyawan		
13	Memberikan dukungan program pelatihan dalam rangka restrukturisasi (<i>up-skilling</i>)	Des 2026	Memberikan dukungan program pelatihan dalam rangka restrukturisasi pada TW II 2026 belum ada kegiatan yang dilakukan. Rencana diklat Executive Leadership program dan Integrated Management Essential Program akan dilaksanakan pada 20 Juli 2026 - September 2026: a. Tier 1: BoD-2 dan BoD-3 = 7 batch; b. Tier 2: BoD-1 = 6 batch (GM dan EVP)		

Rencana Penanganan Risiko		Target Waktu	Penjelasan Realisasi	Anggaran Biaya Mitigasi (Juta)	Realisasi Biaya Mitigasi (Juta)
14	Rekrutmen 50 (lima puluh) orang peserta pemagangan tahun 2026	TW IV 2026	Rekrutmen 50 orang peserta Pemagangan 2026 pada TW II 2026 telah dilakukan hal sebagai berikut: a. Pembahasan dan perencanaan proses pemenuhan SDM sesuai dengan kebutuhan Perusahaan, Rencana akan dilakukan pembahasan secara rutin apabila ada rencana program pengembangan pelayanan b. Pembahasan pembukaan formasi untuk rekrutmen tahun 2026		

6. Risiko Tidak Tercapainya Target Investasi (Non PMN)

Tabel IV.9

Mitigasi Risiko Tidak Tercapainya Target Investasi (Non PMN)

Rencana Penanganan Risiko		Target Waktu	Penjelasan Realisasi	Anggaran Biaya Mitigasi (Juta)	Realisasi Biaya Mitigasi (Juta)
1	Memperkuat fungsi pengawasan pekerjaan atau peran dan fungsi <i>Project Management Office</i>	Jan s.d. Des 2026	Pengawasan pekerjaan pada TW II telah dilakukan pengawasan pada: a. Gedung Baru : Rapat pemeriksaan dan pengujian; b. Tower Bengkulu : Pemeriksaan dan Pengujian Tahap 1 (30%), proses addendum 2 (perpanjangan waktu) c. Tower Luwuk : Addendum 1, proses Surat Peringatan 1; d. Voice Recorder Sugimaru dan Morowali : BAST 1; e. Voice Recorder 5 lokasi (MAmuju, Pangandaran, Banda Aceh,	Rp3.110,55	Rp442,84

Rencana Penanganan Risiko		Target Waktu	Penjelasan Realisasi	Anggaran Biaya Mitigasi (Juta)	Realisasi Biaya Mitigasi (Juta)
			Bengkulu dan Biak) : BAST 1		
2	Pelaksanaan pekerjaan yang lewat tahun dilakukan lelang tidak mengikat	Jan s.d. Juni 2026	Rapat koordinasi pemaketan rencana investasi <i>carry over</i> untuk lelang tidak mengikat		
3	Melakukan persiapan dokumen teknis pada TW IV tahun sebelumnya dan melakukan evaluasi pada TW I tahun berjalan guna meminimalisir gagal lelang	Jan s.d. Maret 2026	Melakukan persiapan dokumen teknis pada Q4 Tahun sebelumnya dan melakukan evaluasi pada Q1 Tahun berjalan sehingga untuk meminimalisir lelang gagal, pada TW II 2026 terdapat kemajuan pekerjaan yaitu proses lelang sudah ada di divisi MS.		
4	Pemaketan pekerjaan sejenis dan sentralisasi pekerjaan pengadaan dilakukan di kantor pusat untuk pekerjaan investasi CNSA	Jan s.d. Juni 2026	Pemaketan pekerjaan sejenis dan sentralisasi pekerjaan pengadaan dilakukan di Kantor Pusat untuk pekerjaan Investasi CNSA, pada TW II 2026 terdapat kemajuan pekerjaan yaitu: a. Telah dilakukan koordinasi dengan unit ST (Technology Solution Division); b. Proses pelelangan menunggu PER Barjas di setujui (sampai dengan akhir TW II 2026 masih tahap finalisasi Legal Drafting Peraturan Direksi tentang Pengadaan Baran g/ Jasa).		

7. Risiko Tidak Terealisasinya Penyesuaian Biaya PJNP

Tabel IV.10
Mitigasi Risiko Tidak Terealisasinya Penyesuaian Biaya PJNP

Rencana Penanganan Risiko		Target Waktu	Penjelasan Realisasi	Anggaran Biaya Mitigasi (Juta)	Realisasi Biaya Mitigasi (Juta)
1	Program penyesuaian biaya PJNP	Des 2026	Program penyesuaian biaya PJNP pada TW II telah dilakukan hal sebagai berikut: a. Berkoordinasi dengan KP dalam menyiapkan bahan paparan kepada pemilik modal terkait progres usulan penyesuaian biaya PJNP; b. Mendampingi direksi dalam menyampaikan konsep perhitungan progres usulan penyesuaian biaya PJNP; c. Penyusunan draft surat penyampaian dukungan pemilik modal atas penyesuaian biaya PJNP kepada Regulator/Kementerian Teknis; d. Surat Direktur Utama 1068/U/TNG/LPPNPI/HU K.07/III/2026 tanggal 11 Maret 2026 perihal Penyampaian Hasil Pembahasan Tindak lanjut Kesepakatan Tingkat Layanan (Service Level Agreement) Perum LPPNPI dengan Pengguna Jasa PJNP; e. 161/KT/KEU/IV/2026 Undangan Kegiatan Tindak Lanjut Hasil CSI Tahun 2025 melalui Customer Hearing Forum Dalam Rangka Rencana Implementasi Service Level Agreement (SLA) yang diselenggarakan pada 27-29 April 2026; f. UM.004/7/8/DJPU.DNP-2026 Hasil Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Kesepakatan	Rp1.097,24	Rp115,53

Rencana Penanganan Risiko		Target Waktu	Penjelasan Realisasi	Anggaran Biaya Mitigasi (Juta)	Realisasi Biaya Mitigasi (Juta)
			Tingkat Layanan (Service Level Agreement) Perum LPPNPI dengan Pengguna Jasa PJNP mendasari UM 207/39/13/DJPU.DNP/2026 Undangan Rapat SLA tanggal 21 Mei 2026; g. 314/KP/HUK.07/VI/2026 tanggal 05 Juni 2026 perihal Undangan Pembahasan Penyesuaian Draft SLA reff Hasil Rapat Pembahasan SLA bersama Regulator h. 357/KP/HUK.07/VI/2026 tanggal 29 Juni 2026 perihal Penyampaian Matrik Penyesuaian Draft SLA dan Undangan Rapat untuk Konsolidasi Hasil Penyesuaian Draft SLA.		
2	Reprioritasi program, program mandatory, safety critical dan operasional kontinuiti tetap di pertahankan, sedangkan penjadwalan ulang program non prioritas atau dilaksanakan secara bertahap	Des 2026	a. Monitoring dan evaluasi atas pencapaian target kinerja keuangan RKAP 2026; b. Monitoring dan evaluasi atas pencapaian target kinerja investasi RKAP 2026; c. Pembuatan dashboard monitoring RKAP yang mencakup kinerja trafik & produksi, keuangan, anggaran, dan investasi		
3	Pengendalian belanja secara selektif, belanja dan pengadaan dikendalikan berdasarkan urgency, kesiapan teknis, serta kontribusi terhadap kehandalan pelayanan dan sasaran strategis				
4	Monitoring komitmen dan prognosa beban, realisasi, komitmen prognosa anggaran, arus kas dan Risiko dilakukan pemantauan secara berkala sebagai dasar penyesuaian				

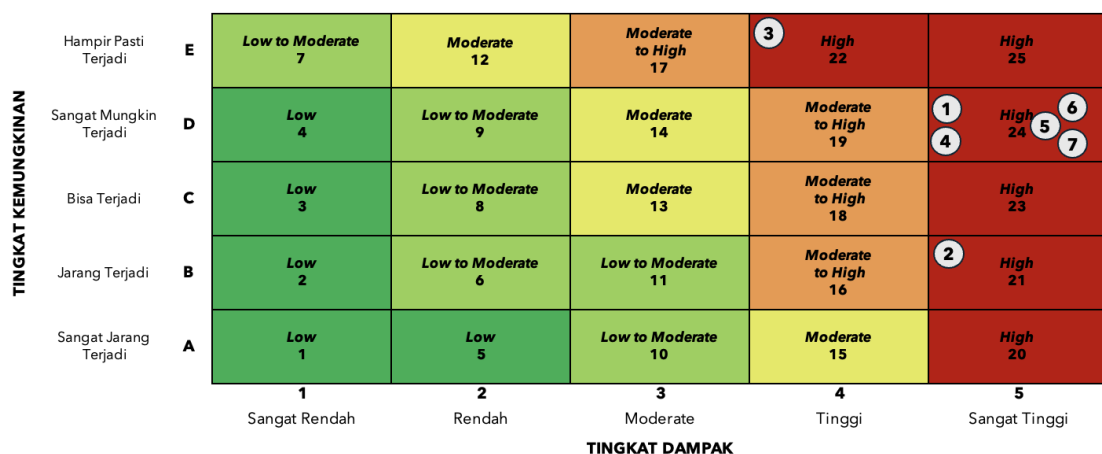
Rencana Penanganan Risiko		Target Waktu	Penjelasan Realisasi	Anggaran Biaya Mitigasi (Juta)	Realisasi Biaya Mitigasi (Juta)
	program ataupun belanja				
5	Melakukan monitoring efisiensi biaya dan membuat kebijakan <i>cost cutting</i>				

4.1.3. Peta Risiko

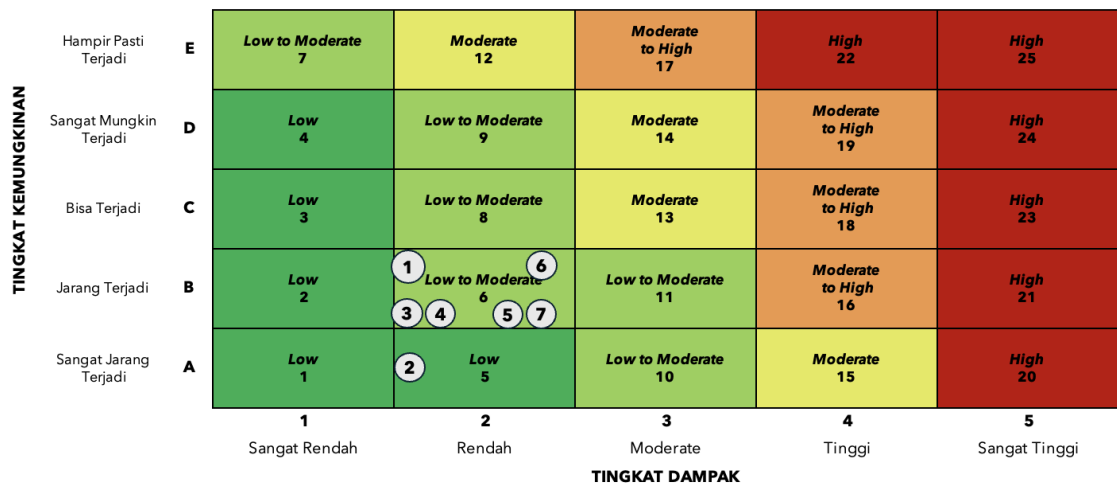
Sebagai bagian dari proses manajemen risiko yang terstruktur, Perum LPPNPI telah melakukan pemetaan terhadap risiko-risiko utama berdasarkan tingkat kemungkinan dan dampaknya. Peta risiko ini disusun untuk memberikan visualisasi atas distribusi risiko yang dihadapi perusahaan pada berbagai tahapan siklus manajemen risiko. Adapun peta risiko yang dikembangkan meliputi:

1. Peta Risiko *Inherent* Tahun 2026, yang menunjukkan tingkat risiko awal sebelum dilakukan perlakuan risiko;
2. Peta Target Risiko *Residual* Tahun 2026, yang menunjukkan proyeksi risiko akhir yang ingin dicapai perusahaan melalui seluruh rencana mitigasi hingga akhir tahun;
3. Peta Target Risiko *Residual* Triwulan II 2026, yang menunjukkan tingkat risiko yang diharapkan tercapai setelah perlakuan risiko dilakukan; dan
4. Peta Target Risiko Aktual (*Current Risk*) Triwulan II 2026, yang menyajikan tingkat risiko aktual yang dihadapi berdasarkan pemantauan terakhir.

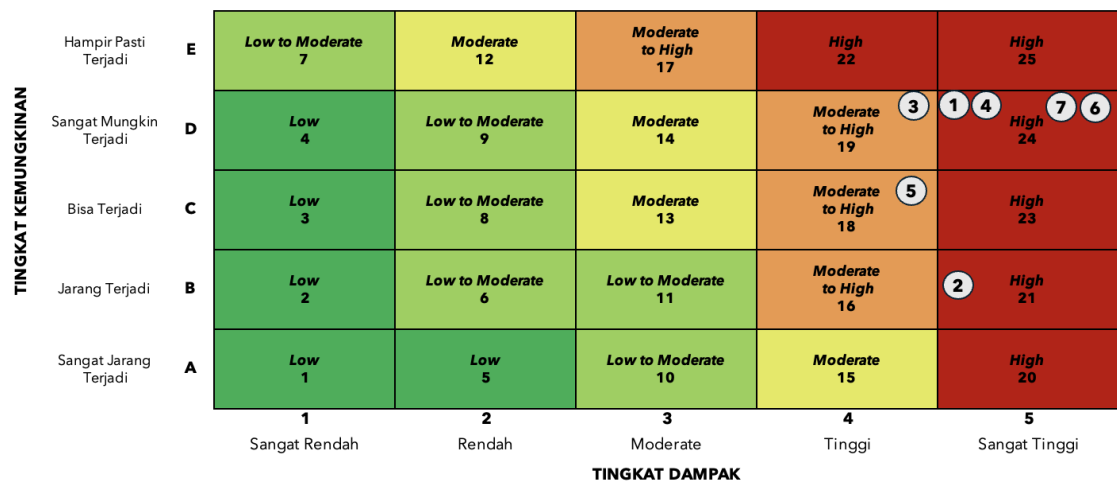
Pemetaan ini digunakan untuk memastikan bahwa arah mitigasi dan strategi pengendalian risiko telah berjalan secara proporsional terhadap prioritas risiko yang ada.



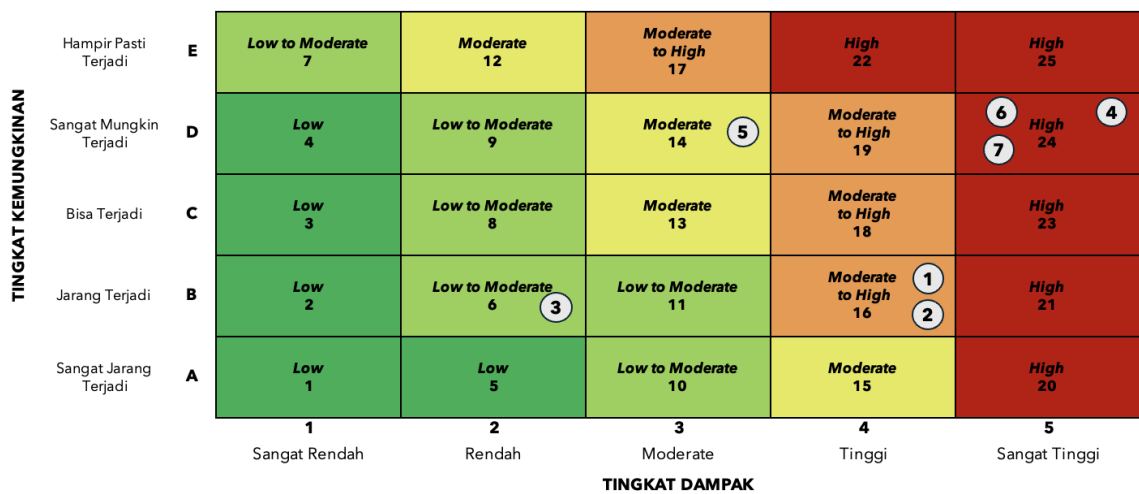
Gambar IV.1
Peta *Inherent Risk* 2026



Gambar IV.2
Peta Target Residual Risk Tahun 2026



Gambar IV.3
Peta Residual Risk Triwulan II 2026



Gambar IV.4
Peta Current Risk Triwulan II 2026

4.1.4. Ikhtisar Perubahan Profil dan Strategi Risiko

A. Ikhtisar Perubahan Profil Risiko

Pada pelaporan Triwulan II 2026, tidak terdapat penambahan risiko baru yang berdampak pada profil risiko.

B. Strategi Risiko

Sejalan dengan Aspirasi Pemegang Saham (APS) tahun 2026, Perum LPPNPI menetapkan strategi pengelolaan risiko berdasarkan tingkat toleransi yang diselaraskan dengan kebijakan Kementerian BUMN. Strategi ini terbagi ke dalam 4 (empat) pendekatan, yaitu:

1. Tidak Toleran
 - a. Sangat berhati-hati dalam mengambil risiko dan lebih memilih menjaga stabilitas serta konsistensi dalam operasi bisnis; dan
 - b. Keputusan bisnis didasarkan pada pemeliharaan modal.
2. Konservatif
 - a. Berhati-hati dalam mengambil risiko, dengan memilih beberapa risiko yang terkendali namun tetap memprioritaskan kestabilan usaha; dan
 - b. Keputusan bisnis didasarkan pada Upaya untuk melindungi risiko besar yang tidak terduga, termasuk didalamnya menghindari paparan terhadap fluktuasi pasar yang signifikan serta dapat menanggung beban yang kecil.x
3. Moderat
 - a. Bersedia mengambil risiko dalam batas tertentu untuk mencapai pertumbuhan dan keuntungan, tetapi tetap memperhatikan perlindungan terhadap kerugian besar; dan
 - b. Keputusan bisnis mempertimbangkan peluang pertumbuhan dan dampak risiko secara bersamaan serta dapat menanggung beban yang sedang.
4. Strategis
 - a. Secara aktif menerapkan strategi yang melibatkan pengelolaan risiko sebagai bagian integral dan rencana bisnis, mengambil risiko lebih tinggi dalam rangka mencapai pertumbuhan dan inovasi besar; dan
 - b. Keputusan bisnis mempertimbangkan peluang pertumbuhan dan dampak risiko secara bersamaan serta dapat menanggung beban yang besar.

Hingga Triwulan II 2026, perusahaan tetap beroperasi sesuai RKAP tahun 2026 tanpa adanya perubahan faktor risiko internal maupun eksternal yang signifikan.

4.1.5. Catatan Kejadian Kerugian (*Loss Event Database*)

Tabel IV.11
Loss Event Database Triwulan II 2026

No	Nama Kejadian	Profil Risiko yang Diidentifikasi di Awal	Waktu Kejadian	Sumber Penyebab Kejadian	Perlakuan Atas Kejadian	Nilai Kerugian	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Status Pemulihan Saat Ini	Keterangan
1	Kerusakan Modul DVOR Unit Kertajati	Risiko tidak tercapainya target peningkatan keselamatan operasional pelayanan	5 Desember 2025	Petir	Mengajukan proses klaim asuransi aset	Rp342.435.000	a. Pihak Asuransi; b. Direktorat Pembina; dan c. Cabang Bandung	Proses penggantian oleh pihak penyedia asuransi, yaitu PT. ACA	Survei lokasi telah dilaksanakan, dan saat ini Kantor Cabang Bandung sedang melengkapi dokumen yang diperlukan oleh <i>Loss Adjuster</i>
2	Tindakan Melawan Hukum Berupa Pencurian di Area Shelter Localizer dan Shelter DVOR di Unit Kertajati Cabang Bandung	Risiko tidak tercapainya target peningkatan keselamatan operasional pelayanan	DOL 23 & 24 Januari 2026	Pencurian	Mengajukan proses klaim asuransi aset	Rp1.367.844.491	a. Pihak Asuransi; b. Direktorat Pembina; c. Cabang Bandung; dan d. Pihak Kepolisian	Proses penggantian oleh pihak penyedia asuransi, yaitu PT. ACA	Survei lokasi telah dilaksanakan, dan saat ini Kantor Cabang Bandung sedang melengkapi dokumen yang diperlukan oleh <i>Loss Adjuster</i>
3	Kerusakan Fasilitas Navigasi Akibat Tindakan Melawan, di antaranya: 1. Tiang Penangkal Petir; 2. Kabel BC	Risiko tidak tercapainya target peningkatan keselamatan operasional pelayanan	29 April 2026	Pencurian	Mengajukan proses klaim asuransi aset	Rp8.940.000	a. Pihak Asuransi; b. Direktorat Pembina; dan c. Cabang Banjarmasin	Proses penggantian oleh pihak penyedia asuransi, yaitu PT. ACA	Survei lokasi sudah dilaksanakan, saat ini Kantor Cabang sedang melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan oleh pihak asuransi

No	Nama Kejadian	Profil Risiko yang Diidentifikasi di Awal	Waktu Kejadian	Sumber Penyebab Kejadian	Perlakuan Atas Kejadian	Nilai Kerugian	Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab	Status Pemulihan Saat Ini	Keterangan
4	Kerusakan Peralatan UPS 30 KVA Akibat Terbakar	Risiko tidak tercapainya target peningkatan keselamatan operasional pelayanan	10 April 2026	Terbakar	Mengajukan proses klaim asuransi aset	Rp384.696.644	a. Pihak Asuransi; b. Direktorat Pembina; dan c. Cabang Yogyakarta	Proses penggantian oleh pihak penyedia asuransi, yaitu PT. ACA	Survei lokasi sudah dilaksanakan, saat ini Kantor Cabang sedang melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan oleh pihak asuransi
5	Kerusakan Peralatan UPS 30 KVA Akibat Terbakar	Risiko tidak tercapainya target peningkatan keselamatan operasional pelayanan	9 Maret 2026	Terbakar	Mengajukan proses klaim asuransi aset	Rp1.230.347.000	a. Pihak Asuransi; b. Direktorat Pembina; dan c. Cabang Pontianak	Proses penggantian oleh pihak penyedia asuransi, yaitu PT. ACA	Survei lokasi sudah dilaksanakan, saat ini Kantor Cabang sedang melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan oleh pihak asuransi
6	Kerusakan Fasilitas Navigasi Akibat Tindakan Melawan, di antaranya: 1. Tiang Penangkal Petir; 2. Kabel BC	Risiko tidak tercapainya target peningkatan keselamatan operasional pelayanan	17 & 24 Juni 2026	Pencurian	Mengajukan proses klaim asuransi aset	Rp22.654.000	a. Pihak Asuransi; b. Direktorat Pembina; dan c. Cabang Banjarmasin	Proses penggantian oleh pihak penyedia asuransi, yaitu PT. ACA	Survei lokasi akan segera dilaksanakan, menunggu jadwal resmi dari pihak asuransi

4.1.6. Perhitungan Peringkat Komposit Risiko

Penilaian peringkat komposit risiko dilakukan dengan menggabungkan 2 (dua) aspek utama, yaitu:

1. Kualitas penerapan manajemen risiko; dan
2. Capaian kinerja operasional dan keuangan.

Pada laporan ini, perhitungan atas peringkat komposit risiko sebagai berikut.

1. Penilaian terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

Tabel IV.12
Hasil Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

No	Indikator	Bobot	Hasil Penilaian	Skor Penilaian
1	Pencapaian Nilai Eksposur Risiko dibandingkan dengan Target Risiko Residual	30%	90	27
2	Pencapaian Output Pelaksanaan Perlakuan Risiko dibandingkan dengan Target Total Output Perlakuan Risiko	20%	100	20
3	Realisasi Biaya Pelaksanaan Perlakuan Risiko dibandingkan dengan Anggaran	20%	80	16
4	Ketepatan Penilaian Risiko yang meliputi identifikasi risiko, kuantifikasi risiko, rencana perlakuan risiko, dan prioritasasi risiko	30%	83	24
TOTAL				87

2. Penilaian terhadap Pencapaian Kinerja

Tabel IV.13
Hasil Penilaian Atas Pencapaian Kinerja

No	Indikator	Bobot	Hasil Penilaian	Skor Penilaian
1	Capaian KPI Kolegial	30%	100	30
2	Capaian Kinerja Keuangan	30%	92,5	27,8
3	Capaian Kinerja Operasi/ Produksi Utama	40%	80	32
TOTAL				89,8

3. Penentuan Hasil Perhitungan Peringkat Komposit Risiko

KINERJA	KUALITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO				
	Strong	Satisfactory	Fair	Marginal	Unsatisfactory
Sangat Baik	1	1	2	3	3
Baik	1	2	2	3	4
Cukup	2	2	3	4	4
Kurang	2	3	4	4	5
Buruk	3	3	4	5	5

Gambar IV.5
Hasil Perhitungan Peringkat Komposit Risiko

Berdasarkan tabel klasifikasi penilaian, skor yang diperoleh menghasilkan peringkat:

- Kualitas Manajemen Risiko: *Satisfactory* (87);
- Capaian Kinerja: Sangat Baik (89,8).

Dengan demikian, peringkat komposit risiko Perum LPPNPI di Triwulan II 2026 adalah :

- Peringkat: 2;
- Deskripsi: Risiko terkendali baik dan kemungkinan tidak tercapainya target kinerja tergolong rendah.

4. Peringkat Komposit Risiko

Tabel IV.14
Kriteria Peringkat Komposit Risiko

Peringkat	Deskripsi
1	Risiko terkendali sangat baik dan kemungkinan tidak tercapainya target kinerja tergolong sangat rendah
2	Risiko terkendali baik dan kemungkinan tidak tercapainya target kinerja tergolong rendah
3	Risiko terkendali cukup dan kemungkinan tidak tercapainya target kinerja tergolong cukup
4	Risiko tidak terkendali dan kemungkinan tidak tercapainya target kinerja tergolong tinggi
5	Risiko sangat tidak terkendali dan kemungkinan tidak tercapainya target kinerja tergolong sangat tinggi

4.2. LAPORAN AUDIT INTERN

Sejumlah pelaksanaan kegiatan audit intern yang telah dilaksanakan pada Triwulan II 2026 di antaranya sebagai berikut.

4.2.1 Audit Tematik

1. Maksud dan tujuan

Audit tematik adalah audit yang dilakukan dengan fokus pada topik atau tema tertentu di seluruh unit kerja, bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap kebijakan atau prosedur yang terkait dengan tema tersebut.

Audit tematik dilakukan untuk mendalami satu tema atau topik tertentu di seluruh organisasi atau unit kerja, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih fokus dan mendetail mengenai penerapan kebijakan, prosedur, atau pengendalian pada area tersebut, melalui:

- a. Menilai kepatuhan dengan memastikan bahwa seluruh unit kerja mematuhi kebijakan, prosedur, atau regulasi yang terkait dengan tema audit;
- b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dengan menilai apakah sumber daya, proses, atau kegiatan terkait tema telah digunakan secara optimal;
- c. Mengidentifikasi risiko dan penyimpangan dengan mendeteksi potensi masalah, kesalahan, atau penyimpangan yang berkaitan dengan tema tertentu;
- d. Memberikan rekomendasi perbaikan dengan membantu manajemen memperbaiki prosedur, pengendalian, atau kebijakan pada area yang menjadi fokus audit; dan
- e. Mendukung pengambilan keputusan - menyediakan informasi yang relevan untuk perbaikan proses dan pengelolaan risiko di seluruh organisasi.

2. Realisasi Kegiatan

Realisasi kegiatan audit tematik sampai dengan Triwulan II 2026 sebesar **0%** dikarenakan kegiatan audit tematik akan dilaksanakan pada periode bulan Juli sampai dengan Desember 2026. Adapun ruang lingkup kegiatan ini berupa audit atas Pengelolaan Pendapatan dan Piutang Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan (PJNP), Audit atas Pengelolaan Aset *Communication, Navigation, Surveillance and Data* (CNSD), dan Audit Penyertaan Modal Negara (PMN).

4.2.2 Audit Operasional

1. Maksud dan tujuan

Audit operasional digunakan suatu alat pengendalian yang penting untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kegiatan objek yang diaudit, sehingga jika ada suatu masalah yang timbul dapat segera diidentifikasi dan diharapkan untuk tidak terulang lagi dimasa yang akan datang.

Audit operasional merupakan rancangan secara sistematis untuk mengaudit aktivitas-aktivitas, program-program yang diselenggarakan atau sebagian dari entitas yang bisa diaudit untuk menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana telah digunakan secara efisien, serta tujuan dari program dan aktifitas yang telah direncanakan dapat tercapai serta tidak melanggar ketentuan aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan.

Audit ini dimaksudkan untuk membantu manajemen perusahaan/cabang dalam memahami sejauh mana operasi bisnis berjalan efisien, efektif, dan ekonomis, serta kepatuhan operasional perusahaan/cabang. Audit ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi masalah, ketidaksesuaian atau ketidakpatuhan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan/cabang serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan operasional perusahaan/cabang, melalui:

- a. Penilaian atas kinerja operasional perusahaan/cabang;
 - b. Mengidentifikasi peluang perbaikan dalam proses bisnis;
 - c. Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan internal perusahaan/cabang; dan
 - d. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasional.
2. Realisasi kegiatan

Realisasi kegiatan Audit Operasional pada Triwulan II 2026 sebesar **0%**. Kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan pada periode bulan Juli s.d. Desember 2026, dengan rencana audit operasional tahun 2026 pada 4 lokasi, meliputi: JATSC, MATSC, Sentani dan Tanjungpinang.

4.2.3 Reviu Penyertaan Modal Negara (PMN)

1. Maksud dan tujuan

Reviu atas PMN meliputi peninjauan pengecekan atau evaluasi dokumen, laporan atau informasi dengan tujuan untuk memastikan keakuratan dan kelayakan. Adapun maksud dan tujuan Reviu PMN adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Reviu atas Penyertaan Modal Negara ini dilatarbelakangi adanya penerimaan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah kepada Perum LPPNPI;
- b. Kegiatan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 146/PMK.06/2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi PMN pada Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya c.q. Pasal 7 ayat (3) yang antara lain menyatakan bahwa Laporan Triwulanan – Realisasi Penggunaan PMN direviu oleh *Internal Audit Division*; dan

- c. Kegiatan revidi ini dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian laporan triwulanan yang disampaikan dengan dokumen pendukungnya antara lain seperti kesesuaian pencapaian progress fisik, realisasi keuangan, mutasi rekening bank penyimpan dana PMN serta kesesuaian capaian realisasi dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Realisasi kegiatan

Realisasi kegiatan Revidi Penyertaan Modal Negara (PMN) sampai dengan Triwulan II 2026 sebesar **50%**. Kegiatan yang terealisasi adalah Revidi Penyertaan Modal Negara (PMN) Triwulan IV 2025 dan Triwulan I 2026 dengan tahapan pelaksanaan:

 - a. Penilaian atas Pengelolaan Keuangan PMN pada Triwulan IV Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026. Kegiatan ini menilai seluruh aspek pengelolaan keuangan PMN, meliputi rekening bank yang digunakan, penerimaan dan pengeluaran, bunga atau pendapatan lain yang terkait, pencatatan akuntansi, serta kepatuhan terhadap standar keuangan dan peraturan yang berlaku. Tujuannya adalah memastikan pengelolaan dana PMN dilakukan secara tepat, transparan, akuntabel, dan aman dari potensi penyalahgunaan atau kesalahan pencatatan;
 - b. Penilaian terhadap Kesesuaian Target dan Realisasi (Keuangan dan Fisik) PMN pada Triwulan IV Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026. Kegiatan ini menilai sejauh mana realisasi penggunaan PMN sesuai dengan target yang telah ditetapkan, baik dari sisi keuangan maupun fisik. Penilaian mencakup perbandingan anggaran dan realisasi pengeluaran, serta progres fisik proyek atau program yang didanai PMN. Hal ini untuk memastikan penggunaan dana berjalan sesuai rencana dan mendukung pencapaian hasil yang diharapkan;
 - c. Penilaian atas Kesesuaian Capaian Target *Output/Outcome* dari Program PMN pada Triwulan IV Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan menilai hasil nyata dari program yang didanai PMN, baik berupa *output* (produk, layanan, atau hasil langsung) maupun *outcome* (manfaat jangka menengah/panjang bagi perusahaan atau masyarakat). Penilaian ini memastikan PMN tidak hanya dicairkan dan dibelanjakan, namun memastikan kesesuaian manfaat yang dilaporkan; dan
 - d. Penyusunan Penyusunan Laporan Hasil Revidi PMN pada Triwulan IV Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026. Kegiatan ini mencakup penyusunan laporan akhir yang memuat seluruh catatan, analisis, penilaian kesesuaian, capaian, dan saran perbaikan terkait pengelolaan PMN. Laporan ini menjadi dokumen resmi yang disampaikan kepada manajemen dan pihak terkait sebagai dasar tindak lanjut dan pengambilan keputusan. Adapun Laporan Hasil Revidi PMN yang telah diterbitkan adalah:

- i. Laporan Hasil Reviu atas Konsep Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Periode Triwulan IV Tahun 2025 Nomor: 022/UI/KEU.02/I/2026 tertanggal 26 Januari 2026;
- ii. Laporan Hasil Reviu atas Konsep Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Periode Triwulan I Tahun 2026 Nomor: 087/UI/KEU.02/IV/2026 tertanggal 27 April 2026.

4.2.4 Pelaksanaan Permintaan Audit Tertentu/Investigatif, Reviu dan/atau Konsultatif

1. Maksud dan tujuan

- a. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat insidental dan tidak terencana, di mana pelaksanaan kegiatan akan dapat dilakukan jika adanya permintaan dari Direktur Utama dan/atau anggota Direksi lainnya; dan
- b. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi permintaan manajemen terkait permasalahan/kendalan serta hal-hal lainnya yang memerlukan pelaksanaan peran dan fungsi *Internal Audit Division* di perusahaan.

2. Realisasi kegiatan

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang didasarkan pada permintaan dari Direktur Utama dan/atau unit kerja lainnya sehingga pelaksanaan kegiatan akan tergantung pada permintaan itu sendiri. Realisasi Permintaan Audit Tertentu/Investigatif, Reviu dan/atau Konsultatif sampai dengan Triwulan II 2026 sebesar **40%**. Berikut ini adalah realisasi kegiatan Audit Khusus/Investigatif, Permintaan Reviu dan Konsultatif sampai dengan Triwulan I 2026, di antaranya:

- a. Pembahasan Draft Peraturan Direksi Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perum LPPNPI pada tanggal 25-28 Maret 2026;
- b. Pembahasan Draft Petunjuk Teknis Terkait Deposit Pembayaran Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan (PJNP) Kantor Cabang pada tanggal 03 Maret 2026;
- c. Pembahasan dan Penyusunan tanggapan atas permintaan Data terkait Pemeriksaan BPK atas LK BP BUMN BA 999.03 TA 2025 Tahap 2;
- d. Pembahasan Dan Laporan Monev Risiko PMN Tunai Triwulan I Tahun 2026;
- e. Pembahasan Rapat Awal Pembahasan Draft SMKI Tahun 2026;
- f. Pembahasan Lanjutan Terkait Penjajakan Kerja Sama Penagihan dengan Nav-Pass;
- g. Pembahasan Kajian Direct Benefit Jam Kerja Diluar Waktu Operasional, Penempatan dan Rotasi Personel ATC Pada Daerah 3T, dan Optimalisasi Sistem Rostering ATC;
- h. Pembahasan Defectlist Pekerjaan PMN Tunai Pengadaan dan Penggantian Fasilitas ATM (ATC System) untuk Modernisasi Fasilitas Pelayanan APP di Balikpapan, Medan dan Pontianak;

- i. Pembahasan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dan Pencapaian Kinerja Dalam Komposit Risiko Perum LPPNPI Triwulan I Tahun 2026;
- j. Pembahasan Implementasi Mekanisme Jasa Pengelolaan Administrasi Layanan Kesehatan Karyawan *Administrative Service Only* (ASO) di Perum LPPNPI;
- k. Pembahasan Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia/AirNav Indonesia;
- l. Pembahasan Implementasi PSAK 118 dalam Penyusunan RKAP Tahun 2027;
- m. Pembahasan Persiapan Paparan dengan PPS;
- n. Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun 2024 - *Corporate Secretary Division*;
- o. Pembahasan Penyusunan Profil Risiko Pelayanan Navigasi Penerbangan yang Sejalan Dengan Profil Risiko dan Rencana Perlakuan Risiko Perusahaan;
- p. Pembahasan Draft Final Peraturan Direksi Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perum LPPNPI;
- q. Koordinasi Penyusunan RKAP Tahun 2027 pada Fungsi *Risk Management, Internal Audit, dan Legal, Compliance & Sustainability*;
- r. Monitoring dan Evaluasi Potensi Risiko Pada Masa Transisi Implementasi ATMAS New JATSC; dan
- s. Pembahasan Tindaklanjuti Terhadap Hasil Kajian Risiko atas Petunjuk Teknis Deposit Pembayaran Biaya PJNP Kantor Cabang.

4.2.5 Evaluasi Pelaksanaan *Whistleblowing System*

1. Maksud dan tujuan

Evaluasi Penyelenggaraan *Whistleblowing System* (WBS) bertujuan untuk menyediakan mekanisme resmi bagi seluruh pihak, baik pegawai maupun pemangku kepentingan eksternal, untuk melaporkan dugaan pelanggaran, kecurangan, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan tidak etis dalam organisasi secara aman, terpercaya, dan terjaga kerahasiaannya. WBS diselenggarakan dengan maksud meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas organisasi, sekaligus mendorong budaya kepatuhan dan etika kerja yang tinggi. Sistem ini memungkinkan laporan atau pengaduan ditindaklanjuti secara objektif dan profesional, sehingga setiap indikasi pelanggaran dapat diinvestigasi, diberikan rekomendasi perbaikan, dan dicegah berulang di masa depan. Dengan kata lain, tujuan WBS adalah menjadi sarana perlindungan bagi pelapor, memperkuat pengawasan internal, meningkatkan kepercayaan publik dan pemangku kepentingan terhadap organisasi, serta mendukung terciptanya tata kelola yang bersih, efektif, dan akuntabel.

2. Realisasi kegiatan

Realisasi kegiatan Evaluasi Pelaksanaan WBS sampai dengan Triwulan II tahun 2026 sebesar **50%**, di mana kegiatan penyelenggaraan WBS yang direalisasikan pada periode bulan Juni adalah pelaporan atas penyelenggaraan WBS Triwulan IV 2025 dan WBS Triwulan I 2026 adalah sebagai berikut:

- a) Pengumpulan Data Pengaduan WBS Triwulan IV Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026. Kegiatan ini mencakup seluruh proses penerimaan dan pengumpulan laporan atau pengaduan yang masuk melalui *Whistle Blowing System* selama triwulan I Tahun 2026. Pengumpulan data meliputi pencatatan pengaduan, verifikasi awal terhadap kelengkapan dan relevansi informasi, serta pengorganisasian data berdasarkan kategori, jenis pelanggaran, atau unit kerja terkait. Tujuannya adalah memastikan seluruh laporan tercatat secara sistematis dan dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Kegiatan ini juga menjadi dasar bagi proses investigasi dan analisis lebih lanjut.
- b) Penyusunan Laporan WBS Triwulan IV Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026. Setelah data pengaduan terkumpul dan diverifikasi, kegiatan selanjutnya adalah menyusun laporan WBS Triwulan I. Laporan ini memuat ringkasan jumlah pengaduan, jenis dan kategori pelanggaran yang dilaporkan, status penanganan setiap pengaduan, hasil verifikasi awal, serta tindak lanjut yang telah dilakukan. Penyusunan laporan bertujuan memberikan informasi yang jelas, terstruktur, dan akurat mengenai kinerja WBS selama periode tersebut, sekaligus menjadi bahan evaluasi efektivitas sistem dan perbaikan prosedur bila diperlukan.
- c) Laporan WBS Triwulan IV Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026 kepada Direktur Utama. Kegiatan ini mencakup penyampaian laporan WBS yang telah disusun kepada Direktur Utama sebagai pimpinan tertinggi perusahaan. Laporan ini digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengaduan yang diterima, status penanganan, temuan signifikan, dan rekomendasi tindak lanjut. Penyampaian laporan kepada Direktur Utama bertujuan agar manajemen puncak dapat memantau efektivitas WBS, mengambil keputusan strategis, serta memastikan adanya langkah perbaikan atau mitigasi risiko yang diperlukan di tingkat organisasi. Laporan WBS yang telah disampaikan kepada Direktur Utama adalah sebagai berikut:
 - i. Nota Dinas *Executive Vice President of Internal Audit* Nomor: 023/UI/HMS.05.01/I/2026 tertanggal 26 Januari 2026 Perihal Penyampaian Laporan Atas Penyelenggaraan *Whistle Blowing System* Triwulan IV Tahun 2025 (Periode Bulan Oktober, November dan Desember 2025); dan
 - ii. Nota Dinas *Executive Vice President of Internal Audit* Nomor: 065/UI/GCG/IV/2026 tertanggal 06 April 2026 Perihal Penyampaian Laporan

Atas Penyelenggaraan *Whistle Blowing System* Triwulan I Tahun 2026
(Periode Bulan Januari, Februari dan Maret 2026).

- d) Laporan WBS Triwulan IV Tahun 2025 kepada Badan Pengaturan (BP) BUMN. Selain disampaikan kepada Direktur Utama, laporan WBS Triwulan IV juga disampaikan kepada Badan Pengaturan (BP) BUMN sebagai pihak pengawas eksternal. Laporan ini memberikan informasi mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan WBS, termasuk jumlah dan jenis pengaduan, tindak lanjut, serta temuan penting. Tujuannya adalah untuk memenuhi kewajiban pelaporan reguler kepada pemangku kepentingan pemerintah, sekaligus menunjukkan bahwa perusahaan menjalankan mekanisme pengawasan internal yang efektif dan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Laporan WBS yang telah disampaikan kepada BP BUMN adalah Surat Direktur Utama Perum LPPNPI Nomor: 346/U/TNG/LPPNPI/HMS.05.01/I/2026 tertanggal 27 Januari 2026 Perihal Penyampaian Rekapitulasi Pengaduan yang Masuk Melalui *Whistle Blowing System* (WBS) Perum LPPNPI Periode Semester II Tahun 2025.

4.2.6 Audit Information Technology

1. Maksud dan tujuan

Audit *Information Technology* (Audit TI) dilakukan dengan maksud untuk menilai dan memastikan bahwa seluruh sistem, infrastruktur, proses, dan pengendalian teknologi informasi (TI) dalam organisasi berjalan sesuai dengan kebijakan, prosedur, standar, dan regulasi yang berlaku. Audit TI bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana teknologi informasi mendukung operasional organisasi, meminimalkan risiko yang terkait dengan keamanan data, integritas sistem, ketersediaan layanan, serta kepatuhan terhadap peraturan internal maupun eksternal. Audit ini juga bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan teknologi, termasuk implementasi sistem aplikasi, jaringan, *database*, perangkat keras, dan perangkat lunak pendukung kegiatan bisnis.

2. Realisasi kegiatan

Realisasi kegiatan pelaksanaan kegiatan Audit *Information Technology* sampai dengan Triwulan II 2026 sebesar **0%**. Kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan pada periode bulan Triwulan III 2026.

4.2.7 Rekapitulasi Tindak Lanjut Temuan Auditor Internal Tahun

Audit Internal mencakup audit operasional serta audit atas permintaan, sampai dengan Triwulan II 2026, pelaksanaan audit internal yang berupa audit operasional **tahun 2024** telah dilakukan di 7 (tujuh) Cabang yang terdiri dari Cabang Aceh, Cabang Tarakan, Cabang MATSC, Cabang Ambon, Cabang Kupang, Cabang Denpasar dan Cabang Pontianak. Serta

audit operasional **tahun 2025** di 7 (tujuh) Cabang yang terdiri dari Cabang MATSC, Cabang JATSC, Cabang Denpasar, Cabang Medan, Cabang Yogyakarta, Cabang Pontianak dan Cabang Balikpapan. Selain itu, Audit atas permintaan telah dilakukan terkait AirNav *Training Center* (ANTC). Adapun rekapitulasi penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Auditor sampai dengan Triwulan II tahun 2026 secara total (Audit Operasional dan Audit ANTC) adalah dari 459 arahan yang disampaikan, tindak lanjut yang sudah Sesuai/S sebanyak 89 (19,39%), tindak lanjut yang Belum Sesuai/BS sebanyak 208 (45,32%), dan Belum Ditindaklanjuti/BD sebanyak 162 (35,29%).

Tabel IV.15
Rekapitulasi Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Audit Operasional dan Audit ANTC Triwulan II 2026

A. AUDIT OPERASIONAL										
Cabang	Jumlah Temuan	Jumlah Arahan	Tindak Lanjut*							
			S	%	BS	%	BD	%	TD	%
Tahun 2024										
1. Cabang Aceh	18	36	7	19,44%	23	64%	6	17%	0	0%
2. Cabang Tarakan	15	37	16	43,24%	8	21,62%	13	35,14%	0	0%
3. Cabang MATSC	8	19	10	52,63%	9	47,37%	0	0%	0	0%
4. Cabang Ambon	15	33	8	24,24%	6	18,18%	19	57,58%	0	0%
5. Cabang Kupang	19	47	29	61,70%	8	17,02%	10	21,28%	0	0%
6. Cabang Denpasar	13	24	4	16,67%	4	16,67%	16	66,67%	0	0%
7. Cabang Pontianak	7	12	8	66,67%	3	25%	1	8,33%	0	0%
Tahun 2025										
1. Cabang MATSC	10	25	0	0%	13	52%	12	48%	0	0%
2. Cabang JATSC	16	40	0	0%	22	55%	18	45%	0	0%
3. Cabang Denpasar	13	33	0	0%	23	69,70%	10	30,30%	0	0%
4. Cabang Medan	14	29	0	0%	19	65,52%	10	34,48%	0	0%
5. Cabang Jogja	11	52	0	0%	31	59,62%	21	40,38%	0	0%
6. Cabang Pontianak	9	25	0	0%	16	64%	9	36%	0	0%
7. Cabang Balikpapan	12	39	0	0%	23	58,97%	16	41,03%	0	0%
Sub Total A	180	451	82	18,18%	208	46,12%	161	35,70%	0	0%

B. AUDIT ANTC										
Cabang	Jumlah Temuan	Jumlah Arahan	Tindak Lanjut*							
			S	%	BS	%	BD	%	TD	%
1. AirNav Training Center (ANTC)	6	8	7	87,50%	0	0%	1	12,50%	0	0%
TOTAL (A + B)		459	89	19,39%	208	45,32%	162	35,29%	0	0%

*) Tindak Lanjut: (S) Sesuai, (BS) Belum Sesuai, (BD) Belum Ditindaklanjuti, dan (TD) Tidak Dapat Ditindaklanjuti

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelesaian tindak lanjut atas temuan LHA Operasional tahun 2024 pada Cabang Aceh yaitu dari 36 total arahan (rekomendasi) yang disampaikan, terdapat 7 tindak lanjut yang Sesuai/S (19,44%), 23 tindak lanjut Belum Sesuai/BS (64%), dan 6 tindak lanjut yang Belum Ditindaklanjuti/BD (17%);
2. Penyelesaian tindak lanjut atas temuan LHA Operasional tahun 2024 pada Cabang Tarakan yaitu dari 37 total arahan (rekomendasi) yang disampaikan, terdapat 16 tindak lanjut yang Sesuai/S (43,24%), 8 tindak lanjut Belum Sesuai/BS (21,62%), dan 13 tindak lanjut yang Belum Ditindaklanjuti/BD (35,14%);

3. Penyelesaian tindak lanjut atas temuan LHA Operasional tahun 2024 pada Cabang MATSC yaitu dari 19 total arahan (rekomendasi) yang disampaikan, terdapat 10 tindak lanjut yang Sesuai/S (52,63%), dan 9 tindak lanjut Belum Sesuai/BS (47,37%);
4. Penyelesaian tindak lanjut atas temuan LHA Operasional tahun 2024 pada Cabang Ambon yaitu dari 33 total arahan (rekomendasi) yang disampaikan, terdapat 8 tindak lanjut yang Sesuai/S (24,24%), 6 tindak lanjut Belum Sesuai/BS (18,18%), dan 19 tindak lanjut yang Belum Ditindaklanjuti/BD (57,58%);
5. Penyelesaian tindak lanjut atas temuan LHA Operasional tahun 2024 pada Cabang Kupang yaitu dari 47 total arahan (rekomendasi) yang disampaikan, terdapat 29 tindak lanjut yang Sesuai/S (61,70%), 8 tindak lanjut Belum Sesuai/BS (17,02%), dan 10 tindak lanjut yang Belum Ditindaklanjuti/BD (21,28%);
6. Penyelesaian tindak lanjut atas temuan LHA Operasional tahun 2024 pada Cabang Denpasar yaitu dari 24 total arahan (rekomendasi) yang disampaikan, terdapat 4 tindak lanjut yang Sesuai/S (16,67%), 4 tindak lanjut Belum Sesuai/BS (16,67%), dan 16 tindak lanjut yang Belum Ditindaklanjuti/BD (66,67%);
7. Penyelesaian tindak lanjut atas temuan LHA Operasional tahun 2024 pada Cabang Pontianak yaitu dari 12 total arahan (rekomendasi) yang disampaikan, terdapat 8 tindak lanjut yang Sesuai/S (66,67%), 3 tindak lanjut Belum Sesuai/BS (25%), dan 1 tindak lanjut yang Belum Ditindaklanjuti/BD (8,33%);
8. Penyelesaian tindak lanjut atas temuan LHA Operasional tahun 2025 pada Cabang MATSC yaitu dari 25 total arahan (rekomendasi) yang disampaikan, terdapat 13 tindak lanjut yang Belum Sesuai/BS (52%), 12 tindak lanjut yang Belum Ditindaklanjuti/BD (48%);
9. Penyelesaian tindak lanjut atas temuan LHA Operasional tahun 2025 pada Cabang JATSC yaitu dari 40 total arahan (rekomendasi) yang disampaikan, terdapat 22 tindak lanjut yang Belum Sesuai/BS (55%), 18 tindak lanjut yang Belum Ditindaklanjuti/BD (45%);
10. Penyelesaian tindak lanjut atas temuan LHA Operasional tahun 2025 pada Cabang Denpasar yaitu dari 33 total arahan (rekomendasi) yang disampaikan, terdapat 23 tindak lanjut yang Belum Sesuai/BS (69,7%), 10 tindak lanjut yang Belum Ditindaklanjuti/BD (30,3%);
11. Penyelesaian tindak lanjut atas temuan LHA Operasional tahun 2025 pada Cabang Medan yaitu dari 29 total arahan (rekomendasi) yang disampaikan, terdapat 19 tindak lanjut yang Belum Sesuai/BS (65,52%), 10 tindak lanjut yang Belum Ditindaklanjuti/BD (34,48%);
12. Penyelesaian tindak lanjut atas temuan LHA Operasional tahun 2025 pada Cabang Jogja yaitu dari 52 total arahan (rekomendasi) yang disampaikan, terdapat 31 tindak

lanjut yang Belum Sesuai/BS (59,62%), 21 tindak lanjut yang Belum Ditindaklanjuti/BD (40,38%);

13. Penyelesaian tindak lanjut atas temuan LHA Operasional tahun 2025 pada Cabang Pontianak yaitu dari 25 total arahan (rekomendasi) yang disampaikan, terdapat 16 tindak lanjut yang Belum Sesuai/BS (64%), 9 tindak lanjut yang Belum Ditindaklanjuti/BD (36%);
14. Penyelesaian tindak lanjut atas temuan LHA Operasional tahun 2025 pada Cabang Balikpapan yaitu dari 39 total arahan (rekomendasi) yang disampaikan, terdapat 23 tindak lanjut yang Belum Sesuai/BS (58,97%), 16 tindak lanjut yang Belum Ditindaklanjuti/BD (41,03%);
15. Pemeriksaan atau Audit Internal Atas LHA AirNav *Traning Center* (ANTC), yaitu dari 8 (delapan) total arahan (rekomendasi) yang disampaikan, terdapat 7 (tujuh) tindak lanjut yang Sesuai/S (87,50%) dan 1 (satu) tindak lanjut yang Belum Ditindaklanjuti/BD (12,50%)

BAB V - PELAKSANAAN PROGRAM TJSL



5.1 PROGRAM TJSL

Dalam rangka mendukung keberlanjutan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Perum LPPNPI telah melaksanakan berbagai kegiatan yang didesain berdasarkan 5 (lima) aspek KPI TJSL yang telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN. Kelima aspek tersebut mencakup Fokus pada Dampak, Peningkatan Tata Kelola, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Peningkatan Kolaborasi, serta Peningkatan Engagement Karyawan. Setiap aspek ini menjadi dasar evaluasi untuk memastikan bahwa program TJSL yang dijalankan tidak hanya efektif tetapi juga memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat dan lingkungan.

Sepanjang Tahun 2025, Perum LPPNPI menunjukkan capaian yang baik dalam pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan tercermin dari tingkat penyerapan anggaran yang optimal serta implementasi program yang selaras dengan 5 (lima) aspek KPI TJSL Kementerian BUMN. Berlandaskan fokus pada bidang pendidikan, lingkungan, dan pengembangan usaha mikro dan kecil (PUMK), berbagai inisiatif yang dijalankan tidak hanya terlaksana dengan baik, tetapi juga memberikan manfaat yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Beragam program penting dan prioritas di bidang kesehatan dan pendidikan telah dilaksanakan sebagai bentuk respon serta kepedulian perusahaan, mulai dari penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah 3T, pelaksanaan kegiatan edukatif dan pembinaan karakter, hingga dukungan peningkatan kapasitas melalui beasiswa dan pelatihan keterampilan. Di sisi lain, penguatan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan serta keterlibatan aktif karyawan turut memperkuat efektivitas pelaksanaan program sekaligus memastikan keberlanjutan manfaat yang dihasilkan. Capaian tersebut menjadi dasar yang penting bagi Perum LPPNPI untuk melangkah ke Tahun 2026 dengan semangat peningkatan kualitas dan perluasan dampak program. Dengan terus mengedepankan prinsip keberlanjutan dan penciptaan nilai tambah, pelaksanaan TJSL diharapkan dapat memberikan kontribusi yang semakin signifikan bagi masyarakat, lingkungan, serta mendukung peran Perum LPPNPI dalam pembangunan nasional.

Tabel V.1
Realisasi RKA Program TJSL Triwulan II 2026

JENIS	2026	
	RKAP	Realisasi TW II
1	2	3
1 Pilar Pembangunan Sosial:	Rp 13,857,500,000	Rp 5,592,873,761
a. TBP 1 - Tanpa Kemiskinan	-	-
b. TBP 2 - Tanpa Kelaparan	Rp 2,357,500,000	Rp 1,428,622,306
c. TBP 3 - Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Rp 3,162,500,000	Rp 629,295,566
d. TBP 4 - Pendidikan Berkualitas	Rp 8,337,500,000	Rp 3,534,955,889
e. TBP 5 - Kesenjaraan Gender	-	-
2 Pilar Pembangunan Ekonomi:	Rp 9,740,500,000	Rp 4,638,378,863
a. TBP 7 - Energi Bersih & Terjangkau	-	-
b. TBP 8 - Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi	Rp 9,740,500,000	Rp 4,638,378,863
c. TBP 9 - Industri, Inovasi dan Infrastruktur	-	-
d. TBP 10 - Berkurangnya Kesenjaraan	-	-
e. TBP 17 - Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	-	-
3 Pilar Pembangunan Lingkungan:	Rp 6,762,500,000	Rp 2,475,432,500
a. TBP 6 - Air Bersih dan Sanitasi Layak	Rp 1,400,500,000	Rp 591,500,000
b. TBP 11 - Kota dan Pemukiman Berkelanjutan	Rp 1,800,000,000	Rp 357,520,000
c. TBP 12 - Konsumsi & Produksi yang Bertanggung Jawab	Rp 1,282,000,000	Rp 893,747,500
d. TBP 13 - Penanganan Perubahan Iklim	Rp 1,380,000,000	Rp 632,665,000
e. TPB 15 - Ekosistem Daratan	Rp 900,000,000	-
4 Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola:	Rp 690,000,000	Rp 79,000,000
TPB 16 - Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	Rp 690,000,000	Rp 79,000,000
Total	Rp 31,050,500,000	Rp 12,785,685,124

Penyaluran dana program TJSL sampai dengan Triwulan II 2026 mencapai Rp12.785.685.124,- yang berarti telah terserap sebesar **41,18%** dari total anggaran RKA TJSL tahun 2026 sebesar Rp31.050.500.000,-. Pada Triwulan II 2026, pelaksanaan Program TJSL Perum LPPNPI menunjukkan cakupan yang semakin luas dan terintegrasi, dengan menghadirkan berbagai program yang menjawab kebutuhan masyarakat secara responsif sekaligus berorientasi pada keberlanjutan. Melalui Program AirNav Peduli Bencana, perusahaan menunjukkan kehadiran secara langsung dalam situasi darurat dengan menyalurkan bantuan sembako dan obat-obatan bagi masyarakat terdampak banjir di berbagai wilayah, bekerja sama dengan mitra strategis guna memastikan distribusi bantuan yang tepat sasaran dan efektif. Upaya ini diperkuat dengan pelaksanaan bantuan kemanusiaan di sejumlah daerah terdampak bencana lainnya, sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung percepatan pemulihan kondisi sosial masyarakat. Di bidang kesehatan, Program AirNav Sehat turut dihadirkan melalui dukungan penyediaan obat-obatan dan vitamin dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti sunat massal dan kegiatan olahraga masyarakat, yang tidak hanya berkontribusi pada peningkatan derajat kesehatan, tetapi juga memperkuat kesadaran akan pentingnya pola hidup sehat. Sementara itu, melalui Program AirNav Berbagi, perusahaan menyalurkan bantuan penyaluran hewan kurban di berbagai cabang AirNav pada momentum hari besar keagamaan sebagai wujud kepedulian

sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mempererat hubungan antara perusahaan dan lingkungan sekitar.

Pada aspek pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, Perum LPPNPI melaksanakan berbagai program yang bersifat edukatif dan transformatif. Program AirNav Bakti Pendidikan difokuskan pada peningkatan kesadaran terhadap isu-isu krusial seperti bahaya narkoba dan kesehatan mental, khususnya di lingkungan internal perusahaan. Selain itu, dukungan terhadap pendidikan juga diwujudkan melalui penyediaan sarana belajar, edukasi anti-perundungan di berbagai daerah, serta penguatan kompetensi di bidang penerbangan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan. Inisiatif ini dilengkapi dengan pemberian beasiswa bagi mahasiswa di bidang lalu lintas udara, sebagai bagian dari upaya mencetak sumber daya manusia unggul di sektor aviasi. Selaras dengan pendekatan pemberdayaan, Perum LPPNPI juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai program peningkatan kapasitas dan pengembangan usaha. Kegiatan ini mencakup pelatihan keterampilan produktif, baik bagi pelaku UMKM dan masyarakat sekitar, serta pengembangan usaha berbasis potensi lokal, termasuk sektor kelautan, yang diharapkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pendekatan inklusif juga dihadirkan melalui program pemberdayaan bagi kelompok disabilitas dan penguatan kelembagaan berbasis pesantren ramah anak, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata.

Di sisi lain, bantuan pembangunan infrastruktur sosial turut menjadi perhatian, baik melalui dukungan terhadap sarana ibadah maupun pembangunan fasilitas yang memiliki nilai manfaat jangka panjang bagi masyarakat, seperti Rumah Inspirasi dan perbaikan sanitasi di wilayah terdampak bencana. Program-program ini tidak hanya berfungsi sebagai bantuan fisik, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebagai bagian dari program nasional, partisipasi aktif Perum LPPNPI dalam Mudik Gratis Bersama BUMN menjadi salah satu program unggulan dengan jangkauan manfaat yang luas. Program ini memberikan akses transportasi yang aman dan layak bagi ribuan masyarakat untuk kembali ke kampung halaman, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi risiko perjalanan mudik yang tidak aman. Selain itu, momentum keagamaan dimanfaatkan secara optimal melalui pelaksanaan bantuan penyaluran hewan kurban diberbagai wilayah disekitar kantor cabang AirNav. Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kebersamaan, empati, dan kepedulian sosial di lingkungan perusahaan. Kegiatan ini melibatkan partisipasi aktif dari masing-masing kantor cabang sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan program sosial perusahaan. Keterlibatan tersebut mencerminkan sinergi yang baik antara kantor pusat dan unit kerja dalam mengimplementasikan kegiatan TJSL secara merata dan berkelanjutan. Selain itu, partisipasi cabang dalam kegiatan ini juga menjadi wujud penguatan peran internal perusahaan dalam menumbuhkan nilai kepedulian

sosial, kebersamaan, serta komitmen untuk memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Secara keseluruhan, rangkaian program TJSL pada Triwulan II 2026 mencerminkan pendekatan yang holistik, di mana aspek bantuan, edukasi, dan pemberdayaan berjalan secara beriringan. Hal ini menunjukkan bahwa Perum LPPNPI tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek masyarakat, tetapi juga berupaya menciptakan dampak jangka panjang yang berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas, kemandirian, dan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

5.2 PROGRAM PUMK

Berdasarkan Risalah Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perum LPPNPI No. RIS-09/DSI.MBU.B/01.2026 tertanggal 9 Januari 2026, serta sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) ke delapan, yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, Perum LPPNPI berkomitmen untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Perum LPPNPI telah menyalurkan dana Program PUMK melalui kerja sama dengan PT Bank BRI (Persero) Tbk, yaitu dengan alokasi dana sebesar Rp100.000.000,- atau 100% dari RKA.

Sampai dengan Triwulan II 2026, terdapat piutang dana PUMK senilai Rp766 juta yang masih aktif. Termasuk di dalamnya terdapat piutang macet senilai Rp 80.415.833,-. Adapun upaya penyelesaian piutang macet tersebut, saat ini sudah diusulkan menjadi piutang bermasalah pada RKA TJSL Tahun 2026 berdasarkan Risalah Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2026 Perum LPPNPI nomor: RIS-09/DSI.MBU.B/01/2026 tanggal 9 Januari 2026. Adapun tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman Program PUMK hingga Triwulan II 2026 yang dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang kolektibilitas adalah sebesar **77,15%**.

5.3 KPI PELAKSANAAN PROGRAM TJSL

Mengacu pada Aspirasi Pemegang Saham (APS) tahun 2026 bahwa setiap BUMN memiliki KPI tersendiri terkait pelaksanaan program TJSL. Ketercapaian KPI terkait pelaksanaan program TJSL pada sampai dengan Triwulan II 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel V.2
Capaian KPI Program TJSL Triwulan II 2026

Deskripsi	Bobot	2025		Rasio	Skor
		RKAP	Realisasi		
1	2	3	4	5 = 4 : 3	6 = 5 x 2
1 Aspek Fokus pada Dampak , yaitu pengukuran dampak 3 (tiga) program TJSL dengan metode <i>Social Return on Investment (SROI)</i> , minimal 1 (satu) di antaranya adalah program <i>Creating Shared Values</i>	35	3	0	0%	0.00
2 Aspek Peningkatan Tata Kelola , terdiri dari:					
Peningkatan Kompetensi SDM, yaitu:	20	100%	16.67%	16.67%	3.33
1) Perusahaan memiliki minimal 1 (satu) pegawai yang bersertifikasi di bidang Sustainability;					
2) Seluruh karyawan pengelola TJSL mendapatkan pelatihan terkait kompetensi TJSL					
3 Aspek Pemanfaatan Teknologi Informasi , yaitu pemenuhan pengisian data dalam sistem informasi TJSL Kementerian BUMN	15	5	2	40.00%	6.00
4 Aspek Peningkatan Kolaborasi , yaitu pelaksanaan kolaborasi program TJSL antar BUMN dan pihak lain	15	3	3	100.00%	15.00
5 Aspek Peningkatan Engagement Karyawan , yaitu pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan oleh seluruh karyawan BUMN	15	91%	11.71%	12.87%	1.93
Total					26.26

Penjelasan:

1. Aspek Fokus pada Dampak

Pengukuran *Social Return on Investment (SROI)* ditujukan untuk mengevaluasi tiga program TJSL, dengan memperhatikan persyaratan bahwa program telah berjalan minimal enam bulan atau merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya. Sampai dengan Triwulan II 2026, indikator ini belum terealisasi 0. Namun demikian, beberapa langkah persiapan telah dilakukan, antara lain penetapan lokasi pelaksanaan SROI serta pelaksanaan monitoring terhadap program yang akan dievaluasi.

2. Aspek Peningkatan Tata Kelola

KPI ini menunjukkan keterselesaian pelaksanaan kegiatan TJSL yang ditinjau dari 2 (dua) aspek, pada aspek Peningkatan Kompetensi SDM sampai dengan Triwulan II 2026 terealisasi sebesar **16,67%**, dengan rincian sebagai berikut yaitu:

a. Perusahaan memiliki minimal 1 (satu) pegawai yang bersertifikasi di bidang Sustainability

Sampai dengan Triwulan II 2026, indikator ini belum terealisasi 0% karena perusahaan masih berada pada tahap persiapan pelaksanaan program sertifikasi. Persiapan tersebut meliputi identifikasi kebutuhan kompetensi, penentuan lembaga sertifikasi yang sesuai, serta proses administrasi dan penjadwalan pelaksanaan sertifikasi bagi pegawai yang ditunjuk. Program sertifikasi ini direncanakan akan dilaksanakan pada periode berikutnya sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas SDM di bidang keberlanjutan.

b. Seluruh karyawan pengelola TJSL mendapatkan pelatihan terkait kompetensi TJSL

Realisasi indikator ini hingga Triwulan II 2026 juga masih sebesar **33,33%**, dikarenakan ada 2 (dua) dari 6 (enam) personil TJSL yang telah melaksanakan pelatihan pada tanggal 23 Juni s.d 25 Juni 2026 yang dilaksanakan di Semarang oleh NCCR (National Center for Corporate Reporting). Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan karyawan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara efektif. Pelaksanaan kegiatan pelatihan direncanakan akan dilakukan pada periode berikutnya.

3. Aspek Pemanfaatan Teknologi Informasi

KPI ini mengukur pemenuhan pengisian data pelaporan program TJSL melalui sistem yang telah ditentukan. Sampai dengan Triwulan II 2026, realisasi indikator ini masih sebesar 40% dikarenakan dua dari lima target pelaporan yang ditetapkan untuk tahun berjalan telah terealisasi. Capaian tersebut telah sesuai dengan target periodik Semester I, di mana Laporan Semester I Tahun 2026 telah disampaikan secara lengkap melalui Sistem Informasi TJSL BP BUMN sesuai dengan jadwal pelaporan yang ditetapkan. Dengan demikian, progres pelaksanaan pada aspek ini telah berjalan sesuai rencana dan menjadi dasar untuk pemenuhan target pelaporan pada periode selanjutnya.

4. Aspek Peningkatan Kolaborasi

KPI ini mengukur pelaksanaan program TJSL melalui kolaborasi dan sinergi dengan berbagai mitra strategis guna memperluas dampak program secara berkelanjutan. Sampai dengan Triwulan II 2026, telah terealisasi kerja sama dengan **3 (tiga)** instansi sebagai bagian dari upaya pencapaian indikator ini.

Pertama, kolaborasi dengan CT Arsa Foundation melalui program pembangunan Rumah Inovasi di wilayah Tamiang. Program ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan kapasitas masyarakat setempat melalui penyediaan sarana pembelajaran dan pengembangan keterampilan.

Kedua, kolaborasi dengan Politeknik Penerbangan (Poltekbang) dalam pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar, yang meliputi pelatihan pengelasan dan teknik perawatan *Air Conditioner* (AC). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Ketiga, Program Mudik Bersama BUMN Tahun 2026 yang diselenggarakan bekerja sama dengan PT KAI Wisata, serta pelaksanaan Program TJSL Kolaborasi di Raja Ampat yang melibatkan sinergi dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT TASPEN (Persero), PT Pegadaian, dan PT Angkasa Pura Indonesia.

5. Aspek Peningkatan *Engagement* Karyawan

KPI ini mengukur tingkat keterlibatan karyawan dalam pelaksanaan program TJSL sebagai bentuk kontribusi nyata perusahaan terhadap masyarakat. Sampai dengan Triwulan II 2026, jumlah karyawan yang terlibat tercatat sebesar 551 orang dari total 4.732 karyawan, sehingga capaian pada aspek ini sebesar **11,71%**.

Keterlibatan karyawan pada periode ini masih terbatas karena kegiatan TJSL yang dilaksanakan baru mencakup program Safari Ramadhan serta Penyaluran Hewan Kurban. Namun demikian, kegiatan tersebut tetap mencerminkan partisipasi aktif karyawan dalam kegiatan sosial perusahaan, melalui berbagai bentuk kontribusi seperti penyaluran bantuan kepada masyarakat, kegiatan berbagi dengan kelompok rentan, serta dukungan terhadap kegiatan keagamaan di lingkungan sekitar. Ke depan, keterlibatan karyawan direncanakan akan terus ditingkatkan melalui pengembangan dan diversifikasi program TJSL di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, lingkungan, dan kemanusiaan. Dengan demikian, diharapkan tingkat engagement karyawan dapat meningkat secara signifikan pada periode berikutnya, seiring dengan bertambahnya jumlah dan variasi program yang dilaksanakan.

BAB VI - LAPORAN PENGGUNAAN TAMBAHAN PMN



6.1 PMN TUNAI

Perum LPPNPI sebagai penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia harus mendukung rencana keselamatan penerbangan nasional sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. KP 180 Tahun 2021, serta mendukung rencana strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2020-2024 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. KP 13 Tahun 2021.

Perum LPPNPI dituntut untuk melakukan peningkatan kemampuan dan fitur sistem penerbangan global guna menciptakan layanan navigasi penerbangan yang andal dan mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini sesuai dengan ICAO *Global Air Navigation Plan* (GANP) yang dituangkan dalam ICAO *Aviation System Block Upgrade* (ASBU), yaitu menuju pelayanan penerbangan yang *seamless* serta melakukan peningkatan keselamatan (*safety*) dan kapasitas di ruang udara lapis atas (*upper level*) dan lapis bawah (*lower level*).

Perum LPPNPI mendukung upaya Pemerintah dalam rangka pengambilalihan pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna dari Singapura untuk program *Realignment* FIR Jakarta-Singapura, sehingga Perum LPPNPI perlu untuk terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan.

Penambahan PMN Tunai (dana segar) ini bertujuan mendukung Perum LPPNPI dalam menghadapi dinamika usaha sebagai penyedia layanan navigasi penerbangan serta memperbaiki struktur modal dan meningkatkan kapasitas usaha.

6.1.1 Dasar Usulan PMN

Pemerintah melakukan penambahan PMN kepada Perum LPPNPI dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum lainnya yang di dalamnya terdapat kepemilikan negara sebagaimana tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2022 tentang APBN Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Presiden No. 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023.

6.1.2 Jumlah Rincian Tambahan PMN

Mengacu pada Kajian Bersama Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Kepada Perum LPPNPI, total kebutuhan pendanaan adalah sebesar Rp717,5 Miliar, yang terdiri dari nilai total investasi (belanja modal) sebesar Rp707,8 Miliar dan nilai biaya pendukung investasi (belanja barang) sebesar Rp9,6 Miliar. Dari total kebutuhan investasi sebesar Rp707,8 Miliar tersebut, akan dibiayai melalui PMN dana segar sebesar Rp659,19 Miliar dan sisanya sebesar Rp48,6 Miliar akan dibiayai melalui dana internal Perum LPPNPI. Penambahan PMN dana segar kepada Perum LPPNPI tahun 2023 sebesar Rp659,19 Miliar akan digunakan untuk membiayai pengadaan dan penggantian fasilitas navigasi penerbangan berupa *Air Traffic*

Management (ATM) System di 4 (empat) lokasi, yaitu JATSC, Medan, Balikpapan, serta Pontianak. Hal ini sesuai dengan persetujuan rencana investasi Perum LPPNPI tahun 2023 yang tertuang dalam Surat Menteri Perhubungan No. PR.004/1/14/PHB 2023 tertanggal 25 Mei 2023.

6.1.3 Progres Pengadaan Program Investasi yang Dibiayai PMN

Persetujuan Persetujuan penambahan PMN atas Perum LPPNPI disahkan pada 27 Desember 2023 melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perum LPPNPI.

Perusahaan telah melakukan berbagai kegiatan sebagai upaya untuk mendukung proses Pengadaan dan Penggantian *ATM System* Beserta Sarana Pendukungnya di 4 (Empat) Lokasi, yang akan dibiayai oleh dana PMN tersebut.

Unit ST telah menyerahkan dokumen teknis Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas ATM (*ATC System*) untuk Modernisasi Fasilitas APP di Pontianak dan Medan serta Penerbitan Surat Keputusan Direksi perihal Penetapan Pengadaan *Air Traffic Management System (ATMS)* di 4 (Empat) Lokasi sebagai Proyek Prioritas Perusahaan pada bulan Februari 2023.

Perum LPPNPI menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) guna melakukan pendampingan dan bantuan teknis pelaksanaan pemilihan penyedia pada bulan Juni 2023, serta dilanjutkan dengan *kick off meeting* kegiatan dimaksud pada bulan Juli 2023.

Proses *tender* Pengadaan & Penggantian Fasilitas ATM (*ATC System*) di Wilayah Ruang Udara Barat RI (FIR Jakarta)/Program New JATSC serta tender Pengadaan & Penggantian Fasilitas ATM (*ATC System*) 3 (Tiga) Lokasi melalui mekanisme tender pada sistem *e-Procurement* AirNav Indonesia pada awal November 2023, namun belum ditemukan penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi dokumen teknis. Sebagai upaya guna memenuhi target di tahun 2024, telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan tender di tahun 2023. Atas hasil evaluasi tersebut, untuk pelaksanaan tender berikutnya telah dilakukan penyesuaian atas beberapa hal, yaitu:

1. Penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan untuk program ATM (*ATC System*) di JATSC yang semula 500 (lima ratus) hari kalender menjadi 550 hari kalender. Sedangkan untuk program ATM (*ATC System*) di Medan, Balikpapan, dan Pontianak turut disesuaikan dari semula 330 hari kalender menjadi 450 hari kalender.
2. Perubahan skema pembayaran yang semula *turnkey* menjadi *termin*;
3. Penyesuaian nilai *owner estimate*;
4. Waktu pemasukan dokumen penawaran untuk ATM (*ATC System*) di JATSC yang semula 25 hari kalender dan untuk program ATM (*ATC System*) di Medan, Balikpapan, dan Pontianak yang semula 21 hari kalender, disesuaikan menjadi 60 (enam puluh) hari kalender untuk masing-masing program.

Setelah dilaksanakan penyesuaian tersebut, progres atas pekerjaan pengadaan dan penggantian *ATM System* di 4 (empat) lokasi tersebut sudah berkontrak di akhir tahun 2024, dengan rincian progres sebagai berikut:

1. *ATM System JATSC*

Proses pengadaan yang **telah dilakukan** adalah pengumuman lelang pada tanggal 4 April 2024, pelaksanaan *Aanwijzing* pada tanggal 24 April 2024, peninjauan lapangan pada tanggal 25 April 2024, pemasukan dokumen penawaran pengadaan pada tanggal 26 April 2024 s.d. 24 Juni 2024, serta dilanjutkan dengan evaluasi dokumen penawaran serta klarifikasi dan negosiasi sampai dengan 29 Juli 2024. Pada tanggal 29 Juli 2024, telah ditetapkan pemenang pelaksana pekerjaan tersebut yaitu GHI KSO dan telah melewati proses masa sanggah sampai dengan 2 Agustus 2024. Telah dilakukan penandatanganan kontrak pada tanggal 9 September 2024 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 531 hari kalender atau sampai dengan 21 Februari 2026. Pada pelaksanaannya, telah dilakukan *kick off meeting* pada tanggal 23-27 September 2024.

Progres pekerjaan Program New JATSC telah mencapai 100% pada 21 Februari 2026 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I No. BAC.136/T/TNG/LPPNPI/PGD.02.01/II/2026. Sedangkan realisasi penyerapan dana PMN Tunai di Triwulan II 2026 untuk pekerjaan pengadaan Paket I di lokasi JATSC telah dilakukan pembayaran hingga tahap ketiga dengan total nilai pembayaran sebesar Rp391.330.562.767,- atau 95% dari nilai kontrak.

2. *ATM System Medan, Balikpapan, dan Pontianak*

Proses pengadaan yang **telah dilakukan** adalah pengumuman lelang pada tanggal 17 Mei 2024 serta pelaksanaan *Aanwijzing* pada tanggal 28 Mei 2024, pada tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan 31 Juli 2024 juga telah dilaksanakan pemasukan dokumen penawaran pengadaan oleh calon penyedia. Pada bulan Agustus 2024 telah dilakukan evaluasi atas dokumen penawaran dan telah ditetapkan pemenang pelaksanaan pekerjaan tersebut. Pada bulan September 2024, telah dilakukan proses masa sanggah dan revidi ikatan kerja. Selanjutnya, **penandatanganan kontrak** dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 450 hari kalender atau sampai dengan 6 Januari 2026. Pada pelaksanaannya, telah dilakukan *kick off meeting* untuk pelaksanaan ATC System di Balikpapan pada tanggal 28-30 Oktober 2024, *kick off meeting* untuk pelaksanaan ATC System di Medan pada tanggal 19-21 November 2024, serta *kick off meeting* untuk pelaksanaan ATC System di Pontianak pada tanggal 9-11 Desember 2024. Sehubungan dengan beberapa kendala pada pelaksanaan pekerjaan di Balikpapan, dilakukan addendum atas pekerjaan ATC System di Balikpapan sehingga jangka waktu pelaksanaannya berakhir pada 12 Februari 2026.

ATC System di Balikpapan telah mencapai progres fisik sebesar **100%** pada 8 Februari 2026 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I No. BAC. 135/T/TNG/LPPNPI/PGD.02.01/II/2026, di mana penyelesaian pekerjaan meliputi pekerjaan arsitektur, antara lain pengecatan dinding, pemasangan lantai keramik, *plafond gypsum*, kusen, partisi kaca, water proofing lantai atap, pekerjaan *fasade* dan *sanitair*. Selain itu, telah diselesaikan pekerjaan elektrikal dan elektornik, meliputi pemasangan instalasi listrik, lampu, serta instalasi *Building Automation System* (BAS). Selanjutnya, pekerjaan pengembangan lapangan juga telah diselesaikan, yang mencakup pekerjaan pedestrian, kanstin, lansekap, serta pemasangan tiang bendera. Sedangkan realisasi penyerapan dana PMN Tunai di Triwulan II 2026 untuk pekerjaan di lokasi Balikpapan adalah pembayaran hingga tahap kedua atas pekerjaan peralatan pertama dengan total nilai pembayaran sebesar Rp92.071.349.888 yang digunakan untuk pembayaran hingga tahap kelima (95%) atas pekerjaan peralatan utama sebesar Rp59.116.704.911 untuk pembayaran hingga tahap keempat (95%) atas pekerjaan konstruksi bangunan sebesar Rp32.954.644.977.

ATC System di Medan telah mencapai progres fisik sebesar **100%** pada 15 Oktober 2025, di mana capaian tersebut dipengaruhi oleh telah selesainya seluruh pekerjaan peralatan utama dan peralatan bangunan. Berdasarkan hasil tersebut, telah diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pertama No. BAC.1290/T/TNG/LPPNPI/PGD.02.01/X/2025 tanggal 15 Oktober 2025. Sedangkan realisasi penyerapan dana PMN Tunai di Triwulan II 2026 untuk pekerjaan di lokasi Medan sebesar Rp64.587.164.434 yang terdiri dari sebesar Rp60.694.304.819 untuk pembayaran hingga tahap kelima (95%) pekerjaan peralatan utama dan sebesar Rp3.892.859.615 untuk pembayaran tahap pertama (95%) pekerjaan konstruksi bangunan.

ATC System di Pontianak telah tercapai progres fisik sebesar **100%**, di mana capaian tersebut dipengaruhi oleh telah selesainya seluruh pekerjaan peralatan utama dan peralatan bangunan. Berdasarkan hasil tersebut, telah diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pertama nomor : BAC.1368/T/TNG/LPPNPI/PGD.02.01/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025. Sedangkan realisasi penyerapan dana PMN Tunai di Triwulan II 2026 untuk pekerjaan di lokasi Pontianak sebesar Rp51.750.169.063 yang terdiri dari sebesar Rp48.021.254.127 untuk pembayaran sampai dengan tahap kelima (95%) atas pekerjaan peralatan utama dan sebesar Rp3.728.914.937 untuk pembayaran tahap pertama (95%) pekerjaan konstruksi bangunan.

Meringkas penjabaran di atas, maka seluruh pekerjaan penggantian dan pemasangan ATM System di keempat lokasi tersebut telah selesai. Adapun progres sampai dengan 30 Juni 2026 terkait implementasi ATM System di empat lokasi adalah sebagai berikut:

1. Pengoperasian fasilitas ATC System di JATSC telah memperoleh persetujuan berdasarkan surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

- Nomor AU.306/17/20/DJPU.DNP-2026 tanggal 22 Mei 2026 tentang Persetujuan Perubahan Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan Perum LPPNPI Cabang JATSC dan telah beroperasi secara penuh (*full operation*) pada 16 Juni 2026;
2. Pengoperasian peralatan fasilitas ATC System di lokasi Balikpapan telah memperoleh persetujuan melalui surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara nomor AU.314/1/7/DJPU.DNP-2026 tanggal 12 Maret 2026 perihal Persetujuan Perubahan Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan Perum LPPNPI Cabang Balikpapan. Selanjutnya pada tanggal 07 April 2026 ATC System di lokasi Balikpapan telah beroperasi secara penuh (*full operation*);
 3. Pengoperasian peralatan fasilitas ATC System di lokasi Medan telah memperoleh persetujuan melalui Surat Kementerian Perhubungan-Direktorat Jenderal Perhubungan Udara No. AU.314/1/14/DJPU.DNP.2025 tertanggal 7 November 2025 perihal Persetujuan Perubahan Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan Perum LPPNPI Cabang Medan. Sejak tanggal 18 November 2025, ATC System di lokasi Medan telah memasuki fase *full operation* dan selanjutnya memasuki fase *post monitoring implementation*, yaitu tahap evaluasi dan pemantauan. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penggunaan Aset No. BAC.1368/T/TNG/LPPNPI/PGD.02.01/XII/2025, peralatan utama ATC System untuk lokasi Medan telah digunakan pada tanggal 31 Desember 2025; dan
 4. ATC System untuk lokasi Pontianak telah memperoleh persetujuan perubahan Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan pada tanggal 21 November 2025 berdasarkan Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara No. AU.306/13/14/DJPU.DNP.2025. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2025, peralatan utama ATC System untuk lokasi Pontianak telah digunakan sesuai dengan Berita Acara BAC.1368/T/TNG/LPPNPI/PGD.02.01/XII/2025.

6.1.4 Pengelolaan Dana Investasi yang Dibiayai PMN

Selanjutnya dari sisi finansial, sebagai tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2023, Perum LPPNPI telah menyampaikan surat kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perihal Permohonan Pencairan Dana PMN Tahun Anggaran 2023. Mengacu pada surat tersebut, pada tanggal 29 Desember 2023 telah dilakukan pencairan dana PMN sebesar Rp659,19 Miliar ke rekening Perum LPPNPI.

Dana PMN tunai tersebut ditempatkan pada rekening giro khusus pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan *special rate* sebesar 6,55% p.a untuk periode 01 Januari 2024

s.d 29 Maret 2024. Namun demikian dalam perjalanan, *special rate* tersebut mengalami penurunan dengan rincian sebagai berikut:

1. Menjadi sebesar 6,25% p.a pada periode 29 Maret 2024 s.d 24 Juli 2024;
2. Menjadi sebesar 6,15% p.a pada periode 24 Juli s.d 23 Oktober 2024;
3. Menjadi sebesar 6,10% p.a pada periode 24 Oktober s.d 24 Januari 2025;
4. Menjadi sebesar 6,05% p.a pada periode 25 Januari 2025 s.d 24 April 2025;
5. Menjadi sebesar 6,00% p.a pada periode 30 April 2025 s.d 24 Juli 2025;
6. Menjadi sebesar 5,75% p.a pada periode 1 Agustus 2025 s.d 31 Oktober 2025; dan
7. Menjadi sebesar 5,00% p.a pada periode 1 November 2025 s.d 30 Juni 2026.

Penurunan suku bunga tersebut secara umum dipengaruhi oleh turunnya suku bunga acuan (BI-Rate) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Tabel VI.1
Saldo Akhir atas Dana PMN Tunai Tahun 2023 Per 30 Juni 2026

Dana Tunai PMN Tahun 2023	Saldo Awal (Rp.)	Bunga (Rp.)	Beban Pajak (Rp.)	Realisasi PMN (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
Per 31 Desember 2023	659.190.000.000	-	-		659.190.000.000
Per 31 Januari 2024	659.190.000.000	3.312.204.000	(662.440.800)		661.839.763.200
Per 29 Februari 2024	661.839.763.200	3.681.823.669	(736.364.734)		664.785.222.135
Per 31 Maret 2024	664.785.222.135	3.459.615.149	(691.923.030)		667.552.914.254
Per 30 April 2024	667.552.914.254	3.565.464.127	(713.092.825)		670.405.285.556
Per 31 Mei 2024	670.405.285.556	3.443.862.768	(688.772.554)		673.160.375.770
Per 30 Juni 2024	673.160.375.770	3.573.282.817	(714.656.563)		676.019.002.024
Per 31 Juli 2024	676.019.002.024	3.472.700.353	(694.540.071)		678.797.162.306
Per 31 Agustus 2024	678.797.162.306	3.545.552.850	(709.110.570)		681.633.604.586
Per 30 September 2024	681.633.604.586	3.560.368.403	(712.073.681)		684.481.899.308
Per 31 Oktober 2024	684.481.899.308	3.459.915.354	(691.983.071)		687.249.831.591
Per 30 November 2024	687.249.831.591	3.565.226.181	(713.045.236)		690.102.012.536
Per 31 Desember 2024	690.102.012.536	3.459.963.515	(691.992.703)	(73.075.929.015)	619.794.054.333
Per 31 Januari 2025	619.794.054.333	3.255.418.789	(651.083.758)	(8.165.765.766)	614.232.623.598
Per 28 Februari 2025	614.232.623.598	3.156.145.988	(631.229.198)		616.757.540.388
Per 31 Maret 2025	616.757.540.388	2.874.542.195	(574.908.439)	(12.201.623.968)	606.855.550.176
Per 30 April 2025	606.855.550.176	3.118.237.701	(623.647.540)		609.350.140.337
Per 31 Mei 2025	609.350.140.337	2.974.751.978	(594.950.396)	(20.645.902.527)	591.084.039.392
Per 30 Juni 2025	591.084.039.392	3.001.239.092	(600.247.818)	(3.657.043.436)	589.827.987.230
Per 31 Juli 2025	589.827.987.230	2.913.585.098	(582.742.019)	(8.067.768.506)	584.091.061.803
Per 31 Agustus 2025	584.091.061.803	2.895.081.383	(579.041.277)	(1.878.749.453)	584.528.352.456
Per 30 September 2025	584.528.352.456	2.565.480.272	(513.121.054)	(73.987.541.275)	512.593.170.399
Per 31 Oktober 2025	512.593.170.399	2.404.463.262	(480.892.652)	(9.556.707.618)	504.960.033.391
Per 30 November 2025	504.960.033.391	2.072.511.053	(414.652.211)	(57.209.944.223)	449.407.948.010
Per 31 Desember 2025	449.407.948.010	1.819.963.002	(364.067.600)	(55.693.930.207)	395.169.913.205
Per 31 Januari 2026	395.169.913.205	1.676.652.804	(335.330.561)	(7.206.244.945)	389.304.990.503
Per 28 Februari 2026	389.304.990.503	1.591.659.714	(318.431.943)	(32.163.008.689)	358.415.209.585
Per 31 Maret 2026	358.415.209.585	1.264.594.711	(252.943.942)	(8.000.144.916)	351.426.715.438
Per 30 April 2026	351.426.715.438	1.311.894.320	(262.453.864)	(92.606.871.859)	259.869.284.035
Per 31 Mei 2026	259.869.284.035	813.109.663	(162.696.933)	(120.969.675.740)	139.550.021.025
Per 30 Juni 2026	139.550.021.025	594.994.600	(118.998.920)	(14.652.394.010)	125.373.622.695
TOTAL	659.190.000.000	82.404.304.811	(16.481.435.963)	(599.739.246.153)	125.373.622.695

Catatan:

- *) Saldo akhir dana PMN Tunai, yaitu saldo dana PMN Tunai beserta hasil pengelolaannya dikurangi dengan realisasi pembayaran pekerjaan di 4 lokasi.

Mengacu pada **Tabel VI.1** di atas, saldo akhir dana PMN adalah Rp125.373.622.695,- yang diperoleh dari dana pokok PMN Tunai sebesar Rp659.190.000.000,- ditambah dengan pendapatan bunga sebesar Rp82.404.304.811,- serta dikurangi dengan nilai perpajakan sebesar Rp16.481.435.963,- dan realisasi pembayaran atas pekerjaan PMN di empat lokasi sebesar Rp599.739.246.153,- (atau terealisasi 90,98% dari total dana PMN Tunai atau 95% dari nilai kontrak). Adapun nilai pendapatan bunga yang diperoleh setiap bulan dipengaruhi oleh perbedaan suku bunga atas special rate rekening giro khusus serta perbedaan jumlah hari pada bulan berjalan dalam perhitungan pendapatan bunga per bulan.

BAB VII - STATISTIK TEMUAN AUDITOR



7.1 STATISTIK TEMUAN AUDITOR

Progres monitoring per 30 Juni 2026 terkait tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dan/atau audit eksternal ditunjukkan secara ringkas pada tabel di bawah ini.

Tabel VII.1

Progres Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan dan/atau Audit Eksternal per Triwulan II 2026

Pemeriksaan dan/atau Audit Eksternal (LHP dan LHA)*	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut**							
			S	%	BS	%	BD	%	TD	%
1. Atas LHA BPK RI Tahun 2015	11	28	28	100%	0	0%	0	0%	0	0%
2. Atas LHA BPK RI Tahun 2018	16	43	13	30,23%	30	69,77%	0	0%	0	0%
3. Atas LHA BPK RI Tahun 2021	7	21	15	71,43%	6	28,57%	0	0%	0	0%
4. Atas LHA BPK RI Tahun 2024	13	63	8	12,70%	4	6,35%	51	80,95%	0	0%
Jumlah LHA BPK RI Tahun 2025	47	155	64	41,29%	40	25,81%	51	32,90%	0	0%
5. Atas LHA KAP Tahun 2025	4	10	0	0%	4	40%	6	60%	0	0%
6. Atas LHP PMN Itjen Kemenkeu 2024	14	17	14	82,35%	3	17,65%	0	0%	0	0%

*) Catatan : LHP adalah Laporan Hasil Pemeriksanaan, dan LHA adalah Laporan Hasil Audit.

**) Tindak Lanjut: (S) Sesuai, (BS) Belum Sesuai, (BD) Belum Ditindaklanjuti, dan (TD) Tidak Dapat Ditindaklanjuti

Berdasarkan tabel di atas, disimpulkan bahwa dari total status pemeriksaan atau audit eksternal atas LHA BPK RI dari tahun 2015, 2018, 2021, dan 2024 terdapat 155 rekomendasi yang disampaikan dengan progres 64 rekomendasi yang sudah sesuai (41,29%), 40 rekomendasi yang belum sesuai (25,81%), dan 51 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (32,90%), yang dirinci sebagai berikut:

1. Pemeriksaan atau audit eksternal atas LHA BPK RI tahun 2015, dari 28 rekomendasi yang disampaikan sudah sesuai 100% (28 sesuai dengan rekomendasi);
2. Pemeriksaan atau audit eksternal atas LHA BPK RI tahun 2018, dari 43 rekomendasi yang disampaikan terdapat 13 (tiga belas) rekomendasi yang sudah sesuai (30,23%), dan 30 (tiga puluh) rekomendasi yang belum sesuai (69,77%). Sampai dengan 30 Juni 2026 telah dilakukan proses tindaklanjut atas 1 (satu) rekomendasi LHA BPK RI Tahun 2018 yang sebelumnya masih berstatus Belum Sesuai. Selanjutnya Internal Audit Division telah melakukan proses input (*entry*) data pemenuhan tindak lanjut tersebut ke dalam portal Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK-RI. Atas penyampaian tersebut, status penyelesaian tindak lanjut masih menunggu proses verifikasi oleh Tim BPK RI yang direncanakan akan dilaksanakan pada periode semester 2 tahun 2026;
3. Pemeriksaan atau audit eksternal atas LHA BPK RI tahun 2021, dari 21 rekomendasi yang disampaikan terdapat 15 (lima belas) rekomendasi yang sudah sesuai (71,43%) dan 6 (enam) rekomendasi yang belum sesuai (28,57%). Sampai dengan 30 Juni 2026, belum

terdapat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) BPK RI Tahun 2021 yang masih berstatus Belum Sesuai. Dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut, Internal Audit Division terus melakukan identifikasi atas kendala yang dihadapi serta berkoordinasi secara intensif dengan unit kerja terkait guna memastikan pemenuhan atas rekomendasi yang masih berstatus Belum Sesuai. Melalui upaya tersebut, diharapkan seluruh kekurangan yang masih ada dapat segera dipenuhi sehingga proses penyelesaian tindak lanjut dapat dilaksanakan dan selanjutnya diajukan kepada BPK RI untuk dilakukan verifikasi; dan

4. Pemeriksaan atau audit eksternal atas LHA BPK RI tahun 2024, dari 63 (enam puluh tiga) rekomendasi yang disampaikan terdapat 8 (delapan) rekomendasi yang sudah sesuai (12,70%), 4 (empat) rekomendasi yang belum sesuai (6,35%), serta 51 (lima puluh satu) rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (32,90%). Sampai dengan 30 Juni 2026 telah dilaksanakan proses tindak lanjut rekomendasi LHA BPK RI Tahun 2024 sebanyak 4 (empat) draft pemenuhan tindak lanjut rekomendasi yang sebelumnya masih berstatus Belum Sesuai dan sejumlah 25 (dua puluh lima) draft pemenuhan tindak lanjut rekomendasi yang sebelumnya masih berstatus Belum Ditindaklanjuti. Selanjutnya Internal Audit Division telah melakukan proses input (*entry*) data pemenuhan tindak lanjut tersebut ke dalam portal SIPTL BPK-RI. Atas penyampaian tersebut, status penyelesaian tindak lanjut masih menunggu Proses verifikasi oleh Tim BPK RI yang direncanakan akan dilaksanakan pada periode semester 2 tahun 2026.

Selain itu untuk pemeriksaan atau audit eksternal atas LHA KAP tahun 2025, terdapat 10 rekomendasi yang disampaikan dengan progres 0 rekomendasi yang sudah sesuai dan 4 (empat) rekomendasi yang belum sesuai (40%) dan 6 (enam) rekomendasi belum ditindaklanjuti. Sedangkan untuk pemeriksaan atau audit eksternal atas LHP PMN Itjen Kemenkeu tahun 2024, terdapat 17 (tujuh belas) rekomendasi yang disampaikan dengan progres 14 (empat belas) rekomendasi yang sudah sesuai (82,35%) dan 3 (tiga) rekomendasi yang belum sesuai (17,65%) dikarenakan masih dalam progres penyelesaian sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.

7.2 UPAYA PENYELESAIAN TEMUAN AUDIT

Dalam rangka memastikan rekomendasi hasil audit internal maupun audit eksternal ditindaklanjuti secara memadai, Perum LPPNPI melaksanakan berbagai upaya monitoring, koordinasi, dan pendampingan penyelesaian tindak lanjut. Upaya tersebut dilakukan untuk mendorong percepatan penyelesaian rekomendasi, memastikan rencana aksi yang telah disusun dapat dilaksanakan sesuai target waktu, serta meminimalkan risiko berulangnya permasalahan yang menjadi temuan audit.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

a. Monitoring Triwulanan atas Penyelesaian Tindaklanjuti

Untuk memastikan rekomendasi hasil audit ditindaklanjuti secara efektif dan tepat waktu oleh unit kerja terkait, maka dilakukan kegiatan monitoring penyelesaian tindak lanjut secara berkala setiap triwulan. Kegiatan monitoring ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkini mengenai progres penyelesaian rekomendasi, mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh unit kerja, serta mendorong percepatan penyelesaian atas rekomendasi yang masih dalam proses tindak lanjut.

Sebagai bagian dari kegiatan monitoring tersebut, sampai dengan tanggal 31 Mei 2026 Perum LPPNPI telah menyampaikan nota dinas dan surat dinas internal kepada Kantor Cabang maupun Unit Kerja terkait sebagai sarana pengingat (*reminder*) dan permintaan penyampaian perkembangan tindak lanjut rekomendasi audit. Adapun monitoring yang telah dilakukan antara lain:

- 1) *Learning And Knowledge Management Division* melalui Nota Dinas Nomor: 092/UI/AUD.06.07/IV/2026 tertanggal 30 April 2026 tentang Pemantauan Penyelesaian Arahan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit Intern pada *Airnav Training Center (ANTC)* Tahun 2024;
- 2) Kantor Cabang Kupang melalui Surat Dinas Internal Nomor: 1619/UI/TNG/AUD.06.07/IV/2026 tertanggal 30 April 2026 tentang Pemantauan Penyelesaian Arahan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit Operasional *Internal Audit Division* pada Perum LPPNPI Cabang Kupang Tahun 2024;
- 3) Kantor Cabang Pontianak melalui Surat Dinas Internal Nomor: 1620/UI/TNG/AUD.06.07/IV/2026 tertanggal 30 April 2026 tentang Pemantauan Penyelesaian Arahan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit Operasional *Internal Audit Division* pada Perum LPPNPI Cabang Pontianak Tahun 2024;
- 4) Kantor Cabang MATSC melalui Surat Dinas Internal Nomor: 1621/UI/TNG/AUD.06.07/IV/2026 tertanggal 30 April 2026 tentang Pemantauan Penyelesaian Arahan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit Operasional *Internal Audit Division* pada Perum LPPNPI Cabang MATSC Tahun 2024;
- 5) Kantor Cabang Banda Aceh melalui Surat Dinas Internal Nomor: 1622/UI/TNG/AUD.06.07/IV/2026 tertanggal 30 April 2026 tentang Pemantauan Penyelesaian Arahan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit Operasional *Internal Audit Division* pada Perum LPPNPI Cabang Banda Aceh Tahun 2024;
- 6) Kantor Cabang Tarakan melalui Surat Dinas Internal Nomor: 1623/UI/TNG/AUD.06.07/IV/2026 tertanggal 30 April 2026 tentang

Pemantauan Penyelesaian Arahan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit Operasional *Internal Audit Division* pada Perum LPPNPI Cabang Tarakan Tahun 2024;

- 7) Kantor Cabang Ambon melalui Surat Dinas Internal Nomor: 1624/UI/TNG/AUD.06.07/IV/2026 tertanggal 30 April 2026 tentang Pemantauan Penyelesaian Arahan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit Operasional *Internal Audit Division* pada Perum LPPNPI Cabang Ambon Tahun 2024;
- 8) Kantor Cabang Denpasar melalui Surat Dinas Internal Nomor: 1625/UI/TNG/AUD.06.07/IV/2026 tertanggal 30 April 2026 tentang Pemantauan Penyelesaian Arahan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit Operasional *Internal Audit Division* pada Perum LPPNPI Cabang Denpasar Tahun 2024.

Atas kegiatan monitoring tersebut, Perum LPPNPI telah menerima tanggapan dari Kantor Cabang dan Unit Kerja terkait berupa informasi progres penyelesaian serta dokumen pendukung tindak lanjut yang telah dilakukan. Terhadap setiap dokumen tindak lanjut yang diterima, terlebih dahulu akan dilakukan evaluasi dan verifikasi untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rekomendasi audit serta didukung oleh bukti yang memadai.

Khusus untuk rekomendasi yang berasal dari audit internal, proses verifikasi dilakukan oleh unit terkait guna menilai tingkat keterpenuhan rekomendasi dan menentukan status penyelesaiannya. Sementara itu, terhadap rekomendasi yang berasal dari auditor eksternal, dokumen tindak lanjut yang telah diterima dari unit kerja selanjutnya disampaikan kepada auditor eksternal untuk memperoleh verifikasi dan konfirmasi atas kecukupan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.

Melalui pelaksanaan monitoring secara berkala, Perum LPPNPI tidak hanya melakukan pemantauan administratif atas status tindak lanjut, namun juga berperan aktif dalam mengawal penyelesaian rekomendasi audit sampai dengan dinyatakan selesai, sehingga perbaikan yang diharapkan dapat diimplementasikan secara efektif serta memberikan manfaat bagi penguatan pengendalian internal, kepatuhan, dan tata kelola perusahaan.

- b. Koordinasi dan Pembahasan Intensif Atas Rekomendasi dan Rencana Tindaklanjut
Selain melaksanakan monitoring secara berkala, Perum LPPNPI juga melakukan koordinasi dan pembahasan secara intensif dengan Kantor Cabang dan Unit Kerja terkait guna mempercepat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi audit yang masih terbuka. Kegiatan koordinasi ini dilakukan sebagai sarana untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kendala yang dihadapi dalam proses

penyelesaian, sekaligus mengidentifikasi alternatif solusi yang dapat ditempuh oleh unit kerja terkait.

Koordinasi dan pembahasan tersebut terutama difokuskan pada rekomendasi yang berasal dari auditor eksternal, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, dan Kantor Akuntan Publik (KAP), mengingat rekomendasi tersebut pada umumnya memerlukan pemenuhan dokumen pendukung yang memadai serta proses verifikasi lanjutan oleh auditor yang menerbitkan rekomendasi.

Melalui kegiatan koordinasi tersebut, Perum LPPNPI memberikan pendampingan kepada unit kerja terkait mengenai mekanisme penyelesaian tindak lanjut, kebutuhan dokumen pendukung yang harus dipenuhi, serta langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar rekomendasi dapat dinyatakan selesai oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Selain itu, pembahasan secara intensif juga menjadi media untuk menyamakan persepsi mengenai substansi rekomendasi, rencana aksi yang akan dilaksanakan, target waktu penyelesaian, serta potensi risiko yang dapat timbul apabila rekomendasi belum ditindaklanjuti secara memadai.

Melalui pelaksanaan koordinasi dan pembahasan yang berkesinambungan, Perum LPPNPI berupaya memastikan bahwa setiap rekomendasi audit tidak hanya ditindaklanjuti secara administratif, tetapi juga menghasilkan perbaikan yang efektif terhadap proses bisnis, pengendalian internal, kepatuhan, dan tata kelola perusahaan.

c. Upaya Lainnya

Selain kegiatan monitoring dan koordinasi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Perum LPPNPI juga melaksanakan berbagai upaya pendukung lainnya untuk mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi audit. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penyampaian pengingat (*reminder*) secara berkala kepada Kantor Cabang dan Unit Kerja terkait atas rekomendasi yang masih berstatus terbuka atau belum menunjukkan perkembangan penyelesaian yang memadai. Penyampaian reminder dilakukan melalui berbagai media komunikasi yang tersedia guna memastikan rekomendasi audit tetap menjadi perhatian dan prioritas penyelesaian oleh unit kerja yang bertanggung jawab.

Selain itu, Perum LPPNPI juga memfasilitasi proses klarifikasi dan konsultasi apabila terdapat perbedaan pemahaman terkait substansi rekomendasi audit, bentuk tindakan perbaikan yang diperlukan, maupun kecukupan dokumen pendukung yang harus disampaikan sebagai bukti penyelesaian. Melalui fasilitasi tersebut, diharapkan unit kerja dapat memahami ekspektasi auditor secara lebih tepat sehingga proses tindak lanjut dapat dilaksanakan secara efektif dan mengurangi risiko terjadinya penolakan atau pengembalian dokumen pada saat proses verifikasi. Di samping itu, Perum LPPNPI secara berkelanjutan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut rekomendasi audit

untuk memastikan keakuratan, kelengkapan, dan keandalan informasi yang digunakan dalam pelaporan kepada Direksi, Dewan Pengawas, auditor eksternal, maupun pemangku kepentingan lainnya. Ketersediaan data yang mutakhir dan andal juga menjadi dasar bagi manajemen dalam melakukan pemantauan progres penyelesaian rekomendasi serta pengambilan keputusan yang diperlukan untuk mendorong percepatan tindak lanjut.

Meskipun berbagai upaya monitoring, koordinasi, dan pengawalan penyelesaian tindak lanjut telah dilakukan secara berkelanjutan, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi kecepatan dan efektivitas penyelesaian rekomendasi audit, baik yang berasal dari auditor internal maupun auditor eksternal.

- a. Dari sisi internal, perubahan struktur organisasi (reorganisasi) perusahaan menyebabkan belum optimalnya penetapan unit kerja atau fungsi yang bertanggung jawab atas penyelesaian beberapa rekomendasi audit. Selain itu, mutasi pejabat dan karyawan pada unit kerja terkait turut memengaruhi kesinambungan informasi dan pemahaman atas hasil audit yang telah diterbitkan sebelumnya, sehingga proses tindak lanjut pada beberapa rekomendasi memerlukan waktu tambahan untuk melakukan penelusuran informasi, koordinasi, serta penyesuaian penanggung jawab. Kendala lainnya meliputi keterbatasan ketersediaan dokumen pendukung, perbedaan pemahaman terhadap substansi rekomendasi audit, serta keterlambatan penyampaian laporan perkembangan tindak lanjut oleh unit kerja terkait.
- b. Di samping kendala internal tersebut, terdapat pula beberapa kendala yang bersifat eksternal dan berada di luar kendali langsung manajemen perusahaan. Khusus terhadap rekomendasi yang berasal dari auditor eksternal, terdapat tindak lanjut yang penyelesaiannya memerlukan koordinasi dengan instansi atau pihak di luar perusahaan. Sebagai contoh, terdapat rekomendasi yang berkaitan dengan kebijakan penetapan tarif dan mekanisme penagihan pendapatan lain-lain yang memerlukan koordinasi dengan Kementerian BUMN, serta penyelesaian kewajiban sewa lahan dan bangunan dengan pihak eksternal seperti PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II. Selain itu, terdapat pula rekomendasi yang penyelesaiannya bergantung pada pemenuhan kewajiban oleh pihak ketiga, seperti penyerahan dokumen tertentu oleh rekanan maupun penyelesaian perbedaan nilai kontrak, sehingga memerlukan waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan rekomendasi yang dapat diselesaikan secara internal.
- c. Selanjutnya, beberapa rekomendasi audit eksternal belum dapat ditutup sepenuhnya meskipun tindakan perbaikan telah dilaksanakan oleh unit kerja terkait, karena proses penyelesaiannya masih menunggu verifikasi atau evaluasi lebih lanjut dari auditor eksternal sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditetapkan. Dengan demikian, status penyelesaian rekomendasi tersebut tidak hanya bergantung pada

pelaksanaan tindak lanjut oleh perusahaan, tetapi juga pada proses konfirmasi dan validasi dari auditor yang menerbitkan rekomendasi.

Secara umum, tindak lanjut yang dilakukan sampai dengan periode pelaporan menunjukkan perkembangan yang positif, yang tercermin dari meningkatnya jumlah rekomendasi yang telah diselesaikan, sementara rekomendasi lainnya masih dalam proses penyelesaian sesuai dengan target dan jadwal yang telah disepakati.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pemantauan dan percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit internal maupun eksternal, Perum LPPNPI akan terus melakukan berbagai langkah strategis yang berorientasi pada penguatan proses monitoring, peningkatan koordinasi dengan unit kerja terkait, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan budaya kepatuhan dan akuntabilitas dalam penyelesaian rekomendasi audit. Adapun langkah-langkah strategis yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Memperkuat mekanisme monitoring tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan
Perum LPPNPI akan terus melaksanakan monitoring secara periodik terhadap seluruh rekomendasi audit yang masih berstatus terbuka melalui penyampaian reminder, permintaan progres penyelesaian, serta evaluasi berkala terhadap perkembangan tindak lanjut yang dilakukan oleh unit kerja terkait.
- b. Meningkatkan koordinasi dan pembahasan intensif dengan unit kerja terkait
Perum LPPNPI akan memperkuat koordinasi antara Kantor Cabang dan Unit Kerja terkait untuk mengidentifikasi hambatan penyelesaian tindak lanjut, menyamakan pemahaman atas substansi rekomendasi, serta mendorong penyusunan rencana aksi yang realistis dan terukur.
- c. Memperkuat koordinasi dengan auditor eksternal dan pemangku kepentingan terkait
Terhadap rekomendasi yang berasal dari auditor eksternal, Perum LPPNPI akan meningkatkan komunikasi dan koordinasi secara berkelanjutan dengan auditor eksternal serta pihak-pihak terkait guna mempercepat proses verifikasi, memperoleh kejelasan atas kriteria penyelesaian rekomendasi, dan memastikan tindak lanjut yang dilakukan dapat memenuhi ekspektasi auditor.
- d. Membangun Sistem/Aplikasi pengelolaan proses bisnis *Internal Audit Division*
Sebagai bagian dari transformasi digital fungsi pengawasan, Perum LPPNPI telah merencanakan pengembangan sistem/aplikasi yang mengintegrasikan proses bisnis utama *Internal Audit Division*, mulai dari perencanaan audit, pelaksanaan audit, monitoring tindak lanjut rekomendasi, hingga pelaporan hasil pengawasan. Salah satu fitur utama dalam sistem tersebut adalah mekanisme monitoring tindak lanjut rekomendasi audit internal dan eksternal yang dapat digunakan oleh unit kerja terkait untuk menyampaikan progres penyelesaian dan dokumen pendukung secara elektronik, sehingga proses monitoring menjadi lebih efektif, terdokumentasi dengan

baik, serta memudahkan manajemen dalam memantau perkembangan penyelesaian rekomendasi secara *real time*.

e. Memperjelas penanggungjawab penyelesaian tindak lanjut

Sejalan dengan dinamika organisasi dan perubahan struktur kerja, Perum LPPNPI akan berkoordinasi dengan unit terkait untuk memastikan kejelasan penanggung jawab atas setiap rekomendasi audit sehingga proses penyelesaian tindak lanjut dapat berjalan lebih efektif dan tidak terhambat oleh perubahan organisasi maupun mutasi personel. Melalui pelaksanaan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan efektivitas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi audit dapat terus meningkat, sehingga perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban penyelesaian rekomendasi auditor, tetapi juga memberikan nilai tambah dalam penguatan pengendalian internal, manajemen risiko, kepatuhan, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

BAB VIII - PENUTUP



Perum LPPNPI pada Triwulan II 2026 secara umum mampu mempertahankan kinerja yang positif seiring berlanjutnya pemulihan sektor penerbangan global, khususnya di kawasan Asia-Pasifik, yang didorong oleh peningkatan aktivitas di sektor perdagangan dan sektor pariwisata. Momentum ini menjadi katalis bagi peningkatan pergerakan trafik internasional dan *overflying* yang dilayani oleh Perum LPPNPI, yang diperkuat dengan semakin luasnya ruang udara yang dilayani oleh perusahaan melalui implementasi *Realignment* FIR JKT-SIN sejak 21 Maret 2024. Namun demikian, pertumbuhan trafik internasional menghadapi keterbatasan akibat konflik di kawasan Timur Tengah dan ketegangan di Selat Hormuz. Dalam cakupan nasional, sejumlah stimulus dari Pemerintah dalam rangka meningkatkan mobilisasi masyarakat menggunakan transportasi udara turut memberikan dampak positif terhadap peningkatan pergerakan trafik domestik di Triwulan II 2026. Secara keseluruhan, kondisi ini mendorong terealisasinya kinerja finansial perusahaan yang positif, dengan kontribusi tambahan dari realisasi nilai tukar USD yang berada di atas asumsi RKAP.

Berbagai upaya dilakukan perusahaan guna menghasilkan capaian yang sesuai target sebagaimana tertuang dalam RKAP tahun 2026, serta untuk memenuhi ekspektasi Pemilik Modal dan para pemangku kepentingan terkait. Meskipun masih terdapat deviasi atas capaian kinerja Triwulan II 2026 terhadap targetnya, namun deviasi dimaksud bersifat terukur dan memiliki dasar yang jelas, serta selanjutnya menjadi bahan pembelajaran dan evaluasi perusahaan guna menghasilkan capaian yang lebih baik kedepannya. Gambaran kinerja perusahaan Triwulan II 2026 secara ringkas sebagai berikut:

1. Total pergerakan trafik terealisasi sebesar 989,52 Ribu pergerakan, atau lebih tinggi 1,87% dari targetnya sebesar 971,35 Ribu pergerakan. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan II 2025, realisasi total pergerakan trafik Triwulan II 2026 mengalami pertumbuhan 4,39% karena adanya peningkatan pergerakan trafik di setiap jenis penerbangan. Capaian atas kinerja pergerakan trafik internasional dan *overflying* masih berkontribusi dari *Realignment* FIR JKT-SIN pada 21 Maret 2024 pukul 20.00 UTC serta peningkatan penggunaan transportasi udara terutama di wilayah Asia-Pasifik;
2. Total aset perusahaan tercatat sebesar Rp8.848,19 Miliar atau 0,09% sedikit lebih tinggi dari nilai yang ditargetkan sebesar Rp8.839,88 Miliar dan meningkat 2,82% dari nilai total aset *audited* tahun 2025 sebesar Rp8.605,26 Miliar. Peningkatan total aset tersebut secara umum dikarenakan kenaikan nilai aset lancar, yang di antaranya dipengaruhi meningkatnya penerimaan dari maskapai, yang dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta didukung oleh pengelolaan beban operasional perusahaan yang dilakukan secara efektif hingga periode Juni 2026;
3. Pendapatan usaha terealisasi sebesar Rp2.079,03 Miliar atau 0,05% sedikit lebih tinggi dari targetnya sebesar Rp2.078,03 Miliar dan tumbuh 3,25% dibandingkan realisasi pada Triwulan II 2025 sebesar Rp2.013,62 Miliar. Tercapainya target pendapatan usaha Triwulan II 2026

secara umum berkontribusi dari realisasi kurs USD di sepanjang Triwulan II 2026 yang lebih tinggi dari asumsi kurs USD pada RKAP tahun 2026;

4. Beban usaha terealisasi sebesar Rp1.601,16 Miliar atau lebih rendah 18,56% dari targetnya sebesar Rp1.965,99 Miliar serta meningkat 6,19% dari realisasi pada periode yang sama di tahun 2025 sebesar Rp1.507,88 Miliar. Deviasi atas ketercapaian beban usaha Triwulan II 2026 dibandingkan dengan targetnya, secara umum dikarenakan:
 - a. Beban Pegawai terealisasi di bawah anggarannya, di mana capaian ini dipengaruhi oleh kebijakan pengendalian biaya pegawai dari perusahaan dalam rangka pemenuhan tanggung jawab terhadap karyawan, serta realisasi sumbangan kelahiran, perkawinan dan kematian yang lebih rendah dari anggaran;
 - b. Beban Perlengkapan terealisasi lebih rendah dari anggarannya, yang secara umum dikarenakan belum terealisasinya sejumlah kebutuhan sesuai *budgetplan*, di antaranya penyediaan pemenuhan perlengkapan kantor;
 - c. Beban Penyusutan terealisasi lebih rendah dari anggarannya, yang secara umum dikarenakan belum terealisasinya sebagian investasi aset tetap sesuai jadwal RKAP, sehingga aset yang direncanakan belum siap digunakan dan belum dapat disusutkan;
 - d. Beban Utilitas terealisasi lebih rendah dari anggarannya, yang secara umum dikarenakan efisiensi konsumsi listrik, serta terdapat sejumlah layanan dan biaya langganan yang belum diterima nominal realisasi terkini;
 - e. Beban Pemeliharaan terealisasi di bawah anggarannya, yang secara umum dipengaruhi oleh sejumlah kegiatan pemeliharaan yang masih dalam proses pengadaan serta proses penyelesaian Triwulan II 2026 sehingga belum dapat tercatat sebagai realisasi beban;
 - f. Beban Operasional Lain, yang merupakan akun beban usaha baru yang dibentuk untuk mengakomodir pencatatan biaya operasional atas penyelenggaraan layanan baru perusahaan di Bandara Khusus sehingga beban tersebut belum dianggarkan dalam RKAP tahun 2026;
 - g. Beban Umum terealisasi di bawah anggarannya, yang dipengaruhi oleh efisiensi biaya untuk kegiatan perjalanan dinas dan rapat, serta terdapat pergeseran realisasi atas penggunaan jasa konsultan; serta
 - h. Beban Penurunan Nilai Piutang, terealisasi lebih tinggi dari targetnya yang disebabkan oleh bertambahnya *aging* umur piutang di beberapa maskapai.
5. Perum LPPNPI membukukan laba komprehensif Triwulan II 2026 sebesar Rp500,67 Miliar atau lebih tinggi dari nilai yang diproyeksikan pada RKAP Triwulan II 2026 sebesar Rp154,62 Miliar dan menurun 0,96% dibandingkan realisasi di Triwulan II 2025 sebesar Rp505,51 Miliar. Capaian laba komprehensif Triwulan II 2026 dipengaruhi oleh realisasi beban usaha yang masih di bawah target, serta realisasi pendapatan lain-lain yang lebih tinggi dari targetnya terutama untuk pendapatan bunga atas penempatan deposito dan giro;

6. Saldo kas akhir Triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp5.385,33 Miliar atau lebih tinggi 6,51% dari targetnya sebesar Rp5.056,24 Miliar, serta meningkat 29,77% dari realisasi pada Triwulan II 2025 sebesar Rp4.150,01 Miliar. Realisasi saldo kas akhir Triwulan II 2026 yang lebih tinggi dari targetnya tersebut secara umum dikarenakan adanya realisasi surplus akibat realisasi kas keluar aktivitas operasi yang masih di bawah target; dan
7. Pencapaian skor KPI Korporasi Triwulan II 2026 adalah 100,50.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. PROGRES PELAKSANAAN PROGRAM INVESTASI TRIWULAN II 2026

Tabel 1.1 Progres Program Investasi Triwulan II 2026

NO	JENIS PROGRAM INVESTASI	SINGLE/MULTI YEARS	NAMA PROGRAM	JENIS FASILITAS	PROGRES DOKUMEN	PROGRES PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp.)	PROSENTASE PEKERJAAN
1	Carry Over	Multi	Pengadaan dan Penggantian Fasilitas ATM (ATC System) di Wilayah Ruang Udara Barat RI (FIR Jakarta) / Program New JATSC	Automation	Sudah Kontrak	BAST I	411.926.908.175,00	100,00%
2	Carry Over	Multi	Pengadaan dan Penggantian Fasilitas ATM (ATC System) untuk Modernisasi Fasilitas Pelayanan APP di Balikpapan	Automation	Sudah Kontrak	BAST I	99.250.708.204,49	100,00%
3	Carry Over	Multi	Pengadaan dan Penggantian Fasilitas ATM (ATC System) untuk Modernisasi Fasilitas Pelayanan APP di Medan	Automation	Sudah Kontrak	BAST I	68.114.603.691,26	100,00%
4	Carry Over	Multi	Pengadaan dan Penggantian Fasilitas ATM (ATC System) untuk Modernisasi Fasilitas Pelayanan APP di Pontianak	Automation	Sudah Kontrak	BAST I	54.568.088.104,25	100,00%
5	Carry Over	Multi	Jasa Konsultan Pengawasan Pekerjaan Pengadaan dan Penggantian Fasilitas ATM (ATC SYSTEM) NEW JATSC, APP Balikpapan, APP Medan dan APP Pontianak	Automation	Sudah Kontrak	Pelaksanaan Pekerjaan	14.804.171.287,50	100,00%
6	Carry Over	Multi	Pembangunan ATC Tower dan Sarana Penunjangnya di Palu	Building	Sudah Kontrak	Pelaksanaan Pekerjaan	23.840.113.609,94	17,85%
			Konsultan Pengawas Pembangunan ATC Tower dan Sarana Penunjangnya di Palu	Building	Sudah Kontrak	Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.864.800,00	17,85%
7	Carry Over	Multi	Pengadaan dan Penggantian Fasilitas ATM (ATC System) Wilayah Ruang Udara Timur RI (FIR Ujung Pandang) di Denpasar, Surabaya, Yogyakarta dan MATSC	Automation	Belum Kontrak	Proses Pengadaan	-	0,00%
			Konsultan Perencana Pengadaan dan Penggantian Fasilitas ATM (ATC System) Wilayah Ruang Udara Timur RI (FIR Ujung Pandang) di Denpasar Surabaya Yogyakarta dan MATSC	Automation	Belum Kontrak	BAST I	18.882.968.962,50	100,00%
8	Carry Over	Multi	Pembangunan ATC Tower beserta Penunjangnya di Luwuk	Building	Sudah Kontrak	Pelaksanaan Pekerjaan	21.636.173.689,35	25,54%
			Konsultan Perencana Pembangunan ATC Tower beserta Penunjangnya di Luwuk	Building	Sudah Kontrak	BAST I	183.500.760,00	100,00%
			Konsultan Pengawas Pembangunan ATC Tower beserta Penunjangnya di Luwuk	Building	Sudah Kontrak	Pelaksanaan Pekerjaan	1.287.104.218,50	25,54%

9	Carry Over	Multi	Pembangunan ATC Tower beserta Penunjangnya di Bengkulu	Building	Sudah Kontrak	Pelaksanaan Pekerjaan	25.500.155.815,53	52,86%
			Konsultan Perencana Pembangunan ATC Tower beserta Penunjangnya di Bengkulu	Building	Sudah Kontrak	BAST I	182.112.150,00	100,00%
			Konsultan Pengawas Pembangunan ATC Tower beserta Penunjangnya di Bengkulu	Building	Sudah Kontrak	Pelaksanaan Pekerjaan	1.363.463.269,13	52,86%
10	Carry Over	Multi	Pembangunan Gedung Baru Kantor Pusat Perum LPPNPI (lanjutan)	Building	Sudah Kontrak	Pelaksanaan Pekerjaan	55.296.659.733,07	20,00%
			Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Baru Kantor Pusat Perum LPPNPI (lanjutan)	Building	Sudah Kontrak	BAST I	178.353.412,50	100,00%
			Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Baru Kantor Pusat Perum LPPNPI (lanjutan)	Building	Sudah Kontrak	Pelaksanaan Pekerjaan	1.924.119.510,00	20,00%
11	Carry Over	Single	Penggantian dan Pemasangan Transmitter dan Reproduser ATIS di Pekanbaru	Communication	Belum Kontrak	Proses Pengadaan	-	0,00%
12	Carry Over	Single	Penggantian dan Pemasangan VHF Primary TWR dan VHF Primary APP di Padang	Communication	Belum Kontrak	Proses Pengadaan	-	0,00%
13	Carry Over	Single	Pengadaan dan Pemasangan VHF Primary TWR di Banda Aceh	Communication	Belum Kontrak	Proses Pengadaan	-	0,00%
14	Carry Over	Single	Penggantian dan Pemasangan Voice Recorder 16 Channel di Banda Aceh	Communication	Sudah Kontrak	BAST I	401.042.274,00	100,00%
15	Carry Over	Single	Pengadaan dan Pemasangan VHF Primary TWR di Sentani	Communication	Belum Kontrak	Proses Pengadaan	-	0,00%
16	Carry Over	Single	Penggantian dan Pemasangan Voice Recorder 16 Channel di Biak	Communication	Sudah Kontrak	BAST I	413.219.584,00	100,00%
17	Carry Over	Single	Pengadaan 4 (Empat) Signal Light Gun di Sentani	Communication	Sudah Kontrak	BAST I	632.422.500,00	100,00%

18	Carry Over	Single	Penggantian dan Pemasangan Voice Recorder 16 Channel di Bengkulu	Communication	Sudah Kontrak	BAST I	396.811.730,96	100,00%
19	Carry Over	Single	Penggantian dan Pemasangan VHF Primary APP di Bengkulu	Communication	Belum Kontrak	Proses Pengadaan	-	0,00%
20	Carry Over	Single	Penggantian dan Pemasangan Voice Recorder 8 Channel di Pangandaran	Communication	Sudah Kontrak	BAST I	241.364.405,83	100,00%
21	Carry Over	Single	Pengadaan dan Pemasangan VHF ER Primary APP Bandung di Pangandaran	Communication	Belum Kontrak	Proses Pengadaan	-	0,00%
22	Carry Over	Single	Penggantian dan Pemasangan Reproduser ATIS di Lombok	Communication	Belum Kontrak	Proses Pengadaan	-	0,00%
23	Carry Over	Single	Penggantian dan Pemasangan VHF Primary TWR di Kendari	Communication	Belum Kontrak	Proses Pengadaan	-	0,00%
24	Carry Over	Single	Penggantian dan Pemasangan VHF Primary APP di Kendari	Communication	Belum Kontrak	Proses Pengadaan	-	0,00%
25	Carry Over	Single	Pengadaan dan Pemasangan Voice Recorder 8 Channel di Sugimanuru dan Morowali	Communication	Sudah Kontrak	BAST I	509.106.141,00	100,00%
26	Carry Over	Single	Pengadaan dan Pemasangan VHF Primary TWR di Tarakan	Communication	Belum Kontrak	Proses Pengadaan	-	0,00%
27	Carry Over	Single	Penggantian dan Pemasangan Voice Recorder 8 Channel di Mamuju	Communication	Sudah Kontrak	BAST I	255.784.926,00	100,00%
28	Carry Over	Single	Penggantian dan Pemasangan Reproduser ATIS di Palangkaraya	Communication	Belum Kontrak	Proses Pengadaan	-	0,00%
29	Carry Over	Single	Penggantian dan Pemasangan Transmitter dan Reproduser ATIS di Surabaya	Communication	Belum Kontrak	Proses Pengadaan	-	0,00%
30	Carry Over	Single	Penggantian dan Pemasangan Instrument Landing System (ILS) di Padang	Navigation	Belum Kontrak	Proses Pengadaan	-	0,00%

31	Carry Over	Single	Penggantian dan Pemasangan DVOR/DME di Sorong	Navigation	Belum Kontrak	Proses Pengadaan	-	0,00%
32	Carry Over	Single	Penggantian dan Pemasangan Instrument Landing System (ILS) di Banda Aceh	Navigation	Belum Kontrak	Proses Pengadaan	-	0,00%
33	Carry Over	Single	Penggantian dan Pemasangan DVOR/DME di Makawembeng	Navigation	Belum Kontrak	Proses Pengadaan	-	0,00%
34	Carry Over	Single	Penggantian dan Pemasangan Instrument Landing System (ILS) Beserta Pendukungnya di Manado	Navigation	Belum Kontrak	Proses Pengadaan	-	0,00%
35	Carry Over	Single	Penggantian dan Pemasangan Instrument Landing System (ILS) di Banjarmasin	Navigation	Belum Kontrak	Proses Pengadaan	-	0,00%
36	Carry Over	Single	Penggantian dan Pemasangan DVOR/DME di Labuan Bajo	Navigation	Belum Kontrak	Proses Pengadaan	-	0,00%
37	Carry Over	Single	Penggantian dan Pemasangan Instrument Landing System (ILS) di Palangkaraya	Navigation	Belum Kontrak	Proses Pengadaan	-	0,00%
38	Carry Over	Multi	Penggantian dan Pemasangan Monopulse Secondary Surveillance Radar (MSSR) di Banda Aceh	Surveillance	Belum Kontrak	Proses Pengadaan	-	0,00%
39	Carry Over	Multi	Penggantian dan Pemasangan Monopulse Secondary Surveillance Radar (MSSR) di Denpasar	Surveillance	Belum Kontrak	Proses Pengadaan	-	0,00%
40	Carry Over	Multi	Penggantian dan Pemasangan Monopulse Secondary Surveillance Radar (MSSR) di Surabaya	Surveillance	Belum Kontrak	Proses Pengadaan	-	0,00%
41	Carry Over	Multi	Penggantian dan Pemasangan Monopulse Secondary Surveillance Radar (MSSR) di MATSC	Surveillance	Belum Kontrak	Proses Pengadaan	-	0,00%
42	Carry Over	Multi	Penggantian dan Pemasangan Monopulse Secondary Surveillance Radar (MSSR) di Balikpapan	Surveillance	Belum Kontrak	Proses Pengadaan	-	0,00%

43	Carry Over	Multi	Penggantian dan Pemasangan Monopulse Secondary Surveillance Radar (MSSR) di Banjarmasin	Surveillance	Belum Kontrak	Proses Pengadaan	-	0,00%
44	Carry Over	Single	Penggantian Dan Pemasangan Lift/Elevator Gedung Tower di Manokwari	Mechanical/Electrical	Sudah Kontrak	BAST I	1.101.702.195,00	100,00%
45	Carry Over	Single	Penggantian Dan Pemasangan Lift/Elevator Gedung Tower di Sorong	Mechanical/Electrical	Sudah Kontrak	BAST I	1.101.702.195,00	100,00%
46	Carry Over	Single	Penggantian dan Pemasangan Uninterruptible Power Supply (UPS) 15 KVA di Sentani	Mechanical/Electrical	Sudah Kontrak	BAST I	405.039.000,00	100,00%
47	Carry Over	Single	Penggantian dan Pemasangan Sistem Catu Daya Gedung Radar di Pontianak	Mechanical/Electrical	Sudah Kontrak	Pelaksanaan Pekerjaan	1.563.240.750,00	6,67%
48	Carry Over	Single	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Fiber Optic Tx-Tower di Palembang	Mechanical/Electrical	Sudah Kontrak	BAST I	567.852.579,00	100,00%
49	Carry Over	Single	Penggantian dan Pemasangan Panel MVMD B Substation Localizer di Denpasar	Mechanical/Electrical	Sudah Kontrak	Pelaksanaan Pekerjaan	1.201.741.500,00	85,73%
50	Carry Over	Single	Pengadaan dan Pemasangan Genset 100KVA Gedung Radar di Balikpapan	Mechanical/Electrical	Sudah Kontrak	BAST I	733.617.415,12	100,00%
51	Carry Over	Single	Penggantian dan Pemasangan Uninterruptible Power Supply (UPS) MER 60kVA beserta penunjangnya di Surabaya	Mechanical/Electrical	Sudah Kontrak	BAST I	1.363.635.000,00	100,00%
52	Carry Over	Single	Pengadaan dan Pemasangan UPS 2X100 KVA di Medan	Mechanical/Electrical	Sudah Kontrak	Pelaksanaan Pekerjaan	4.764.123.544,23	27,00%

53	Carry Over	Single	Penggantian dan Pemasangan Pagar Perimeter DVOR di Palu	Building	Sudah Kontrak	Pelaksanaan Pekerjaan	1.199.851.952,14	0,00%
54	Carry Over	Single	Penggantian dan Pemasangan Pagar Gedung Telekomunikasi di Gunung Nona Ambon	Building	Sudah Kontrak	BAST I	476.308.672,90	100,00%
55	Carry Over	Single	Pengadaan Alat Ukur Portable di Airnav Repair Center	Penunjang	Sudah Kontrak	BAST I	1.831.500.000,00	100,00%
56	Carry Over	Single	Pengadaan Alat Ukur Radio Comm Tester di Airnav Repair Center	Penunjang	Sudah Kontrak	BAST I	1.324.719.288,00	100,00%

LAMPIRAN 2. PELAKSANAAN PROGRAM TJSL TRIWULAN II 2026

Tabel 2.1 Pelaksanaan Program TJSL Triwulan II 2026

Kegiatan Program TJSL Periode Januari 2026		Nilai (Rp)	
1		2	
1	Bantuan Tanggap Bencana Banjir di Tapanuli Selatan-Medan-Sumatera Utara berupa Sembako Kerjasama dengan BULOG	Rp	61.210.811
2	Bantuan Tanggap Bencana Banjir di Padang-Sumatera Barat berupa Sembako Kerjasama dengan BULOG	Rp	73.695.044
3	Bantuan Program AirNav Sehat Sunat Massal Kabupaten Banggai Laut (Obat-obatan dan Vitamin Kimia Farma)	Rp	11.699.279
4	Bantuan Program AirNav Sehat Dalam Rangka Runway Run Makassar (Obat - obatan dan Vitamin Kimia Farma)	Rp	70.335.135
5	Bantuan Sembako Kerjasama dengan BULOG dalam rangka NATARU di KC Semarang	Rp	28.632.432
6	Program Edukasi dan Sosialisasi Bahaya Narkotika Terhadap Kesehatan Mental Karyawan di 5 Kantor Cabang AirNav Indonesia (Wilayah Barat)	Rp	79.000.000
7	Bantuan Sembako Kerjasama dengan BULOG dalam rangka NATARU di Tapanuli Tengah-KC Medan	Rp	24.355.856
Total		Rp	348.928.557

Kegiatan Program TJSL Periode Februari 2026		Nilai (Rp)	
1		2	
1	Pelaksanaan Program Kampung Better AirNav Blora-Jawa Tengah	Rp	116,523,000
2	Bantuan Paket Buku dan Perlengkapan Sekolah Kabupaten Banggai Laut kerjasama dengan PT Balai Pustaka	Rp	50,250,000
3	Program AirNav Peduli Sarana Ibadah (Tipe I)-Partisipasi Bantuan Pembangunan Sarana Pendukung TPA Masjid Fala Kubu Nan Limo Nagari-Sumatera Barat	Rp	10,000,000
4	Bantuan Tanggap Bencana Banjir di Periuk Tangerang-Berupa Lauk Pauk dan Makanan Siap Saji	Rp	10,000,000
5	Program Bantuan Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan Bidang Penerbangan melalui Sinergi Organisasi Profesi dan Institusi Pendidikan Penerbangan-CT ARSA	Rp	165,860,000
6	Program AirNav Peduli Sarana Ibadah (Tipe I)-Bantuan Kemasyarakatan pada Kegiatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Majelis Taklim Daarul Barkah-Neglasari Tangerang	Rp	5,000,000
7	Program AirNav Peduli Sarana Ibadah (Tipe I)-Partisipasi Bantuan Kemasyarakatan pada Kegiatan Bakti Sosial, Dzikir dan Do'a Untuk Negeri-Majelis Al Athos Neglasari	Rp	5,000,000
8	Bantuan Tanggap Bencana Banjir di Kabupaten Pekalongan-Kerjasama dengan Bulog (Tegal)	Rp	48,074,775
9	Pelatihan Keterampilan Produktif sebagai upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas guna mendukung kemandirian ekonomi di pekalongan	Rp	194,300,000
10	Partisipasi Bantuan Kegiatan Bulan Ramadhan 1447 H Masjid Quba Taman Royal 2-Tangerang	Rp	10,000,000
11	Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Anti Bullying Peduli Mental Health Cegah Perundungan dan Kekerasan Seksual Bagi Anak & Remaja di SDN Biren-Aceh	Rp	127,350,000
12	Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Anti Bullying Peduli Mental Health Cegah Perundungan dan Kekerasan Seksual Bagi Anak & Remaja di Berau-BPN	Rp	150,710,000
13	Bantuan Program AirNav Peduli UMKM Pesisir Melalui Pengembangan Usaha Berbasis Potensi Kelautan guna Mendukung Penguatan Ekonomi Pesisir di Sedati - Jawa Timur	Rp	170,230,000
14	Bantuan Program AirNav Berbagi Berkah di Bulan Ramadhan 1477 H-Safari Ramadhan KC Tanjungpinang	Rp	35,000,000
15	Bantuan Program AirNav Berbagi Berkah di Bulan Ramadhan 1477 H-Safari Ramadhan KC Medan	Rp	35,000,000
16	Bantuan Pendukung Kegiatan bersama Anak Penderita Kanker YKAI di Kutoharjo Yogyakarta	Rp	20,280,300
17	Bantuan Sarana Belajar Mengajar (Laptop dan Proyektor) di KC Merauke SD CENDERAWASIH	Rp	27,600,000
18	Partisipasi Bantuan Kegiatan Bulan Ramadhan 1447 H Santunan Yatim Dhuafa di Masjid Baiturrahman Beji Depok	Rp	13,555,406
19	Bantuan Program AirNav Berbagi Berkah di Bulan Ramadhan 1477 H-Safari Ramadhan KC Padang	Rp	35,000,000
20	Bantuan Program AirNav Berbagi Berkah di Bulan Ramadhan 1477 H-Safari Ramadhan KC Ambon	Rp	35,000,000
21	Bantuan Program AirNav Berbagi Berkah di Bulan Ramadhan 1477 H-Safari Ramadhan KC Palembang	Rp	35,000,000
22	Bantuan Program AirNav Berbagi Berkah di Bulan Ramadhan 1477 H-Safari Ramadhan KC Surabaya	Rp	35,000,000
Total		Rp	1,334,733,481

Kegiatan Program TJSL Periode Maret 2026		Nilai (Rp)
1		2
1	Partisipasi Bantuan Pesantren Kilat Aksara Bulan Ramadhan 1447 H Madrasah Aliyah Kafil di Jakarta	Rp 7,500,000
2	Partisipasi Bantuan Perbaikan Sanitasi dan Air Bersih Pascabencana Longsor di Wilayah Cisarua Kabupaten Bandung	Rp 160,000,000
3	Bantuan Program AirNav Berbagi Berkah di Bulan Ramadhan 1447 H dan Santunan Yatim Dhuafa di Lingkungan Kantor Pusat bersama DKM Masjid AirNav Indonesia	Rp 40,000,000
4	Bantuan Program AirNav Berbagi Berkah di Bulan Ramadhan 1477 H-Safari Ramadhan KC Lombok	Rp 35,000,000
5	Bantuan Program AirNav Berbagi Berkah di Bulan Ramadhan 1477 H-Safari Ramadhan KC Aceh	Rp 35,000,000
6	Bantuan Program AirNav Berbagi Berkah di Bulan Ramadhan 1477 H-Safari Ramadhan KC Halim Perdanakusuma	Rp 35,000,000
7	Bantuan Program AirNav Berbagi Berkah di Bulan Ramadhan 1477 H-Safari Ramadhan KC Berau-BPN	Rp 14,827,200
8	Bantuan Program AirNav Berbagi Berkah di Bulan Ramadhan 1477 H-Safari Ramadhan KC Balikpapan	Rp 34,658,070
9	Bantuan program airnav berbagi kasih Natal tahun 2025 3 lokasi di Makassar	Rp 51,692,564
10	Mudik Gratis Bersama BUMN 2026 (4000 Tiket)	Rp 1,730,000,000
11	Bantuan Program AirNav Berbagi Berkah di Bulan Ramadhan 1477 H-Safari Ramadhan KC Tarakan	Rp 35,000,000
12	Bantuan Uang Saku Peserta Magang dan PKL (Magenta) bulan Januari 2026 - Kota Tangerang	Rp 31,640,000
13	Bantuan Uang Saku Peserta Magang dan PKL (Magenta) bulan Februari 2026 - Kota Tangerang	Rp 31,900,000
14	Bantuan Pendukung Mudik Gratis Bersama BUMN 2026	Rp 397,675,000
15	Program Pesantren Ramah, Aman dan Tanpa Kekerasan di Pondok Pesantren Al-Husain-Banten (PERMATA)	Rp 145,250,000
16	Sewa Tenda Validasi Tiket Mudik Gratis	Rp 92,329,000
17	Bantuan Kegiatan Ramadhan 1447 H di Lingkungan RT.03 Kecamatan Neglasari Tangerang	Rp 5,000,000
18	Bantuan Partisipasi Pembangunan Sarana Pendidikan Sekolah Tahfidz Durrotul Ummah Al Mabdal Kabupaten Tangerang	Rp 10,000,000
19	Bantuan Program Peduli Sarana Ibadah di Gereja Protestan Jemaat Nusanawe AirLuw Maluku Ambon	Rp 15,000,000
20	Bantuan Kegiatan Berbagi Takzil dan Bakti Sosial di Bulan Ramadhan di sepanjang Jalan Bauroq Kelurahan Karanganyar Kecamatan Neglasari (Forum Persatuan Pemuda Neglasari)	Rp 3,500,000
21	Bantuan Program AirNav Berbagi Berkah di Bulan Ramadhan 1477 H-Safari Ramadhan KC Palangkaraya	Rp 35,000,000
22	Program Pemberdayaan Disabilitas melalui Pendekatan Ta'awun dan Ekonomi Syariah di Kabupaten Karawang	Rp 25,000,000
23	Bantuan Program AirNav Berbagi Berkah di Bulan Ramadhan 1477 H-Pemberdayaan UMKM (Pembelian Takjil) KC Aceh	Rp 15,000,000
24	Bantuan Program AirNav Berbagi Berkah Ramadhan 1447 H (Pemberian Nasi Box Sahur) di Masjid Raya Al-A'zhom Kota Tangerang	Rp 30,000,000
25	Bantuan Program AirNav Berbagi Berkah di Bulan Ramadhan 1447 H di Yayasan Yatim Piatu Madina Asyafina Kab. Karawang	Rp 13,497,600
26	Bantuan Program AirNav Berbagi Berkah di Bulan Ramadhan 1477 H-Safari Ramadhan Kantor Unit Batulicin-Banjarmasin	Rp 39,750,000
27	Bantuan Program AirNav Berbagi Berkah di Bulan Ramadhan 1477 H-Safari Ramadhan KC Ternate	Rp 35,000,000
28	Bantuan Program AirNav Berbagi Berkah di Bulan Ramadhan 1477 H-Bantuan Beras ke Pesantren An-Nahl Kab. Bogor	Rp 33,300,000
29	Pengelolaan dan Informasi Mudik Gratis (Website) kerjasama dengan PT Olahkarsa Inovasi Indonesia	Rp 31,531,532
30	Bantuan Program AirNav Berbagi Berkah di Bulan Ramadhan 1477 H-Safari Ramadhan Tanjungpinang	Rp 4,000,000
31	Bingkisan Safari Ramadhan Tenaga OS (Sembako) di Lingkungan Kantor Pusat	Rp 45,000,000
32	Penen Raya Perdana Tanaman Melon Kelompok Tani TJSL di Kaputen Solo	Rp 13,500,000
33	Pemberian Bantuan Dana Kegiatan Program TJSL di Kantor Cabang Merauke	Rp 35,000,000
34	Bantuan Sembako kepada Masyarakat Kurang Mampu di Lingkungan Kantor Unit Batulicin	Rp 16,212,600
Total		Rp 3,282,763,566

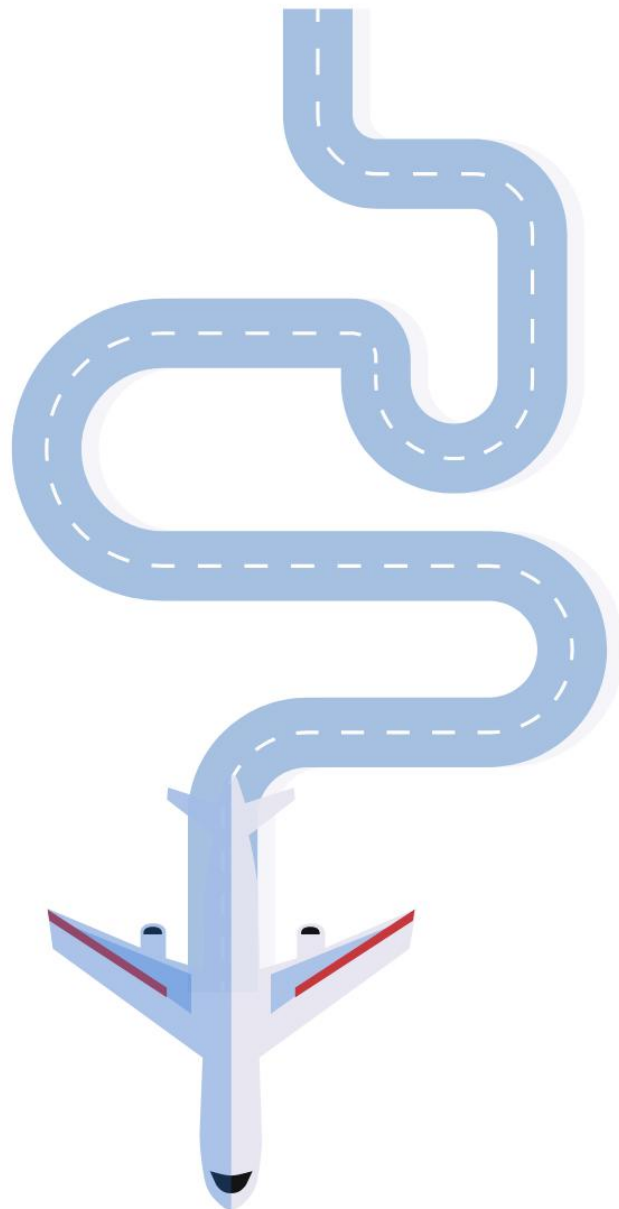
Kegiatan Program TJSL Periode April 2026		Nilai (Rp)	
1		2	
1	Bakti Sosial dan Santunan kepada Yatim dan Dhuafa di Pondok Pesantren Al Qodiri Kaliabu Salaman Kabupaten Magelang	Rp	5,000,000
2	Pembangunan dan Pengembangan Rumah Inspirasi di Aceh Tamiang Kerjasama AirNav dengan Yayasan CT ARSA	Rp	300,000,000
3	Pelatihan Initial Aviation Security Guard/Basic dan Screener/Junior Kerjasama dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug	Rp	193,000,000
4	Pogram AirNav Bakti Pendidikan melalui Basiswa Program TJSL dalam rangka Pembayaran Biaya Semester II DIII jurusan Lalu Lintas Udara kepada Mahasiswa Penerima Beasiswa Program TJSL Kerjasama dengan Poltekbang Surabaya dan Yayasan CT ARSA	Rp	41,304,000
5	Bantuan Uang Saku Peserta Magang dan PKL (Magenta) bulan Maret 2026 - Kota Tangerang	Rp	22,995,000
6	Bantuan Sembako untuk Masyarakat kurang mampu di sekitar kantor pusat (kerjasama dengan bulog)	Rp	188,237,838
7	Bantuan Buka Puasa Bersama Korban Bencana Banjir Bandang-Aceh	Rp	10,000,000
8	Bantuan sarana prasarana jalan menuju NDB di Muara Gembong-KC JATSC	Rp	10,000,000
9	Program AirNav Bakti Pendidikan berupa Pelatihan Teknik Dasar Perawatan Air Conditioner dan Teknik Las Listrik Kerjasama dengan Poltekbang Surabaya	Rp	225,000,000
10	Program AirNav Bakti Pendidikan berupa Pelatihan Teknik Las Listrik dan Perawatan Air Conditioner (AC) dan Kerjasama dengan Poltekbang Medan	Rp	220,100,000
11	Bantuan Kegiatan Kunjungan Kasih Paskah Tahun 2026 dalam rangka Program Kerja Persekutuan Oikumene AirNav Indonesia	Rp	25,000,000
12	Partisipasi Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana Masjid Jami' Harapan Kita Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang	Rp	25,000,000
13	Partisipasi Bantuan Summer Camp 2026 dengan Tema "Do'a Untuk Bangsa" di Yayasan Komunitas Satu Benih Indonesia-Kec. Tenjo Kab. Bogor	Rp	30,000,000
14	Program AirNav Bakti Pendidikan berupa Pelatihan Teknik Las Listrik dan Perawatan Air Conditioner (AC) dan Kerjasama dengan Poltekbang Palembang	Rp	225,000,000
15	Bantuan Pendukung Kegiatan Festival Balon Udara di Pekalongan dan Kegiatan Safari Ramadhan di KC Semarang	Rp	72,521,089
16	Bantuan Pendukung Edukasi Kesehatan Mental pada Karyawan di Kantor Cabang Palangkaraya	Rp	7,500,000
Total		Rp	1,600,657,927

Kegiatan Program TJSL Periode Mei 2026		Nilai (Rp)	
1		2	
1	Bantuan Safari Ramadhan dan Kegiatan Lomba Bulan Ramadhan di Kantor Cabang Aceh	Rp	10,000,000
2	Biaya perlengkapan Mudik Bersama BUMN	Rp	225,000,000
3	Bantuan Program TJSL untuk mendukung Kerjasama Kantor Cabang Bandung dengan BKSDA Jawa Barat (RKT Tahun 2026)	Rp	56,670,000
4	Kolaborasi dengan Universitas Gadjah Mada dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Maritim Berkelanjutan di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau	Rp	50,000,000
5	Bantuan Program TJSL bentuk kerjasama dengan BKSDA Jawa Barat Tahun 2026	Rp	7,500,000
6	Program AirNav Peduli Sarana Ibadah melalui Perbaikan Masjid At-Taqwa di Lingkungan Kementerian Perhubungan-DKI Jakarta	Rp	50,000,000
7	Bantuan Penyaluran Hewan Qurban dalam rangka Memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 H di Lingkungan Kantor Cabang Solo	Rp	20,000,000
8	Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan di Majelis Dzikir dan Sholawat Daar El Hasan Sepatan Kab. Tangerang	Rp	16,000,000
9	Bantuan Sembako bulan Ramadhan di Lingkungan Kantor Cabang Bandung	Rp	31,250,000
10	Bantuan Uang Saku Peserta Magang dan PKL (Magenta) bulan April 2026 - Kota Tangerang	Rp	26,305,000
11	Bantuan Program TJSL Melalui Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Kompetensi Masyarakat di Wilayah Operasional AirNav Indonesia- Pelatihan Barbershop di Kota Tangerang	Rp	75,010,800
12	Dukungan Program Pemberdayaan Kelompok UPPKS dan Penguatan Ekonomi Melalui Pemanfaatan Hasil Budidaya Sapi dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 H Pemberdayaan Kelompok UPPKS dan Penguatan Ekonomi Melalui Pemanfaatan Hasil Budidaya Sapi dalam Hari Raya Idul Adha 1447 H	Rp	280,000,000
13	Program Penguatan Ekonomi Melalui Pemanfaatan Hasil Budidaya Kambing Warga dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 H di AirNav Indonesia Pemberdayaan Kelompok UPPKS dan Penguatan Ekonomi Melalui Pemanfaatan Hasil Budidaya Sapi dalam Hari Raya Idul Adha 1447 H	Rp	247,500,000
14	Program AirNav Berbagi berupa Penyaluran Hewan Qurban melalui DKM Masjid AirNav Indonesia memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 H	Rp	181,000,000
15	Bantuan Penyaluran Hewan Qurban dalam rangka Memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 H di Lingkungan Kantor Cabang Sentani	Rp	44,983,293
16	Biaya Pendukung (Sewa tenda dll) Perlengkapan Validasi Mudik Tahap 2	Rp	18,786,000
17	Bantuan Penyaluran Hewan Qurban dalam rangka Memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 H di Lingkungan Kantor Cabang Halim Perdana Kusuma	Rp	60,000,000

Kegiatan Program TJSL Periode Mei 2026		Nilai (Rp)
1		2
18	Bantuan Program AirNav Peduli UMKM Pengembangan Usaha Gula Aren di Sumatera Barat	Rp 196,630,000
19	Bantuan Penyaluran Hewan Qurban dalam rangka Memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 H di Lingkungan Kantor Cabang JATSC	Rp 37,000,000
20	Bantuan Penyaluran Hewan Qurban dalam rangka Memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 H di Lingkungan Kantor Cabang Pekanbaru	Rp 20,000,000
21	Bantuan Penyaluran Hewan Qurban dalam rangka Memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 H di Lingkungan Kantor Cabang Palembang	Rp 20,000,000
22	Bantuan Penyaluran Hewan Qurban dalam rangka Memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 H di Lingkungan Kantor Cabang Surabaya	Rp 45,000,000
23	Bantuan Penyaluran Hewan Qurban dalam rangka Memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 H di Lingkungan Kantor Cabang Banjarmasin	Rp 25,000,000
24	Bantuan Penyaluran Hewan Qurban dalam rangka Memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 H di Lingkungan Kantor Cabang Balikpapan	Rp 35,000,000
25	Bantuan Penyaluran Hewan Qurban dalam rangka Memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 H di Lingkungan Kantor Cabang Ambon	Rp 20,000,000
26	Bantuan Penyaluran Hewan Qurban dalam rangka Memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 H di Lingkungan Kantor Cabang Nabire	Rp 20,000,000
27	Bantuan Penyaluran Hewan Qurban dalam rangka Memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 H di Lingkungan Kantor Cabang Manado	Rp 20,000,000
28	Bantuan Penyaluran Hewan Qurban dalam rangka Memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 H di Lingkungan Kantor Cabang Aceh	Rp 20,000,000
Total		Rp 1,858,635,093

Kegiatan Program TJSL Periode Juni 2026		Nilai (Rp)
1		2
1	Bantuan Penyaluran Hewan Qurban dalam rangka Memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 H di KC Bandung	Rp 15,000,000
2	Bantuan Penyaluran Hewan Qurban dalam rangka Memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 H di KC Semarang	Rp 20,000,000
3	Bantuan Penyaluran Hewan Qurban dalam rangka Memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 H di KC Yogyakarta	Rp 20,000,000
4	Bantuan Penyaluran Hewan Qurban dalam rangka Memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 H di KC Sorong	Rp 20,000,000
5	Bantuan Penyaluran Hewan Qurban dalam rangka Memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 H di KC Merauke	Rp 20,000,000
6	Bantuan Penyaluran Hewan Qurban dalam rangka Memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 H di KC Palangkaraya	Rp 10,000,000
7	Bantuan Penyaluran Hewan Qurban dalam rangka Memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 H di KC Kendari	Rp 20,000,000
8	Pelatihan Barbershop kepada Karang Taruna Kelurahan Neglasari Kota Tangerang	Rp 59,600,000
9	Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Rumah Inspirasi Trenggalek Kerjasama dengan Yayasan CT Arsa	Rp 400,000,000
10	Bantuan Prasarana (berupa AC) di Masjid Al Hidayah Perumahan Korem 052/Wijayakrama Kota Tangerang	Rp 7,000,000
11	Bantuan Edukasi Pencegahan Perundungan dan Kekerasan Seksual untuk Anak dan Program Parenting Orang Tua di SD Negeri Wamena di Papua Pegunungan	Rp 175,165,000
12	Bantuan Uang Saku Peserta Magang dan PKL (Magenta) bulan Juni 2026 - Kota Tangerang	Rp 14,610,000
13	Pelaksanaan Program Pelayanan Pendidikan dan Pengajaran (PIJAR) Kerjasama dengan Yayasan CT Arsa	Rp 1,200,000,000
14	Bantuan Sarana dan Prasarana SMAK Santo Agustinus Wolowuli, NTT	Rp 78,900,000
15	Program Optimalisasi Sukun sebagai Produk Unggulan UMKM demi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Ekonomi Kreatif	Rp 85,249,000
16	Bantuan Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Radamata Tambolaka Sumba Barat Daya	Rp 220,000,000
17	Bantuan Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Lembata	Rp 211,500,000
18	Bantuan Pemeriksaan Mata oleh Perdami Jatim-Surabaya	Rp 51,900,000
19	Program AirNav Bakti Pendidikan berupa Pelatihan Teknik Las Listrik dan Perawatan Air Conditioner (AC) dan Kerjasama dengan Politeknik Penerbangan Indonesia Curug	Rp 275,000,000
20	Bantuan Barbershop di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Tangerang	Rp 85,879,000
21	Bantuan Barbershop di Kelurahan Karanganyar Kota Tangerang	Rp 85,879,000
22	Program AirNav Sehat berupa Bakti Sosial Operasi Katarak bersama PERDAMI Cabang Jakarta	Rp 153,000,000
23	Pengembangan Petani Muda Berbasis Inovasi Greenhouse melalui Budidaya Melon untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Pengembangan Potensi Desa	Rp 284,251,000
24	Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengolahan Smpah Organik dan Pengembangan Ekosistem Maggot untuk Mewujudkan Ekonomi Sirkular yang Berkelanjutan	Rp 185,247,500
25	Berupa Pemerataan Kesehatan Melalui Kunjungan dan Pemeriksaan Dokter Ahli di Wilayah Banggai Laut	Rp 192,400,000

Kegiatan Program TJSL Periode Juni 2026		Nilai (Rp)	
1		2	
26	Pengembangan Pertanian Holtikultura Modern melalui Budidaya Melon Berbasis Greenhouse dalam Mendukung Penguatan Ekonomi Desa dan Pembangunan Desa Berkelanjutan - Kabupaten Nganjuk	Rp	299,600,000
27	Bantuan Pelatihan Teknik Membatik dan Pengembangan Desain Motif Batik Bagi Penyandang Disabilitas Rungu di Bali dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis Budaya Lokal	Rp	169,786,000
Total		Rp	4,359,966,500



TRIWULAN II

2026

**LAPORAN MANAJEMEN
PERUM LPPNPI**

KANTOR PUSAT

Jl. Ir. H. Juanda No.1 Tangerang
Banten, Indonesia 15121
(021)55915000

www.airnavindonesia.co.id

